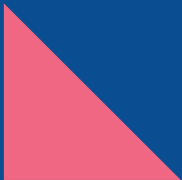




# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

*KABUPATEN  
TAPANULI UTARA  
TAHUN 2019-2024*



Pemerintah Kabupaten  
Tapanuli Utara



**BUPATI TAPANULI UTARA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI  
UTARA TAHUN 2019-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
14. Rencana Kerja Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk menunjukkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.



21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RPJMD disusun memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Bupati/Wakil Bupati terpilih, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah Periode Tahun 2019-2024, berpedoman kepada RPJPD dan RTRW;
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :
  - BAB I : Pendahuluan;
  - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;
  - BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis;
  - BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
  - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
  - BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - BAB IX : Penutup.
- (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) RPJMD menjadi pedoman bagi:
  - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2019-2024;
  - b. Bappeda dalam penyusunan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabarkan kedalam Renja SKPD;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedomana dalam penyusunan APBD.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kepala Bappeda.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RPJMD

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dilakukan, apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar dan/atau merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
  - (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

#### Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, dan RPJMN.
- (2) Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.



- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 30-04-2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 30-04-2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020  
NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI UTARA TAHUN 2019-2024 : (3-35/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya.  
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALBOIN

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR           TAHUN 2020

### TENTANG

#### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019-2024

## I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada di atas (pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di tingkat provinsi sampai pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengertian pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja PD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai pedoman perencanaan lima tahun masing-masing. Selanjutnya, Renstra PD menjadi pedoman bagi penyusun Rencana Kerja PD yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi OPD dalam menyusun Renstra;
- b. menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Periode Tahun 2019-2024;
- c. menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;



- d. menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Pimpinan PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
- e. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
- f. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pemerintahan daerah maupun antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 terdiri dari 6 (enam) bab dan 10 (sepuluh) pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR\_\_\_\_\_



## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1. Latar Belakang.....	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD.....	I-4
	1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
	1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-7
	1.5. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
	2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
	2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah.....	II-1
	2.1.1.2. Topografi.....	II-3
	2.1.1.3. Hidrologi.....	II-4
	2.1.1.4. Klimatologi.....	II-6
	2.1.1.5. Geologi.....	II-7
	2.1.1.6. Ekoregion.....	II-8
	2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-11
	2.1.2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-11
	2.1.2.2. Rencana Struktur Ruang.....	II-13
	2.1.2.3. Rencana Pola Ruang.....	II-15
	2.1.3. Daerah Rawan Bencana.....	II-21
	2.1.4. Kondisi Demografi.....	II-22
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-24
	2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-24
	2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB.....	II-24
	2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-28
	2.2.1.3. PDRB Per Kapita.....	II-30
	2.2.1.4. Laju Inflasi.....	II-32
	2.2.1.5. Kemiskinan.....	II-32
	2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia.....	II-36
	2.2.1.7. Indeks Gini.....	II-37
	2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-39
	2.2.2.1. Pendidikan.....	II-39
	2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf.....	II-39
	2.2.2.1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah.....	II-40
	2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar.....	II-40
	2.2.2.1.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan.....	II-41
	2.2.2.1.5. Angka Partisipasi Murni.....	II-42
	2.2.2.2. Kesehatan.....	II-43
	2.2.2.2.1. Angka Kematian Bayi.....	II-44
	2.2.2.2.2. Angka Kematian Ibu.....	II-45
	2.2.2.2.3. Angka Harapan Hidup.....	II-46
	2.2.2.2.4. Persentase Balita Gizi Buruk.....	II-47
	2.2.2.3. Ketenagakerjaan.....	II-48
	2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....	II-49
	2.2.3.1. Kebudayaan.....	II-49

2.2.3.2	Olahraga.....	II-50
2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-50
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.....	II-51
2.3.1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.....	II-51
2.3.1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah.....	II-51
2.3.1.1.2	Rasio Guru dan Siswa.....	II-52
2.3.1.1.3	Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan.....	II-53
2.3.1.1.4	Fasilitas Sekolah dan Kualifikasi Guru.....	II-53
2.3.1.1.5	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	II-54
2.3.1.1.6	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.....	II-55
2.3.1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.....	II-56
2.3.1.2.1	Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis.....	II-57
2.3.1.2.2	Penolong Kelahiran.....	II-60
2.3.1.2.3	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).....	II-61
2.3.1.2.4	Pemberian ASI.....	II-62
2.3.1.2.5	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.....	II-62
2.3.1.2.6	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.....	II-63
2.3.1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-64
2.3.1.3.1	Kondisi Jalan.....	II-66
2.3.1.3.2	Air Minum.....	II-79
2.3.1.3.3	Irigasi.....	II-80
2.3.1.3.4	Penataan Ruang.....	II-88
2.3.1.3.5	Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang....	II-89
2.3.1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-90
2.3.1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Rakyat.....	II-92
2.3.1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.....	II-96
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-99
2.3.2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.....	II-99
2.3.2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-101
2.3.2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.....	II-103
2.3.2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.....	II-105
2.3.2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.....	II-107
2.3.2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-109
2.3.2.7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-112
2.3.2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-114
2.3.2.9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.....	II-116
2.3.2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.....	II-118

2.3.2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-119
2.3.2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.....	II-121
2.3.2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....	II-124
2.3.2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.....	II-125
2.3.2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.....	II-126
2.3.2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.....	II-128
2.3.2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.....	II-129
2.3.2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.....	II-131
2.3.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-132
2.3.3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan...	II-132
2.3.3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.....	II-133
2.3.3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.....	II-134
2.3.3.3.1	Tanaman Pangan.....	II-135
2.3.3.3.2	Tanaman Hortikultura.....	II-136
2.3.3.3.3	Tanaman Perkebunan.....	II-138
2.3.3.3.4	Peternakan.....	II-139
2.3.3.3.5	Kelembagaan Pertanian.....	II-140
2.3.3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II-141
2.3.3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian.....	II-142
2.3.3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.....	II-143
2.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-143
2.3.4.1	Sekretariat Daerah.....	II-143
2.3.4.2	Sekretariat DPRD.....	II-145
2.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-145
2.3.5.1	Perencanaan.....	II-145
2.3.5.2	Kuangan.....	II-147
2.3.5.3	Kepegawaian.....	II-148
2.3.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	II-150
2.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-152
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-152
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-156
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-157
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-157
2.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-159
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2014-2018.....	III-4
3.1.1.1	Pendapatan Daerah.....	III-11
3.1.1.2	Belanja Daerah.....	III-14
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah.....	III-18
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-20
3.1.2.1	Aset.....	III-24
3.1.2.2	Kewajiban.....	III-24



3.1.2.3	Ekuitas.....	III-24
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-25
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-27
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-28
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-32
3.3.1	Proyeksi Pendapatan Daerah.....	III-33
3.3.2	Proyeksi Belanja Daerah.....	III-37
3.3.3	Proyeksi Pembiayaan.....	III-39
3.3.4	Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-41
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.1	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	IV-1
4.1.2	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV-9
4.2	Isu Strategis.....	IV-11
4.2.1	Isu Strategis Global.....	IV-11
4.2.1.1	Perlambatan Ekonomi Global.....	IV-11
4.2.1.2	Sustainable Development Goals.....	IV-12
4.2.1.3	Perubahan Iklim Global.....	IV-14
4.2.1.4	Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	IV-16
4.2.1.5	Demokratisasi dan Hak Azasi Manusia.....	IV-16
4.2.2	Isu Strategis Nasional.....	IV-17
4.2.2.1	Isu Perekonomian Nasional.....	IV-17
4.2.2.2	Agenda Pembangunan Nasional.....	IV-18
4.2.2.3	Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara.....	IV-20
4.2.2.4	Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Utara.....	IV-24
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1	Visi.....	V-1
5.2	Misi.....	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V-7
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	VI-1
6.1	Strategi.....	VI-1
6.2	Arah Kebijakan.....	VI-5
6.2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (Tahun 2020).....	VI-5
6.2.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (Tahun 2021).....	VI-6
6.2.3	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (Tahun 2022).....	VI-6
6.2.4	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (Tahun 2023).....	VI-7
6.2.5	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (Tahun 2024).....	VI-7
6.3	Program Pembangunan Daerah.....	VI-10

BAB VII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....	VII-1
BAB VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	VIII-1
BAB IX	PENUTUP.....	IX-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-2
Tabel 2.2	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-4
Tabel 2.3	Jenis dan Luasan (Ha) Ekoregion Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-9
Tabel 2.4	Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara 2017 – 2037....	II-16
Tabel 2.5	Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-18
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-20
Tabel 2.7	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Bencana Kab Tapanuli Utara 2017 – 2037.....	II-21
Tabel 2.8	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	II-23
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018.....	II-23
Tabel 2.10	Persentase Penduduk yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2018.....	II-24
Tabel 2.11	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-26
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018.....	II-27
Tabel 2.13	Perbandingan PDRB dan Peranan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2018 di Kawasan Dataran Tinggi Sumatera Utara (Juta Rupiah).....	II-28
Tabel 2.14	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Dibanding Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014-2018.....	II-29
Tabel 2.15	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018.....	II-30
Tabel 2.16	Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2014-2018 (Ribu Rupiah).....	II-31
Tabel 2.17	Tingkat Inflasi Kota Padang Sidempuan Tahun 2014-2018.....	II-32
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-34
Tabel 2.19	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018.....	II-35
Tabel 2.20	IPM Kabupaten Tapanuli Utara dibanding Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014 – 2018.....	II-37
Tabel 2.21	Indeks Gini Kab. Tapanuli Utara dibanding Provinsi Sumatera Utara dan nasional Tahun 2014-2018.....	II-38
Tabel 2.22	Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2017.....	II-39
Tabel 2.23	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Nasional Tahun 2014-2018.....	II-40
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tahun 2014-2018.....	II-41
Tabel 2.25	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2014 – 2017.....	II-42



Tabel 2.26	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-43
Tabel 2.27	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-45
Tabel 2.28	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-46
Tabel 2.29	Persentase Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-47
Tabel 2.30	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2014 – 2017.....	II-48
Tabel 2.31	Perkembangan Seni Budaya Tahun 2014-2018.....	II-49
Tabel 2.32	Prestasi Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 – 2018.....	II-50
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Tahun 2014-2018.....	II-52
Tabel 2.34	Rata-rata Rasio Siswa dan Guru Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-52
Tabel 2.35	Persentase Kelulusan dan Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2014-2018.....	II-53
Tabel 2.36	Fasilitas sekolah dan kualifikasi Guru Tahun 2014 – 2018.....	II-54
Tabel 2.37	PAUD di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 – 2018.....	II-55
Tabel 2.38	Capaian SPM Bidang Pendidikan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014 – 2018.....	II-56
Tabel 2.39	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-57
Tabel 2.40	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-59
Tabel 2.41	Indikator Kinerja Urusan Kesehatan pada RSUD Tarutung Tahun 2014-2018.....	II-60
Tabel 2.42	Persentase Balita Menurut Penolong Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2014-2018.....	II-60
Tabel 2.43	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan Tahun 2014 – 2018.....	II-61
Tabel 2.44	Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif (Usia 0-6 bulan) Tahun 2014 – 2018.....	II-62
Tabel 2.45	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2014-2018.....	II-63
Tabel 2.46	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2018.....	II-63
Tabel 2.47	Perkembangan Panjang Jalan dan Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-66
Tabel 2.48	Kondisi Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-68
Tabel 2.49	Perkembangan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-80
Tabel 2.50	Status Daerah Irigasi Sesuai Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018.....	II-81
Tabel 2.51	Capaian Indikasi Pembangunan Perumahan Tahun 2014-2018	II-89

Tabel 2.52	Capaian Indikasi Pembangunan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2018.....	II-90
Tabel 2.53	Capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2018.....	II-91
Tabel 2.54	Capaian Indikasi Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2018.....	II-92
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2018.....	II-93
Tabel 2.56	Capaian SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Rakyat.....	II-94
Tabel 2.57	Indikator Kinerja Penanganan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-95
Tabel 2.58	Data Bencana Per Kecamatan di Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-96
Tabel 2.59	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-98
Tabel 2.60	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 – 2018.....	II-100
Tabel 2.61	Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2018.....	II-102
Tabel 2.62	Perkembangan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pangan Tahun 2014-2018.....	II-104
Tabel 2.63	Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2014-2018.....	II-106
Tabel 2.64	Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018.....	II-107
Tabel 2.65	Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014-2018.....	II-109
Tabel 2.66	Jumlah Kepala Keluarga, Rata-rata Anggota Keluarga dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2018.....	II-110
Tabel 2.67	Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2018.....	II-111
Tabel 2.68	Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014 – 2018.....	II-113
Tabel 2.69	Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2014-2018.....	II-114
Tabel 2. 70	Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018.....	II-117
Tabel 2.71	Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2018.....	II-119
Tabel 2.72	Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-120
Tabel 2.73	Perkembangan Permodalan Koperasi Tahun 2014-2018.....	II-121
Tabel 2. 74	Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 – 2018.....	II-123
Tabel 2.75	Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014 – 2018.....	II-124
Tabel 2.76	Indikator Kinerja Urusan Statistik 2014 – 2018.....	II-125
Tabel 2.77	Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 – 2018.....	II-128
Tabel 2.78	Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2014-2018.....	II-129

Tabel 2.79	Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2018.....	II-133
Tabel 2. 80	Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2014-2018.....	II-134
Tabel 2.81	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija Tahun 2014-2018.....	II-135
Tabel 2.82	Rata-rata Produksi Tanaman Sayur-sayuran Tahun 2014-2018.....	II-136
Tabel 2.83	Perkembangan Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 2014-2018.....	II-137
Tabel 2.84	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2014-2018.....	II-138
Tabel 2.85	Perkembangan Populasi dan Produksi Peternakan Tahun 2014-2018.....	II-139
Tabel 2.86	Perkembangan Kelembagaan Pertanian Tahun 2014-2018.....	II-141
Tabel 2.87	Perkembangan Industri Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2014-2018.....	II-142
Tabel 2.88	Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-143
Tabel 2.89	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-144
Tabel 2.90	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2014-2018.....	II-145
Tabel 2.91	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018.....	II-146
Tabel 2.92	Indikator Kinerja Urusan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018.....	II-147
Tabel 2.93	Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014-2018.....	II-148
Tabel 2.94	Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2014-2018.....	II-151
Tabel 2.95	Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2017.....	II-153
Tabel 2.96	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2017.....	II-155
Tabel 2.97	Fasilitas Sarana Prasarana Wilayah Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-156
Tabel 2.98	Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-157
Tabel 2.99	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-158
Tabel 2.100	Rasio Ketergantungan Penduduk Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-144
Tabel 2.101	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tapanuli Utara Pilar Sosial Tahun 2014-2018.....	II-164
Tabel 2.102	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tapanuli Utara Pilar Lingkungan Tahun 2014-2018.....	II-172
Tabel 2.103	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tapanuli Utara Pilar Ekonomi Tahun 2014-2018.....	II-175
Tabel 2.104	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tapanuli Utara Pilar Hukum dan Tata Kelola Tahun 2014-2018.....	II-180



Tabel 3.1	Indikator Makro Ekonomi Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	III-3
Tabel 3.2	Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	III-5
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014–Tahun 2018.....	III-12
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014–Tahun 2018.....	III-15
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-Tahun 2018.....	III-19
Tabel 3.6	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 – Tahun 2018.....	III-21
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan KebutuhanAparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	III-28
Tabel 3.8	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	III-29
Tabel 3.9	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	III-31
Tabel 3.10	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 –2024.....	III-35
Tabel 3.11	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.....	III-38
Tabel 3.12	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.....	III-40
Tabel 3.13	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.....	III-42
Tabel 3.14	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.....	III-44
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	IV-1
Tabel 5.1	Definisi Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.....	V-3
Tabel 5.2	Keselaran Misi pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dengan Misi pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025.....	V-4
Tabel 5.3	Keterkaitan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dengan Misi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024.....	V-5
Tabel 5.4	Keselaran Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2017- 2037 dengan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024.....	V-7
Tabel 5.5	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024.....	V-8
Tabel 5.6	Hubungan Hirarki Antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024.....	V-10
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.....	VI-1

Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024.....	VI-8
Tabel 6.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disertai Pagu Indikatif.....	VI-11
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.....	VII-4
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.....	VII-6
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Bupati Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.....	VIII-3
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.....	VIII-4
Tabel 8.3	Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.....	VIII-5

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara.....	I-3
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-3
Gambar 2.2	Wilayah Kelerengan Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-4
Gambar 2.3	Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-6
Gambar 2.4	Wilayah Hujan di Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-7
Gambar 2.5	Peta Ekoregion Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-10
Gambar 2.6	Peta Rencana Pembangunan Prasarana Kab. Tapanuli Utara..	II-14
Gambar 2.7	Peta Sistem Jaringan Transportasi Kab. Tapanuli Utara.....	II-15
Gambar 2.8	Peta Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-17
Gambar 2.9	Potensi Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-22
Gambar 2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-37
Gambar 2.11	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018.....	II-46
Gambar 2.12	Kinerja Pelayanan Air Minum/Air Bersih Tahun 2016 – 2018..	II-79
Gambar 2.12	Proporsi Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-160
Gambar 2.13	Proporsi Capaian TPB Berdasarkan Pilar Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-161
Gambar 2.14	Perbandingan Indikator Capaian Masing-masing Tujuan TPB	II-162
Gambar 3.1	Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014 – 2018.....	III-16
Gambar 3.2	Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja APBD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014 – 2018.....	III-17
Gambar 7.1	Indikasi Program Pembangunan RPJMD.....	VII-2

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinamika pembangunan senantiasa mengalami perubahan sebagai respon terhadap tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, yang dimulai sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara mendasar telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada pasal 258 ayat (1) telah diamanatkan bahwa pembangunan dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga penyusunan rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pembangunan daerah selaras dan sejalan dengan prioritas nasional dan target strategis nasional.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ruang lingkup rencana pembangunan daerah meliputi (1) rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan (2) rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah). Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah telah diatur dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

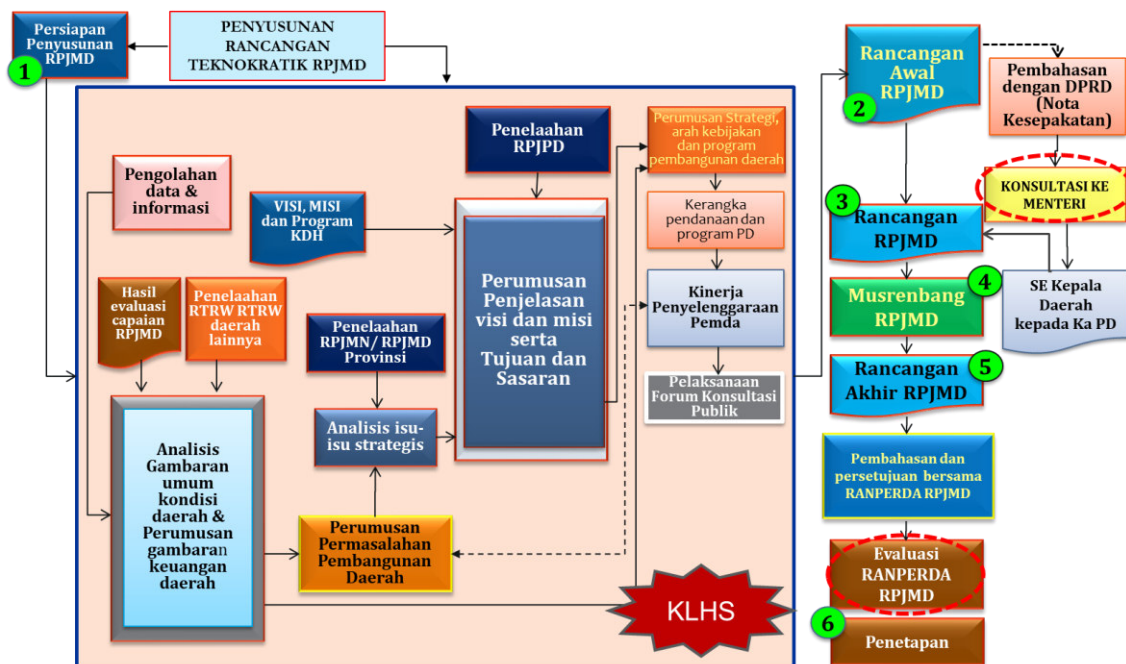
Guna melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan telah dilantiknyanya Bapak Drs. Nikson Nababan, M.Si sebagai Bupati Tapanuli Utara sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-18 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Tapanuli Utara dan Bapak Sarlandy Hutabarat, SH sebagai Wakil Bupati Tapanuli Utara sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-19 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 23 April 2019 untuk masa jabatan tahun 2019-2024, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun waktu lima tahun, sehingga Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Demikian juga halnya dengan RKPD sebagai rencana kerja tahunan wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun tahap ke IV RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 juga merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam proses perencanaannya dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan mengacu pada kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025, memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 dan kondisi lingkungan hidup strategis di daerah. Proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.





**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara**

Proses penyusunan RPJMD dilakukan dengan :

1. Pendekatan politik

Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program yang ditawarkan calon kepala daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Pendekatan teknokratik

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

3. Pendekatan partisipatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan yang bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up)

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD**

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

#### **1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

#### 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dengan RTRW Kabupaten Tapanuli Utara

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037, melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

#### 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dengan KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

#### 1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah.

Selanjutnya RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat

prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya periode tahun 2019-2024.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada seluruh Perangkat Daerah.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara dan RKPD tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD.
4. Sebagai alat ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Pimpinan OPD dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka pencapaian target visi misi pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama lima tahun sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan.
4. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.



### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta maksud dan tujuan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini berisi menjelaskan analisis kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

#### **BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014 – 2019 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, beserta kebutuhan pendanaannya yang mendukung pada pencapaian visi dan misi.
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**  
Bagian ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD beserta kebutuhan pendanaannya. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
- BAB IX PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumberdaya yang cukup besar yang harus dikembangkan untuk mewujudkan tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah secara keseluruhan dengan memanfaatkan posisi geografis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Berdasarkan beberapa aspek dapat diuraikan secara ringkas gambaran umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi dan demografi Kabupaten Tapanuli Utara meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi penduduk. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan serta potensi penggunaan lahan.

##### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Kabupaten Tapanuli Utara terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut. Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah.

Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi 1° 20'- 2° 41' Lintang Utara dan 98° 05'- 99° 16' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah 3.800,31 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 3.793,71 Km<sup>2</sup> dan perairan Danau Toba seluas 6,60 Km<sup>2</sup>. Perhitungan luasan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mengamanatkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

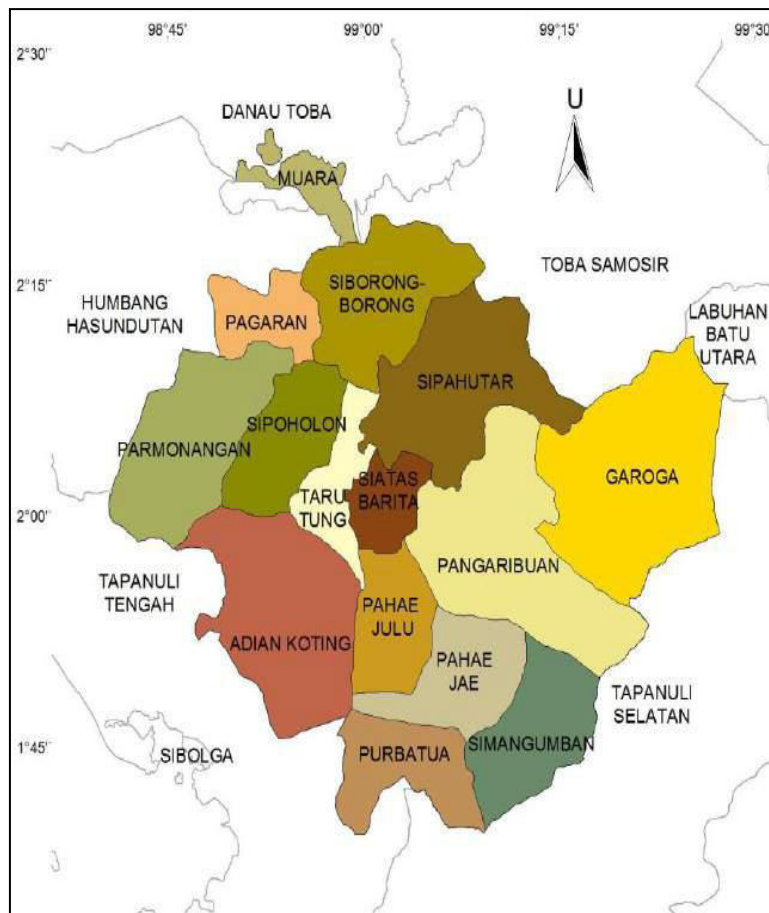
Perkembangan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 (limabelas) kecamatan, 11 (sebelas) kelurahan dan 241 desa sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah		Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
			Desa	Kelurahan	
1	Parmonangan	Parmonangan	14	-	257.35
2	Adiankoting	Adiankoting	16	-	502.90
3	Sipoholon	Sipoholon	13	1	189.20
4	Tarutung	Tarutung	24	7	107.68
5	Siatas Barita	Siatas Barita	12	-	92.92
6	Pahae Julu	Onan Hasang	18	1	165.90
7	Pahae Jae	Sarulla	12	1	203.20
8	Purbatua	Parsaoran Janji Angkola	11	-	191.80
9	Simangumban	Simangumban	8	-	150.00
10	Pangaribuan	Pangaribuan	26	-	459.25
11	Garoga	Garoga	13	-	567.58
12	Sipahutar	Sipahutar	25	-	408.22
13	Siborongborong	Siborongborong	20	1	279.91
14	Pagaran	Sipultak	14	-	138.05
15	Muara	Muara	15	-	79.75
<b>JUMLAH.....</b>			<b>241</b>	<b>11</b>	<b>3,793.71</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2019

Kecamatan Garoga menjadi kecamatan terluas dari 15 kecamatan yang ada yaitu sekitar 567,58 Km<sup>2</sup> atau 14,96 persen dari luas kabupaten dan kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Muara sekitar 79,75 Km<sup>2</sup> atau 2,10 persen. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki bentang alam dengan struktur alam yang melintasi Pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari utara ke selatan Provinsi Sumatera Utara.

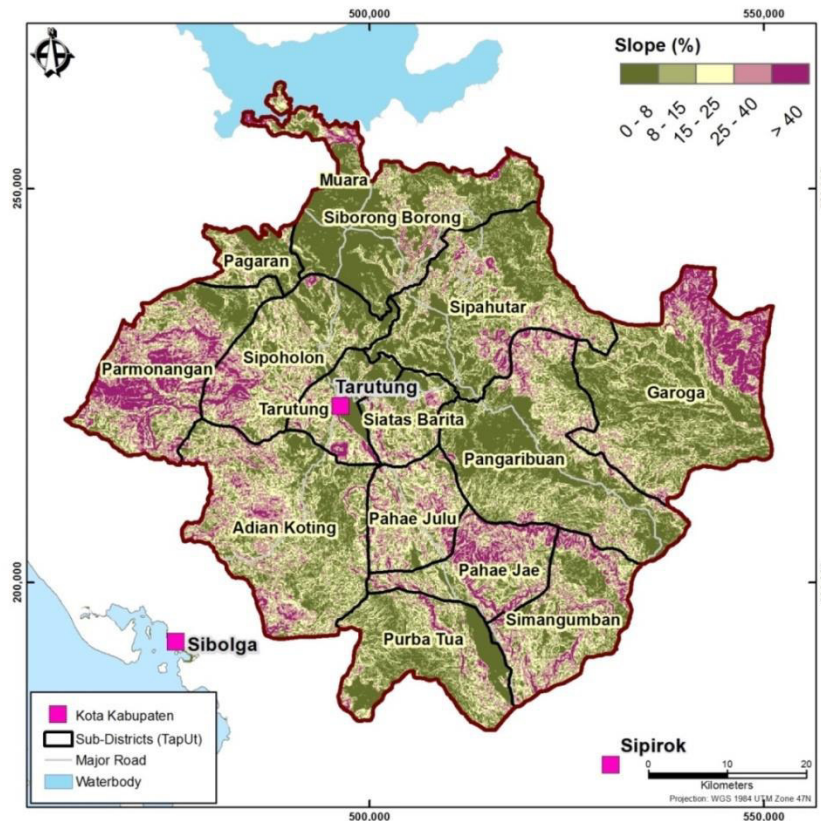


**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara**

#### **2.1.1.2. Topografi**

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi berbukit dan berlembah dengan suhu antara 12°C - 28°C. Kondisi geografis yang berada pada ketinggian 150 - 1.700 meter di atas permukaan laut menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pertanian dan agrobisnis dengan potensi pengembangan yang cukup besar. Secara keseluruhan beberapa wilayah kecamatan berada pada ketinggian dengan kisaran > 1.500 mdpl (Kecamatan Muara, Pangaribuan, Sipahutar, Siatas Barita, Pagaran dan Siborongborong). Sementara itu kecamatan yang bersebelahan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang lebih rendah, yaitu Kecamatan Parmonangan, Adiankoting, Purbatua, Pahaie Jae dan sebagian besar Simangumban. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu daerah datar sebesar 3,16 persen, daerah landai sebesar 26,86 persen, daerah miring sebesar 25,63 persen dan daerah terjal 44,35 persen.





**Gambar 2.2**  
**Wilayah Kelereng Kabupaten Tapanuli Utara**

Berdasarkan Peta Geologi dari Puslitbang Geologi, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara terbentuk pada masa tersier dan masa kwarter, yakni pada letusan Gunung Toba 75.000 tahun lalu, dimana letusan gunung ini menghasilkan batuan yang didominasi oleh liparitsche effusifa yang tergolong ke dalam tipe formasi pematang, yang terdiri dari komposisi serpih merah dan serpih berkarbon, batu bara, batu lanau berpasir, dan konglomerat breksi yang menghasilkan tanah dengan jenis podsolik/spodosol.

#### 2.1.1.3. Hidrologi

Pemanfaatan curah hujan untuk mengairi lahan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara melalui irigasi didukung oleh keberadaan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di wilayah ini.

**Tabel 2.2**  
**Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Utara**

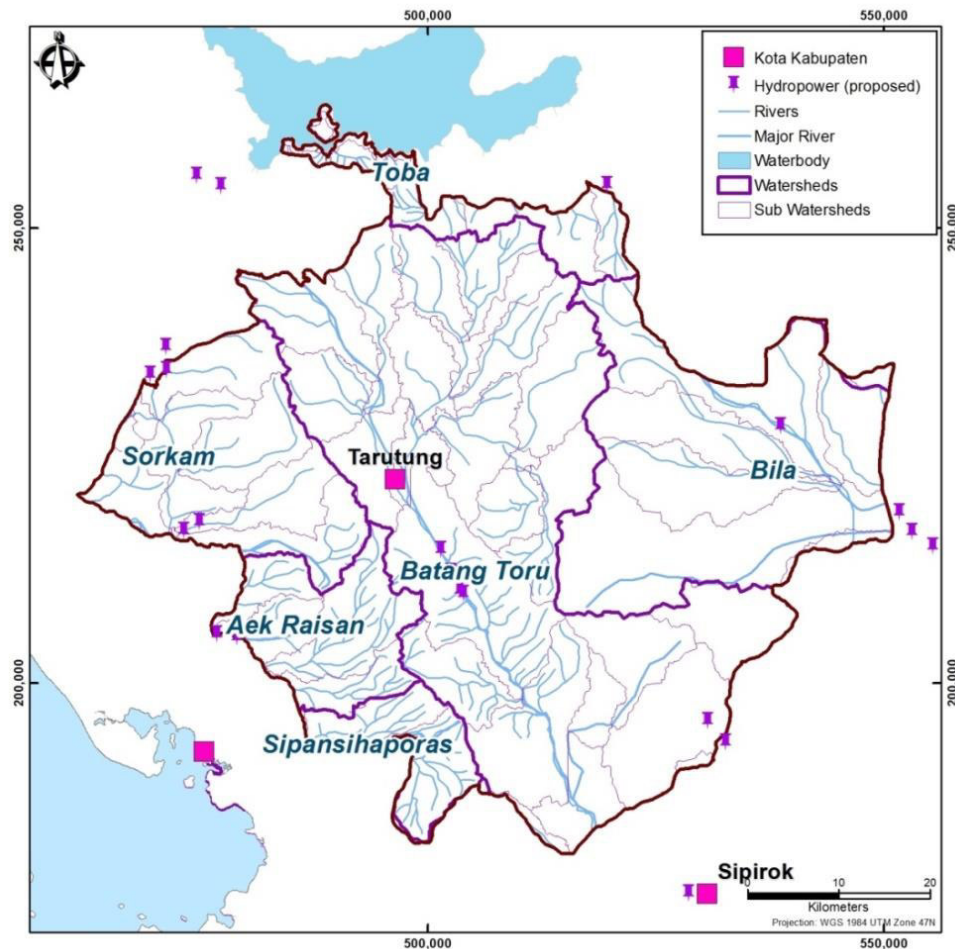
No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Sipoholon	Batang Toru, Kolang	18.920
2.	Pangaribuan	Bilah, Batang Toru	45.925
3.	Adiankoting	Batang Toru, Kolang	50.290
4.	Sipahutar	DTA Danau Toba, Batang Toru	40.822

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Km <sup>2</sup> )
5.	Garoga	Bilah	56.758
6.	Tarutung	Batang Toru	10.768
7.	Simangumban	Batang Toru	15.000
8.	Purbatua	Batang Toru	19.180
9.	Pahae Jae	Batang Toru	20.320
10.	Pahae Julu	Batang Toru	16.590
11.	Siborongborong	DTA. Danau Toba, Batang Toru	27.991
12.	Siatas Barita	Batang Toru	9.292
13.	Parmonangan	Batang Toru, Sibundong, Kolang	25.735
14.	Pagaran	Batang Toru, Sibundong	13.805
15.	Muara	DTA. Danau Toba	7.975

Sumber : Buku Putih Sanitasi Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2014

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki nilai yang sangat strategis karena terletak di wilayah hulu yang merupakan sumber air untuk kabupaten/kota di sekitarnya. Terdapat enam daerah aliran sungai utama di Kabupaten Tapanuli Utara. DAS kecil di Toba bagian utara mengalir ke Danau Toba, tiga daerah aliran sungai di sebelah barat (Sorkam, Aek Raisan dan Sipansihaporos) mengalir ke Samudera Hindia melalui Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan DAS Bila di sebelah Timur mengalir ke Selat Malaka. DAS terbesar di Kabupaten Tapanuli Utara (Batang Toru) meliputi dua pertiga dari wilayah kabupaten dan mengalir ke Kabupaten Tapanuli Selatan.

Studi literatur tentang proses hidrologis di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan oleh CI-Indonesia menunjukkan bahwa di bagian barat kabupaten relatif kaya akan air, dengan air yang dihasilkan dari curah hujan tinggi di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan, dipengaruhi oleh sistem musim yang membawa hujan dari Samudera Hindia. Wilayah hulu Sungai Bila dan bagian timur-laut Sungai Batang Toru menghasilkan air yang lebih sedikit dan oleh karenanya sangat berkemungkinan untuk merasakan dampak yang lebih besar dari kekeringan pada waktu Dipole Samudera Hindia positif atau terjadinya El Nino. Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada gambar berikut.



Sumber: KLHS RTRW Kab. Tapanuli Utara

**Gambar 2.3**  
**Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Tapanuli Utara**

#### 2.1.1.4. Klimatologi

Uraian tentang klimatologi bermanfaat untuk mengenali tingkat pengaruh iklim terhadap fungsi ruang yang akan ditetapkan. Guna melakukan analisis daya dukung lahan, klimatologi dijadikan kriteria penilaian tingkat kesesuaian unit lahan. Beberapa variabel yang mempengaruhi kondisi klimatologi suatu daerah diantaranya adalah besaran curah hujan, kondisi atau tingkat suhu udara rata-rata, tingkat kelembaban udara dan intensitas penyinaran matahari. Secara umum iklim tergolong ke dalam daerah beriklim tropis (karena berada dekat garis khatulistiwa) yang mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian besar daerah atau kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki curah hujan rata-rata sekitar 100-200 mm/tahun. Hanya sebagian kecil yang memiliki curah hujan dengan rentang antara 200-300 mm/tahun. Suhu udara kisaran maksimum 29° C, minimum 17° C serta kelembapan udara rata-rata 85,04%.

Kondisi iklim di Tapanuli Utara sangat dipengaruhi oleh posisinya yang dekat dengan Pegunungan Bukit Barisan di sebelah Barat. Gambar 2.4 menggambarkan wilayah pengaruh bayangan hujan di bagian tengah kabupaten sebagai pengaruh posisinya yang lebih rendah dibandingkan pegunungan di sebelah Barat dan Timur. Walaupun wilayah bayangan hujan relatif lebih kering, namun intensitas hujannya masih lebih dari 1.250 mm per tahun.



Sumber : KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara

**Gambar 2.4**  
**Wilayah Hujan di Kabupaten Tapanuli Utara**

#### 2.1.1.5. Geologi

Secara umum kondisi geologi Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh jenis batuan sedimen aluvium muda dan aluvium tua. Berdasarkan hasil analisis peta geologi yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya tergolong ke dalam tipe formasi pematang yang terdiri dari komposisi serpih merah dan serpih berkarbon, batu bara, batu lanau berpasir dan konglomerat breksi. Hasil penelitian beberapa ahli menunjukkan bahwa formasi geologi Kabupaten Tapanuli Utara adalah peralihan antara masa tertier dan masa kuartier yakni pada letusan Gunung Toba, dimana letusan gunung ini menghasilkan batuan yang

didominasi oleh *liparitsche effusifa* yang menghasilkan tanah dengan jenis *podsolik* yang sangat peka terhadap erosi. Keadaan batuan yang bervariasi di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan potensi yang cukup baik sebagai salah satu bahan pembentuk batuan sumberdaya mineral.

Selain itu Kabupaten Tapanuli Utara berada di situs geologi yang terdapat di kawasan Geopark Kaldera Toba terdiri dari 16 (enam belas) situs geologi utama yang dapat menceritakan tema Geopark Kaldera Toba sebagai Supervolcano. Penyebaran situs geologi utama yang ada di Kawasan Geopark Kaldera Toba tersebut berada di 7 (tujuh) kabupaten yang memiliki lintas geopark yang terhubung satu dengan lainnya, yakni di situs HUT Hutaginjang-Muara Rentetan Dinding Kaldera Kaldera supervolcano Toba juga dikenal sebagai kaldera Sibandang yang menghasilkan Tuf Toba Termuda dan Situs MUS Muara Sibandang, Post-calderic volcanism Kubah-kubah tertutup dikekstrusi di bagian selatan-barat Danau Toba melalui beberapa sesar yang berada di Kecamatan Muara.

#### **2.1.1.6. Ekoregion**

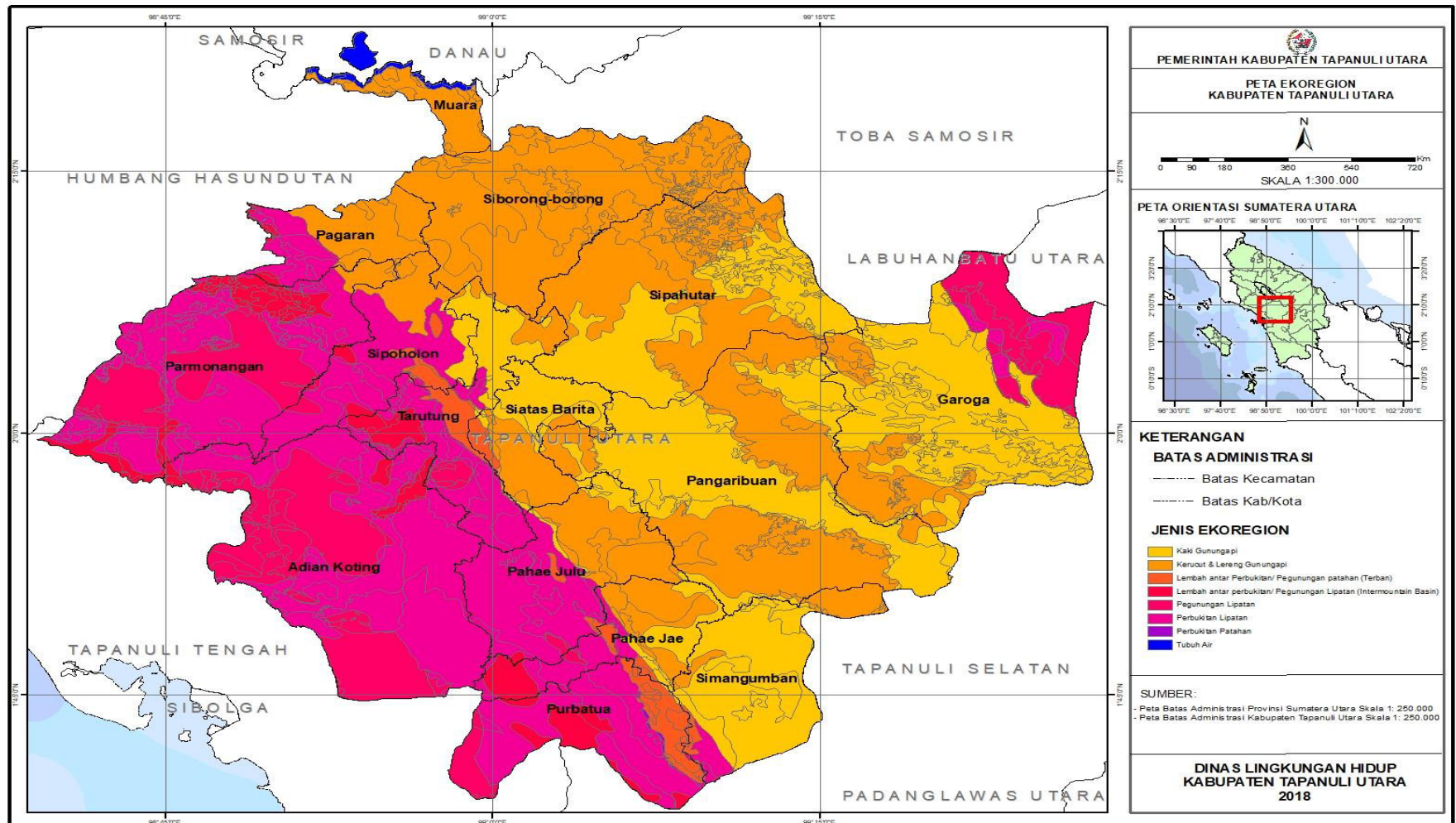
Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Secara umum, ekoregion Tapanuli Utara didominasi oleh jenis ekoregion kerucut dan lereng gunung api yang hampir mencapai luasan sebesar 121.613,21 hektar atau sekitar 31,99 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Tapanuli Utara. Ekoregion kerucut dan lereng gunung api sebagian besar terdapat di Kecamatan Siborongborong (32.375,27 Ha), Kecamatan Pangaribuan (26.125,91 Ha) dan Kecamatan Sipahutar (21.152,16 Ha).

Dominasi ekoregion selanjutnya adalah ekoregion kaki gunung api yang luasannya 99.277,75 hektar atau mencapai 26,12 persen dari luas kabupaten. Persebaran ekoregion ini lebih banyak terdapat di Kecamatan Garoga dan Kecamatan Pangaribuan dengan luas mencapai 25.680,68 hektar. Ekoregion ketiga yang juga cukup mendominasi adalah ekoregion perbukitan lipatan yang luasnya mencapai 94474.14 hektar atau sekitar 24,85 persen luas kabupaten. Persebaran ekoregion ini lebih banyak terdapat di Kecamatan Adiankoting seluas 26.369,02 hektar dan Kecamatan Parmonangan seluas 19.335,89 hektar.

**Tabel 2.3**  
**Jenis dan Luasan (Ha) Ekoregion Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Jenis Ekoregion	Luas (Ha)															
		Adian Koting	Garoga	Muara	Pagaran	Pahae Jae	Pahae Julu	Pangaribuan	Parmonangan	Purbatua	Siatas Barita	Siborong-borong	Simangumban	Sipahutar	Sipoholon	Tarutung	TOTAL
1	Kaki Gunungapi		27,418.83			2,439.51	1,388.57	25,680.68		62.22	5,139.72	108.47	15,010.41	16,597.77	1,215.95	4,215.63	99,277.75
2	Kerucut & Lereng Gunungapi		7,185.05	4,231.32	6,111.00	4,549.56	7,282.26	26,125.91	1,128.23		4,508.76	32,375.28	2,347.56	21,152.16	3,069.68	1,546.44	121,613.21
3	Intermountain Basin	1,593.05			432.14	1,527.78	118.01		4,772.37	2,832.06					485.27	1,755.41	13,516.09
4	Terban					556.49	328.26			2,824.48	667.85		388.69		1,028.24	1,365.22	7,159.23
5	Pegunungan Lipatan	19,634.21	8,880.62			178.47	241.86		10,388.73	1,778.47			27.29		428.18	875.20	42,433.03
6	Perbukitan Lipatan	26,369.02	1,707.21		3,302.68	2,957.79	11,268.94		19,335.89	11,003.58	40.26		1,037.26		9,714.43	7,737.08	94,474.14
7	Perbukitan Patahan									116.45							116.45
8	Tubuh Air			1,552.89													1,552.89
TOTAL		47,596.28	45,191.71	5,784.21	9,845.82	12,209.60	20,627.91	51,806.59	35,625.22	18,617.25	10,356.59	32,483.74	18,811.21	37,749.92	15,941.75	17,494.99	380,142.80





**Gambar 2.5**  
**Peta Ekoregion Kabupaten Tapanuli Utara**

## **2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

### **2.1.2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara**

Rancangan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara memuat Kebijakan Rencana dan Program (KRP) sekaligus. Kebijakan terkandung dalam tujuan, kebijakan dan strategi. Kebijakan kemudian dijabarkan menjadi rencana yang terdiri atas Rencana Struktur Ruang (Sistem Pusat dan Infrastruktur), Rencana Pola Ruang (Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya) dan Rencana Kawasan Strategis. Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Rencana Kawasan Strategis dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikasi program. Tujuan dari perencanaan tata ruang di Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk membuat rencana tata ruang berbasis pertanian dan agroindustri yang didukung oleh sektor pariwisata, pertambangan dan energi yang produktif, efisien, aman dan mengutamakan pentingnya pengembangan wilayah yang adil, mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh RTRW yang perlu dilihat penjabarannya dalam rencana pola dan struktur ruang serta indikasi program.

Kebijakan untuk mencapai tujuan tata ruang tersebut dirumuskan dalam enam kebijakan strategi yang keseluruhannya sudah bersifat menyeluruh, multi-dimensi, integratif dan konseptual, yaitu :

1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah pengembangan.
2. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup serta penanggulangan risiko bencana alam.
3. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan.
5. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Adapun yang menjadi strategi pencapaian untuk enam kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi :

1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah pengembangan.
  - a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan pergerakan transportasi darat ke setiap bagian wilayah pengembangan.
  - b. Membangun dan mengembangkan potensi pembangkit energi dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan energi untuk kebutuhan pembangunan wilayah.

- c. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, telekomunikasi, energi listrik, pemerintahan).
  - d. Mengembangkan dan melestarikan serta mempromosikan berbagai potensi alam, budaya dan sejarah yang merupakan aset dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.
2. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup serta penanggulangan risiko bencana alam.
    - a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya.
    - b. Mengembangkan energi alternatif.
    - c. Mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis.
    - d. Mengoptimasikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana.
  3. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
    - a. Menerapkan konsep intensifikasi lahan pertanian irigasi teknis untuk meningkatkan hasil produksi.
    - b. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif.
    - c. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian dengan konsep ekstensifikasi sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya.
  4. Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan.
    - a. Membangun dan memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis.
    - b. Melakukan intensifikasi lahan pertanian dan perkebunan untuk mendukung pengembangan sektor sekunder.
    - c. Meningkatkan produktifitas subsektor peternakan dan perikanan (minapolitan).
    - d. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
  5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat berbasis sumber daya alam.
    - a. Mengembangkan sektor pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam.
    - b. Mendirikan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan pada lokasi-lokasi produksi.
    - c. Membudidayakan peternakan hewan besar dan kecil pada kawasan bukan perkotaan.

- d. Mengembangkan perikanan darat pada daerah yang dekat dengan sumber daya air.
  - e. Mengeksplorasi daerah penghasil barang tambang dengan memperhatikan dampak lingkungan.
  - f. Membangun sarana dan prasarana pada kantong-kantong produksi dan lokasi wisata.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
- a. Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. Mengembangkan budi daya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan

Strategi pencapaian kebijakan sudah menunjukkan upaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup, namun penterjemahan ke dalam rencana struktur dan pola ruang serta indikasi program perlu dicermati lebih lanjut baik konsistensi maupun muatannya.

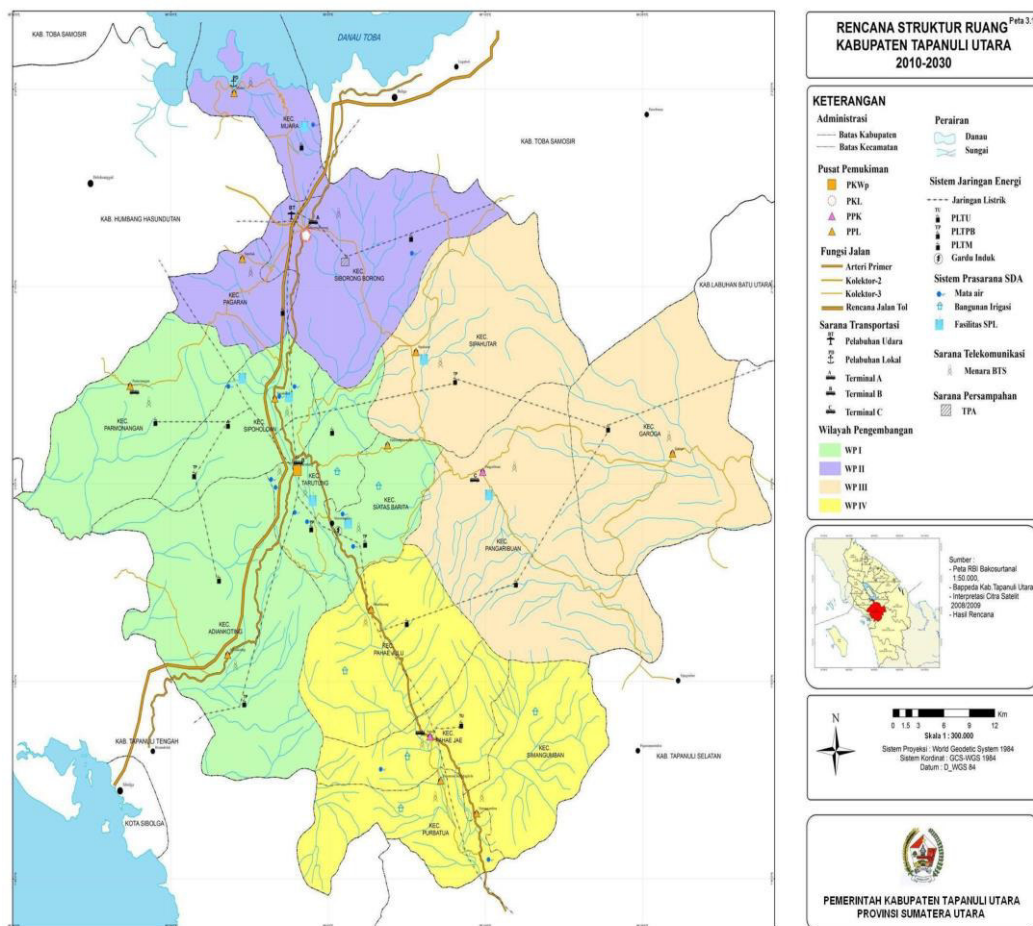
#### **2.1.2.2. Rencana Struktur Ruang**

Rencana Struktur Ruang yang terdapat pada RTRW Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Rencana Sistem Pusat Pelayanan (Sistem Perkotaan) dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten (gambar 2.6).

Sistem perkotaan di dalam Rancangan RTRW Kabupaten Tapanuli Utara meliputi 15 kota utama sebagai berikut:

1. Tarutung berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) : Tarutung berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Pelayanan Primer I (untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara).
2. Siborongborong berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Pelayanan Primer II.
3. Pangaribuan dan Pahae Jae berperan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) : berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Pelayanan Sekunder (Pendukung Pusat Kegiatan Pelayanan Primer I dan II).

4. Siatas Barita, Sipoholon, Parmonangan, Adiankoting, Muara, Pagaran, Garoga, Sipahutar, Purbatua, Pahae Julu, dan Simangumban berperan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

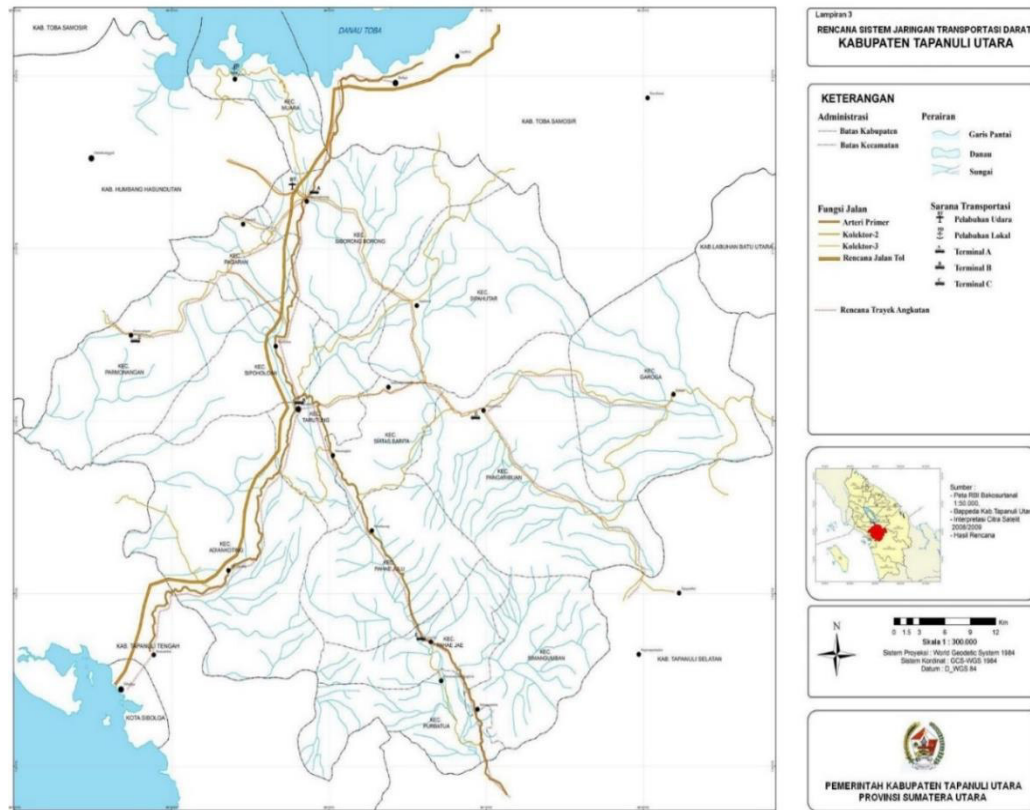


**Gambar 2.6**  
**Peta Rencana Pembangunan Prasarana Kab. Tapanuli Utara**

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten memuat beberapa sistem jaringan prasarana yang masing-masing diterjemahkan kedalam indikasi program. Rencana Struktur Ruang secara umum dan Sistem Jaringan Prasarana dan Transportasi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi - Darat dan Udara
2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi
3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air - (Jaringan Sumber Daya Air Lintas Provinsi, Kabupaten/Kota; Jaringan Irigasi; Jaringan Air Baku dan Air Bersih; Sistem Pengendalian Banjir)
4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

5. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lingkungan (Prasarana TPA dan TPS; Pengolahan Limbah Cair; Sistem Drainase Wilayah)
6. Rencana Pengembangan Sarana Lainnya (Sarana Pendidikan; Sarana Kesehatan; Sarana Peribadatan; Sarana Perdagangan).



Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037

**Gambar 2.7**  
**Peta Sistem Jaringan Tranportasi Kab. Tapanuli Utara**

Rencana struktur ruang yang terdiri atas rencana sistem perkotaan dan rencana pembangunan infrastruktur tampaknya disusun untuk mempercepat pembangunan ekonomi, namun tampak bahwa rencana struktur ruang tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup, seperti sumber daya air, hutan dan keanekaragaman hayati. Kajian mengenai perkiraan dampak struktur ruang terhadap lingkungan hidup telah dilakukan pada tahap pengkajian KLHS.

### 2.1.2.3. Rencana Pola Ruang

Pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya pada RTRW Kabupaten Tapanuli Utara menyisihkan sekitar 37,1 persen wilayahnya sebagai kawasan lindung dan sisanya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi hutan lindung, hutan suaka alam dan kawasan lindung setempat. Kawasan budidaya



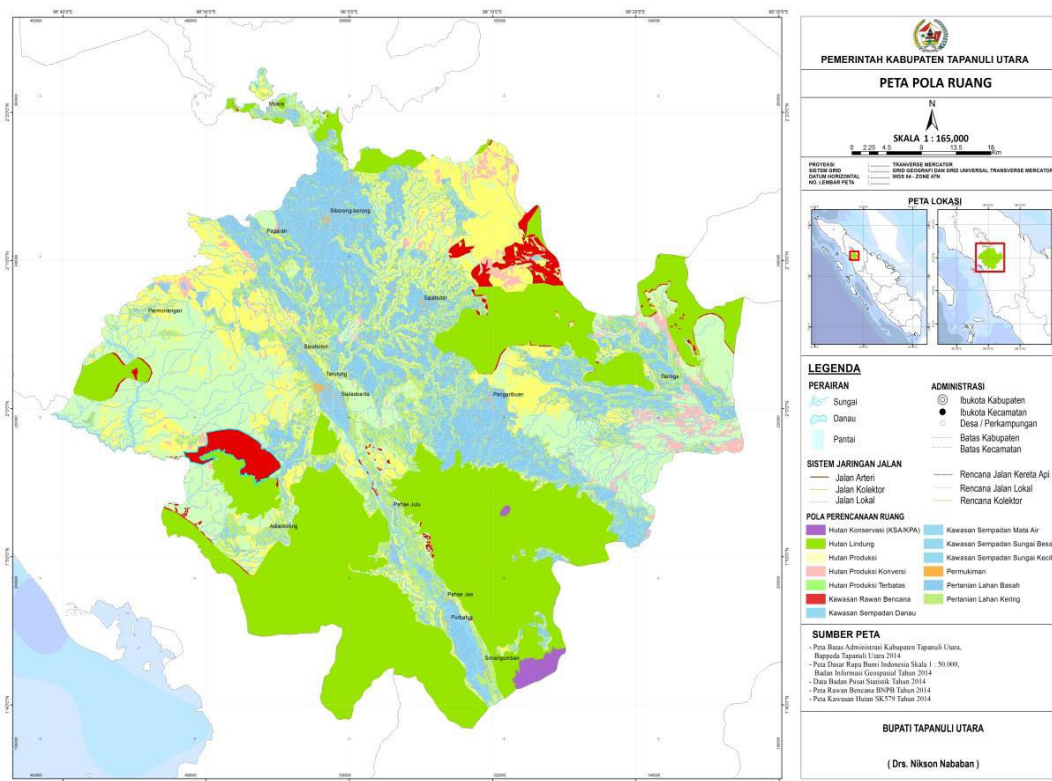
meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, lahan kering, lahan basah, perkebunan, hortikultura dan permukiman.

**Tabel 2.4**  
**Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara 2017 – 2037**

<b>Pola</b>	<b>Rencana Tata Guna Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Lindung	Hutan Lindung	127.994,23
Lindung	Hutan Suaka Alam	2.208,28
Lindung	Setempat	10.575,14
<b>Sub Total</b>		<b>140.777,65</b>
Budidaya	Hutan Produksi	22.449,78
Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	59.338,05
Budidaya	Lahan Kering	67.370,74
Budidaya	Lahan Basah	13.924,41
Budidaya	Perkebunan	30.583,82
Budidaya	Hortikultura	36.255,28
Budidaya	Pemukiman	8.671,28
<b>Sub Total</b>		<b>238.593,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>379.371.01</b>

Sumber RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi dengan pendekatan kebijakan perwilayahan.



Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037

**Gambar 2.8**  
**Peta Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara**

Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan diseluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara, dimana kebijakan penataan ruang wilayah secara kewilayahan diarahkan menjadi lima pusat pelayanan, yaitu:

- Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP), mencakup kawasan perkotaan Tarutung.
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mencakup perkotaan Siborongborong.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup kawasan perkotaan Pangaribuan dan Pahae Jae.
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup pusat permukiman Kecamatan Pahae Julu, Purbatua, Simangumban, Garoga, Sipahutar, Muara, Pagaran, Sipoholon, Siatas Barita, Adiankoting dan Parmonangan.

- e. Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), meliputi Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Selain pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan kesesuaian lahan yang diarahkan untuk budidaya (kegiatan perkotaan dan pertanian) serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

**Tabel 2.5**  
**Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten Tapanuli Utara**

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
<b>I. KAWASAN LINDUNG</b>		
1.	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan ini mencakup Kawasan Hutan Lindung Batang Toru.
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan yang berfungsi untuk menjaga fungsi utama sungai, waduk dan mata air. Kawasan ini mencakup daerah di sekitar Danau Toba, Kecamatan Muara.
3.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kawasan yang berfungsi menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang tipe ekosistemnya masih alami (belum diganggu manusia). Kawasan ini mencakup Kawasan Suaka Alam Dolok Saut Kecamatan Pangaribuan dan Sijaba Huta Ginjang Kecamatan Muara serta Kawasan Konservasi Simangumban.
4.	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan yang memiliki gejala geologi yang meliputi kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan Lindung Geologi tersebar di Kecamatan Sipahutar, Pagaran, Parmonangan, Sipoholon, Tarutung, Siatas Barita, Adiankoting, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua, Simangumban, Pangaribuan dan Garoga serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
<b>II. KAWASAN BUDIDAYA</b>		
1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Kawasan yang berfungsi sebagai hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan ini mencakup hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara seluas 95.690 Ha.
2.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah untuk pengembangan tanaman pangan seluas 36.839,193 Ha, kawasan pertanian lahan kering seluas 44.500,01 Ha, kawasan tanaman tahunan/perkebunan seluas 16.159,001 Ha, kawasan pengembangan budidaya perikanan di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Siatas Barita, Pahae Jae, Siborongborong, Purbatua dan Muara seluas + 4.570 Ha dan kawasan pengembangan peternakan ternak kecil di 15 kecamatan dan pengembangan ternak besar di Kecamatan Siborongborong, Muara, Parmonangan, Pagaran, Sipoholon, Garoga, Pangaribuan, Sipahutar dan Tarutung.
3.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan melakukan kegiatan pertambangan untuk bahan galian golongan A, B dan C. Kawasan ini meliputi : (1) Kecamatan Parmonangan dan Pahae Julu berupa Kaolion.

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
		(2) Kecamatan Pangaribuan, Adiankoting dan Pahae Julu berupa Feldspar. (3) Kecamatan Simangumban dan Pahae Jae berupa Zeolit. (4) Kecamatan Pagaran, Simangumban, Pahae Julu, Sipoholon, Tarutung, Adiankoting berupa Batu Gamping. (5) Kecamatan Pahae Jae dan Parmonangan berupa Batu Apung. (6) Kecamatan Tarutung dan Pahae Julu berupa Belerang. (7) Kecamatan Siborongborong berupa gambut. (8) Kecamatan Pangaribuan berupa mika. (9) Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Sipahutar dan Pangaribuan berupa tras. (10) Kecamatan Adiankoting berupa granit. (11) Kecamatan Pahae Julu berupa batu setengah mulia dan sabak. (12) Kecamatan Parmonangan dan Pangaribuan berupa silica. (13) Kecamatan Pahae Julu dan Simangumban berupa lempung. (14) Kecamatan Pahae Julu, Pahae Jae, Sipoholon, Tarutung, Sipahutar, Siatas Barita, Siborongborong, Pagaran, Purbatua, Adiankoting berupa pertambangan panas bumi. (15) Kecamatan Tarutung, Siatas Barita, Pahae Julu, Adiankoting, Pahae Jae, Simangumban, Purbatua, Siborongborong, Sipahutar, Sipoholon, Pangaribuan, Parmonangan dan Garoga berupa bahan tambang mineral logam.
4.	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten yang meliputi industri kecil menengah yang diarahkan di 15 kecamatan serta industri besar yang diarahkan ke Kecamatan Siborongborong dan Tarutung.
5.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan yang berfungsi untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang kepariwisataan, yang terdiri dari: (1) Kawasan peruntukan pariwisata alam/rekreasi yang meliputi Panaroma Alam Hutaginjang dan Pantai Muara di Kecamatan Muara, Air Soda di Parbubu, Air Panas Hutabarat, Ugan dan Saitnihuta serta Gua Natumandi di Kecamatan Tarutung; Air Panas Sipoholon di Kecamatan Sipoholon dan Pacuan Kuda di Kecamatan Siborongborong; (2) Kawasan peruntukan pariwisata budidaya/sejarah yang meliputi Sopo Partungkoan dan Pohon Durian di Kecamatan Tarutung serta Situs Hindu Hopong di Kecamatan Simangumban; (3) Kawasan peruntukan wisata rohani meliputi Salib Kasih di Kecamatan Siatas Barita; Makam Musnson & Lyman - Lobu Pining di Kecamatan Adiankoting; Kantor Pusat HKBP Pea Raja, Tugu Nomensen-Saitnihuta, Gereja Dame-Saitnihuta, Makam Pendeta Johansen - Pansur Napitu di Kecamatan Tarutung, Seminarium HKBP di Kecamatan Sipoholon dan Makam Pendeta Johannes Siregar di Kecamatan Muara.
6.	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan yang berfungsi untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan ini terdiri dari : (1) Kawasan permukiman berkepadatan tinggi di Kecamatan Tarutung, Siborongborong, Pangaribuan, Sipoholon dan Sipahutar; (2) Kawasan permukiman berkepadatan sedang di Kecamatan Pagaran, Garoga, Adiankoting, Muara dan Parmonangan; (3) Kawasan permukiman berkepadatan rendah di Kecamatan Siatas Barita, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua dan Pangaribuan.

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
<b>III. KAWASAN STRATEGIS</b>		
1.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang meliputi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara, Kawasan Minapolitan dan Kawasan Bandara Silangit.
2.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi yang berpengaruh terhadap fungsi dan daya dukung lingkungan yang meliputi Kawasan Suaka Margasatwa Dolok Saut, Kawasan Alam Sibaja Huta Ginjang dan Kawasan Hutan Lindung Batang Toru.
3.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya.	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yang mencakup Kawasan Wisata Rohani dengan penekanan sosial budaya.
4.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yang mencakup Kawasan Sebaran Potensi Bahan Tambang dengan penekanan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; Kawasan Sebaran Potensi Bahan Tambang dan Kawasan Sebaran Potensi Tenaga Air dengan penekanan sumberdaya alam.

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037

Dari total wilayah daratan seluas 3.793,71 Km<sup>2</sup>, luas hutan lindung mencapai 32,6 persen, hutan produksi terbatas 12,9 persen dan hutan produksi seluas 12,3 persen. Sedangkan untuk permukiman adalah 1,7 persen dari seluruh luas daratan. Penggunaan lahan untuk pertanian (holtikultura, perkebunan, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering) adalah sebesar 38 persen. Penggolongan lahan ini dalam bentuk penggunaan lahan utama dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 2.6**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Jenis Guna Lahan	Luas (Km2)	%
1.	Hutan Lindung (HL)	1.236,7	32,6
2.	Hutan Produksi (HP)	0,4660	12,3
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	0,4909	12,9
4.	Hutan Suaka Alam (HSA)	0,0182	0,48
5.	Hutan Rakyat	0,2475	6,5
6.	Kawasan Sempadan Danau	0,0017	0,05
7.	Kawasan Sempadan Mata Air	0,0009	0,02
8.	Kawasan Sempadan Sungai Besar	0,0154	0,4
9.	Kawasan Sempadan Sungai Kecil	0,0934	2,5
10.	Kawasan Tambang	0,0079	0,21
11.	Holtikultura	0,1761	12,3
12.	Perkebunan	0,1616	4,3
13.	Permukiman	0,0641	1,7
14.	Pertanian Lahan Basah	0,3684	9,7
15.	Pertanian Lahan Kering	0,4450	11,7
<b>Jumlah.....</b>		<b>3.793,71</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037

### 2.1.3. Daerah Rawan Bencana

Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana.

Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai struktur sesar/patahan yang merupakan proses dislokasi pada batuan yang diikuti oleh pergeseran batuan. Indikasi adanya proses ini umumnya dapat terlihat dari gejala-gejala morfologi pada peta topografi seperti adanya pembelokan sungai, pergeseran bukit dan bentuk-bentuk khas lain yang menunjukkan gejala adanya sesar/patahan.

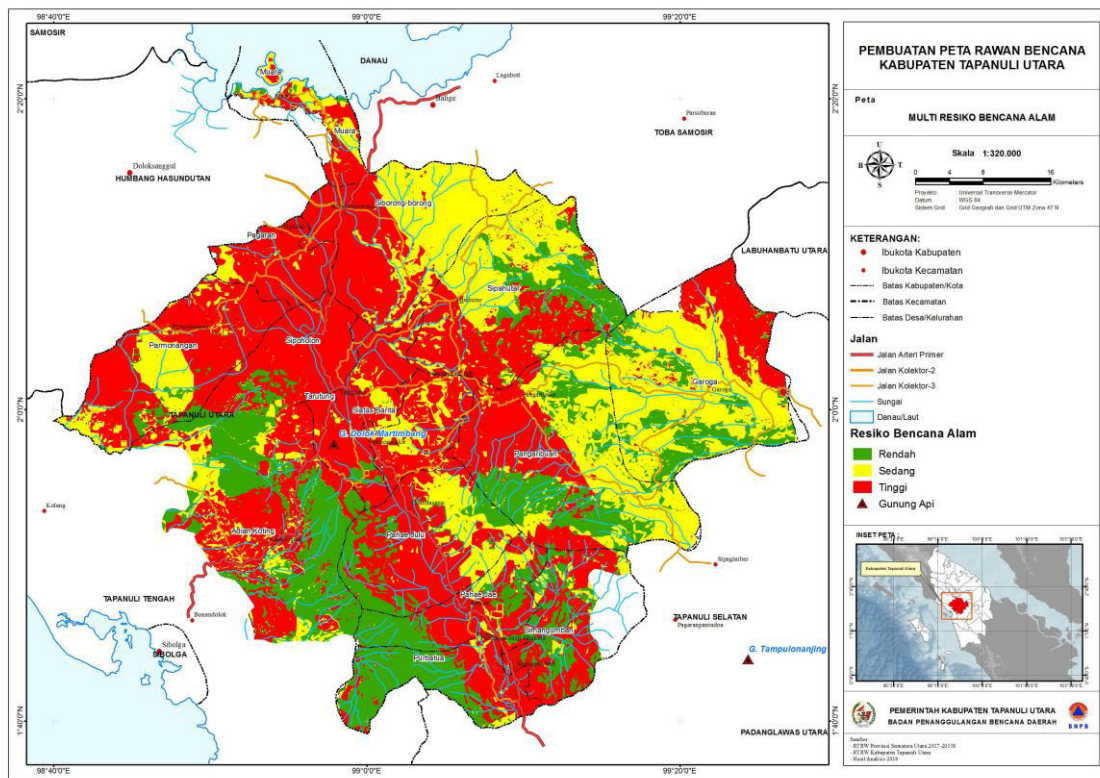
**Tabel 2.7**  
**Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Bencana Kab. Tapanuli Utara 2017 – 2037**

<b>Kawasan Lindung Bencana</b>	<b>Pada Kawasan Lindung (Ha)</b>	<b>Pada Kawasan Budidaya (Ha)</b>	<b>Total</b>
Longsor	19.128,62	51.601,87	70.730,49
Gempa	8.903,88	9.641,20	18.545,08
<b>Total Rawan Bencana Tiap Kawasan</b>	<b>28.032,50</b>	<b>61.243,07</b>	<b>89.275,57</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037

Sesar/patahan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah bagian dari Sesar Semangko yang diinterpretasikan sebagai suatu sesar mendatar yang umumnya berarah relatif barat laut tenggara yang masih aktif dan telah terjadi beberapa kali gempa bumi yang cukup besar. Kejadian gempa dan curah hujan yang diatas rata-rata akan menyebabkan potensi timbulnya longsor terutama mengarah ke kawasan permukiman penduduk di bagian tengah. Dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 telah ditetapkan dalam pola ruang terkait penetapan kawasan lindung untuk daerah rawan bencana yang dapat dilihat pada Tabel 2.7.





Sumber: BPBD Kab. Tapanuli Utara, Peta Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Utara

**Gambar 2.9**  
**Potensi Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Tapanuli Utara**

Perlu digarisbawahi bahwa Kabupaten Tapanuli Utara memiliki modal alamiah yang tidak ternilai harganya yaitu hutan primer yang sangat luas, terutama Hutan Batang Toru. Pada tahun 2013, hutan primer di Kabupaten Tapanuli Utara mencakup wilayah seluas sekitar 186,116 Ha, atau sekitar 50,4 persen dari total wilayah kabupaten, lebih tinggi dari rata-rata proporsi tutupan hutan Pulau Sumatera sebesar 30 persen. Laju deforestasi wilayah hutan primer ini cukup rendah selama kurun waktu 2010-2013, yaitu 0,17 persen per tahun. Hutan Batang Toru merupakan aset yang tidak terukur nilainya karena fungsi kuncinya sebagai daerah tangkapan air untuk Kabupaten Tapanuli Utara dan kabupaten/kota yang berada di wilayah hilir serta kekayaan keanekaragaman hayatinya.

#### 2.1.4. Kondisi Demografi

Kondisi Demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan komposisi penduduk. Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2010 sebanyak 141.101 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 adalah 0,87 persen, tahun 2016 sebesar 0,75 persen, tahun 2017 sebesar 0,74 persen



dan tahun 2018 sebesar 0,70 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018 adalah 299.881 jiwa.

Berdasarkan data Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2019, penduduk Tapanuli Utara didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 151.659 jiwa dan laki-laki sebanyak 148.222 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018**

Gol. Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
0 – 4	17.776	16.935	34.711	104,97
5 – 9	18.674	17.810	36.484	104,85
10 – 14	17.433	16.395	33.828	106,33
15 – 19	15.188	13.811	28.999	109,97
20 – 24	8.881	7.145	16.026	124,30
25 – 29	8.457	7.853	16.310	107,69
30 – 34	8.967	8.558	17.525	104,78
35 – 39	8.618	8.330	16.948	103,46
40 – 44	8.158	8.383	16.541	97,32
45 – 49	8.167	8.685	16.852	94,04
50 – 54	7.493	8.688	16.181	86,25
55 – 59	6.816	8.567	15.383	79,56
60 – 64	5.989	7.300	13.289	82,04
65 – 69	3.541	4.936	8.477	71,74
70 – 74	2.052	3.560	5.612	57,64
75+	2.012	4.703	6.715	42,78
<b>Total</b>	<b>148.222</b>	<b>151.659</b>	<b>299.881</b>	<b>97,73</b>

Sumber : Tapanuli Utara Dalam Angka, 2019

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah		Total	Kepadatan per Km <sup>2</sup>
		Lk	Pr		
1	Parmonangan	6.940	7.042	13.982	54
2	Adiankoting	7.538	7.366	14.904	30
3	Sipoholon	11.755	12.155	23.910	126
4	Tarutung	20.680	21.739	42.419	394
5	Siatas barita	6.767	7.264	14.031	151
6	Pahae Julu	6.172	6.444	12.616	76
7	Pahae Jae	5.490	5.860	11.350	56

No	Kecamatan	Jumlah		Total	Kepadatan per Km <sup>2</sup>
		Lk	Pr		
8	Purbatua	3.730	3.964	7.694	40
9	Simangumban	3.826	4.014	7.840	52
10	Pangaribuan	14.178	14.533	28.711	63
11	Garoga	8.405	8.325	16.730	29
12	Sipahutar	13.200	13.148	26.348	65
13	Siborongborong	23.850	23.578	47.428	169
14	Pagaran	8.795	8.970	17.765	129
15	Muara	6.896	7.257	14.153	177
	<b>Tapanuli Utara</b>	<b>148.222</b>	<b>151.659</b>	<b>299.881</b>	<b>79</b>

Sumber : Tapanuli Utara Dalam Angka, 2019

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Tapanuli Utara digambarkan dengan usia penduduk yang masih sekolah diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.10**  
**Persentase Penduduk yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2018**

No	Kelompok Umur	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	7 - 12 tahun	100	100	100	99,58
2	13 - 15 tahun	97,33	99,31	99,31	99,12
3	16 - 18 tahun	85,46	89,35	89,35	83,91
4	19 - 24 tahun	20	39,50	39,50	27,17
5	7 - 15 tahun	99,18	99,78	99,78	99,44
6	7 - 24 tahun	85,98	88,25	88,25	85,90

Sumber : Tapanuli Utara Dalam Angka, 2019

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

#### **2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan

produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Hal tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan analisis ekonomi suatu wilayah yang meliputi : PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

PDRB Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2018 mencapai 7,29 miliar rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 5,51 miliar rupiah. Selama lima tahun terakhir nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan peningkatan meskipun pertumbuhannya melambat. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan terus meningkat seiring dengan berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara.

**Tabel 2.11**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Sektor/Sub Sektor PDRB	PDRB Per Sektor (Juta Rupiah)									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.618.153	48,22	2.774.279	47,38	2.936.775	46,61	3.088.534,16	45,65	3.227.209,89	44,23
2	Pertambangan dan Penggalian	3.675	0,07	4.051	0,07	4.365	0,07	4.695,79	0,07	5.016,76	0,07
3	Industri Pengolahan	102.191	1,88	114.232	1,95	126.751	2,01	143.773,37	2,13	161.397,52	2,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.462	0,08	4.550	0,08	4.402	0,07	4.978,79	0,07	5.608,06	0,07
5	Pengadaan Air	5.876	0,11	6.282	0,11	6.859	0,11	7.378,66	0,11	7.485,21	0,10
6	Konstruksi	661.418	12,18	718.611	12,27	855.147	13,57	982.947,39	14,53	1.026.138,80	14,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	878.849	16,19	767.178	13,10	807.214	12,81	875.098,91	12,93	1.055.492,85	14,47
8	Transportasi dan Pergudangan	253.458	4,67	280.720	4,79	309.798	4,92	339.160,49	5,01	370.623,73	5,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	132.403	2,44	148.739	2,54	161.730	2,57	174.870,75	2,58	187.618,74	2,57
10	Informasi dan Komunikasi	46.952	0,86	47.425	0,81	47.457	0,75	48.918,68	0,72	53.530,24	0,73
11	Jasa Keuangan	87.483	1,61	98.695	1,69	107.133	1,70	114.185,71	1,69	117.973,28	1,62
12	Real Estate	127.748	2,35	143.921	2,46	156.053	2,48	167.211,06	2,47	179.715,26	2,46
13	Jasa Perusahaan	15.444	0,28	16.774	0,29	18.259	0,29	19.826,61	0,29	21.160,98	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	542.596	9,99	576.469	9,84	600.926	9,54	629.594,67	9,31	696.437,63	9,54
15	Jasa Pendidikan	98.627	1,82	100.963	1,72	102.646	1,63	107.943,20	1,60	118.268,56	1,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43.294	0,80	45.261	0,77	46.456	0,74	47.646,63	0,70	53.223,71	0,73
17	Jasa lainnya	6.698	0,12	7.460	0,13	8.318	0,13	8.926,27	0,13	9877,88	0,14
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5.429.328</b>	<b>100,00</b>	<b>5.855.611</b>	<b>100,00</b>	<b>6.300.298</b>	<b>100,00</b>	<b>6.765.691,15</b>	<b>100</b>	<b>7.296.779,10</b>	<b>100</b>

**Tabel 2.12**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018**

No	Sektor/Sub Sektor PDRB	PDRB Per Sektor (Juta Rupiah)									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.271.325,77	48,93	2.351.115,87	48,28	2.431.668,98	47,96	2.502.264,68	47,39	2.523.960,02	45,81
2	Pertambangan dan Penggalian	3.216,66	0,07	3.540,36	0,07	3.762,95	0,07	4.000,27	0,08	4.207,02	0,08
3	Industri Pengolahan	87.843,23	1,89	95.716,68	1,97	101.727,74	2,01	108.311,07	2,05	114.605,55	2,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.995,72	0,11	5.435,34	0,11	5.583,12	0,11	5.884,12	0,11	6.303,54	0,11
5	Pengadaan Air	5.052,42	0,11	5.269,98	0,11	5.364,68	0,11	5.461,55	0,10	5.618,79	0,10
6	Konstruksi	531.675,08	11,45	578.504,96	11,88	635.966,05	12,54	694.156,95	13,15	737.805,32	13,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	573.635,73	12,36	605.911,13	12,44	624.827,69	12,32	653.103,15	12,37	745.518,86	13,53
8	Transportasi dan Pergudangan	210.027,65	4,52	224.708,90	4,61	237.197,57	4,68	252.537,25	4,78	268.420,44	4,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101.305,15	2,18	107.773,05	2,21	112.940,47	2,23	119.080,22	2,26	127.082,53	2,31
10	Informasi dan Komunikasi	46.415,22	1,00	46.853,29	0,96	47.653,29	0,94	48.876,59	0,93	50.211,14	0,91
11	Jasa Keuangan	70.273,36	1,51	76.443,56	1,57	79.909,16	1,58	82.769,11	1,57	85.629,79	1,55
12	Real Estate	98.525,04	2,12	105.686,76	2,17	109.492,78	2,16	113.605,74	2,15	118.393,25	2,15
13	Jasa Perusahaan	13.396,74	0,29	13.868,44	0,28	14.254,06	0,28	14.790,81	0,28	15.361,64	0,28
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	488.682,72	10,53	511.498,30	10,50	522.284,68	10,30	535.732,92	10,15	562.256,61	10,20
15	Jasa Pendidikan	90.370,22	1,95	90.874,16	1,87	90.934,77	1,79	93.115,14	1,76	95.273,01	1,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39.354,40	0,85	39.734,10	0,82	39.919,53	0,79	40.126,15	0,76	42.177,40	0,77
17	Jasa lainnya	6.230,68	0,13	6.543,34	0,13	6.707,34	0,13	6.873,05	0,13	7.365,18	0,13
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4.642.325,79</b>	<b>100,00</b>	<b>4.869.478,21</b>	<b>100,00</b>	<b>5.070.194,85</b>	<b>100,00</b>	<b>5.280.688,78</b>	<b>100,00</b>	<b>5.510.190,10</b>	<b>100</b>

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Sumbangan terbesar pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor, lapangan usaha Konstruksi dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah enam persen.

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Kawasan Dataran Tinggi Sumatera Utara, maka PDRB Kabupaten Tapanuli Utara menduduki peringkat kelima tertinggi setelah Kabupaten Dairi. Peranannya terhadap pembentukan PDRB Kawasan Dataran Tinggi Sumatera Utara tahun 2018 adalah sebesar 7,16 persen, sedangkan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,98 persen.

**Tabel 2.13**  
**Perbandingan PDRB dan Peranan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara ADHB dan ADHK 2010**  
**Tahun 2018 di Kawasan Dataran Tinggi Sumatera Utara (Juta Rupiah)**

Kabupaten/Kota	ADH Berlaku**	ADH Konstan**	Peranan terhadap PDRB Dataran Tinggi (%)**	Peranan terhadap PDRB Sumatera Utara (%)**
Simalungun	35.444.572,49	25.996.206,63	37,79	4,78
Karo	19.359.018,39	13.744.173,77	19,00	2,61
Pematang Siantar	13.176.710,84	9.170.185,70	12,93	1,78
Dairi	8.752.397,78	6.267.821,65	8,59	1,18
Tapanuli Utara	7.296.779,10	5.510.190,10	7,16	0,98
Toba Samosir	7.166.985,79	5.250.302,06	7,03	0,97
Humbang Hasundutan	5.523.753,49	3.946.119,77	5,42	0,75
Samosir	4.085.202,85	2.931.698,14	4,01	0,55
Pakpak Bharat	1.082.960,92	805.008,99	1,06	0,15
Kawasan Dataran Tinggi	101.888.381,65	73.621.706,81	100,00	13,75
Sumatera Utara	684.069.488,47	512.765.628,04	-	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha 2014-2018

#### 2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah

mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018 mencapai 4,35 persen, sedangkan tahun 2017 sebesar 4,15 persen. Pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan akibat pertumbuhan global yang lesu. Secara rata-rata, selama tahun 2014-2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 4,51 persen dan terendah dibanding Provinsi Sumatera Utara dan nasional.

**Tabel 2.14**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Dibanding**  
**Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)					Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	5,11	4,81	4,12	4,15	4,35	4,51
2.	Provinsi Sumatera Utara	5,23	5,10	5,18	5,12	5,18	5,16
3.	Nasional	5,02	4,79	5,02	5,07	5,17	5,01

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (sumut.bps.go.id), Tahun 2019

Perekonomian Indonesia diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan dasar harga berlaku Tahun 2018 mencapai Rp. 14.837,4 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp. 56,0 Juta atau US\$ 3.927. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,99 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,08 persen, sedangkan pengeluaran dari semua komponen menyumbang sebesar 10,79 persen. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sebesar 58,48 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,58 persen, dan Pulau Kalimantan 8,20 persen.

Apabila dilihat kondisi Kabupaten Tapanuli Utara, secara umum hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 8,81 persen, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,32 persen dan 6,28 persen. Sedangkan tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 2,73 persen, Jasa Kesehatan sebesar 2,06 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 1,88 persen.



**Tabel 2.15**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2014-2018**

No	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,59	3,51	2,74	2,43	2,02
2.	Pertambangan dan Penggalian	9,58	10,06	6,29	6,31	5,17
3.	Industri Pengolahan	12,07	8,96	6,28	6,47	5,81
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,02	8,80	2,72	5,39	7,13
5.	Pengadaan Air	4,40	4,31	1,80	1,90	2,79
6.	Konstruksi	9,08	8,81	8,90	8,13	8,32
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,26	5,63	5,24	7,44	8,81
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,14	6,99	5,57	6,47	6,28
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,49	6,38	5,77	5,25	5,92
10.	Informasi dan Komunikasi	1,55	0,94	1,71	2,57	2,73
11.	Jasa Keuangan	5,85	8,78	4,53	3,58	3,46
12.	Real Estate	6,57	7,27	4,74	3,81	3,04
13.	Jasa Perusahaan	3,63	3,52	2,78	3,77	3,86
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,00	4,67	3,09	2,57	3,96
15.	Jasa Pendidikan	0,80	0,56	1,61	1,28	1,88
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,52	0,96	2,00	1,97	2,06
17.	Jasa lainnya	5,12	5,02	3,99	3,95	4,13
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>5,04</b>	<b>4,89</b>	<b>4,12</b>	<b>4,15</b>	<b>4,35</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha 2014-2018

Kontribusi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2014-2018 merupakan kontribusi terkecil yang berada dalam rentang 0,07-0,08 persen.

#### **2.2.1.3. PDRB Per Kapita**

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pemerataan pembangunan daerah. Semakin tinggi/besar pendapatan per kapita, semakin makmur daerah tersebut,

meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena angka ini hanya merupakan rata-rata.

**Tabel 2.16**  
**Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2014-2018 (Ribuan Rupiah)**

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2014	18.666,21	7,55	15.960,47	3,70
2015	19.957,84	6,92	16.596,78	3,99
2016	21.312,63	6,79	17.151,46	3,34
2017*	22.718,45	6,60	17.731,98	3,38
2018**	24.332,24	7,10	18.374,58	3,62

Sumber : PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha 2014-2018

PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar Rp. 18.666.207,66 dan meningkat menjadi Rp. 24.332.240,00 rupiah di tahun 2018. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2014-2018 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2018, PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga konstan mencapai Rp. 18.374.580,00.

Berdasarkan harga konstan, pertumbuhan PDRB per kapita sejak tahun 2014-2018 berfluktuasi. Tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Utara tumbuh sebesar 3,70 persen sedangkan tahun 2018 tumbuh sebesar 3,62 persen. Apabila dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dengan adanya tren kenaikan PDRB per kapita seharusnya secara positif akan meningkatkan daya beli. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter pasar Tapanuli Utara yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif. Pasar lokal Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar. Struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan

makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian.

#### 2.2.1.4. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Inflasi Kabupaten Tapanuli Utara sampai saat ini masih mengacu pada inflasi Kota Padang Sidempuan.

**Tabel 2.17**  
**Tingkat Inflasi Kota Padang Sidempuan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tingkat Inflasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kota Padang Sidempuan	7,38	1,66	4,28	3,82	2,22
2.	Provinsi Sumatera Utara	8,17	3,24	6,34	3,20	1,23
3.	Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2019

Pada tahun 2018, seiring dengan berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah, gejala harga-harga barang dan jasa dapat diredam hingga mencapai 2,22 persen dan angka inflasi ini relatif lebih tinggi dari laju inflasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,23 persen tetapi lebih rendah dari laju inflasi nasional yang mencapai 3,13 persen. Turunnya laju inflasi pada tahun 2018 disebabkan oleh tercukupinya pasokan bahan pangan dan tidak adanya kebijakan penyesuaian tarif listrik.

#### 2.2.1.5. Kemiskinan

Pada tahun 1990 World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu kemiskinan adalah kelaparan, ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter, tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan juga adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang, kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih, ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan.

Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi.

Definisi kemiskinan lainnya juga dapat didasari pada jenis kemiskinan secara konseptual yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Todaro dan Smith, 2006). Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Dengan demikian, maka penduduk dikatakan miskin secara absolut jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan absolut tetap (tidak berubah) dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Namun demikian, antara negara yang satu dengan lainnya memiliki garis kemiskinan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, World Bank menetapkan garis kemiskinan internasional agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Garis kemiskinan tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US \$ 1 atau \$ 2 per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*).

Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (BPS, 2008). Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan atau pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif

sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Tapanuli Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2014 BPS memperkirakan sekitar 32.230 orang atau 11,06 persen dari jumlah penduduk Tapanuli Utara masuk dalam kategori miskin. Jumlah ini berkurang pada tahun 2018 menjadi 29.200 orang atau 9,75 persen.

**Tabel 2.18**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk (Jiwa)	290.864	293.399	295.613	297.806	299.881
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	32.230	33.370	33.200	33.750	29.200
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,06	11,41	11,25	11,35	9,75
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,33	1,61	1,60	1,83	1,08
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,27	0,35	0,36	0,48	0,16
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		291.893	325.606	344.644	357.464

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara tetap dilakukan sepanjang waktu melalui berbagai kegiatan prioritas. Selain perbaikan dan peningkatan akses dan kualitas infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, rumah layak huni), pemberian bantuan, pemberian beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, pemberdayaan masyarakat melalui berbagai jenis pelatihan yang mengikutsertakan masyarakat juga tetap dilakukan.

Upaya ini dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk miskin dari 11,06 persen pada tahun 2014 menjadi 9,75 persen pada tahun 2018. Demikian juga halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan (ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan) yang berkurang dari 1,33 pada tahun 2014 menjadi 1,08 tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga

semakin menyempit. Apabila dilihat indeks keparahan kemiskinan, ada kecenderungan membaik sejak tahun 2014-2017 namun berkurang pada tahun 2018. Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan seberapa jauh selisih pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di sana. Semakin tinggi angka indeksinya, semakin parah kemiskinannya, maka harus semakin terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk daerah tersebut keluar dari kemiskinan. Secara nasional upaya penanggulangan kemiskinan tetap dilakukan melalui pemberian bantuan kepada keluarga tidak mampu yang terdata pada Basis Data Terpadu.

**Tabel 2.19**  
**Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018**

Kecamatan	Jumlah BDT (Rumah Tangga)	Jenis Bantuan			
		Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP)	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Sesuai BDT	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Non BDT	Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
		(KK)	(Jiwa)	(Jiwa)	(KK)
Parmonangan	1.478	996	5.084	2.325	726
Adiankoting	1.868	1.125	5.885	2.924	857
Sipoholon	2.185	1.076	6.674	2.754	791
Tarutung	3.032	1.253	8.553	3.003	735
Siatas Barita	1.465	760	3.804	1.152	485
Pahae Julu	1.685	894	4.842	1.831	584
Pahae Jae	1.257	629	3.527	1.377	438
Purbatua	1.056	557	2.916	1.008	375
Simangumban	1.044	704	3.566	1.351	475
Pangaribuan	2.334	1.308	7.597	3.485	1.061
Garoga	2.298	1.443	7.541	2.170	1.058
Sipahutar	2.493	1.535	9.160	2.926	1.089
Siborongborong	3.082	2.035	11.550	3.733	1.322
Pagaran	1.262	836	5.026	2.432	683
Muara	1.277	787	4.382	1.648	591
<b>Total.....</b>	<b>27.816</b>	<b>15.938</b>	<b>90.107</b>	<b>34.119</b>	<b>11.270</b>

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Sesuai data tahun 2018, jumlah rumah tangga yang tercatat pada Basis Data Terpadu adalah sebanyak 27.816 rumah tangga dengan jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan sosial pangan (Rastra), bantuan iuran kesehatan dan bantuan Program Keluarga Harapan. Melalui bantuan sosial yang diberikan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah Daerah dalam hal ini agar tetap meningkatkan kegiatan yang bertujuan untuk penanggulangan

kemiskinan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

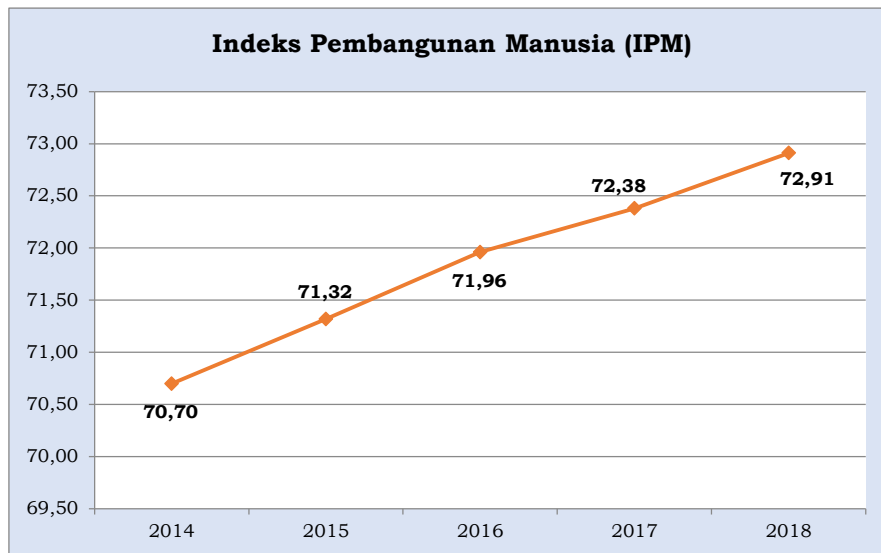
#### **2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu:

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (Life Expectancy - e0) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.
2. Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Mean Years of Schooling - MYS) yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
3. Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling - EYS) yang didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.

Selanjutnya secara global, IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu : IPM rendah ( $IPM < 60$ ); IPM sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ); IPM tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ); IPM sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ).





**Gambar 2.10**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

Secara umum nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2014 mengalami pembentukan pola yang semakin meningkat atau semakin baik, dengan nilai yang tinggi, yaitu 70,70 tahun 2014 dan menjadi 72,91 pada tahun 2018. Ini menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan manusia secara umum dan bukan hanya pembangunan perekonomian semata.

**Tabel 2.20**  
**IPM Kabupaten Tapanuli Utara dibanding Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014 – 2018**

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Tapanuli Utara	70,70	71,32	71,96	72,38	72,91
Prov. Sumatera Utara	68,87	69,51	70,00	70,57	71,18
Nasional	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39

Apabila dibandingkan nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara dengan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, maka capaian nilai IPM masih lebih tinggi. Hal ini perlu dijaga dan ditingkatkan sehingga hasil pembangunan manusia dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### **2.2.1.7. Indeks Gini**

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,

pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan dua masalah krusial yakni kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang dimaksud adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari perubahan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar kelompok masyarakat. Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat kelompok berpendapatan rendah tumbuh dengan lambat atau bahkan turun, sedangkan tingkat kesejahteraan kelompok berpendapatan tinggi tumbuh dengan cepat. Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, kesenjangan ekonomi juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada negara-negara maju. Tidak mengherankan bila ketimpangan itu akan selalu ada, baik itu di negara miskin, negara berkembang maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah  $G < 0,30$  berarti ketimpangan rendah,  $0,30 \leq G \leq 0,50$  berarti ketimpangan sedang dan  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi.

**Tabel 2.21**  
**Indeks Gini Kab. Tapanuli Utara dibanding Provinsi Sumatera Utara dan Nasional**  
**Tahun 2014 - 2018**

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Tapanuli Utara	0,304	0,355	0,308	0,328	0,282
Prov. Sumatera Utara	0,321	0,336	0,319	0,315	0,318
Nasional	0,406	0,408	0,397	0,393	0,389

Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan dibandingkan dengan Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional, Rasio Gini Kabupaten

Tapanuli Utara masih lebih rendah. Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara relatif lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Artinya distribusi pendapatan antar penduduk lebih merata.

## **2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **2.2.2.1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan unsur penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu komponen dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia selain kesehatan dan standar hidup layak. Pendidikan akan memperluas peluang seseorang dalam mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

#### **2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

**Tabel 2.22**  
**Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

Kemampuan Baca Tulis	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Huruf Latin	98,41	98,78	99,12	99,10	99,25
Huruf Latin dan Arab	1,41	-	-	-	-
Huruf Latin dan Lainnya	5,10	-	-	-	-
Huruf Arab	-	2,01	1,37	2,60	2,77
Huruf Lainnya	-	3,32	1,79	4,49	4,94
Melek Huruf	99,00	99,28	99,22	99,21	99,38
Buta Huruf	1,00	0,72	0,78	0,79	0,62
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Penuntasan buta aksara menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 bahwa angka melek huruf secara nasional berada pada angka 95,66 persen. Artinya masih ada penduduk Indonesia yang belum dapat membaca dan menulis sebesar

4,34 persen. Capaian angka melek huruf Kabupaten Tapanuli Utara sampai tahun 2018 mencapai 99,38 persen, sudah lebih tinggi dari capaian tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang tahun 2018 berada pada angka 99,14 persen.

#### **2.2.2.1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah mulai sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Dari Tabel 2.23 dapat diketahui bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 9,05 tahun pada tahun 2014 menjadi 9,65 tahun pada tahun 2018. Nilai rata-rata lama sekolah menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah.

**Tabel 2.23**  
**Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Nasional Tahun 2014-2018**

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Tapanuli Utara	9,05	9,31	9,32	9,46	9,65
Provinsi Sumatera Utara	8,93	9,03	9,11	9,25	9,34
Nasional	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17

Apabila dibandingkan dengan data rata-rata lama sekolah tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 yang berada pada angka 9,34 tahun, maka angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara lebih tinggi. Demikian juga bila dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah tingkat nasional tahun 2018 yang berada pada angka 8,17 tahun.

#### **2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 2.24**  
**Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA**  
**Tahun 2014-2018**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Kasar (APK)						
a. SD/MI	%	104,41	105,85	106,35	119,75	104,83
b. SMP/MTs	%	95,68	97,50	98,95	114,23	114,95
c. SMA/SMK/MA	%	89,13	91,41	91,46	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Nilai APK di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan untuk semua jenjang pendidikan, dimana peningkatan APK tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD/MI dengan APK rata-rata selama tahun 2014-2018 sebesar 108,24 persen. Pada periode waktu yang sama rata-rata APK jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 104,26 persen. Tahun 2018 perhitungan nilai APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sudah tidak dihitung karena merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Makin tinggi nilai APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 persen karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah kota atau daerah perbatasan yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

#### **2.2.2.1.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan**

Pendidikan yang ditamatkan seseorang secara langsung menunjukkan tingkat pendidikan yang dicapainya. Sejalan dengan itu, pola dan distribusi pendidikan menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat menggambarkan taraf pendidikan penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi menunjukkan kondisi pendidikan penduduk yang semai kn membaik. Secara umum persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.25**  
**Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2014 - 2017**

No	Ijazah Tertinggi	Tahun (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	Tidak/belum pernah sekolah	1,04	0,96	0,00	0,80
2	Tidak/belum tamat SD	21,22	20,88	20,98	19,90
3	SD/MI/Sederajat	22,81	21,29	36,14	21,09
4	SMP/MTs/Sederajat	23,14	24,41	12,30	22,82
5	SMA/MA/Sederajat	17,31	-	-	22,80
6	SMK	8,23	-	-	3,86
7	SMA/MA/SMK Sederajat	-	25,45	24,27	-
8	Diploma I/II	0,01	0,92	0,65	0,78
9	Diploma III	0,07	0,98	0,77	2,14
10	Diploma IV/S-1	6,16	5,10	4,89	5,81
	<b>Jumlah.....</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018

Apabila diperhatikan secara rata-rata untuk seluruh jenjang pendidikan, maka secara umum terjadi peningkatan angka pendidikan yang ditamatkan. Kelompok penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai tingkat pendidikan menengah tahun 2017 nilainya meningkat menjadi 26,66 persen. Artinya keinginan untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin meningkat. Adanya program wajib belajar 12 tahun dan sekolah gratis melalui mekanisme pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pendidikan tertinggi penduduk. Hal ini juga terlihat pada jenjang pendidikan tinggi.

#### **2.2.2.1.5. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. APM berfungsi hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah untuk SD/MI adalah umur 7-12 tahun, untuk SMP/MTs adalah umur 13-15 tahun dan untuk SMA/MA/SMK adalah umur 16-18 tahun. Perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014-2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.26**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Murni (APM)						
a. SD/MI	%	88,40	98,51	90,18	90,08	89,05
b. SMP/MTs	%	70,92	97,50	72,35	81,30	100,5
c. SMA/SMK/MA	%	70,29	75,45	71,70	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018

APM menggambarkan kondisi kapasitas SDM Kabupaten Tapanuli Utara di masa depan, dimana APM yang tinggi menunjukkan tingkat intelektualitas angkatan kerja pada beberapa tahun mendatang setelah para pelajar meninggalkan bangku sekolah. Dari data pada tabel 2.26 bahwa angka partisipasi murni semakin rendah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Intervensi pemerintah sangat diperlukan agar anak usia diatas 15 tahun mendapat pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, dengan kata lain program wajib belajar 12 tahun terpenuhi. Dalam jangka panjang, intervensi pemerintah diperlukan agar tersedia angkatan kerja dengan *knowledge*, *skill* dan *attitude* yang mendukung pembangunan. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan yang berfluktuatif untuk semua jenjang pendidikan, dimana peningkatan APM yang paling tinggi didapat pada jenjang pendidikan SD/MI dengan APM rata-rata selama tahun 2014-2018 sebesar 91,79 persen, sedangkan pada periode waktu yang sama rata-rata APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 80,51 persen dan pada tingkat jenjang pendidikan SMA/SMK/ MA rata-rata APM sebesar 72,48 persen. Kemajuan pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari kondisi atau kemampuan sumber daya manusianya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah adalah aspek pendidikan penduduk. Oleh karena itu, sebaiknya permasalahan pendidikan dapat menjadi perhatian bersama dalam penanganannya.

#### **2.2.2.2. Kesehatan**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.



Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan : 1 ) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran serta kendali mutu dan kendali biaya.

Untuk mendapatkan keadaan dimana masyarakat bisa sehat dan berkeadilan, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengaplikasikan kebijakan bidang kesehatan diantaranya adalah meningkatkan kuantitas jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan (medis dan non medis). Pendekatan lain yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat terutama terhadap golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang tinggal di pedesaan. Upaya lain yang dilakukan termasuk tindakan pencegahan dan penyembuhan penyakit, sehingga pembangunan yang sedang digiatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat berakselerasi positif dan bersinergi terhadap kegiatan pembangunan di bidang lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan dan konsumsi makanan bergizi masyarakat. Tetapi faktor yang terpenting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan tersebut terletak pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

#### **2.2.2.2.1. Angka Kematian Bayi**

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini juga terkait dengan kelangsungan hidup anak serta merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Renstra

Kemenkes RI 2015-2019 menargetkan penurunan AKB Tahun 2019 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

**Tabel 2.27**  
**Angka Kematian Bayi di Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah bayi lahir hidup (jiwa)	5.264	5.222	5.775	5.762	6.996
2	Jumlah kematian bayi (jiwa)	60	55	66	50	30
3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran	11,40	10,53	11,43	8,68	6,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut, AKB di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014-2018 tergolong rendah dan jauh melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kondisi ini perlu tetap dijaga agar angkanya dapat diturunkan kembali untuk tahun yang akan datang. Faktor penyebab kematian bayi secara umum adalah lahir mati, BBLR, premature, kelainan jantung, asfiksia, aspirasi dan gizi buruk.

#### **2.2.2.2.2. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah ibu meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. AKI dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Faktor penyebab utama kematian maternal adalah keterlambatan mencari, mencapai dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah pengetahuan ibu yang kurang dalam menjaga kehamilan, jarak yang sulit dicapai dan masih adanya beberapa desa yang belum mempunyai tenaga kesehatan utamanya bidan desa. Secara nasional target AKI adalah 306 per 100.000 penduduk. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan, jumlah ibu melahirkan setiap tahunnya tidak mencapai angka 100.000 sehingga angka kematian ibu yang disajikan pada tabel berikut merupakan jumlah ibu meninggal per kelahiran bayi.

**Tabel 2.28**  
**Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

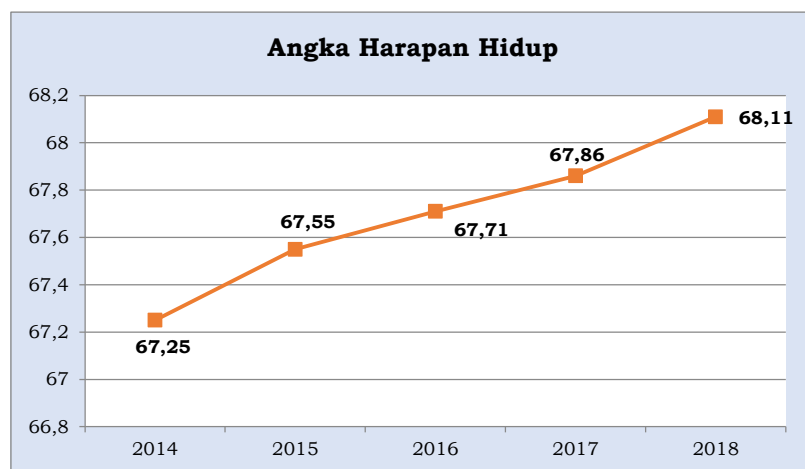
No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah bayi lahir hidup (jiwa)	5.264	5.222	5.775	5.762	6.996
2	Jumlah ibu meninggal (jiwa)	2	6	5	8	4
3	Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4	85,18	87	87	79	73,2
4	Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	19,40	24,91	28,55	38,33	44,56
5	Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	82,64	82	83	73	67,10
6	Persentase cakupan pelayanan nifas	82,16	73,34	82,36	72,90	64,6
7	Persentase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	3,1	1,4	1	5,4	3,0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Apabila kita hitung secara persentase, maka rata-rata selama lima tahun terakhir angka kematian ibu melahirkan berdasarkan jumlah bayi yang lahir hidup berada pada kisaran 0,08 persen (lebih rendah dari target nasional sebesar 0,30 persen) dengan cakupan kunjungan ibu hamil yang berfluktuasi.

#### **2.2.2.2.3. Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama disektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan ekonomi. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

**Gambar 2.11**  
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari 67,25 tahun pada tahun 2014 menjadi 68,11 tahun pada tahun 2018. Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan faktor membaiknya pelayanan kesehatan, adanya kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan serta peningkatan keadaan sosial ekonomi penduduk yang selanjutnya memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta meningkatnya kesadaran untuk menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan.

#### **2.2.2.2.4. Persentase Balita Gizi Buruk**

Gizi buruk, terutama pertumbuhan yang terhambat, merupakan sebuah masalah kesehatan di Indonesia, sehingga salah satu arah kebijakan perbaikan gizi sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan. Kondisi gizi buruk pada balita akan dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Stunting adalah salah satu efek jangka panjang akibat gizi buruk dan saat ini menjadi isu di tingkat nasional. Penyakit akibat gizi buruk ini menghambat kemampuan anak untuk tumbuh secara normal. Tinggi dan berat badan anak dengan gizi buruk akan berada jauh di bawah normal dibanding dengan anak-anak pada usia yang sama. Pertumbuhan yang terhambat ini bisa menjadi permanen dan seorang anak mungkin tidak akan pernah mencapai tinggi normal atau berat badan jika mengalami kekurangan gizi kronis. Selain itu, dampak gizi buruk pada balita juga dapat menghambat perkembangan otak dan kapasitas intelektual pada tahap awal kehidupan.

**Tabel 2.29**  
**Persentase Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk di Kabupaten Tapanuli Utara**  
**Tahun 2014-2018**

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah balita gizi kurang (jiwa)	49	97	195	145	153
Cakupan balita gizi kurang mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah balita gizi buruk (jiwa)	33	30	32	25	23
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2019

Kasus balita dengan gizi kurang dan gizi buruk setiap tahun selalu ada walaupun angkanya berfluktuasi. Sejauh ini seluruh balita dengan kasus gizi kurang maupun gizi buruk semua mendapat perawatan.

### 2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk, baik yang bekerja maupun mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dari pengertian diatas terdapat kata “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan,” itu berarti tidak semua penduduk bisa dikatakan sebagai tenaga kerja, karena pada dasarnya tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan. Orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan inilah yang disebut sebagai bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan penduduk di satu wilayah yang masuk dalam usia kerja (diatas 15 tahun sampai 64 tahun) baik yang bekerja maupun tidak bekerja (menganggur) namun tidak termasuk pelajar dan ibu rumah tangga. Jadi angkatan kerja adalah setiap penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Tidak semua penduduk usia kerja bisa dikatakan sebagai angkatan kerja, hal ini karena penduduk yang tidak aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi tidak termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja.

**Tabel 2.30**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2014 - 2018**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian	77,36	84,74	84,74	65,91	NA
2	Industri	6,03	3,96	3,96	6,94	NA
3	Jasa-jasa	16,61	11,30	11,30	27,15	NA
	<b>Jumlah.....</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>NA</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Seiring dengan perkembangan dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara terlihat mulai adanya pergeseran lapangan pekerjaan utama dari sebelumnya bekerja di sektor pertanian bergeser ke sektor jasa-jasa. Pergeseran ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa secara kualitas terjadi peningkatan SDM pada tenaga kerja diluar sektor pertanian sehingga tenaga kerja mampu beralih pada profesi selain

pertanian. Namun hal ini juga harus tetap dicermati mengingat bahwa penyumbang perekonomian terbesar Kabupaten Tapanuli Utara saat ini adalah sektor pertanian. Artinya berkurangnya keterlibatan tenaga kerja di sektor pertanian harus diimbangi dengan penggunaan teknologi untuk menunjang sektor pertanian agar tetap dapat berkembang.

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator berikut ini.

#### 2.2.3.1. Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan, khususnya dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, dimana Tarutung sebagai ibukota kabupaten selama ini telah dikenal sebagai Kota Wisata Rohani. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama pemangku kepentingan lainnya berusaha mengembangkan seni dan budaya di daerah ini dengan mengikuti berbagai event kebudayaan yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Sumatera Utara, pemerintah provinsi/kabupaten lainnya maupun untuk tingkat nasional. Kegiatan kebudayaan juga ditampilkan dalam menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke Tapanuli Utara.

**Tabel 2.31**  
**Perkembangan Seni Budaya Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya di daerah (kali)	18	18	4	3	2
2	Kegiatan seni budaya yang diikuti di luar daerah (kali)	-	-	-	-	-
3	Jumlah group kesenian (kelompok)	75	75	2	3	-
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni & budaya (unit)	1	1	1	1	1
5	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	7	7	7	7	7

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

### 2.2.3.2. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Olahraga merupakan bagian dari upaya menumbuhkan karakter kuat bagi jiwa pemuda melalui kegiatan olah tubuh. Melalui olahraga pemuda diharapkan dapat membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan bagi dirinya. Olahraga merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan diri yang nantinya mampu berprestasi dan memiliki jiwa yang kompetitif. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah, dimana untuk mengembangkan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tapanuli Utara telah tersedia berbagai fasilitas pendukung.

**Tabel 2.32**  
**Prestasi Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 – 2018**

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Perolehan medali emas tingkat provinsi	3	4	30	27
2	Perolehan medali perak tingkat provinsi	4	5	24	38
3	Perolehan medali perunggu tingkat provinsi	6	6	23	49
4	Perolehan medali emas tingkat nasional	1	1	14	21
5	Perolehan medali perak tingkat nasional	4	3	12	20
6	Perolehan medali perunggu tingkat nasional	5	4	11	22
7	Jumlah sarana dan prasarana olahraga				
	a. Lapangan olahraga	4	4	4	4
	b. Gedung olahraga	-	-	-	-
8	Jumlah club olahraga tingkat kabupaten	22	22	22	22

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara, 2019

Secara umum sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan prestasi olahraga melalui perolehan medali di semua peringkat baik di tingkat provinsi maupun nasional. Adapun cabang olahraga penyumbang medali terbanyak adalah cabang olahraga karate, tinju dan wushu.

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ketentuan ini seluruh unit pelayanan publik diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen/ kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.



### **2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Rakyat
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

#### **2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal.

##### **2.3.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS juga dapat digunakan melihat tingkat kemampuan lembaga pendidikan formal (sekolah) dalam menyerap warga belajar terutama anak usia sekolah.

**Tabel 2.33**  
**Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Tahun 2014-2018**

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	7 - 12 tahun	110,77	110,87	110,97	111,07	111,17
2	13 - 15 tahun	100,10	100,20	100,30	100,40	100,50
3	16 - 18 tahun	72,31	73,35	85	85	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Dari tabel menunjukkan bahwa secara umum nilai APS menurut tingkatan usia, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah sudah bagus. Kemudian nilai APS menjadi turun untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi (akademi, perguruan tinggi). Salah satu penyebabnya adalah dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat juga oleh ketersediaan fasilitas yang mendukung.

#### **2.3.1.1.2. Rasio Guru dan Siswa**

Beban kinerja guru salah satunya dapat diukur dengan indikator rasio murid-guru, yaitu perbandingan antara jumlah guru terhadap jumlah murid. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada pasal 17 disampaikan bahwa Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya, untuk masing-masing jenjang/tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. TK, RA, atau yang sederajat 1 : 15;
- b. SD atau yang sederajat 1 : 20;
- c. MI atau yang sederajat 1 : 15;
- d. SMP atau yang sederajat 1 : 20;
- e. MTs atau yang sederajat 1 : 15;
- f. SMA atau yang sederajat 1 : 20;
- g. MA atau yang sederajat 1 : 15;
- h. SMK atau yang sederajat 1 : 15; dan
- i. MA atau yang sederajat 1 : 12.

**Tabel 2.34**  
**Rata-rata Rasio Siswa dan Guru Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 15	1 : 15
2	SMP/MTs	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15
3	SMA/MA	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15
4	SMK	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa secara rata-rata untuk Kabupaten Tapanuli Utara, rasio jumlah siswa dengan ketersediaan guru yang ada untuk semua jenjang pendidikan telah tercukupi, walaupun untuk beberapa kecamatan terdapat angka yang sedikit berbeda (penyebaran guru belum merata).

#### 2.3.1.1.3. Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan

Peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara telah memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan yang dapat dilihat dari banyak faktor, diantaranya angka kelulusan dan angka melanjutkan. Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus pada tingkat pendidikan per jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tahun sebelumnya, sedangkan angka melanjutkan sekolah menunjukkan persentase murid yang melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

**Tabel 2.35**  
**Persentase Kelulusan dan Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>I.</b>	<b>Angka Kelulusan</b>					
	1. SD/MI	95,56	100,00	100,00	100,00	100,00
	2. SMP/MTs	95,56	100,00	97,30	99,98	100,00
	3. SMA/SMK/MA	99,98	100,00	96,44	-	-
<b>II.</b>	<b>Angka Melanjut Sekolah</b>					
	1. SMP/MTs	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00
	2. SMA/SMK/MA	98,90	100,00	96,44	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Tabel 2.35 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu 2014-2018 yang ditunjukkan oleh peningkatan angka persentase kelulusan murid pada semua jenjang pendidikan serta peningkatan jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan (sekolah) ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Melihat kondisi di atas, pelayanan bidang pendidikan di daerah ini perlu lebih ditingkatkan agar mutu lulusan mempunyai *life skill* dan dapat bersaing di pasar tenaga kerja.

#### 2.3.1.1.4. Fasilitas Sekolah dan Kualifikasi Guru

Salah satu komponen pendukung yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta kompetensi tenaga pengajar. Komponen sarana prasarana sangat dibutuhkan, terlebih bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar membutuhkan alat dan fasilitas yang dapat memperlancar proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh pelajar. Selain itu, peranan guru dalam mengajar juga

merupakan hal yang sangat penting karena kompetensi guru juga dapat mempengaruhi keterlibatan guru dalam menggunakan fasilitas dalam proses belajar mengajar. Apabila kondisi fasilitas sekolah yang kurang memadai dan kinerja guru yang kurang optimal, maka proses belajar mengajar tidak akan efektif.

**Tabel 2.36**  
**Fasilitas sekolah dan kualifikasi Guru Tahun 2014 – 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Sekolah Dasar/MI	389	389	389	390	390
2	Jumlah SMP/MTs	81	82	82	83	83
3	Jumlah SMA/SMK/MA	50	51	51	52	52
4	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tingkat SD/MI	52,95	42,37	46,71	56,70	69,98
5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tingkat SMP/MTs	87,63	86,62	90,22	90,23	90,63
6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tingkat SMA/SMK/MA	94,19	93,49	95,40	Na	Na

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, 2019

Saat ini kebutuhan jumlah sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara telah terpenuhi untuk semua jenjang pendidikan. Setiap kecamatan telah memiliki sekolah tingkat dasar hingga menengah.

#### **2.3.1.1.5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0-6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan bentuk lain yang sederajat menggunakan program untuk anak usia 4-≤6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan non formal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat menggunakan program untuk anak usia 0-<2 tahun, 2-<4 tahun, 4-≤6 tahun dan program pengasuhan untuk anak usia 0-≤6 tahun, kelompok bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2-<4 tahun dan 4-≤6 tahun.

**Tabel 2.37**  
**PAUD di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 – 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kelompok PAUD sejenis (unit)	-	215	227	250	255
2	Jumlah Guru PAUD			77	64	
3	Jumlah Siswa PAUD			5.233	4.198	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, 2019

Tabel 2.37 menunjukkan bahwa jumlah kelompok PAUD mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara semakin peduli terhadap masalah pendidikan anak usia dini sehingga hal ini perlu mendapat perhatian untuk kedepannya.

#### **2.3.1.1.6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif. Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP berisi ketentuan tentang delapan standar pendidikan yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu tertentu. Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat beragam dan sebagian besar kualitasnya masih berada di bawah SNP, maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Apabila SPM Pendidikan telah tercapai maka indikator tingkat (mutu) layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya mencapai tingkatan yang ditetapkan dalam SNP. Oleh karena itu, SPM Pendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk mencapai SNP secara bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhan SNP.

**Tabel 2.38**  
**Capaian SPM Bidang Pendidikan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2018**

No	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah warga usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	99,01	99,18	99,78	99,45	99,44
2	Jumlah warga usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15,4	14,54	10,65	12,05	16,09
3	Jumlah warga usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	1.224	1.520	1.153	1.186	1.123

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara, 2019

Implementasi Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu strategi peningkatan kualitas pendidikan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program peningkatan mutu pendidikan.

#### **2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada waktu sebelumnya. Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah dan merata. Melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di tiap wilayah. Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan,

khususnya kepada masyarakat kurang mampu dan perempuan di wilayah perbatasan/terluar/terpencil.

#### 2.3.1.2.1. Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis

Salah satu indikator kesehatan yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari rasio antara penduduk dengan tenaga medis. Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan termasuk sarana kesehatan dan tenaga medis.

**Tabel 2.39**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2018**

No	Sarana Kesehatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	1
2	Jumlah Puskesmas					
	a. Biasa	13	14	14	14	13
	b. Rawat Inap	6	6	6	6	7
	c. Puskesmas dengan akreditasi dasar	-	-	-	-	6
	d. Puskesmas dengan akreditasi madya	-	-	-	1	3
3	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	60	60	60	60	61
	a. Parmonangan	4	4	4	4	4
	b. Adiankoting	6	6	6	6	6
	c. Sipoholon	5	5	5	5	5
	d. Tarutung	5	5	5	5	5
	e. Siatas Barita	4	4	4	4	4
	f. Pahae Julu	5	5	5	5	6
	g. Pahae Jae	1	1	1	1	1
	h. Purbatua	1	1	1	1	1
	i. Simangumban	-	-	-	-	-
	j. Pangaribuan	8	8	8	8	8
	k. Garoga	5	5	5	5	5
	l. Sipahutar	3	3	3	3	3
	m. Siborongborong	6	6	6	6	6
	n. Pagaran	4	4	4	4	4
	o. Muara	3	3	3	3	3
4	Poskesdes	90	91	93	95	95
	a. Parmonangan	12	12	13	14	14
	b. Adiankoting	3	3	3	3	3
	c. Sipoholon	4	4	5	5	5
	d. Tarutung	3	3	3	3	3
	e. Siatas Barita	1	1	1	1	1
	f. Pahae Julu	2	3	3	4	4
	g. Pahae Jae	1	1	1	1	1



No	Sarana Kesehatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	h. Purbatua	3	3	3	3	3
	i. Simangumban	3	3	3	3	3
	j. Pangaribuan	13	13	13	13	13
	k. Garoga	9	9	9	9	9
	l. Sipahutar	9	9	9	9	9
	m. Siborongborong	12	12	12	12	12
	n. Pagaran	9	9	9	9	9
	o. Muara	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019

Kabupaten Tapanuli Utara terus berbenah dan berupaya meningkatkan pembangunan kesehatan untuk mencapai Kabupaten Sehat. Salah satu hal yang sangat penting dalam upaya tersebut adalah dengan mendirikan sarana pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau oleh masyarakat serta menyediakan tenaga medis yang dibutuhkan. Guna meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, penambahan tenaga media khususnya jumlah dokter spesialis juga tetap dilakukan.

**Tabel 2.40**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2018**

No	Tenaga Kesehatan	Puskesmas					RSU					Klinik Dinkes					Dinkes				
		Tahun					Tahun					Tahun					Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	14	18	20	25	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dokter Umum	22	37	35	37	37	19	18	17	15	15	1	1	1	2	2	-	2	2	5	4
3	Dokter Gigi	14	13	12	13	12	4	5	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bidan	482	488	485	793	812	127	53	61	62	60	3	3	3	5	5	-	-	-	14	14
5	Perawat	87	106	104	203	225	163	158	163	175	188	-	-	-	2	2	-	-	-	18	18
6	Perawat Gigi	8	7	5	3	-	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tenaga teknis kefarmasian	6	7	9	15	15	16	16	16	16	16	1	1	-	-	-	-	4	5	5	3
8	Apoteker	1	1	-	-	-	3	4	4	5	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
9	Kesehatan Masyarakat	7	6	27	38	36	4	9	7	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6
10	Nutrisi	16	14	13	9	14	6	8	6	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6
11	Dietisien	-	1	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Fisioterapis	-	-	-	-	-	2	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Radiografer	8	6	5	6	6	4	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Teknisi elektromedis	-	-	-	-	-	2	5	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Analisis kesehatan	5	4	4	4	4	7	6	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
16	Kesehatan lingkungan	-	6	6	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Rekam medis dan infokes	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pengelola program kes	25	25	32	-	-	-	20	1	1	1	-	-	-	-	-	56	49	56	8	29
19	Tenaga kes lainnya	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	<b>Total</b>	<b>682</b>	<b>722</b>	<b>739</b>	<b>1.138</b>	<b>1.178</b>	<b>382</b>	<b>335</b>	<b>320</b>	<b>343</b>	<b>346</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>82</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Selain pemenuhan fasilitas kesehatan, keberadaan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Sesuai data yang diperoleh, upaya penambahan tenaga kesehatan terus dilakukan baik di sarana pelayanan kesehatan dasar maupun lanjutan demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**Tabel 2.41**  
**Indikator Kinerja Urusan Kesehatan pada RSUD Tarutung Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	50,79	61,25	61,75	67,02	55,5
2	Average Length of Stay (ALOS)	5	4,6	4,7	4,8	4,86
3	Turn Over Internal (TOI)	5	2,9	2,9	2,37	3,89
4	Bed Turn Over (BTO)	38	48	47,9	50,9	41,71
5	Gross Death Rate (GDR)	38,78	37,99	29,98	36,1	43,81
6	Net Death Rate (NDR)	9,65	29,45	16,94	18,49	26,15
7	Cost Recovery Rate (CRR)	APBD	APBD	APBD	0,73	0,77
8	Nilai Survey/Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan RSUD Tarutung	-	82,5	76,6	76,92	79,17

Sumber : RSUD Tarutung Tahun 2019

#### **2.3.1.2.2. Penolong Kelahiran**

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dari yang ditolong oleh dukun atau yang lainnya.

**Tabel 2.42**  
**Persentase Balita Menurut Penolong Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2014 - 2018**

No	Penolong Anak Lahir Hidup	Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Dokter kandungan (%)	12,71	18,35	22	25,34	-
2	Dokter umum (%)	-	-	3	2,20	-
3	Bidan (%)	76,9	76,4	57	61,23	66,7
4	Tenaga kesehatan lainnya/famili (%)	2,94	1,92	2	10,28	-
5	Dukun beranak/paraji (%)	7,45	3,34	16	0,95	-

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 2.42 dapat dilihat bahwa cakupan persalinan ditolong oleh bidan semakin meningkat. Membaiknya kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang telah menempatkan bidan-bidan yang berstatus PNS

maupun PTT di hampir seluruh desa di Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian juga halnya kelahiran yang ditolong oleh dokter, persentasenya juga semakin meningkat.

#### 2.3.1.2.3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Program imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan terjangkitnya penyakit tertentu, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti tuberkulosis, difteri, tetanus, hepatitis B, polio dan campak. Imunisasi melindungi anak-anak dari beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100 persen desa/kelurahan.

**Tabel 2.43**  
**Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2014 - 2018**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Desa/Kel UCI (Tahun)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Parmonangan	14	6	11	13	13	7
2	Adiankotting	16	13	14	15	15	13
3	Sipoholon	14	12	12	11	11	13
4	Tarutung	31	29	13	25	25	25
5	Siatas Barita	12	10	9	10	10	12
6	Pahae Julu	19	11	16	18	18	17
7	Pahae Jae	13	10	11	11	11	10
8	Purbatua	11	4	8	11	11	9
9	Simangumban	8	5	6	8	8	7
10	Pangaribuan	26	22	23	25	25	21
11	Garoga	13	6	5	8	8	10
12	Sipahutar	25	18	20	22	22	23
13	Siborongborong	21	21	21	20	20	21
14	Pagaran	14	10	11	12	12	11
15	Muara	15	12	12	15	15	13
	<b>Kabupaten</b>	<b>252</b>	<b>189</b>	<b>192</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>212</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019

Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi dimana 80% dari jumlah bayi telah mendapatkan imunisasi secara lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Pelayanan imunisasi bayi mencakup vaksinasi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis campak yang dilakukan melalui pelayanan rutin di posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sesuai data pada tabel tersebut cakupan desa/kelurahan UCI tahun 2018 mencapai 212 desa/kelurahan atau sekitar 84,12 persen sehingga sesuai target nasional pada tahun 2019 diharapkan cakupan UCI akan mencapai 91 persen.

#### 2.3.1.2.4. Pemberian ASI

Faktor yang mempengaruhi Angka Kematian Bayi selain kesehatan ibu, juga masa persalinan, pemberian ASI dan makanan tambahan serta pemberian imunisasi. Oleh karena itu, lamanya masa pemberian ASI dan lengkapnya pemberian imunisasi perlu diperhatikan. Pemberian ASI eksklusif juga akan mempengaruhi perkembangan dan tingkat inteligensi anak kelak.

**Tabel 2.44**  
**Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif (Usia 0-6 bulan) Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah bayi (lahir hidup)	5.264	5.222	5.775	5.762	6.996
2	Jumlah bayi yang diberi asi eksklusif	1.585	820	780	820	961

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel, jumlah bayi yang diberi asi eksklusif rata-rata hanya sekitar 17,46 persen. Rendahnya nilai ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari seluruh pihak, baik keluarga maupun petugas kesehatan di tingkat poskesdes, puskesmas pembantu hingga puskesmas dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan serta pendampingan bagi ibu hamil akan pentingnya asi eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan.

#### 2.3.1.2.5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu *fundamental right* yang menjadi tanggung jawab bersama oleh negara dan masyarakat itu sendiri, tetapi yang terjadi justru akses kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan masih sangat rendah. Permasalahan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah, terlebih lagi semakin meningkatnya biaya kesehatan akan menjauhkan pelayanan kesehatan utamanya bagi masyarakat miskin. Hal ini terkait dengan belum berjalannya sistem jaminan sosial terutama bidang kesehatan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sangat penting memberikan porsi yang cukup besar bagi jaminan kesehatan masyarakat.

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu upaya dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat kurang mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Melalui jaminan kesehatan masyarakat diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita serta menurunkan angka kelahiran disamping dapat terlayannya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat kurang mampu pada umumnya.

**Tabel 2.45**  
**Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jaminan Kesehatan Nasional	147.738	155.855	179.134	202.173	193.211
	1.1 Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	107.021	106.927	113.825	114.101	113.920
	1.2. PBI APBD Provinsi	5.209	4.451	5.677	7.346	7.073
	1.3 Pekerja Penerima Upah (PPU)	22.010	25.862	31.864	31.864	27.959
	1.4 Pekerja Bukan Penerima Upah/Mandiri	33.375	36.829	38.167	37.270	64.104
	1.5 Bukan Pekerja	9.213	11.141	11.375	11.375	5.979
2	Jamkesda	4.998	9.996	14.999	19.999	26.966
	Jumlah	152.738	180.855	194.133	222.172	222.799
	Cakupan persentase (%)	52,51	61,64	65,67	74,61	74,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

#### **2.3.1.2.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan**

Standar Pelayanan Minimal sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah merupakan mandat yang harus dilakukan daerah. Pelaksanaan SPM ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

**Tabel 2.46**  
**Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 - 2018**

No	Indikator SPM	Capaian SPM	
		2017	2018
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di Fasilitas Pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan Swasta	6.030	5.634
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	5.473	4.900
3	Jumlah Bayi Baru Lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	5.762	4.904
4	Jumlah Balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	27.941	20.109
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 & 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan disatuan pendidikan dasar	7.587	8.008
6	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	325	13.990
7	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	175	22.341
8	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	7.644	9.198
9	Jumlah penyandang Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	815	1.257

No	Indikator SPM	Capaian SPM	
		2017	2018
10	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	367	482
11	Jumlah orang yang mendapat pelayanan Tuberculosis sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	470	672
12	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara, 2019

#### **2.3.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya keberhasilan pembangunan, dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum dan penyediaan irigasi merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara langsung oleh masyarakat.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik yang diperlukan sebagai jaminan pelayanan sektor publik dan sektor privat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur selain fasilitasi juga dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa, sehingga infrastruktur merupakan unsur penting dalam mendukung terciptanya keberhasilan pembangunan. Infrastruktur juga merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, pembukaan daerah terisolasi serta mempersempit kesenjangan antar wilayah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, saluran irigasi dan jaringan air minum yang dikelola secara baik dengan memperhatikan perencanaan tata ruang akan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kerangka utama pembangunan infrastruktur Kabupaten Tapanuli Utara dalam 5 tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi disamping juga memperhatikan infrastruktur perkotaan. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar bertujuan untuk pemerataan pembangunan di kabupaten yang mencakup sejumlah hal, salah satunya adalah hunian layak. Sementara itu, pembangunan infrastruktur ekonomi akan berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, khususnya pada bidang transportasi.

Pembangunan infrastruktur perkotaan akan berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana penunjang di perkotaan, seperti pipa air minum dan sanitasi serta



pengolahan dan pengelolaan limbah. Keseluruhan dari pembangunan infrastruktur ini akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, investasi serta sosial budaya dengan harapan kehadiran infrastruktur ini akan memudahkan aliran arus barang dari dan ke dalam daerah. Selain itu juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagai salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toba dan sekitarnya, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara juga perlu meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur yang ada saat ini, seperti akses masuk dan keluar menuju lokasi KSPN serta akses penghubung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Semangke menuju Pelabuhan Kuala Tanjung. Akses yang dapat dipergunakan adalah dengan pembukaan ruas jalan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara (batas Tapanuli Utara) - Kabupaten Labuhan Batu Utara. Akses ini juga diharapkan dapat menghubungkan wilayah Lintas Timur Sumatera dengan Lintas Barat Sumatera dan mempermudah transportasi pengangkutan barang dan hasil-hasil produksi pertanian dari daerah Kabupaten Tapanuli Utara ke kabupaten lain di sekitarnya.

Akses lain yang menjadi prioritas adalah ruas jalan nasional di Kecamatan Siborongborong. Saat ini kondisi eksisting ruas jalan tersebut kurang maksimal dalam melayani volume Lintas Harian Rata-rata (LHR) sehingga pemerintah daerah merencanakan pembangunan jalan lingkaran baru dengan harapan pembangunan jalan lingkaran ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera telah mengamanatkan Pembangunan Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar - Parapat - Tarutung - Sibolga yang merupakan bagian ruas rencana jalan tol Trans Sumatera. Keberadaan ruas jalan tol tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara dan perlu didukung dengan memfasilitasi pembebasan lahan untuk trase jalan tol dimaksud. Diharapkan dengan pembangunan jalan tol akan memaksimalkan peran Bandara Internasional Silangit dan terwujudnya konektivitas wisata Danau Toba di Kabupaten Tapanuli Utara dengan wisata bahari yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Selain itu, keberadaan ruas jalan tol melalui Muara - Tarutung - Sibolga turut berperan terhadap rencana pengembangan Universitas Negeri yang saat ini sedang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten

Tapanuli Utara melalui pengembangan status Institut Agama Kristen Negeri Tarutung menjadi Universitas Negeri.

#### 2.3.1.3.1. Kondisi Jalan

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten serta kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat serta orang/penumpang. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status dan kelas.

Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Total panjang jalan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2018 lebih kurang 1.550,172 Km, yang terdiri dari jalan negara sepanjang 138,853 Km, jalan provinsi sepanjang 199,300 Km dan jalan kabupaten sepanjang 1.074,009 Km dan jalan desa sepanjang 138,010 Km. Perkembangan panjang jalan dan tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014 - 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.47**  
**Perkembangan Panjang Jalan dan Tingkat Kemantapan Jalan**  
**di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Panjang Jalan (Km)	1.686,691	1.524,272	1.524,272	1.524,272	1.550,172
	a. Jalan Negara	152,218	138,853	138,853	138,853	199,300
	b. Jalan Provinsi	174,400	173,400	173,400	173,400	199,300
	c. Jalan Kabupaten	1.222,009	1.222,009	1.222,009	1.074,009	1.074,009
	d. Jalan Desa	138,01	138,01	138,01	138,01	138,01
2.	Kondisi Jalan Kabupaten (Km)					
	a. Kondisi Baik	330,087	338,487	367,506	533,323	547,249
	b. Kondisi Sedang Rusak	405,902	422,050	405,686	149,085	159,536
	c. Kondisi Rusak Ringan	343,280	375,972	359,760	344,655	249,208
	d. Kondisi Rusak Berat	142,740	85,500	89,057	46,946	118,016
3.	Panjang jalan yang ditingkatkan	89,436	64,255	95,871	51,152	83,145
4.	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	1,729	2,724	1,011	0,958	0,829

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
5.	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	22,521	13,168	10,134	5,084	23,538
6.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min. 1,5 m)	20	25	30	33	35
7.	Persentase drainase kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	25	30	35	38	45
8.	Tersedianya Database Jalan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Jumlah alat berat dalam kondisi baik	2	10	11	11	13

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik terus meningkat dan pada tahun 2018 sudah mencapai 50,95 persen. Adanya perbedaan panjang jalan disesuaikan berdasarkan hasil updating data base jalan tahun 2016. Kondisi jalan baik akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah (kecamatan dan desa) karena pembangunan wilayah akan terhambat jika tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai.

**Tabel 2.48**  
**Kondisi Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 - 2019**

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2017				2018				2019			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	002	TARUTUNG – HAREAN	2,553	2,5	97,92	0,053	2,08	2,273	89,03	0,05	1,96	2,273	89,03	0,05	1,96
2	003	AEK SIANSIMUN - SIANDORANDOR – SIMANINGGIR	13,3	7,41	55,71	1	7,52	6,65	50	0,7	5,26	6,65	50	0,7	5,26
3	004	TARUTUNG - SIMP. SEMINARIUM	5,5	3,672	66,76	0,577	10,49	2,329	42,35	0,221	4,02	2,329	42,35	0,221	4,02
4	015	TUSAM - SIMUAK	11,31	7,457	86,25	0,451	5,22	7,21	63,75	1	8,84	7,21	63,75	1	8,84
5	036	HUTA BAGINDA - SAIT NIHUTA	1,605	6,544	23,53	3,872	13,92	1,105	68,85	0	0	1,105	68,85	0	0
6	177	SAIT NIHUTA - HUTABARAT	1,516	8,934	86,11	1,441	13,89	0,866	57,12	0	0	0,866	57,12	0	0
7	178	SAIT NIHUTA - PARBUBUPEA	3,9	12,948	54,55	2,416	10,18	3,33	85,38	0	0	3,33	85,38	0	0
8	198	SIMP. JL NEG - PANGANAN LOMBU	1,689	0,876	14,14	1,449	23,38	1,689	100	0	0	1,689	100	0	0
9	273	SP JLN NEGARA - PANAHRAN	1,956	4,5	100,00	0	0,00	1,5	76,69	0,4	20,45	1,5	76,69	0,4	20,45
10	333	HUTA SUMUR - HAPOLTAHAN	1,266	7,442	82,11	0	0,00	1,066	84,2	0	0	1,066	84,2	0	0
11	343	SP. SOSUNGGULON – SOSUNGGULON	1,388	4,978	100,00	0	0,00	0,4	28,82	0,35	25,22	0,4	28,82	0,35	25,22
12	344	SP. JL NEGARA - LBN.SITUMORANG	1,279	3,886	97,30	0	0,00	0,35	27,37	0	0	0,35	27,37	0	0
13	353	SIARANG-ARANG - PARTALI JULU	3,972	8,147	59,24	0	0,00	2,3	57,91	0,1	2,52	2,3	57,91	0,1	2,52
14	418	KELILING PASAR TARUTUNG	1,506	9,557	84,50	0,877	7,75	1,352	89,77	0,132	8,76	1,352	89,77	0,132	8,76
15	419	SIARANGARANG - AEK NASIA	2,275	5,724	79,44	0	0,00	1,746	76,75	0,204	8,97	1,746	76,75	0,204	8,97
16	420	PERUM BARAT INDAH - PAGAR SINONDI	7,641	9,622	40,99	4,559	19,42	0	0	3,309	43,31	0	0	3,309	43,31
17	421	DALAM KOTA TARUTUNG	7,829	6,354	59,02	1,071	9,95	3,354	42,84	1,113	14,22	3,354	42,84	1,113	14,22
18	218	BANUAREA - PANSURNAPITU	0,631	6,016	35,56	0	0,00	0	0	0,2	31,7	0	0	0,2	31,7
19	037	DALAM KOTA ADIANKOTING	0,2	2,003	54,44	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2017				2018				2019			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	058	PARSINGKAMAN - PARLOBULOBUAN	11,692	0,579	30,31	0	0,00	6,7	57,3	1,6	13,68	6,7	57,3	1,6	13,68
21	059	SITAREALAMAN - BANUAJI	7,499	2,081	19,69	0	0,00	6,8	90,68	0,2	2,67	6,8	90,68	0,2	2,67
22	060	LAPO GAMBIRI - PANCUR BATU	10,569	4,538	62,67	0	0,00	5,369	50,8	0,4	3,78	5,369	50,8	0,4	3,78
23	214	SIDARI - SITORGOM	2,033	0	0,00	10,334	53,97	1,3	63,94	0,733	36,06	1,3	63,94	0,733	36,06
24	268	PAGARAN PISANG - SOPO SABA	2,587	3,505	25,52	1,9	13,83	2,587	100	0	0	2,587	100	0	0
25	269	ADIANKOTING - AEK MATIO JAE-JULU	2,679	2,725	62,23	0,852	19,46	1,329	49,61	0,9	33,59	1,329	49,61	0,9	33,59
26	352	SP. MUNSON LYMAN - MUNSON LYMAN	0,405	1,019	36,03	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	396	PANCUR BATU - LOBU HAMINJON	16,2	0,673	53,50	0	0,00	0,4	2,47	13	80,25	0,4	2,47	13	80,25
28	397	SIANTAR NAIPOSPOS - LOBU HAMINJON - GOMBURAN (BTS TAPTENG)	8,176	0,721	44,92	0	0,00	0	0	2,076	25,39	0	0	2,076	25,39
29	398	SP. PAGARAN LAMBUNG II - PAGARAN LAMBUNG II - SIDARI	2,977	0	0,00	0	0,00	2,977	100	0	0	2,977	100	0	0
30	405	SIMATE-MATE - AEK GODANG	5,1	9,966	85,42	0,805	6,90	0,2	3,92	0,3	5,88	0,2	3,92	0,3	5,88
31	006	SIPOHOLON (SIMENARIUM) - RURA JULU	27,814	1,8	32,14		0,00	6,3	22,65	4,9	17,62	6,3	22,65	4,9	17,62
32	007	SILANGKITANG - HUTA TINGGI	10,375	0	0,00	0	0,00	8,575	82,65	1	9,64	8,575	82,65	1	9,64
33	106	AEK RANGAT - SANDARAN - HUTATINGGI	11,298	7,7	72,70	0,561	5,30	6,798	60,17	2,6	23,01	6,798	60,17	2,6	23,01
34	179	SP. PASAR SIRONGIT - SEMINARIUM	1,917	7,128	60,96	0,53	4,53	1,917	100	0	0	1,917	100	0	0
35	262	DALAM KOTA SIPOHOLON	0,853	5,397	71,97	0,221	2,95	0,15	17,58	0,456	53,46	0,15	17,58	0,456	53,46
36	270	SILANGKITANG - CEKDAM	1,708	5,287	50,02	0	0,00	0,958	56,09	0	0	0,958	56,09	0	0
37	271	SILANGKITANG - SIBADAK I / II	4,288	2,788	29,87	1,823	19,53	1,65	38,48	1	23,32	1,65	38,48	1	23,32

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2017				2018				2019			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	272	HUTA BARU - LBN HARIARA - PANGALOAN	1,3	3,718	23,17	7,974	49,69	0,6	46,15	0	0	0,6	46,15	0	0
39	364	SP. SILANGKITANG - PERUMNAS - PAGAR BATU	1,139	7,626	67,50	0,814	7,20	1,139	100	0	0	1,139	100	0	0
40	365	TAPIAN NAULI - LBN. TONGA-TONGA	8,484	2,182	100,00	0	0,00	1,6	18,86	1,184	13,96	1,6	18,86	1,184	13,96
41	366	SP. PAGAR BATU - DOLOK IMUN	3,412	0	0,00	3,2	100,00	0,8	23,45	0,4	11,72	0,8	23,45	0,4	11,72
42	367	PANGGABEAN - LBN. TONGA-TONGA	4,421	7,454	42,73	3,593	20,59	1,4	31,67	0,2	4,52	1,4	31,67	0,2	4,52
43	012	SIBORONG BORONG - BUTAR	4,978	8,922	63,73	0,347	2,48	4,878	97,99	0	0	4,878	97,99	0	0
44	013	SP.BUTAR - SIAMBOLAS	3,994	1,639	42,22	1,275	32,84	3,795	95,02	0,091	2,28	3,795	95,02	0,091	2,28
45	016	PARPANGIRAN - LUMBAN HOLBUNG	7,205	2,344	44,51	1,056	20,05	3,5	48,58	0,3	4,16	3,5	48,58	0,3	4,16
46	035	LOBU SIREGAR - SANGKAE TORUAN	1,258	4,814	55,60	0,798	9,22	0,8	63,59	0	0	0,8	63,59	0	0
47	038	SILANGIT - SIANJUR	11,667	5,495	91,40	0,517	8,60	5,067	43,43	2,1	18	5,067	43,43	2,1	18
48	039	SP. PACUAN - SILAITLAIT - BTS HUMBAHAS	5,6	6,885	55,36	1,798	14,46	1,56	27,86	0,4	7,14	1,56	27,86	0,4	7,14
49	047	BAHAL BATU I - ONAN RUNGGU II	10,592	3,509	51,93	1,189	17,60	1,9	17,94	3,2	30,21	1,9	17,94	3,2	30,21
50	124	BUTAR – SITAMPURUNG	5,266	3,076	47,76	3,194	49,60	2,065	39,21	0,675	12,82	2,065	39,21	0,675	12,82
51	127	PEA LANGGE - BATU GONTING	8,659	4,695	85,36	0	0,00	6,109	70,55	0,15	1,73	6,109	70,55	0,15	1,73
52	221	SIBORONG BORONG - SIMAROMPU-OMPU - LB.SIREGAR	6,007	1,173	46,46	0	0,00	2,9	48,28	0,7	11,65	2,9	48,28	0,7	11,65
53	234	DALAM KOTA SIBORONGBORONG	2,13	6,723	47,87	0,889	6,33	2,13	100	0	0	2,13	100	0	0
54	235	SINUR PETERNAKAN - KTR CAMAT	3,112	0,764	17,93	1,989	46,68	2,162	69,47	0	0	2,162	69,47	0	0
55	315	SIMP. JL. NEGARA – SILALAH	1,632	4,183	82,59	0,245	4,84	1,1	67,4	0	0	1,1	67,4	0	0
56	316	SIGALINGGING - SIGUMBANG	3,117	0,304	24,24	0	0,00	1	32,08	0,6	19,25	1	32,08	0,6	19,25
57	317	SINUR PETERNAKAN - HARIARA	6,003	0,108	7,12	0	0,00	2,403	40,03	0,5	8,33	2,403	40,03	0,5	8,33

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2017				2018				2019			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	336	BAHAL BATU I - BAHAL BATU III	0,755	0,486	12,46	2,114	54,21	0,455	60,26	0	0	0,455	60,26	0	0
59	348	HOPONG - BUTAR	5,173	1,421	74,13	0,496	25,87	1,5	29	0,7	13,53	1,5	29	0,7	13,53
60	349	SITAMPURUNG - SIBORONG-BORONG	5,266	1,524	68,28	0,172	7,71	2,05	38,93	0,311	5,91	2,05	38,93	0,311	5,91
61	373	SP. AEK MAS - AEK MAS - BATU GONTING	7,032	0	0,00	0	0,00	2,532	36,01	0,4	5,69	2,532	36,01	0,4	5,69
62	375	SP. SIHATANDOHAN - SIHATANDOHAN - POKKI	6,715	4,821	62,68	0	0,00	2,415	35,96	2,1	31,27	2,415	35,96	2,1	31,27
63	370	SP.PURBA SINOMBA - PURBA SINOMBA - NAGA SARIBU	15,548	1,3	19,12	5,5	80,88	5	32,16	3,048	19,6	5	32,16	3,048	19,6
64	008	HUTA TINGGI - PARMONANGAN	23,738	1,689	100,00	0	0,00	17,438	73,46	0	0	17,438	73,46	0	0
65	009	PARMONANGAN - HUTA JULU	6,197	6,761	60,54	0	0,00	1,9	30,66	0	0	1,9	30,66	0	0
66	010	RANGGITGIT - SIMARIGUNG/BTS HUMBAHAS	4,5	2,198	72,09	0	0,00	0	0	4,5	100	0	0	4,5	100
67	011	HUTA TINGGI - BUTAR	9,063	0,856	43,50	1,1	55,89	4,1	45,24	1,3	14,34	4,1	45,24	1,3	14,34
68	107	SP.SISORDAK - SISORDAK	2,182	3,708	49,16	0,389	5,16	2,182	100	0	0	2,182	100	0	0
69	117	SP.HARIARA - RAPPA	14	1,737	85,44	0	0,00	0,452	3,23	0,06	0,43	0,452	3,23	0,06	0,43
70	180	PARRATUSAN - PARMONANGAN	2,232	0,631	100,00	0	0,00	0,732	32,8	0,9	40,32	0,732	32,8	0,9	40,32
71	181	SP TUGU - PARRATUSAN	3,1	1,187	83,59	0,233	16,41	0	0	0	0	0	0	0	0
72	182	HUTA TINGGI - SIMAMORA	7,692	4,859	80,89	0,602	10,02	3,542	46,05	1,2	15,6	3,542	46,05	1,2	15,6
73	368	AEK RAJA - HAU GANJANG - LOBU SUNUT	6,623	2,13	100,00	0	0,00	3,936	59,43	0,113	1,71	3,936	59,43	0,113	1,71
74	369	SIMARGALUNG - LOBU SUNUT	1,433	3,112	100,00	0	0,00	0,627	43,75	0,179	12,49	0,627	43,75	0,179	12,49
75	371	SP. HORISAN - SAMPINUR	7,575	3,5	43,75	3,5	43,75	4,622	61,02	1,699	22,43	4,622	61,02	1,699	22,43
76	372	AEK RAJA - HORISAN	3,625	3,615	74,09	0,953	19,53	0,582	16,06	2,681	73,96	0,582	16,06	2,681	73,96



No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2017				2018				2019			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	374	RAPPA - BATU ARIMO - BTS.TAPTENG	11,306	0,685	15,15	2,107	46,62	5,406	47,82	0,3	2,65	5,406	47,82	0,3	2,65
78	410	RAPPA - TUMUS - HAJORAN	12,458	0	0,00	0,853	73,98	4,613	37,03	0,845	6,78	4,613	37,03	0,845	6,78
79	014	BUTAR - SILABAN - BTS HUMBANG HAS	13,753	2,5	100,00	0	0,00	13	94,52	0	0	13	94,52	0	0
80	244	SIPULTAK - SIMAMORA - HASIBUAN	4,879	0,714	46,30	0	0,00	2,799	57,37	0,9	18,45	2,799	57,37	0,9	18,45
81	318	PARHORBOAN - SIBARAGAS	3,319	0	0,00	0	0,00	0,415	12,5	0	0	0,415	12,5	0	0
82	319	LBN.INAINA - LUBIS	1,423	0,275	10,63	0,661	25,55	0,2	14,05	0,566	39,78	0,2	14,05	0,566	39,78
83	376	SIMAMORA - HASIBUAN - SIBARAGAS	3,868	0	0,00	0,584	21,80	1,088	28,13	2,065	53,39	1,088	28,13	2,065	53,39
84	377	HUTABULU - SIMARANTAJAU	2,827	0,567	33,20	0	0,00	1,552	54,9	0,875	30,95	1,552	54,9	0,875	30,95
85	378	PEALINTA - SIMARANTAJAU	1,313	0,82	19,12	1,197	27,92	0,5	38,08	0	0	0,5	38,08	0	0
86	379	SP. SIHITE - LUMBAN INA-INA - BATU HARANG	8,908	0	0,00	0,3	23,08	0,28	3,14	0	0	0,28	3,14	0	0
87	411	SIPULTAK - SIPULTAK DOLOK	2,355	1,874	95,81	0	0,00	1,7	72,19	0,2	8,49	1,7	72,19	0,2	8,49
88	424	BOLAK PASARAN - SIPULTAK DOLOK	1,609	0,687	100,00	0	0,00	1,031	64,08	0,269	16,72	1,031	64,08	0,269	16,72
89	425	SP. SIHITE - LUMBAN MOTUNG	2,558	0,661	47,21	0,739	52,79	1,6	62,55	0,758	29,63	1,6	62,55	0,758	29,63
90	426	HUTA BULU - HUTA PASAR	2,553	0,446	100,00	0	0,00	1,5	58,75	0,186	7,29	1,5	58,75	0,186	7,29
91	427	SIBARAGAS - PEA TIKKO	2	0,632	100,00	0	0,00	1,785	89,25	0	0	1,785	89,25	0	0
92	428	LBN.INAINA - SIMARGALUNG	2,647	2,351	29,42	2,222	27,80	0,547	20,66	0,2	7,56	0,547	20,66	0,2	7,56
93	433	UNTE MUNGKUR - PANDAN	2,364	7,188	95,52	0	0,00	1,864	78,85	0,5	21,15	1,864	78,85	0,5	21,15
94	044	SP III MUARA - HUTAGINJANG	3,3	2,309	44,55	0	0,00	3,1	93,94	0,2	6,06	3,1	93,94	0,2	6,06
95	109	SITANGGOR - MEAT (BTS. TOBASA)	3,2	0,25	15,32	0,505	30,94	0	0	2	62,5	0	0	2	62,5
96	285	DALAM KOTA MUARA	0,446	1,996	64,04	0	0,00	0,446	100	0	0	0,446	100	0	0

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2017				2018				2019			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	434	SILALI TORUAN - SIDEMPULA	1,046	2,735	45,56	0	0,00	0,946	90,44	0	0	0,946	90,44	0	0
98	308	UNTE MUNGKUR - BATU BINUMBUN - SIMATUPANG	5,183	1,063	32,03	2,1	63,27	5,183	100	0	0	5,183	100	0	0
99	399	SP. HUTAGINJANG - GANTOLE HUTAGINJANG	1,77	0,491	34,50	0,179	12,58	1,5	84,75	0,27	15,25	1,5	84,75	0,27	15,25
100	400	SP.ARITONANG - GANTOLE ARITONANG	1,454	2,104	100,00	0	0,00	1	68,78	0	0	1	68,78	0	0
101	401	SP. SIMATUPANG - ARITONANG	2,726	5,204	42,10	1,577	12,76	2	73,37	0	0	2	73,37	0	0
102	402	HUTAGINJANG - SITANGGOR	5,263	0	0,00	1,918	60,72	2,2	41,8	1,263	24	2,2	41,8	1,263	24
103	403	MUARA - HUTA NAGODANG	2,243	0,688	54,34	0,325	25,67	0,9	40,12	0	0	0,9	40,12	0	0
104	417	SIBANDANG - SAMPURAN - SIBANDANG	11,858	0	0,00	0,657	87,02	9,658	81,45	0	0	9,658	81,45	0	0
105	409	SP.SILANDO - SILANDO	4,665	0,374	26,95	0,471	33,93	0,8	17,15	1,863	39,94	0,8	17,15	1,863	39,94
106	432	BARIBA NI AEK - SILOMBU - SITINDAK TAPIAN NAULI	3,139	0,687	53,71	0,306	23,92	0,7	22,3	0,391	12,46	0,7	22,3	0,391	12,46
107	018	SIMORANGKIR - SIMANAMPANG	10,765	1,7	67,95	0,67	26,78	4,65	43,2	1,765	16,4	4,65	43,2	1,765	16,4
108	149	HAREAN - PANSURNAPITU	5,5	2,206	42,64	1,1	21,26	5,35	97,27	0,1	1,82	5,35	97,27	0,1	1,82
109	332	SP LOBUHOLE - LOBUHOLE	3,159	1,344	25,52	1,017	19,31	1,25	39,57	1,909	60,43	1,25	39,57	1,909	60,43
110	346	SIMORANGKIR - TALPE	2,502	3,87	30,93	0,662	5,29	1,308	52,28	0,292	11,67	1,308	52,28	0,292	11,67
111	380	SALIB KASIH - PEA TOLONG	3,568	0,756	12,68	0,455	7,63	1,533	42,97	2,035	57,03	1,533	42,97	2,035	57,03
112	381	SP. PUSTU - HUTA NAMORA	3,218	0	0,00	0,405	100,00	0,318	9,88	2,2	68,37	0,318	9,88	2,2	68,37
113	382	SIMANAMPANG - GONTING PEGE	3,681	0,136	3,42	1,972	49,65	0,681	18,5	1,7	46,18	0,681	18,5	1,7	46,18
114	429	HUTA NAMAMORA - SIARANGARANG	6,401	1,477	50,90	1,425	49,10	1,1	17,18	3,984	62,24	1,1	17,18	3,984	62,24
115	005	SIPAHUTAR - LUMBAN RIHIT	8,646	0	0,00	1,639	81,06	2	23,13	3,346	38,7	2	23,13	3,346	38,7

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2017				2018				2019			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
116	017	SIPAHUTAR - DOLOK NAGODANG - PARLOMBUAN - NAGA SARIBU (BTS.TOBASA)	23,473	5,023	56,20	0	0,00	7,2	30,67	11,423	48,66	7,2	30,67	11,423	48,66
117	027	SP.SIGALA-GALA - JANJI MARIA (BTS TOBASA)	19,146	0,924	21,61	0,536	12,54	0	0	14,496	75,71	0	0	14,496	75,71
118	123	ONAN TUKKA - PANJAITAN	3,882	0,403	24,38	1,25	75,62	1,1	28,34	2,05	52,81	1,1	28,34	2,05	52,81
119	139	SIPAHUTAR - SIMARHOMPA	6,012	2,511	45,19	2,679	48,21	1,4	23,29	1	16,63	1,4	23,29	1	16,63
120	144	HUTA GURGUR - SITAPONGAN	6,757	3,66	83,54	0,378	8,63	5,357	79,28	0,4	5,92	5,357	79,28	0,4	5,92
121	206	ONAN TUKKA - SIMANAMPANG	7,543	1,416	42,18	0,375	11,17	2,27	30,09	3,33	44,15	2,27	30,09	3,33	44,15
122	243	ONAN RUNGGU - LBN. RANG - LBN. LOBU - TAPIAN NAULI	8	0	0,00	0,4	16,00	2,1	26,25	3,65	45,63	2,1	26,25	3,65	45,63
123	247	DALAM KOTA SIPAHUTAR	2,5	1,139	100,00	0	0,00	2,45	98	0	0	2,45	98	0	0
124	300	ONAN RUNGGU - SILIMABAHAL – HUTAGURGUR	7,992	1,238	14,59	3,672	43,28	4,462	55,83	0,9	11,26	4,462	55,83	0,9	11,26
125	354	LUMBAN JULU - SITAPONGAN	2,902	1,288	37,75		0,00	1,2	41,35	1,2	41,35	1,2	41,35	1,2	41,35
126	355	SP. LUMBAN SIANTAR - LUMBAN SIANTAR	2,022	1,16	26,24	1,663	37,62	0,7	34,62	1,3	64,29	0,7	34,62	1,3	64,29
127	356	SIPARENDEAN - HUTA MAMUNGKA - ADIAN NALAMBOK	8,938	4,049	61,14	0,798	12,05	2,088	23,36	4,85	54,26	2,088	23,36	4,85	54,26
128	357	HUTA MAMUKKA - BONAN DOLOK – SIALOGO	4,276	0,627	43,75	0,179	12,49	0,45	10,52	1,6	37,42	0,45	10,52	1,6	37,42
129	358	AEK NAULI III - LUMBAN HARIARA	1,653	5,107	32,85	4	25,73	0	0	1,153	69,75	0	0	1,153	69,75
130	359	LUMBAN JULU - SANGKAR NI HUTA	5,557	6,321	83,45	0	0,00	1,946	35,02	3,011	54,18	1,946	35,02	3,011	54,18
131	360	SIPAHUTAR - LUMBAN GUKGUK	4,381	2,77	76,41	0,493	13,60	1,7	38,8	2,481	56,63	1,7	38,8	2,481	56,63
132	361	SP. LUMBAN BIRU - LUMBAN BIRU	3,357	5,062	71,99	0,704	10,01	1,007	30	1,3	38,73	1,007	30	1,3	38,73
133	363	SP. INGUL – INGUL	2,5	5,406	47,82	0,3	2,65	0	0	1,1	44	0	0	1,1	44

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2017				2018				2019			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
134	404	HUTA GURGUR - AMBAR HODA - SOSOR TAMBISU	8,152	5,215	77,66	0	0,00	1,768	21,69	2,113	25,92	1,768	21,69	2,113	25,92
135	422	LBN. BIRU - PANJAITAN	2,203	3,6	93,07	0	0,00	0,9	40,85	0	0	0,9	40,85	0	0
136	423	LUMBAN SILITONGA - PANJAITAN	2,149	1,86	65,79	0,404	14,29	0	0	1,799	83,71	0	0	1,799	83,71
137	019	SIBINGKE LOBUGOTI - SOPORARU - PEA NORNOR	16,916	0,568	43,26	0,287	21,86	7	41,38	2,092	12,37	7	41,38	2,092	12,37
138	022	ONAN SABTU - SIBUDIL	10,569	6,834	76,72	0,928	10,42	1,405	13,29	1,203	11,38	1,405	13,29	1,203	11,38
139	147	RAHUT BOSI - LOBU GALA	6,44	2,248	63,00	0	0,00	1,9	29,5	1,6	24,84	1,9	29,5	1,6	24,84
140	150	SP.LBN.SORMIN - LUMBAN SORMIN	2,525	1,92	59,66	1,298	40,34	1,2	47,52	0,925	36,63	1,2	47,52	0,925	36,63
141	199	PARSORMINAN - BATU NADUA	11,167	1,454	39,50	0	0,00	4,467	40	1,2	10,75	4,467	40	1,2	10,75
142	245	SIBINGKE - PARLOMBUAN	4,52	2,4	100,00	0	0,00	1,37	30,31	2	44,25	1,37	30,31	2	44,25
143	251	DALAM KOTA PANGARIBUAN	1,542	1,348	91,58	0,124	8,42	0	0	0	0	0	0	0	0
144	307	SIGOTOM - SIMANAMPANG	7,525	2,638	77,43	0	0,00	1,4	18,6	2,48	32,96	1,4	18,6	2,48	32,96
145	034	PADANG PARSADAAN - PARUREAN	2,828	4,26	42,19	1,624	16,09	0,5	17,68	1,1	38,9	0,5	17,68	1,1	38,9
146	383	PARSIBARUNGAN - SITONONG	2,4	0,435	19,75	1,32	59,95	0	0	2,2	91,67	0	0	2,2	91,67
147	384	HUTALAMA - PANSURNATOLU	1,472	2,967	17,20	0,581	3,37	0	0	0,672	45,65	0	0	0,672	45,65
148	385	LBN. SINAGA - SIBARABARA - PAROMBURAN	3,407	1,267	36,12	1,578	44,98	0,7	20,55	0,373	10,95	0,7	20,55	0,373	10,95
149	386	SIGOTOM - DUSUN SIMANJUNTAK-SIGOTOM	10,096	7,813	70,40	0,387	3,49	0,8	7,92	0	0	0,8	7,92	0	0
150	387	BATUHAPUR - PURBATUA	2,202	0,989	73,81	0	0,00	0,8	36,33	0,243	11,04	0,8	36,33	0,243	11,04
151	392	PARLOMBUAN - SIDAGAL	3,667	0,874	23,83	1,986	54,16	0,2	5,45	2,558	69,76	0,2	5,45	2,558	69,76
152	412	SAMPAGUL - DESA HUTARAJA - PARLOMBUAN	4,138	2,59	44,52	0	0,00	0,8	19,33	3,138	75,83	0,8	19,33	3,138	75,83
153	413	SP.SIOMAOMA - SIOMAOMA	3,323	0,898	36,68	0,147	6,00	3,223	96,99	0	0	3,223	96,99	0	0

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2017				2018				2019			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
154	414	SILANTOM TONGA - SILANTOM JAE	3,555	0,7	15,06	0	0,00	0,755	21,24	0	0	0,755	21,24	0	0
155	415	SP.KARMEL - KARMEL	1,726	5,3	32,72	0	0,00	0	0	0,8	46,35	0	0	0,8	46,35
156	416	SP.SIMANINGGIR - SIMANINGGIR	0,841	0	0,00	2,076	25,39	0,2	23,78	0	0	0,2	23,78	0	0
157	032	SIMP.BOLON - PEA OMBUN	13,735	0,977	32,82	2	67,18	0,4	2,91	4,3	31,31	0,4	2,91	4,3	31,31
158	033	RAMBA SIALA - TAPUS	4,379	1,77	100,00	0	0,00	1,722	39,32	0,957	21,85	1,722	39,32	0,957	21,85
159	092	GAROGA - PEA RAJA/BTS TAPSEL	9,334	0,215	14,79	0,579	39,82	5,984	64,11	1,5	16,07	5,984	64,11	1,5	16,07
160	093	GAROGA - RIANIATE	16,047	1,093	40,10	1,633	59,90	5,75	35,83	0,4	2,49	5,75	35,83	0,4	2,49
161	155	SP.PARINSORAN - PANGORIAN	14,044	2,401	45,62	2,311	43,91	4,35	30,97	3,25	23,14	4,35	30,97	3,25	23,14
162	246	DALAM KOTA GAROGA	1,153	0,729	32,50	0,314	14,00	1,033	89,59	0	0	1,033	89,59	0	0
163	326	LUMBAN PINASA - GONTING HOPO - PADANG SIANDOMANG	12,36	2,822	34,62	1,487	18,24	2,981	24,12	4,553	36,84	2,981	24,12	4,553	36,84
164	350	PARGAWAHAN - LOBU TONGA	12,511	1,8	35,29	0	0,00	0	0	7,655	61,19	0	0	7,655	61,19
165	388	SP.PARANGINAN - HADATARAN - PARSOSORAN	17,252	3,586	71,52	0,873	17,41	2,511	14,55	4,051	23,48	2,511	14,55	4,051	23,48
166	351	SP. BULU PAYUNG - SIBARGOT	5,963	3,429	69,67	0,534	10,85	0,324	5,43	1,376	23,08	0,324	5,43	1,376	23,08
167	389	SP. PARMANUHAN - PARMANUHAN	3,508	1,707	36,59	0	0,00	0,52	14,82	0,7	19,95	0,52	14,82	0,7	19,95
168	390	LUMBAN PINASA - PARSOSORAN - GOTTING SALAK	11,098	4,613	37,03	0,845	6,78	3,5	31,54	0	0	3,5	31,54	0	0
169	391	SP. TRANSMIGRASI -TRANSMIGRASI	1,34	2	84,93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
170	393	AEK TANGGA - HUTA GURGUR - PARINSORAN	5,817	2,784	67,28	0,861	20,81	1,45	24,93	0,592	10,18	1,45	24,93	0,592	10,18
171	394	PARINSORAN - LUMBAN BAGASAN	2,448	2,524	75,96	0	0,00	0,4	16,34	0,9	36,76	0,4	16,34	0,9	36,76
172	395	SIMP. III PEARAJA - BATU MAMAK	4,647	2,261	63,60	0	0,00	1,35	29,05	1,6	34,43	1,35	29,05	1,6	34,43
173	431	SP. SIMATANIARI - SIMATANIARI	1,563	1,388	80,42	0	0,00	0,242	15,48	0,4	25,59	0,242	15,48	0,4	25,59

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2017				2018				2019			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
174	026	SIMP.SIGOMPULON - SIGOMPULON	7,241	0	0,00	0	0,00	6,941	95,86	0,2	2,76	6,941	95,86	0,2	2,76
175	183	SP.SIBAGANDING - SIMATANIARI – HUTAJULU	6,8	4,518	38,10	2,459	20,74	2,9	42,65	1,4	20,59	2,9	42,65	1,4	20,59
176	201	SITAPEAN - PANTIS	3,049	1,484	98,54	0	0,00	1,4	45,92	0	0	1,4	45,92	0	0
177	202	SIGOMPULON - BONANI DOLOK	1,968	1,68	73,85	0,15	6,59	0	0	1	50,81	0	0	1	50,81
178	320	SP. JLN. NEGARA - PARIK MATIA	2,104	2,7	35,34	1,112	14,55	2,004	95,25	0	0	2,004	95,25	0	0
179	408	SIGOMPULON - SIMARDANGIANG	4,922	3,354	42,84	1,113	14,22	1,622	32,95	0	0	1,622	32,95	0	0
180	430	JONGGI - PANGONDOTAN	1,084	1,423	64,59	0,443	20,11	0,404	37,27	0	0	0,404	37,27	0	0
181	020	PANGALOAN - PAGARAN	3,679	0,299	13,91	1,007	46,86	1,839	49,99	0	0	1,839	49,99	0	0
182	021	PANGALOAN - LIANG SINGA	1,91	1,354	84,15	0,255	15,85	1,558	81,57	0,128	6,7	1,558	81,57	0,128	6,7
183	171	SARULLA - TORDOLOK NAULI - ONAN JORO	4,261	2,558	100,00	0	0,00	1,988	46,66	0,2	4,69	1,988	46,66	0,2	4,69
184	173	PARSAORAN NAINGGOLAN - PARSAORAN NAINGGOLAN	1,254	2,553	100,00	0	0,00	0,304	24,24	0	0	0,304	24,24	0	0
185	274	PARSAORAN NAINGGOLAN - SAMOSIR - HARIARA	0,687	2	100,00	0	0,00	0,387	56,33	0	0	0,387	56,33	0	0
186	288	DALAM KOTA SARULLA	0,632	1,066	40,27	0,841	31,77	0,632	100	0	0	0,632	100	0	0
187	110	SARULLA - SIPETANG	17,446	2,575	40,23	1,6	25,00	12,35	70,79	0,05	0,29	12,35	70,79	0,05	0,29
188	172	JANJI MARIA - BONANI DOLOK	5,065	0	0,00	0,205	18,91	1,9	37,51	1,7	33,56	1,9	37,51	1,7	33,56
189	220	JANJI ANGKOLA - PARSAORAN - JANJI NAULI	1,42	0	0,00	1,563	100,00	0,55	38,73	0,32	22,54	0,55	38,73	0,32	22,54

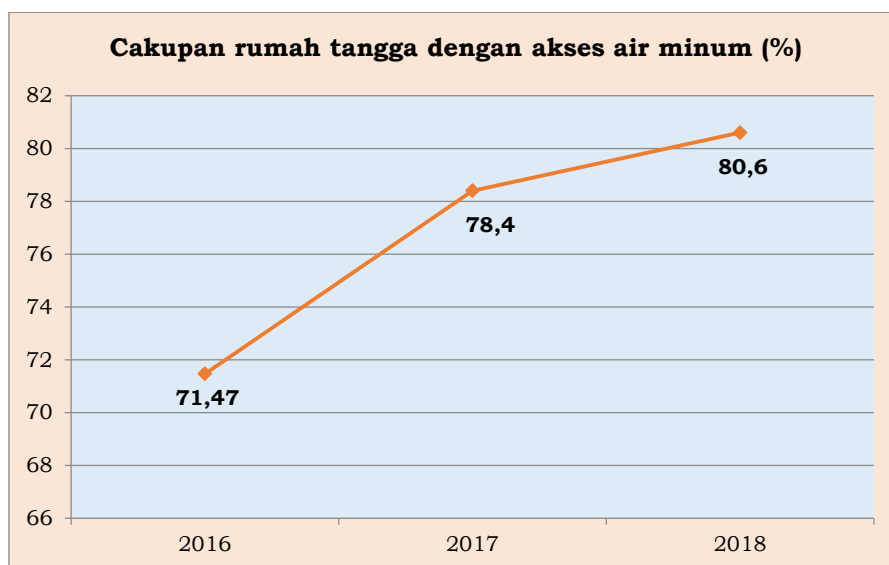
No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2017				2018				2019			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
190	279	JANJI ANGKOLA - AEK NALAS	1,4	1,012	32,24	0	0,00	0,3	21,43	0,056	4	0,3	21,43	0,056	4
191	143	SIMANGUMBAN - HOPONG	12,436	1,716	72,59	0,388	16,41	4,8	38,6	3,577	28,76	4,8	38,6	3,577	28,76
192	407	HUTA GURGUR - MUARA TOLANG - BATAS TAPSEL	5,014	0,344	32,89	0	0,00	1,465	29,22	3,191	63,64	1,465	29,22	3,191	63,64
193	436	SP. LOBI SIHIM - SOBU SIHIM	1,4	0	0	0	0,00	1,4	100	0	0	1,4	100	0	0
194	435	PANONGKALAN - SP. MUARA TOLANG	13	0	0	0	0,00	0	0	2,3	17,69	0	0	2,3	17,69
		<b>TOTAL</b>	<b>1074,009</b>	<b>517,433</b>	<b>48,18</b>	<b>157,515</b>	<b>15</b>	<b>533,323</b>	<b>49,65</b>	<b>149,085</b>	<b>21,02</b>	<b>547,249</b>	<b>50,95</b>	<b>159,536</b>	<b>21,02</b>



### 2.3.1.3.2. Air Minum

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, industri perdagangan, perkantoran maupun tempat-tempat umum lainnya.
- Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
- Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare dan sebagainya.
- Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi.
- Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.



Sumber : RAD AMPL Kab.Tapanuli Utara

**Gambar 2.12**  
**Kinerja Pelayanan Air Minum/Air Bersih Tahun 2016 - 2018**

Berdasarkan indikator target Universal Acces pada tahun 2019, status capaian kinerja pelayanan air minum/air bersih di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 80,60 persen rumah tangga yang telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan pedesaan yang terdiri dari:

- a. 53 persen rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perkotaan
- b. 17 persen rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-pedesaan.

#### 2.3.1.3.3. Irigasi

Seiring dengan wewenang urusan wajib pekerjaan umum, maka pembangunan di bidang pengairan sangat dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan di daerah ini, khususnya pengembangan lahan sawah yang didukung oleh pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan areal pertanian. Perkembangan jaringan irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014 - 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.49**  
**Perkembangan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	6.437,50	26.442,50	35.350,50	42.842,90	47.166,90
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	66,62	66,82	67,02	67,22	67,42
3.	Cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya (%)	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06
4.	Luas lahan budidaya (Ha)	12.970	15.905	15.905	15.905	15.905

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Sesuai data pada Tabel 2.49 dapat dilihat bahwa persentase seluruh sistem jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara yang berfungsi dalam kondisi baik semakin meningkat, yaitu pada tahun 2014 sebesar 66,62 persen dan pada tahun 2018 sebesar 67,42 persen. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, kondisi irigasi tahun 2018 sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.50.

**Tabel 2.50**  
**Status Daerah Irigasi Sesuai Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018**

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018			
				Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
1	Aek Sibatubatu	Pahae Jae	100	35	20	20	25
2	Aek Bongbongan	Pahae Jae	100	35	25	15	25
3	Aek Botik	Pahae Jae	140	25	25	25	25
4	Aek Nangali	Pahae Jae	51	30	25	20	25
5	Onan Joro	Pahae Jae	350	75	5	10	10
6	Saba Singkam	Pahae Jae	50	35	20	25	20
7	Simarpinggan	Pahae Jae	60	35	20	25	20
8	Liang Singa	Pahae Jae	40	30	25	20	25
9	Silangkitang	Pahae Jae	200	25	25	25	25
10	Sigurung-gurung	Pahae Jae	47	35	20	20	25
11	Aek Martindi	Pahae Julu	100	35	25	15	25
12	Aek Nambilung	Pahae Julu	130	30	25	20	25
13	Aek Simargalung	Pahae Julu	75	25	15	35	25
14	Onan Hasang	Pahae Julu	135	35	25	30	10
15	Sialang	Pahae Julu	110	35	20	25	20
16	Aek Sitapean	Pahae Julu	75	45	20	20	15
17	Aek Dahasan	Pahae Julu	60	25	20	25	30
18	Sawa Longat	Pahae Julu	40	30	15	25	30
19	Lobu Pining	Pahae Julu	30	25	20	25	30
20	Gonting Desa Janji Matogu	Pahae Julu	45	25	30	20	25
21	Sonak Sigompulon	Pahae Julu	65	35	15	20	30
22	Sitakkapan Lontung Dolok	Pahae Julu	75	20	25	20	35
23	Aek Siparpar	Pahae Julu	43	15	30	25	30
24	Simasom	Pahae Julu	43	30	20	30	20

NO.	NAMA DAERAH IIRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018			
				Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
25	Sipurik-purik	Purbatua	150	65	10	10	20
26	Aek Bottar	Purbatua	100	25	20	15	15
27	Aek Sulum	Purbatua	40	30	20	15	10
28	Pasadahon Paduahon	Purbatua	320	20	10	25	25
29	Pardamean	Simangumban	368	65	25	20	10
30	Sidua Mas	Simangumban	50	25	15	10	15
31	Simajambu	Simangumban	200	25	20	20	15
32	Simangumban	Simangumban	70	22	10	22	20
33	Aek Halian	Siatas Barita	60	32	20	15	10
34	Aek Marubun	Siatas Barita	80	25	25	15	15
35	Simarlai-lai	Siatas Barita	80	30	15	10	20
36	Simarombang	Siatas Barita	112	20	25	15	20
37	Sangkalan	Siatas Barita	57	27	20	15	15
38	Parmocian	Siatas Barita	50	29	20	15	10
39	Lumban Siagian	Siatas Barita	50	25	20	20	20
40	Panomburan	Siatas Barita	50	19	20	10	15
41	Bondar Sibabiat	Tarutung	66	45	15	15	10
42	Hasak I	Tarutung	300	25	15	25	20
43	Hasak II	Tarutung	250	23	15	20	15
44	Hutabarat Parbaju	Tarutung	50	25	25	15	10
45	Panaharan	Tarutung	200	19	10	25	25
46	Panganan Lombu	Tarutung	15	17	25	20	15
47	Siborgung Hilir	Tarutung	200	62	15	10	12
48	Siborgung kiri dan kanan	Tarutung	159	22	20	15	15
49	Sipolhas	Tarutung	67	35	15	10	10
50	Partali Julu	Tarutung	100	70	5	10	15

NO.	NAMA DAERAH IIRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018			
				Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
51	Siansimun	Tarutung	60	25	20	20	10
52	Aek Halian Harangan	Sipoholon	68	21	15	20	15
53	Saba Dolok	Sipoholon	18	19	15	10	10
54	Pangasean	Sipoholon	50	17	20	15	5
55	Sibontar	Sipoholon	55	25	15	20	15
56	Sampuran	Sipoholon	100	29	25	25	15
57	Dusun Pansinaran	Sipoholon	70	25	20	10	15
58	Sibuntuon	Sipoholon	107	55	20	15	5
59	Simanungkalit	Sipoholon	66	25	20	20	10
60	Aek Parpangiran	Sipoholon	75	20	20	20	5
61	Aek Siandurian	Sipoholon	117	30	15	15	15
62	Tambok Nabegu	Sipoholon	52	40	25	10	5
63	Aek Toras	Sipoholon	40	19	20	15	5
64	Aek Pangaloan	Sipoholon	85	21	15	15	10
65	Sisoding	Sipoholon	50	25	20	20	10
66	Sipilo	Sipoholon	60	20	20	10	15
67	Aek Butar	Pagaran	300	30	25	15	15
68	Pagaran Ginjang	Pagaran	84	25	20	20	5
69	Lubis	Pagaran	46	19	20	15	25
70	Parhorboan	Pagaran	116	21	25	20	10
71	Sibaragas	Pagaran	107	25	20	10	10
72	Sidolgi	Pagaran	140	20	15	20	15
73	Sigohi Butuha	Pagaran	339	45	15	25	12
74	Sipultak	Pagaran	85	25	20	10	15
75	Tambok Bolon	Pagaran	91	30	20	20	25
76	Tomburan Sibirik	Pagaran	225	21	20	10	15

NO.	NAMA DAERAH IIRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018			
				Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
77	Lobu Sonak	Pagaran	77	25	20	15	10
78	Janggaleman	Pagaran	40	20	20	15	10
79	Lumban Silintong	Pagaran	70	30	20	15	10
80	Pokkahan	Pagaran	50	25	20	10	15
81	Sipultak Dolok	Pagaran	100	30	25	20	20
82	Sitamba	Pagaran	50	21	20	15	10
83	Simarhilap	Pagaran	60	25	20	20	15
84	Pearung Desa Sibaragas	Pagaran	40	20	20	10	15
85	Lumban Ina-ina	Pagaran	50	30	20	15	10
86	Aek Sitakkubak	Pagaran	98	25	15	25	15
87	Parlombuan	Pagaran	105	19	25	20	20
88	Sisordak	Parmonangan	84	21	15	15	20
89	Parlombuan	Parmonangan	105	40	15	20	15
90	Saba Najonok	Parmonangan	45	20	20	15	10
91	Saba Lobu	Parmonangan	45	30	15	25	15
92	Hutaraja Julu	Parmonangan	40	25	25	20	20
93	Aek Raja	Parmonangan	50	19	15	25	15
94	Aek Ussim	Parmonangan	40	21	20	10	10
95	Aek Parinsoran	Parmonangan	60	25	15	20	10
96	Aek Horasan	Adian Koting	40	20	10	25	25
97	Pagaran Lambung	Adian Koting	40	30	20	20	10
98	Aek Narorongan	Adiankoting	50	25	15	25	15
99	Munson Lyman	Adiankoting	50	19	10	15	25
100	Aek Burburan	Adiankoting	50	21	20	20	15
101	Aek Raisan	Adiankoting	75	25	20	20	15
102	Pansur Batu	Adiankoting	75	20	20	15	10

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018			
				Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
103	Aek Bulu Godang	Adiankotting	75	30	25	10	10
104	Aek Siaro	Siborong-borong	61	25	20	15	15
105	Banjar Sitabotabo	Siborong-borong	60	19	20	10	15
106	Hariara Silaban	Siborong-borong	80	21	15	25	20
107	Hutasoit	Siborong-borong	90	29	20	20	10
108	Lobu Siregar	Siborong-borong	53	65	10	10	15
109	Lobu Sonak	Siborong-borong	46	60	5	10	20
110	Lumban pea	Siborong-borong	200	25	20	15	20
111	Mabar	Siborong-borong	43	30	15	20	20
112	Sambariba Horbo	Siborong-borong	90	70	10	10	10
113	Siborongborong	Siborong-borong	135	75	5	10	10
114	Sidilanitano Kanan/Kiri	Siborong-borong	500	70	10	10	10
115	Sidoras Kiri/Kanan	Siborong-borong	384	55	15	15	15
116	Sigalingging/Pealangge	Siborong-borong	41	30	25	20	20
117	Sigumbang	Siborong-borong	73	40	15	15	15
118	Sijaba	Siborong-borong	115	27	20	15	10
119	Simokmok	Siborong-borong	200	70	10	10	10
120	Sitampurung	Siborong-borong	225	45	15	17	20
121	Siugan-ugan	Siborong-borong	51	25	15	15	20
122	Sosor Tambak	Siborong-borong	120	21	25	25	5
123	Silait-lait	Siborongborong	67	23	20	20	30
124	Lumban Tora	Siborongborong	72	65	15	10	10
125	Lumban Pea Dolok	Siborongborong	79	70	10	10	10
126	Sianpapaga	Siborongborong	150	45	20	15	15
127	Simarompuompu	Siborongborong	93	22	25	15	10
128	Panggasean	Siborongborong	64	19	20	20	10



NO.	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018			
				Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
129	Sampean	Siborongborong	80	21	20	15	15
130	Lobu Dusun Pangkirapan	Siborongborong	90	25	20	25	20
131	Pangambatan	Siborongborong	60	20	20	10	20
132	Sitamba Lbn. Pea Dolok	Siborongborong	75	30	20	5	10
133	Pananggele	Siborongborong	150	25	20	25	15
134	Lumban Julu Pohan	Siborongborong	66	19	20	10	15
135	Dolok Martumbur	Muara	50	21	20	10	20
136	Sosor Sihilap	Muara	50	25	20	15	10
137	Suppol	Muara	60	55	15	20	10
138	Bondar Barat	Muara	80	30	20	25	15
139	Silando	Muara	70	25	25	20	20
140	Huta Ginjang	Muara	67	19	20	25	20
141	Silaput/Sitanggor	Muara	60	21	20	20	25
142	Aritonang	Muara	60	25	20	20	20
143	Sidempula	Muara	160	49	20	20	10
144	Sigansip	Muara	100	30	25	20	20
145	Simanosor	Muara	55	25	20	20	10
146	Ugan	Muara	49	19	20	20	15
147	Untemungkur	Muara	25	21	25	20	15
148	Nalas	Sipahutar	100	25	25	15	10
149	Hoda Sipahutar	Sipahutar	50	20	20	20	10
150	Simanuk	Sipahutar	125	22	23	25	30
151	Aek Boruan	Sipahutar	40	21	15	20	15
152	Sampean	Pangaribuan	80	25	25	15	20
153	Saba Bolak	Pangaribuan	400	128	10	10	10
154	Siomaoma	Pangaribuan	100	20	20	25	30

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018			
				Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
155	Parsibarungan	Pangaribuan	40	67	10	13	10
156	Saroha Sampean	Pangaribuan	45	20	20	30	30
157	Aek Bontar	Pangaribuan	75	30	25	20	15
158	Aek Sitarolo	Pangaribuan	70	25	20	20	15
159	Huta Julu	Pangaribuan	75	19	25	25	10
160	Aek Tangga	Garoga	70	21	15	20	15
161	Aek Sisudung	Garoga	50	25	20	25	30
162	Aek Pansur Godang	Garoga	75	20	25	25	30
163	Saba Aron	Garoga	45	30	25	25	20
164	Saba Kole	Garoga	50	30	20	25	25
165	Sitangko Rahot	Garoga	33	25	25	20	30
166	Saba Lobu	Garoga	36	20	25	25	30
167	Aek Sibio-bio	Garoga	72	30	25	25	20
168	Aek Salak/sisudung	Garoga	97	25	25	20	30
	<b>TOTAL</b>		<b>15.905</b>	<b>30,56</b>	<b>19,13</b>	<b>18,05</b>	<b>16,57</b>

#### **2.3.1.3.4. Penataan Ruang**

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam disekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius, yaitu : (1) adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang : manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat serta pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut; (2) proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak secara terpadu dan berdayaguna serta serasi.

Dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang serta untuk mewujudkan visi dan misi pengembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara diwaktu mendatang, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri atas Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Kawasan Prioritas. Implementasi pengembangan budidaya dan kawasan prioritas yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 memperlihatkan kondisi fungsi dan peran yang belum optimal. Hal tersebut dilihat dari skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur serta daya dukung dan daya tampung ruangnya. Secara umum sistem kota hampir seluruhnya mengalami masalah dalam penyediaan sistem sarana.

Kondisi pola ruang yang dilihat dari pencapaian kebijakan kawasan lindung, dimana kawasan ini ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2013 di daerah ini terdapat kawasan hutan (hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan hutan konservasi cagar) seluas 311.125,20 Ha atau 82,01 persen dari luas daratan Kabupaten Tapanuli Utara. Penyimpangan pemanfaatan ruang (kawasan lindung) diperlihatkan oleh adanya alih fungsi lahan kawasan hutan (hutan primer maupun hutan sekunder) yang disebabkan pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan jumlah penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi pada umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan. Tingginya alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (lahan terbangun) mengakibatkan berkurangnya kawasan resapan air pada kawasan hulu sungai.

Di sisi lain, alih fungsi pada umumnya mengabaikan rencana tata ruang seperti yang terjadi pada alih fungsi lahan kawasan budidaya pertanian produktif (sawah) menjadi kawasan permukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan yang telah ditetapkan yang menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan, penurunan

daya dukung lingkungan serta mengancam ketahanan pangan di daerah ini. Perubahan alih fungsi lahan tersebut merupakan indikasi rentannya kondisi lahan yang menjadi penyebab degradasi lingkungan. Penyimpangan alih fungsi lahan disebabkan karena belum efektif berfungsinya aspek pengendalian dalam pelaksanaan penataan ruang serta terkait dengan kewenangan perijinan pemanfaatan ruang yang sepenuhnya masih perlu ditingkatkan. Dalam upaya pemanfaatan kawasan lindung di daerah ini dilaksanakan penandaan batas kawasan lindung. Upaya rehabilitasi lahan kritis antara lain dilakukan melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN).

#### 2.3.1.3.5. Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

**Tabel 2.51**  
**Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014-2018**

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
A.	Sumber Daya Air						
	Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat	1. Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimum sehari-hari	0	0	75	100	100
		2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	75	85	87	87,2	87,5
B.	Jalan						
	1. Jaringan						
	a. Aksesibilitas	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	75	85	95	100	100
	b. Mobilitas	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per-individu melakukan perjalanan	75	85	95	100	100
	c. Keselamatan	Tersedianya jalan yang menjamin	20	30	40	50	60
	2. Ruas						

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
	a. Kondisi jalan	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	35	45	50	55	65
	b. Kecepatan	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	25	25	25	30	40

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapanuli Utara

#### 2.3.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan.

Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti : lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan.

**Tabel 2.52**  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Tahun 2014-2018**

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumah tinggal (unit)	51.100	51.471	51.859	52.244	52.631
2	Luas wilayah permukiman (Ha)	2.575	2.602	2.629	2.656	2.683
3	Luas permukiman layak huni (Ha)	1.492	1.506	1.521	1.534	1.548
4	Luas lingkungan permukiman kumuh (Km <sup>2</sup> )	-	-	11,08	11,08	11,08
5	Persentase rumah tinggal layak huni	88,10	88,75	88,79	88,83	90,29
6	Persentase penduduk berakses sanitasi layak	54,99	55,59	57,32	63,71	72

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
7	Persentase rumah tinggal menggunakan listrik	94,99	95,56	91,89	96,14	96,14
8	Persentase rumah tinggal menggunakan air bersih	65,30	66	71,47	78,40	80,60
9	Jumlah Tempat Pemakaman Umum	2	2	2	2	2
10	Luas TPU (Ha)	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
11	Daya tampung TPU	23.642	23.369	23.240	23.123	22.961

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.52 menunjukkan bahwa pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Selama tahun 2014-2018 terdapat peningkatan jumlah rumah tempat tinggal hunian di Kabupaten Tapanuli Utara dari 51.100 unit pada tahun 2014 menjadi sebesar 52.631 unit pada tahun 2018. Seiring dengan peningkatan jumlah rumah tinggal di daerah ini, pada periode waktu sama juga terdapat peningkatan rumah tinggal layak huni dari 88,10 persen tahun 2014 menjadi 90,29 persen pada tahun 2018. Peningkatan jumlah rumah tinggal layak huni ini didukung dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memenuhi persyaratan rumah layak huni, diantaranya rumah tinggal yang berakses sanitasi, rumah tinggal yang menggunakan air bersih, rumah tinggal yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan dan rumah tinggal yang menggunakan lantai (semen dan papan).

**Tabel 2.53**  
**Capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2018**

Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Air Minum						
Cluster pelayanan	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 liter/orang/hari.	50	65	70	80	100

Sumber : Dinas Perkim Kab. Tapanuli Utara

Guna mendukung peningkatan akses air bersih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai upaya dalam membantu masyarakat memberikan ketersediaan fasilitas air bersih dan sehat untuk kehidupan masyarakat. Jumlah rumah tangga yang telah dapat mengakses air bersih meningkat dari 65,30 persen pada tahun 2014 menjadi 80,60 persen pada tahun 2018. Demikian juga halnya dengan rumah tangga berakses sanitasi yang mengalami peningkatan dari 54,99 persen pada tahun 2014 menjadi 72 persen pada tahun 2018. Berdasarkan data ini diharapkan seluruh rumah tangga dapat mengakses air bersih dan sanitasi pada seluruh wilayah permukiman.

### 2.3.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Rakyat

Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian yang tidak terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dan wajib terpelihara persatuan dan kesatuan masyarakat dan wilayahnya untuk tetap bersatu dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari makna fundamental akan pentingnya persatuan dan kesatuan tersebut maka perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan memelihara serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah disiagakan aparat Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dimana perkembangan dukungan pelayanan dan capaiannya ditunjukkan pada Tabel 2.54.

**Tabel 2.54**  
**Capaian Indikasi Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2018**

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Demokrasi Indonesia di Kab. Tapanuli Utara	63,04	62,02	67,37	68,08	69,09
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pilkada					
	a. Pemilu	71,05	-	-	-	-
	b. Pilkada	79,01	-	-	-	74,50
3	Persentase Penurunan Sengketa Pemilu/ Pilkada	8	-	-	-	12
4	Jumlah Perselisihan Berlatar Belakang SARA	-	-	-	-	-
5	Jumlah Perselisihan Berlatang Belakang Konflik Sosial	-	-	-	-	35
6	Masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	360	400	900	900	1.350
7	Masyarakat yang Paham terhadap Politik	-	100	-	400	1.500
8	Jumlah Ormas, OKP dan LSM yang Resmi Terdaftar	75	86	91	94	92
	a. Ormas	7	8	8	8	8
	b. OKP	16	17	17	17	17
	c. LSM	52	61	66	69	67
9	Persentase Monitoring dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing dan NGO	-	-	20	-	-

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.54 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah Ormas, OKP dan LSM yang resmi terdaftar di Kabupaten Tapanuli Utara adalah 92 buah, terdiri dari 67 buah organisasi LSM, 17 buah organisasi kemasyarakatan pemuda dan 8 buah organisasi kemasyarakatan. Sedangkan untuk indikator masyarakat yang paham terhadap politik mengalami peningkatan menjadi 1.500 orang pada tahun 2018. Selain itu Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014 yaitu 63,04 mengalami peningkatan menjadi 69,09 pada tahun 2018.

Selain itu, manajemen pemerintahan yang efektif dilakukan dengan melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan pembangunan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat selama tahun 2014-2018 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat di lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat.

Dalam rangka pelayanan dalam bentuk penciptaan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah ini serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan pelaksanaannya telah disiagakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana perkembangan dukungan pelayanan dan capaiannya ditunjukkan pada Tabel 2.55.

**Tabel 2.55**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah personil Satpol PP (orang)	83	109	163	242	256
	a. Laki-laki	63	89	143	227	237
	b. Perempuan	20	20	20	15	19
2	Jumlah demo dalam 1 tahun (kejadian)	4	5	6	4	16
3	Jumlah penertiban penduduk liar, gelandangan, pengemis, orang gila, orang terlantar dan tuna susila	5	5	8	10	10
4	Jumlah penertiban PKL	6	8	10	12	14
5	Jumlah penindakan baliho/spanduk yang sudah lewat waktu	6	6	8	12	12
6	Jumlah titik reklame tanpa ijin yang dibongkar	0	0	0	6	8
7	Jumlah operasi kasih sayang kepada pelajar (kali)	96	96	96	88	108
8	Jumlah operasi penertiban izin/peraturan daerah (kali)	83	60	116	92	96
9	Jumlah operasi penyakit masyarakat (PEKAT) (kali)	24	24	24	24	24
10	Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	43	30	33	33	40
11	Jumlah mobil pemadam kebakaran	-	-	-	5	5
12	Jumlah kasus kebakaran	30	20	35	40	40
13	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	27	54	54	60	60
14	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	80	80	80	85	85

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.55 menunjukkan bahwa jumlah aparat polisi pamong praja telah meningkat dari 83 orang pada tahun 2014 menjadi 256 orang pada tahun 2018, dimana keberadaan aparat satuan polisi pamong praja telah melakukan peningkatan operasi



dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di daerah ini, diantaranya melalui penertiban PKL, penindakan baliho/spanduk yang sudah lewat waktu, operasi kasih sayang serta operasi penertiban izin/peraturan daerah. Operasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menaati peraturan yang akan dapat menciptakan ketentraman bagi mereka.

**Tabel 2.56**  
**Capaian SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Rakyat**

No	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	83 %	85 %	90 %	95 %	96 %
2	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100%	100%	100%	100%

Sementara dalam hal bencana berdasarkan peta wilayah gempa di Indonesia, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kedalam wilayah 3 dan 4, yaitu wilayah yang relatif stabil terhadap gempa bumi dan berada pada sirkum Mediterian yaitu suatu sirkum atau jajaran gunung api yang membentang dari Sumatera paling utara sampai Sumatera bagian selatan dan terus melewati Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa dan berakhir di Kabupaten Maluku. Sirkum ini terdiri dari beberapa gunung api aktif dan Kabupaten Tapanuli Utara berada pada Pegunungan Bukit Barisan. Selain adanya sirkum Mediterian daerah ini juga merupakan tempat bertemunya lempeng Samudera Indonesia di sebelah barat dengan Lempeng Asia di sebelah Timur - Utara Sumatera dan lempeng tersebut sangat aktif hingga sekarang. Keaktifan lempeng dapat diwakili oleh adanya patahan (sesar) yang memanjang dari arah barat laut - tenggara yang dinamakan sesar Semangko berjenis patahan mendatar. Patahan ini dimulai dari ujung utara sampai ke selatan pulau Sumatera. Sesar Semangko ini melewati Kecamatan Tarutung terus sampai Kecamatan Simangumban yang disebut sebagai Patahan Toba dan sangat rawan gempa bumi.

Selain hal tersebut, di Kabupaten Tapanuli Utara juga terdapat daerah rawan longsor seperti Kecamatan Parmonangan, Tarutung dan Garoga yang memiliki kemiringan lereng diatas 20 persen dan dilewati patahan-patahan yang aktif serta litologinya sebagian besar ditutupi oleh Tufa Toba yang bersifat lunak. Daerah lainnya juga tetap memiliki kemungkinan terjadinya longsor, yakni Kecamatan Sipahutar, Pahae Julu dan sebelah Timur Siborongborong, dimana lokasi tersebut memiliki kemiringan lereng datar sampai terjal.

Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam rangka pelayanan tersebut telah disiagakan aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perkembangan dukungan pelayanan dan capaiannya ditunjukkan pada Tabel 2.57.

**Tabel 2.57**  
**Indikator Kinerja Penanganan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan dokumen penanggulangan bencana daerah	0,5	-	-	-	0,5
2	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	0,81	0,68	0,55	0,10
3	Cakupan Daerah Siaga Bencana	-	-	-	510	520
4	Cakupan ketersediaan sarana prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana	-	-	-	-	-
5	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	-	-	0,0015	0,06	0,006
6	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	-	-	-	-	-
7	Response time mencapai lokasi bencana	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam
8	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai response time yang telah ditentukan	-	0,79	0,68	0,55	0,10
9	Ketersediaan peta rawan bencana Kabupaten/Kota (Ada/Tidak ada)	-	-	-	-	Ada
10	Jumlah Kejadian Bencana					
	a. Gempa Bumi	-	-	-	-	-
	b. Banjir	-	2	3	4	7
	c. Tanah Longsor	-	87	53	43	158
	d. Angin Puting Beliung	-	4	4	-	2
	e. Bencana lainnya	-	1	1	-	1
11	Nilai Kerugian Bencana	-	-	-	-	-
	a. Jumlah korban meninggal/ hilang (jiwa)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	b. Jumlah kerugian materi (Rp.)	-	-	-	-	-
12	Ketersediaan fasilitas pasca bencana	-	-	-	-	-
13	Persentase tim penanggulangan bencana terdidik	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.57 menunjukkan bahwa sudah tersedianya Peta Rawan Bencana Kabupaten pada tahun 2018 sehingga diharapkan penanganan bencana di Kabupaten Tapanuli

dapat diatasi dengan baik dan cepat. Sedangkan untuk cakupan daerah siaga bencana pada tahun 2018 sebanyak 520. Adapun jumlah kejadian bencana pada tahun 2018 untuk bencana banjir sebanyak 7 kejadian, tanah longsor sebanyak 158 kejadian, angin puting beliung 2 dan bencana lainnya 1. Data kejadian bencana per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.58**  
**Data Bencana Per Kecamatan di Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian Bencana Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kecamatan Tarutung	-	37	29	14	50
2	Kecamatan Sipoholon	-	10	5	2	11
3	Kecamatan Pagaran	-	10	-	3	7
4	Kecamatan Siborongborong	-	15	5	6	19
5	Kecamatan Siatas Barita	-	5	7	4	9
6	Kecamatan Adiankoting	-	-	6	4	9
7	Kecamatan Pahae Julu	-	1	2	3	8
8	Kecamatan Pahae Jae	-	3	5	3	18
9	Kecamatan Simangumban	-	1	-	-	3
10	Kecamatan Purbatua	-	1	5	-	6
11	Kecamatan Parmonangan	-	1	6	2	8
12	Kecamatan Sipahutar	-	3	3	4	8
13	Kecamatan Pangaribuan	-	1	3	2	5
14	Kecamatan Garoga	-	4	3	2	6
15	Kecamatan Muara	-	1	1	-	8

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

#### **2.3.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak.

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya permasalahan sosial, dimana keadaan di daerah ini menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Pembangunan PMKS ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

**Tabel 2.59**  
**Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Jumlah PMKS (Tahun)					PMKS yang Ditangani (Tahun)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Anak balita terlantar	-	-	-	4	-			8		
2	Anak terlantar	36	36	36	10	-					
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	-	-	-	30	10			60		
4	Anak jalanan	-	2	2	-	-					
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	121	121	121	121	121					
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	28	28	28	28	-					
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	32	32	32	32	-					
8	Lanjut usia telantar	24	24	675	675	675	0	0	675	240	0
9	Penyandang disabilitas	1.185	1.185	1.185	1.508	1.509	10	15	57	35	0
10	Tuna Susila	8	8	8	45	-			8	45	
11	Gelandangan	3	3	3	3	-					
12	Pengemis	-	-	-	-	-					
13	Pemulung	1	1	1	5	5					
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-					
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	142	142	142	2	-					
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	32	32	32	-	-					
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	61	61	61	-	-					
18	Korban trafficking	-	-	-	-	-					
19	Korban tindak kekerasan	-	-	-	-	-					
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-	-	-					
21	Korban bencana alam	213	163	435	198	656	197	159	412	157	71
22	Korban bencana sosial	-	-	-	-	-					
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	633	633	633	1.260	1.260	10	10	10	10	-
24	Fakir Miskin	-	-	-	15.733	27.810	3.915	4.802	6.690	6.648	11.270
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	-	-	-	18	249					
26	Komunitas Adat Terpencil (KK)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2019

### **2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.

#### **2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan berhubungan dengan tingkat angkatan kerja pada suatu wilayah tertentu. Jumlah angkatan kerja terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja dengan perbandingan penduduk yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas ke dalam pasar kerja.

**Tabel 2.60**  
**Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 – 2018**

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angkatan Kerja (penduduk umur > 15 tahun)					
	a. Bekerja (orang)	155.099	153.301	n/a	160.853	161.862
	b. Pengangguran (orang)	914	4.029	n/a	3.099	2.329
	c. Jumlah penduduk angkatan kerja	156.013	157.330	n/a	163.952	164.191
2	Bukan Angkatan Kerja					
	a. Sekolah	15.237	12.334	n/a	9.704	11.749
	b. Mengurus RT	7.434	7.274	n/a	13.408	11.128
	c. Lainnya	7.088	11.314	n/a	5.990	8.853
	d. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja	29.759	30.922	n/a	29.102	31.730
3	Rasio penduduk yang bekerja	99,41	97,44	-	98,11	98,58
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	83,98	83,57	-	84,93	83,80
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0,59	2,56	-	1,89	1,42
6	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	52,44	66,92	22,92	38,04	46,99
7	Persentase pekerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	0,40	0,63	1,42	1,87	3,87
8	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	54,67	27,43	37,84	23,75	22,62
9	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0,00	0,00	0,00	47,50	93,50
10	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
11	Persentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi	Tidak diuji	Tidak diuji	Tidak diuji	56,25	Tidak diuji
12	Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK atau diatas UMK	-	70	70	70	70

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2.60, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk yang masuk pasar kerja (*supply*) selama tahun 2014-2018 mengalami *trend* menurun yaitu dari 83,98 pada tahun 2014 menjadi 83,80 pada tahun 2018 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama kurun waktu yang sama mengalami penurunan. Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018, maka angka TPT Kabupaten Tapanuli Utara jauh di bawah provinsi yang berada di angka 5,56 persen. Ini mengindikasikan bahwa secara umum, masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara masih mampu bekerja mandiri walaupun tidak menutup kemungkinan untuk masuknya investor guna pembukaan lapangan kerja baru.

#### **2.3.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya kesetaraan gender. Upaya perbaikan pemberdayaan perempuan dikenal dengan nama pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*), yaitu upaya untuk memperhatikan gender dalam berbagai sektor kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki. Upaya perbaikan tersebut memerlukan dukungan kebijakan, program sampai dengan kegiatan yang terintegrasi dengan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Proses perbaikan ini dapat dilakukan dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi. Upaya perbaikan kondisi atau pencapaian kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan tersebut dilandasi berbagai kesepakatan baik di tingkat global/dunia, maupun kesepakatan nasional, diantaranya penetapan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional diharapkan dapat meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah ini.

Keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dalam aspek pemberdayaan terutama keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, perempuan juga relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Ketertinggalan ini sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan apapun yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Peran perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I-IV maupun di lembaga legislatif. Perkembangan jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018 ditunjukkan pada tabel berikut.



**Tabel 2.61**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pekerja perempuan	63.188	63.250	75.090	75.767	77.900
2.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah:					
	a. Eselon II	1	2	2	5	10
	b. Eselon III	22	31	30	50	75
	c. Eselon IV	185	232	237	240	245
	d. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3.734	9.957	3.717	6.767	3.900
3.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga legislatif	3	3	3	3	3
4.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	59.454	63.188	71.373	72.000	74.000
5.	Jumlah kasus KDRT	12	13	4	6	8
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum (%)	77	77	91	50	-

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.61 menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2018 capaian partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014 sebanyak 3.734 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 3.900 orang, sedangkan capaian partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD Kabupaten Tapanuli Utara) pada tahun 2014-2018 sebanyak tiga orang. Partisipasi perempuan pada bidang politik dan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender. Sebagai dampak positif meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender, diharapkan keberpihakan terhadap hasil-hasil peraturan yang responsif gender pun semakin meningkat. Partisipasi perempuan di lembaga swasta, dalam hal ini ditinjau dari jumlah tenaga kerja perempuan di perusahaan swasta menunjukkan jumlah yang semakin besar dari 63.188 orang tahun 2014 menjadi 77.900 orang pada tahun 2018.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT antara lain :

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki, bahwa laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
2. Adanya diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi berupa pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
3. Beban pengasuhan anak, istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.
5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Posisi wanita sebagai istri dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2014 sebanyak 12 kasus dan pada tahun 2018 ada 8 kasus. Hal ini perlu terus didukung agar kedamaian dalam kehidupan keluarga dapat tercipta. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

#### **2.3.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah bersama-sama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan melalui suatu kebijakan yang mampu mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi ketersediaan bahan pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, keamanan, gizi, pemerataan dan keterjangkauan oleh daya beli masyarakat. Pokok-pokok kebijaksanaan yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan, distribusi, panganekaragaman konsumsi dan

kewaspadaan/keamanan pangan dan gizi terhadap komoditas strategis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah ini, berbagai upaya telah ditempuh melalui berbagai kebijakan, diantaranya: 1) kebijakan peningkatan ketersediaan pangan yang dilakukan melalui pemberdayaan kelompok tani, pemantapan penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan peningkatan mutu teknologi terapan; 2) kebijakan dalam kewaspadaan dan keamanan pangan yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan fungsi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), peningkatan keberdayaan masyarakat pangan, dan peningkatan keamanan mutu dan gizi pangan.

**Tabel 2.62**  
**Perkembangan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pangan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penduduk (orang)	326.635	324.606	329.218	336.031	347.717
2.	Skor pola pangan harapan	80,20	80,20	81,0	81,0	82,1
3.	Pangan karbohidrat (padi)					
	a. Produksi padi gabah kering panen (ton)	158.018	160.578	170.919	182.743	229.162
	b. Persentase ketersediaan beras sesuai kebutuhan	240,26	262,44	124,89	120,50	115,50
	c. Tingkat kebutuhan konsumsi beras per kapita (kg)	128,65	126,32	124,89	120,5	115,5
	d. Total kebutuhan beras konsumsi (ton)	37.419,65	37.062,16	36.919,11	35.885,62	34.396,59
4.	Protein hewani					
	a. Daging					
	▪ Persentase ketersediaan daging (ton) sesuai kebutuhan	102,32	99,11	69,47	70,64	71,15
	▪ Tingkat konsumsi daging per kapita (kg/kapita)	4,25	4,62	6,80	6,9	7,12
	▪ Total kebutuhan daging konsumsi (ton)	1.285,00	1.355,50	2.010,17	2.054,86	2.121,00
	b. Susu					
	▪ Tingkat konsumsi susu per kapita (liter/kapita)	-	0,81	0,82	0,79	0,79
	▪ Total kebutuhan susu konsumsi (liter)	-	237,65	242,40	235,27	-
	c. Telur					
	▪ Persentase ketersediaan telur sesuai kebutuhan	-	30,50	22,79	20,52	20,55
	▪ Tingkat konsumsi telur per kapita (kg/kapita)	-	5,24	6,98	7,75	7,76
	▪ Total kebutuhan telur konsumsi (ton)	-	1.537,41	2.063,38	2.308,00	2.310,97

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.62 menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan pangan untuk kebutuhan pangan karbohidrat yang bersumber dari beras di daerah ini selama tahun 2014-2018 telah mencapai swasembada. Pencapaian swasembada pangan beras di Kabupaten Tapanuli Utara tidak diikuti dengan pencapaian swasembada pangan protein hewani yang berasal dari daging, susu dan telur. Guna mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dikembangkan distribusi dan peningkatan akses pangan di masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan pembinaan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).

#### **2.3.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 menyebutkan bahwa Urusan Pertanahan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan konkuren dan lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Lebih lanjut pada ayat (2) disampaikan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan pada ayat (1) maka kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah: (a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; (b) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota; (c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau (d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Dalam lampiran undang-undang tersebut pada pada huruf J mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan disebutkan ada sembilan sub urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Kesembilan sub urusan tersebut terdiri atas; (1) izin lokasi, (2) pengadaan tanah untuk kepentingan umum, (3) sengketa tanah garapan, (4) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, (5) subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee, (6) tanah ulayat, (7) tanah kosong, (8) izin membuka tanah, dan (9) penggunaan tanah. Dari kesembilan sub urusan tersebut terdapat tiga sub urusan yang tidak ada kewenangannya pada pemerintah pusat, yaitu urusan tanah ulayat, tanah kosong dan izin membuka tanah. Kewenangan penerbitan izin membuka tanah hanya ada pada pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu kewenangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya ada pada pemerintah pusat dan daerah propinsi.

Berdasarkan aturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat penyebutan secara lebih konkrit mengenai kewenangan penyelesaian sengketa tanah, yaitu (1) penyelesaian sengketa tanah garapan, (2) penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan dan (3) penyelesaian masalah tanah kosong. Penyelesaian sengketa tanah garapan dan penyelesaian masalah ganti rugi tanah untuk pembangunan ada pada semua level pemerintahan, sedangkan kewenangan penyelesaian masalah tanah kosong hanya ada pada level pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan bidang pertanahan pada umumnya dan bidang sengketa tanah pada khususnya masih memerlukan aturan yang lebih konkrit, karena itu peraturan pemerintah mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diamanatkan pasal 21 UU 23 Tahun 2014 perlu segera direalisasikan.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kabupaten Tapanuli Utara terus mengalami peningkatan. Secara lengkap indikator kinerja urusan pertanahan dijelaskan dalam Tabel 2.63.

**Tabel 2.63**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2014-2018**

No	Lahan Bersertifikat	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	3.793,73	3.793,73	3.793,73	3.793,73	3.793,73
2	Luas Tanah Bersertifikat					
	- Hak Milik	2.274.478	4.306.403	6.067.752	7.312.049	19.916.798
	- Hak Guna Bangunan	1.574	1.815	11.501	187.625	237.744
	- Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
	- Hak Pakai	20.666	74.143	147.015	132.110	97.874
	- Hak Pengelolaan	-	-	-	-	-
	- Hak Wakaf	-	-	1.388	3.267	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.63 dapat diketahui bahwa masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara sudah memiliki kesadaran untuk membuat sertifikat atas tanah miliknya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya capaian tanah yang telah memiliki sertifikat, yaitu dari 2.274.478 tahun 2014 dan meningkat menjadi 19.916.798 pada tahun 2018.

### 2.3.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Dengan semakin berkembangnya perekonomian global maka pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pelaku usaha sudah barang tentu akan berdampak pada peningkatan pencemaran lingkungan meliputi pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan dan/atau tanah serta meningkatnya pengaduan masyarakat terkait dugaan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dan menyentuh masyarakat agar masyarakat menyadari betapa pentingnya hidup dengan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang sesuai untuk mendukung kehidupan manusia yang jika tidak diatasi pada akhirnya akan berdampak pada terganggunya lingkungan, khususnya terkait dengan masalah persampahan dan kualitas air. Dalam mencapai tujuan meningkatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan demi mewujudkan daerah yang nyaman dan ramah lingkungan, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus segera memperoleh penanganan seperti masih terjadinya pencemaran air maupun tanah, belum optimalnya pengelolaan persampahan, belum optimalnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungannya, serta masih terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang publik yang berfungsi untuk interaksi sosial masyarakat.

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa urusan bidang Lingkungan Hidup telah mengalami perubahan, dimana urusan tersebut telah ditetapkan sebagai urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar. Namun demikian pelayanan dasar yang telah ada sebelumnya dalam bentuk SPM bidang Lingkungan Hidup tetap dilaksanakan oleh daerah mengingat indikator-indikator yang ada di dalamnya merupakan bagian kegiatan dari urusan bidang lingkungan hidup. Perkembangan indikator capaian pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.64**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Terintegrasinya KLHS dalam rencana pembangunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
4	Hasil pengukuran indeks kualitas air	86	85	83	82	80
5	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	70,08	70,09	70,10	70,11	70,12
6	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana PPLHD					
	a. Jumlah PPLHD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	b. Jumlah PPLHD yang dilatih	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	c. Sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang ditangani					
	a. Jumlah pengaduan	-	-	-	9	7
	b. Jumlah yang ditangani	-	-	-	9	7
9	Pengelolaan sampah					
	a. Jumlah sampah (m <sup>3</sup> )	53.083	53.545	53.949	54.349	54.728
	b. Jumlah sampah yang ditangani (%)	11,232	11,232	11,232	13,104	15,912
	c. Jumlah petugas pengelola sampah	100	100	125	125	125
10	Prestasi/penghargaan yang diterima di bidang lingkungan hidup					
	a. Penghargaan yang diterima perorangan	-	-	-	-	13
	b. Penghargaan yang diterima oleh kelompok	-	-	-	-	13
11	Persentase sampah yang berkurang melalui 3R	-	-	-	-	-
12	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah					
	a. Jumlah TPA sampah (unit)	2	2	2	2	2
	b. Luas TPA (Ha)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	c. Kapasitas/daya tampung TPA (ton)	-	-	-	-	-
	d. Persentase TPA yang sudah digunakan	30	40	50	60	70
13	Jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) sampah (unit)	150	150	200	328	328
14	Jumlah truk pengangkut sampah (unit)	14	14	15	17	17
15	Cakupan pengawasan Amdal					
	a. Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal	2	2	2	1	2
	b. Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal	2	2	2	1	2
	c. Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal yang diawasi secara rutin	2	2	2	1	2
16	Luas lahan kritis (Ha)	38.952,43	38.952,43	38.952,43	38,933.43	38,927.43
17	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	-	-	-	19	6

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Pesatnya pembangunan dan pertambahan penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara telah menimbulkan permasalahan lingkungan antara lain sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem dan sumberdaya alam lainnya. Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Tapanuli Utara terus mendapat perhatian karena jumlah sampah terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di daerah ini. Tabel 2.64 menunjukkan bahwa produksi sampah di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat setiap tahunnya dan tahun 2018 mencapai 54.728 m<sup>3</sup>. Peningkatan jumlah sampah ini seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan unit usaha. Pengelolaan sampah dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dimana pada tahun 2018 terdapat 328 unit Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah. Melihat pengelolaan sampah yang belum optimal, pengelolaan persampahan diselenggarakan melalui pembinaan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan.

#### **2.3.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (input) produksi sekaligus menciptakan demand barang dan jasa hasil produksi. Namun demikian, jumlah penduduk juga harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan seperti pengangguran dan kemiskinan serta perlu ditingkatkan kualitasnya terutama di era pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini.

**Tabel 2.65**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Berdasarkan Kecamatan**  
**Tahun 2014-2018**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)/Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Parmonangan	16.397	16.273	16.366	16.493	17.019
2	Adiankoting	16.356	16.138	16.274	16.521	16.816
3	Sipoholon	25.771	25.530	25.585	26.129	27.090
4	Tarutung	43.385	42.703	43.034	43.735	45.102
5	Siatas Barita	14.526	14.533	14.783	14.745	15.222
6	Pahae Julu	14.264	14.189	14.527	14.604	15.223
7	Pahae Jae	12.617	12.594	12.618	12.997	13.480
8	Purbatua	8.818	8.787	8.942	9.195	9.450
9	Simangumban	8.476	8.584	9.063	9.244	9.766
10	Pangaribuan	31.858	31.384	31.548	32.271	33.177
11	Garoga	18.754	18.781	18.872	19.283	20.233
12	Sipahutar	28.765	28.578	28.871	29.588	30.388
13	Siborongborong	51.699	51.611	52.925	54.583	56.618



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)/Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
14	Pagaran	19.880	19.685	20.266	20.801	21.767
15	Muara	15.269	15.236	15.544	15.842	16.366
<b>Kabupaten Tapanuli Utara</b>		<b>326.835</b>	<b>324.606</b>	<b>329.218</b>	<b>336.031</b>	<b>347.717</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2018 sebanyak 347.717 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2018 terdapat di Kecamatan Siborongborong yaitu sebanyak 56.618 jiwa (16,28 persen) dan terendah terdapat di Kecamatan Purbatua yaitu 9.450 jiwa atau 2,72 persen.

**Tabel 2.66**  
**Jumlah Kepala Keluarga, Rata-rata Anggota Keluarga dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2018**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kepala Keluarga	Rata-rata Anggota Keluarga	Kepadatan Penduduk
1	Parmonangan	257,35	4.120	4	64
2	Adiankoting	502,90	4.175	4	33
3	Sipoholon	189,20	7.079	4	138
4	Tarutung	107,68	12.324	4	406
5	Siatas Barita	92,92	4.047	4	159
6	Pahae Julu	165,90	3.967	4	88
7	Pahae Jae	203,20	3.695	4	64
8	Purbatua	150,00	2.433	4	61
9	Simangumban	191,80	2.477	4	48
10	Pangaribuan	459,25	8.131	4	70
11	Garoga	567,58	4.820	4	34
12	Sipahutar	408,22	7.335	4	72
13	Siborongborong	279,91	14.106	4	195
14	Pagaran	138,05	5.517	4	151
15	Muara	79,75	4.297	4	199
<b>Kab. Tapanuli Utara</b>		<b>3.793,71</b>	<b>88.523</b>	<b>4</b>	<b>89</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Pada tabel 2.66 dapat kita lihat bahwa tahun 2018 rata-rata jumlah anggota keluarga untuk masing-masing kepala keluarga adalah 4 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tarutung, yaitu 406 orang/Km<sup>2</sup>.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan

ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Dalam bidang penyelenggaraan urusan kependudukan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya dan berkomitmen meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dimana hasil indikator hasil capaian yang dilakukan pemerintah daerah didalam urusan kependudukan pada tahun 2014-2018, diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 2.67**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penduduk (jiwa)	326.835	324.606	329.218	336.031	347.717
2.	Kepemilikan KTP Elektronik					
	a. Jumlah penduduk wajib KTP (jiwa)	224.628	222.172	224.549	228.844	237.604
	b. Jumlah penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP (jiwa)	170.352	195.956	203.411	208.347	219.552
	c. Persentase penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP	75,84	88,20	90,59	91,04	92,40
3.	Kepemilikan Akta Lahir					
	a. Jumlah penduduk wajib akta lahir (jiwa)	326.835	324.606	329.218	336.031	347.717
	b. Jumlah penduduk wajib akta lahir yang telah memiliki akta lahir (jiwa)	73.463	94.054	116.631	137.420	153.031
	c. Persentase penduduk yang mempunyai akte lahir	22,48	28,97	35,43	40,90	44,01
4.	Kepemilikan Akta Nikah					
	a. Jumlah pasangan nikah wajib akta nikah	55.940	57.142	57.456	60.739	61.984
	b. Jumlah pasangan nikah wajib akta nikah yang telah memiliki akta nikah	19.665	21.502	29.973	35.050	38.695
	c. Persentase pasangan nikah ber-akte nikah	35	38	52	58	62
5.	Kepemilikan Akta Kematian					
	a. Jumlah penduduk meninggal (jiwa)	-	-	-	-	-
	b. Jumlah penduduk meninggal yang memiliki akta kematian	854	1.485	2.258	2.959	3.633
6.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-
7.	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.67 tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang memiliki KTP per satuan penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahun dimana angka rasio ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di daerah ini untuk memiliki KTP sudah semakin meningkat disamping adanya ketentuan *single identity* yang diterapkan pemerintah. Demikian juga halnya dengan kepemilikan akte kelahiran dan akte nikah yang meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan semakin baik.

### **2.3.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang semaksimal mungkin melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha dinilai berhasil sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Subyek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau obyek saja. Berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat, dimana setiap pengelola kegiatan khususnya SKPD dituntut untuk peka terhadap aspirasi masyarakat, sehingga dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada akhirnya dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Desa yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Pemerintah pusat mendorong adanya otonomi desa dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dalam hal ini mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan sosial. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.

Dalam mendorong pelayanan kepada masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pembangunan diharapkan dukungan dan peran berbagai lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dalam pemberdayaan masyarakat desa juga sangat dibutuhkan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa serta berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, sejahtera dan adil dalam hal gender serta sadar hukum dan lingkungan.

**Tabel 2.68**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2014 - 2018**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa	241	241	241	241	241
2	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	75	75	75	75	75
3	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan	241	241	241	241	241
4	Jumlah LPM berprestasi	-	-	-	-	-
5	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat	-	-	6	10	13
6	Jumlah desa sangat tertinggal	-	-	24	24	24
7	Jumlah desa tertinggal	-	-	177	177	177
8	Jumlah desa maju	-	-	-	-	-
9	Jumlah desa swadaya	10	10	10	10	10
10	Jumlah desa swakarya	231	231	231	231	231
11	Jumlah desa yang tertib administrasi desa	175	175	200	200	200
12	Persentase Raperdes yang disetujui	100	100	100	100	100
13	Persentase BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ	100	100	100	100	100
14	Persentase Kepala Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	100	100	100	100	100
15	Persentase Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	100	100	100	100	100
16	Persentase Perangkat Desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	100	100	100	100	100
17	Persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi keuangan dan aset desa	75	75	80	80	80
18	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	241	241	241	241	241
19	Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu	-	-	-	-	-
20	Persentase desa yang menyusun Profil Desa	85	85	85	85	95
21	Jumlah desa yang membentuk BUMDes	-	-	6	28	6
22	Jumlah desa berprestasi	3	3	3	3	3
23	Jumlah desa kelompok binaan PKK	241	241	241	241	241
24	PKK Aktif	252	252	252	252	252

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
25	Posyandu Aktif	373	373	377	377	408
26	Persentase penyerapan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)	100	100	100	100	100
27	Persentase penyerapan Anggaran Dana Desa (DD)	0	100	100	100	99,21

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.68 tersebut menunjukkan bahwa jumlah desa yang tertib administrasi desa pada tahun 2014 sebanyak 175 desa dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 200 desa. Dengan adanya pelatihan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya dapat meningkatkan indikator-indikator pemberdayaan masyarakat dan desa lainnya. Untuk indikator jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat pada tahun 2016 hanya ada 6 buah dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 13 buah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa sudah mulai membangun komitmen bersama dan adanya motivasi untuk berswadaya dan tidak bergantung kepada bantuan pihak tertentu sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa.

#### 2.3.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan salah satu prioritas sasaran dan arah pembangunan dalam rangka mewujudkan agenda penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal yang dilakukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk serta mengupayakan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengendalian tingkat kelahiran (*fertility*) penduduk yang dilakukan dengan Program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan serta kehidupan masyarakat untuk lebih maju dan mandiri. Upaya pengendalian jumlah penduduk terlihat dari rata-rata jumlah anak per keluarga yang berjumlah 4 orang pada tahun 2014 hingga tahun 2018.

**Tabel 2.69**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	15	15	23	25	26
2	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	252	252	252	252	252
3	Persentase Kampung KB yang terbentuk	-	-	6,66	86,66	40

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
4	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	-	-	-	4,25	4,25
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun kegiatan berbasis gender	-	-	-	2,94	2,94
6	Jumlah pasangan usia subur (orang)	31.865	33.388	33.170	35.363	34.014
7	Persentase peserta KB aktif terhadap PUS	67,42	66,12	74,17	71,26	65,64
8	Persentase akseptor KB / pemakaian Metode Kotasepsi Jangka Panjang (MJKP) terhadap peserta KB aktif	42,35	46,22	44,02	45,12	50,21
9	Persentase akseptor KB pemakaian metode kontasepsi jangka pendek terhadap peserta KB aktif	57,65	53,78	55,98	54,88	49,75
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	75,77	80,85	80,55	79,32	72,65
11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	21,18	21,10	18,36	20,19	20,64
12	Persentase KB Pria terhadap peserta KB aktif	8,65	8,64	8,65	9,17	9,10
13	Persentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) menggunakan KB	65	70	73	75	78
14	Persentase anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) menggunakan KB	68	72	75	78	80
15	Persentase anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) menggunakan KB	70	75	78	80	85
16	Persentase anggota keluarga UPPKS yang menggunakan KB	60	55	60	65	65
17	Cakupan petugas pembantu pembinaan KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
18	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontasepsi di faskes (%)	-	-	-	70	80
19	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	22,61	22,69	22,83	23,31
20	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan)	4	4	4	4	4
21	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		0,87	0,75	0,74	0,70

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Perkembangan rasio akseptor KB di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah akseptor KB. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian jumlah penduduk tetap dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program KB. Namun demikian, secara umum angka ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana) yang diharapkan mampu mengubah pandangan generasi tentang pentingnya KB.

Program Keluarga Berencana (KB) adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Terkait dengan hal ini telah dibuat beberapa cara untuk mencegah atau menunda kehamilan melalui alat kontrasepsi. Tujuan dari Keluarga Berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, melainkan juga untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) yang berkualitas, menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi untuk membentuk keluarga kecil berkualitas.

Tabel 2.69 tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan persentase peserta KB aktif. Semakin tingginya jumlah peserta KB berarti bahwa sosialisasi KB kepada penduduk khususnya pasangan usia subur mengenai manfaat program KB berhasil dilakukan. Hal ini perlu terus ditingkatkan guna mensukseskan program KB di Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **2.3.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Salah satu faktor penting dalam memperlancar aktivitas kehidupan masyarakat adalah operasional sistem transportasi. Pengembangan sistem transportasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pengembangan wilayah. Transportasi mempunyai fungsi penghubung fungsional dan spasial antar kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya. Penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien diarahkan untuk penyediaan alternatif pilihan pelayanan sesuai kepentingan pengguna jasa transportasi dan akomodasi kepentingan penyedia jasa untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu stakeholder untuk menyediakan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Untuk itu penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien terwujud dalam pelayanan transportasi antar moda yang mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan, tepat waktu dan dapat memberikan pelayanan antar sarana dan fasilitas yang ada di perkotaan dan di perdesaan serta kesetaraan tingkat pelayanan sesuai dengan standar yang dibakukan. Jaringan transportasi di wilayah daerah ini terdiri dari transportasi darat, transportasi danau dan transportasi udara.

**Tabel 2. 70**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penumpang					
	a. Bus dan Mini Bus	2.600.000	2.675.000	2.775.000	2.856.560	2.856.560
	b. Kapal Danau	52.320	53.125	54.265	55.139	55.139
	c. Pesawat Udara	24.005	17.685	153.125	282.240	282.240
2	Persentase uji kir angkutan umum					
	a. Mobil penumpang umum (%)	375	379	257	-	-
	b. Mobil bus (%)	200	215	196	-	-
	c. Mobil barang (%)	670	679	476	-	-
3	Jumlah kendaraan					
	a. Kendaraan roda empat penumpang umum	989	1.025	1.052	1.071	1.071
	b. Kendaraan roda empat bus	202	235	227	237	237
	c. Kendaraan roda tiga (becak bermotor)	246	265	258	254	254
4	Jumlah ijin trayek kendaraan bermotor					
	a. Ijin trayek perkotaan	210	215	225	226	226
	b. Ijin trayek perdesaan	140	125	133	127	127
	c. Jumlah ijin	350	340	358	353	353
5	Jumlah pelabuhan udara (bandara)	1	1	1	1	1
6	Jumlah dermaga danau	3	3	3	3	3
7	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2019

Jumlah penumpang angkutan umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tentunya harus menjadi perhatian yang serius dan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Pada tabel dapat dilihat bahwa jumlah penumpang angkutan pada Tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pemerintah daerah harus tetap memperhatikan ketersediaan angkutan publik yang memadai. Tingkat kesadaran masyarakat pemilik kendaraan angkutan umum dan barang dalam mendukung keselamatan transportasi darat telah meningkat. Ini ditunjukkan oleh peningkatan pengurusan izin trayek dan uji kir kendaraan angkutan umum dan barang yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun untuk tahun 2017 ketiadaan staf akibat telah pensiun sebagai petugas uji kir mengakibatkan dan sudah rusaknya alat penguji KIR sehingga Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan uji kir kendaraan umum.

Jumlah terminal bis, pelabuhan danau dan bandara tahun 2014-2018 tidak mengalami peningkatan, dimana jumlah terminal adalah tiga unit, yaitu 1 unit dikelola oleh Kementerian Perhubungan yang berada di Kecamatan Tarutung dan 2 unit dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berada di Kecamatan



Tarutung dan Kecamatan Siborongborong. Transportasi danau di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki peran penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di Kecamatan Muara yang terletak di Kawasan Danau Toba. Aksesibilitas transportasi danau didukung sarana dermaga danau sebanyak satu unit dengan jumlah armada angkutan danau sebanyak satu unit ferry dan 35 unit kapal pengangkutan yang merupakan sarana transportasi masyarakat di Kawasan Danau Toba.

Transportasi udara di Kabupaten Tapanuli Utara didukung dengan keberadaan bandara Silangit di Kecamatan Siborongborong. Bandara Silangit dibangun pada masa penjajahan Jepang dan pembangunan kembali bandara ini mulai dilakukan sejak tahun 1995 dengan menambah landas pacu sepanjang 900 meter sehingga menjadi 1.400 meter. Pada Maret 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan langsung pengoperasian Bandara Silangit. Pada tanggal 18 Januari 2011, Bandara Silangit didatangi oleh Presiden RI beserta rombongan yang menggunakan pesawat Boeing 737-500. Dengan kedatangan Presiden tersebut, Bandara Silangit dinyatakan telah sanggup melayani pesawat sekelas A320, A320neo, A330, & B737 Next Generation, & MAX. Pada tanggal 24 November 2017 Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Silangit menjadi Bandara Internasional Silangit.

#### **2.3.2.12. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Dunia komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di era global saat ini. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan, bahkan kini cenderung menjadi kebutuhan primer manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga telah berkembang dengan pesat. Semakin majunya teknologi berdampak pada kemudahan penduduk memperoleh informasi. Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah berharap dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, untuk memudahkan penduduknya mengakses informasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki *website* resmi dengan alamat [www.taputkab.go.id](http://www.taputkab.go.id) yang dapat diakses oleh siapa saja. Diharapkan ke depan *website* ini semakin interaktif dan informatif dalam menyampaikan informasi mengenai Kabupaten Tapanuli Utara. Hingga tahun 2018 berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi telah dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, seperti aplikasi *e-planning* untuk perencanaan (mencakup *e-pokir*,

e-ssh, e-hspk, e-asb), aplikasi e-budgetting untuk penganggaran, aplikasi e-database dan aplikasi e-procurement.

**Tabel 2.71**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan (%)	-	-	-	75	75
2	Cakupan wilayah (kecamatan dan desa) yang mendapat layanan telekomunikasi (%)	-	-	-	65,23	74
3	Persentase rumah tangga dengan akses internet	-	-	-	65,23	74
4	Jumlah surat kabar nasional yang masuk ke daerah	3	4	5	5	5
5	Jumlah surat kabar lokal yang ada di daerah	47	50	58	60	65
6	Jumlah penyiaran radio yang masuk ke daerah	2	3	3	2	2
7	Web Site milik Pemerintah Daerah (unit)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Sesuai dengan arah pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah. Hingga tahun 2018, cakupan wilayah (kecamatan dan desa) yang telah mendapatkan layanan telekomunikasi mencapai 74 persen.

#### **2.3.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja, dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki prospek baik. Sektor koperasi dan UMKM dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Utara apabila usaha berkembang dengan baik. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berazaskan kekeluargaan. Koperasi aktif adalah

koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

**Tabel 2.72**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah koperasi (unit)	431	459	461	464	476
	a. Koperasi Unit Desa (KUD)	30	30	30	30	
	b. Koperasi Non KUD	401	429	431	434	
2	Koperasi aktif (unit)	70	94	100	103	93
3	Koperasi aktif (%)	16,24	20,48	22,13	22,19	19,54
4	Jumlah anggota koperasi (orang)	23.409	23.395	24.307	24.609	25.736
5	Jumlah Koperasi Aktif Berbadan Hukum	70	94	100	103	93
6	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	2.233	6.859	2.760	3.966	4.832
7	Jumlah produk UMKM terstandarisasi	8	8	24	9	8
8	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran	5	5	5	6	6
9	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bantuan					
	a. Permodalan	431	305	318	-	-
	b. Peralatan	-	-	-	-	-
	c. Bantuan lainnya (penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, pemasaran)	20	20	50	75	150

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.72 menunjukkan bahwa jumlah anggota koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah kabupaten menjadi penting. Selain itu semakin meningkatnya jumlah usaha mikro dan kecil yang mana pada tahun 2014 sebanyak 2.233 usaha menjadi 4.832 usaha pada tahun 2018. Usaha skala mikro umumnya merupakan usaha informal yang menjadi penyangga penyerapan tenaga kerja dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara.

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Peran koperasi dalam memperkuat kehidupan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha koperasi dapat dilihat dari permodalan koperasi tersebut.

**Tabel 2.73**  
**Perkembangan Permodalan Koperasi Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Modal Sendiri	62.007.246	62.087.286	62.308.401	69.798.000	69.798.000
2.	Modal Luar	50.001.009	50.001.009	50.678.372	56.293.000	56.293.000
3.	Volume Usaha	226.127.147	293.419.309	314.138.709	429.269.000	429.269.000
4.	Sisa Hasil Usaha (SHU)	1.003.189	1.006.009	1.214.396	1.407.000	1.407.000
5.	Asset	107.703.256	113.094.304	114.201.169	143.783.626	143.783.626

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.73 menunjukkan bahwa koperasi yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara memang lebih banyak menggunakan modal sendiri walaupun masih ada juga yang menggunakan modal dari luar. Adapun koperasi yang menggunakan modal sendiri pada tahun 2018 yaitu 69.798.000 sedangkan menggunakan modal luar yaitu 56.293.000. selain itu sisa hasil usaha juga mengalami peningkatan menjadi 1.407.000 pada tahun 2018.

#### **2.3.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan *output* yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor. Penanaman modal merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Dalam mewujudkan pengembangan investasi di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membuat sistem pelayanan investasi, yaitu penataan kelembagaan perangkat daerah yang mengacu kepada potensi daerah, melakukan peninjauan daftar prioritas dan daftar investasi negatif secara berkala, penguatan kelembagaan daerah didalam Sistem Pelayanan Investasi yang efisien, meningkatkan promosi investasi, melaksanakan pemberian pelayanan perizinan secara terpadu dan mengoptimalkan peran dan fungsi perusahaan daerah.

Pengembangan investasi tersebut diharapkan akan memberikan banyak dampak pengganda (*multiplier effects*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. Untuk mendukung penanaman modal, Pemerintah

Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan, diantaranya:

1. Peningkatan dan kerjasama investasi, melalui koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi, koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pengembangan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi, penyelenggaraan pameran investasi, pembuatan media promosi;
2. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi;
3. Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah yang meliputi kajian wisata kampung di daerah kawasan wisata dan Kajian peluang investasi dibidang agribisnis.

**Tabel 2. 74**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah investor PMDN (Perusahaan)	-	5	4	21	48
2	Nilai Investasi PMDN	-	31.746.000.000	376.818.000.000	4.667.695.000.000	8.839.685.000.000
3	Realisasi Investasi PMDN	-	31.746.000.000	376.818.000.000	4.667.695.000.000	8.839.685.000.000
4	Jumlah Investor PMA	-	2	3	1	1
5	Nilai Investasi PMA	-	7.795.254.000.000	1.942.182.000.000	1.793.698.000.000	500.000.000.000
6	Realisasi Investasi PMA	-	7.795.254.000.000	1.942.182.000.000	1.793.698.000.000	500.000.000.000
7	Jumlah Perijinan yang mempunyai retribusi yang diterbitkan					
	a. Ijin mendirikan bangunan	122	65	71	45	81
	b. Ijin tempat penjualan minuman beralkohol	7	3	-	-	3
8	Nilai retribusi ijin yang dikeluarkan					
	a. Ijin mendirikan bangunan	209.462.191	1.194.930.483	1.182.846.600	535.400.160	1.112.713.450
	b. Ijin tempat penjualan minuman beralkohol	-	1.686.000	-	-	19.305.500
9	Persentase penerbitan ijin tepat waktu	100	100	100	100	100
10	Jumlah permohonan ijin dalam 1 tahun	1.483	2.190	2.297	850	952
11	Persentase permohonan ijin yang diproses dalam 1 tahun	122,56	172	86,77	50,53	80,95
12	Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perijinan	-	69,13	69,4	79,5	88,25

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.74 menunjukkan bahwa jumlah investor PMDN (Perusahaan) mengalami kenaikan setiap tahunnya yang mana pada tahun 2015 sebanyak 5 buah menjadi 48 buah pada tahun 2018. Dengan bertambahnya PMDN (Perusahaan) di Kabupaten Tapanuli Utara, membuka peluang kerja bagi para tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tapanuli sehingga diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **2.3.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, pemuda dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini perlu terus ditingkatkan agar pemuda dapat berfikir positif untuk berkreasi yang akan melahirkan karya-karya nyata dan membawa pengaruh dan perubahan yang besar dalam pembangunan bangsa dan negaranya. Disamping itu pemuda juga diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan teknologi untuk bersaing dengan bangsa lain dalam tataran global. Kebutuhan akan pentingnya olah raga, disamping untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh tetapi juga merupakan salah satu hiburan bagi para peminat olah raga sekaligus mempererat hubungan sosialisasi antar pemuda. Pembinaan olahragawan yang berbakat merupakan salah satu cara untuk mengasah bakat dari atlet agar bisa meningkatkan prestasinya di kancah nasional maupun internasional. Pada tabel berikut ini kita dapat melihat beberapa capaian indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2014-2018.

**Tabel 2.75**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**  
**Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Organisasi Pemuda	-	22	22	22	421
2	Jumlah Organisasi Pemuda Aktif	-	22	22	22	421
3	Jumlah pemuda pelopor	-	-	2	4	5
4	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	-	241	241	241	241
5	Persentase wirausaha muda	-	-	3	3	3
6	Jumlah Organisasi Olahraga	-	21	24	26	26
7	Jumlah Organisasi Olahraga Aktif	-	17	24	26	26
8	Jumlah Kegiatan Olahraga	-	7	7	6	7
9	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	-	4	4	3	

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	a. Lapangan olah raga	-	4	4	4	4
	b. Gedung olah raga	-	-	-	-	-
10	Jumlah cabang organisasi olah raga tingkat Kabupaten		18	20	22	24
11	Cakupan pembinaan olahraga aktif (%)	-	50	55	65	75
12	Cakupan pelatih bersertifikat (%)	-	20	25	45	55
13	Cakupan pembinaan atlet muda	-	25	25	35	45
14	Jumlah atlet berprestasi	-	153	187	207	125
15	Jumlah prestasi olahraga	-	23	23	114	177

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.75 menunjukkan adanya peningkatan prestasi dibidang olahraga dimana pada tahun 2015 jumlah prestasi olahraga sebanyak 23 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 177. Namun hal ini belum didukung dengan ketersediaan gedung olahraga yang memadai sehingga ke depan, pemenuhan fasilitas gedung olahraga menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

#### 2.3.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.

**Tabel 2.76**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019



Ketersediaan data statistik daerah sangat penting untuk melihat gambaran umum daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah dan informasi tersebut dikelola dalam SIPD. Namun saat ini ketersediaan data yang terintegrasi belum dimiliki, sehingga ke depannya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan lebih fokus pada penyediaan data yang terintegrasi. Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahunnya dapat di unduh pada [tapanuliutarakab.bps.go.id](http://tapanuliutarakab.bps.go.id).

#### **2.3.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Saat ini merupakan era keterbukaan dan globalisasi. Era ini berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangat-sangat mudah, bahkan dijamin oleh Undang-Undang. Sebagaimana warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bukan berarti bahwa kebebasan tersebut tanpa batas. Kebebasan untuk mengakses informasi dibatasi oleh informasi yang dikecualikan, dimana informasi ini wajib dilindungi agar selama masa berlakunya, informasi yang dikecualikan ini tetap terjaga kerahasiaan, keutuhan dan keasliannya untuk menjaga stabilitas negara.

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara. Fakta sekarang ini, hampir semua transaksi dilakukan melalui media internet, baik urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun yang sifatnya pribadi.

Secara etimologis sandi diartikan sebagai kode rahasia atau perubahan fonologis yang terjadi pada sebuah kata karena pengaruh *fonem* yang didekatnya. Sandi atau persandian lebih luas dikenal sebagai kriptologi yaitu ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia. Terdapat dua bagian kriptologi yaitu kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi merupakan cara untuk mengolah tulisan dalam berita sehingga menjadi tulisan yang berlainan dan *incoherent*. Kriptanalisis adalah usaha mendapatkan teks terang dari suatu teks sandi yang tidak diketahui sistem dan kuncinya.

Kegiatan persandian pada hakekatnya dimulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman dan penyimpanan. Informasi tersebut terkait dengan isu-isu strategis dan merupakan informasi yang dikecualikan. Pengamanan terhadap informasi yang dihasilkan tersebut dilakukan dengan enkripsi. Kemudian distribusi informasi yang menggunakan sarana komunikasi digital diamankan dengan melakukan enkripsi jaringan dan keutuhan informasi dengan *hash function*. Sementara itu distribusi dalam bentuk *hardcopy* pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan. Persandian sangat membantu komunikasi intern organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama melindungi informasi dari potensi ancaman. Terdapat empat macam ancaman terhadap informasi yaitu interupsi, intersepsi, modifikasi dan fabrikasi. Interupsi adalah halangan penyampaian pesan dari sumber ke penerima. Intersepsi adalah penyadapan terhadap pesan yang sedang disalurkan. Modifikasi adalah merubah pesan dari pengirim sehingga pesan yang diterima berbeda dengan aslinya. Fabrikasi adalah pembuatan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber informasi. Ancaman tersebut merupakan dasar perlu dilakukannya pengelolaan informasi berklasifikasi melalui cara yang modern, holistik, dan sistematis sehingga pelayanan publik akan menghasilkan data yang otentik, utuh, terbebas dari kebocoran dan kerusakan informasi.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 2 dinyatakan bahwa urusan persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebelumnya kedudukan perangkat daerah yang membidangi urusan persandian di lingkungan pemerintah daerah diwadahi dalam lingkup Sekretariat Daerah. Sekarang sesuai ketentuan pasal 18 ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perumpunan urusan pemerintahan bidang persandian tergabung bersama urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik serta perumpunan urusan tersebut harus diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk dinas. Berdasarkan hal tersebut persandian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan oleh Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

Penyelenggaraan pengamanan persandian merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dinyatakan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu maka layanan yang perlu dilakukan adalah melaksanakan tata kelola jaminan keamanan informasi dengan menggunakan persandian yang berdasarkan asas kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan nir-sangkal. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan persandian dilihat dari jumlah informasi yang diamankan menurut peraturan

perundang-undangan. Jumlah konten informasi yang diamankan dengan persandian. Jumlah aset atau fasilitas yang diamankan. Jumlah rata-rata kegiatan penting yang didukung pengamanannya dengan persandian dan jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan informasi yang wajib diamankan.

Praktek persandian pada dasarnya adalah kegiatan pengamanan kegiatan komunikasi dan isi dari komunikasi yang dilakukan oleh intern pemerintah dalam pelayanan publik. Namun demikian peran dan fungsi persandian belum terselenggara sebagaimana diharapkan. Hal tersebut terjadi karena kualitas sumber daya manusia persandian, yang belum memahami apa yang menjadi pekerjaannya seutuhnya. Sehingga organisasi perangkat daerah belum bisa memanfaatkan persandian secara utuh. Walaupun demikian pada hakekatnya Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas, sehingga dapat membantu organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat Tapanuli Utara.

#### **2.3.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Kabupaten Tapanuli Utara dalam proses pembangunan juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Keberagaman budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, baik yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan modal dasar pembangunan dan jati diri bangsa. Selanjutnya potensi tersebut diharapkan mampu menjadi pendukung pada pengembangan di bidang kebudayaan dan sekaligus mampu sebagai pendongkrak (daya ungkit) dan ikon wisata di daerah ini. Kesenian merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di daerah ini. Kesenian yang berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya daerah, seperti pengaruh Batak Toba. Beberapa hal yang telah dicapai dalam bidang kebudayaan antara lain adalah pelestarian benda-benda cagar budaya, festival kesenian rakyat di tingkat kabupaten serta penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK maupun penanaman nilai-nilai budaya daerah di tingkat pelajar.

**Tabel 2.77**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	4	4	4	5
2.	Jumlah kelompok/sanggar seni aktif	-	-	-	-	-
3.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	-	-	7	7

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.77 menunjukkan bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 3 dan pada tahun 2018 menjadi 5. Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk memperkenalkan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara dengan menyelenggarakan acara festival seni dan budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara dan juga yang di luar Kabupaten Tapanuli Utara.

#### 2.3.2.19. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, yang menghendaki perubahan dan evaluasi serta penyempurnaan ke arah terwujudnya administrasi publik yang semakin transparan dan akuntabel, serta tuntutan untuk dapat dilayani berbagai macam jasa layanan perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang sesuai dengan tuntutan zaman, menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar yang efektif.

Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian, sehingga peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen kearsipan menjadi suatu hal yang penting. Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur bidang kearsipan sangat penting dilakukan bagi pengelolaan arsip di OPD setiap tahunnya.

**Tabel 2.78**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah buku perpustakaan (exp):					
	a. TK	1.720	1.820	1.980	2.187	2.696
	b. SD/MI	1.856	2.165	2.165	2.355	2.988
	c. SMP/MTS	2.828	2.940	3.120	3.326	3.938

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	d. SMA/SMK/MA	2.930	3.035	3.245	3.557	3.992
	e. Diploma/Sarjana	3.045	3.233	3.533	3.766	4.563
	f. Buku pengetahuan umum lainnya	3.989	4.315	4.605	4.737	5.705
2.	Jumlah perpustakaan umum di tingkat kabupaten (unit)	1	1	1	1	1
3.	Jumlah perpustakaan umum di tingkat desa/kel (unit)	-	-	-	-	3
4.	Jumlah sarana perpustakaan keliling (unit)	2	2	2	2	2
5.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun					
	a. Perpustakaan umum kabupaten	14.284	16.978	18.227	19.773	21.740
	b. Perpustakaan desa/kelurahan	-	-	-	-	-
6.	Jumlah pengunjung perpustakaan yang meminjam buku					
	a. Perpustakaan umum kabupaten	8.284	9.345	10.222	11.245	12.333
	b. Perpustakaan desa/kelurahan	-	-	-	-	-
7.	Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikat	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku. Peningkatan manajemen perpustakaan dan kearsipan dilakukan melalui pembinaan dan pemantauan kearsipan melalui manajemen perpustakaan dan kearsipan.

Tabel 2.78 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan manajemen perpustakaan dan kearsipan di daerah ini selama tahun 2014-2018 yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah buku yang terdapat di Kantor Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara, baik buku bacaan untuk pelajar pada tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Diploma/Sarjana maupun buku bacaan ilmu pengetahuan. Peningkatan jumlah buku tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat dalam mendukung peningkatan sumberdaya manusia. Dengan meningkatnya jumlah buku di perpustakaan kabupaten sebanding dengan peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan yaitu menjadi 19.779 orang pada tahun 2018. Untuk jumlah pengunjung perpustakaan yang meminjam buku juga mengalami peningkatan menjadi 12.333 pada tahun 2018. Selain itu, dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat telah dikembangkan perpustakaan umum di tingkat desa/kelurahan yang pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 23 unit.

#### **2.3.2.20. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Hilangnya beberapa arsip milik negara, polemik aset negara karena tidak didukung kepemilikan arsip, sulitnya menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat di sebuah organisasi, penumpukan arsip disembarangan tempat, pengelolaan arsip yang tidak sesuai kaidah-kaidah kearsipan merupakan permasalahan kearsipan yang sangat kompleks. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula. Oleh karenanya negara wajib hadir untuk mewujudkan tata kelola kearsipan modern. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 6 ayat 1 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Penyelenggaraan kearsipan nasional meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan nasional berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan di negara ini.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 16 Ayat (2) dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan kearsipan, ANRI dibantu oleh lembaga dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Kemudian Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengawasan di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal ini beriringan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 373 yang mengamanatkan bahwa : 1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, 2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, 3) Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Adapun jenis pengawasan kearsipan terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan oleh ANRI terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan Pemerintah Provinsi. Sementara pengawasan kearsipan eksternal Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui LKD Provinsi terhadap pencipta arsip tingkat Provinsi dan LKD Kabupaten/Kota. Sedangkan, pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh LKD Kabupaten

terhadap OPD Kabupaten; Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) terhadap satuan kerja pada rektorat, fakultas, civitas akademika, dan unit dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi; dan unit kearsipan pada lembaga negara, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya sesuai wilayah kewenangannya.

Dengan adanya audit dan pengawasan kearsipan, diharapkan dapat terwujud pengelolaan kearsipan yang lebih baik. Terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian dapat terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa.

### **2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

Urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi beberapa bidang, yaitu :

1. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
2. Urusan pemerintahan bidang pariwisata.
3. Urusan pemerintahan bidang pertanian.
4. Urusan pemerintahan bidang kehutanan.
5. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Urusan pemerintahan bidang perdagangan.
7. Urusan pemerintahan bidang perindustrian.
8. Urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

#### **2.3.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Sesuai kondisi alamnya, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan wilayah yang kaya sumber daya air dan sumber lahan, dimana selain memiliki Danau Toba juga terdapat kolam, rawa dan beberapa sungai yang cukup panjang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan. Usaha perikanan pada umumnya adalah usaha rumah tangga dalam skala kecil yang sifat usahanya ada yang sudah dikelola secara budidaya dan melalui penangkapan di perairan umum. Rumah tangga budidaya ikan lokasi usahanya ada di kolam dan sawah sedangkan penangkapan ikan dilakukan di sungai, rawa dan danau. Dalam mendukung pengembangan perikanan di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai upaya, di antaranya pengembangan budidaya perikanan dan pengembangan perikanan tangkap dan kolam.

**Tabel 2.79**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	<b>Jumlah Penduduk (Orang)</b>	326.635	324.606	329.218	336.031	347.717
1	Produksi ikan tangkap (ton)	372,80	32,70	35,40	23,90	62,10
2	Produksi ikan budidaya (ton)	1.275,40	1.287,00	1.367,00	1.399,10	2.053,80
3	Persentase ketersediaan ikan sesuai kebutuhan	28,61	23,30	22,90	22,57	27,62
4	Tingkat konsumsi ikan per kapita (Kg/kapita)	20,30	20,50	20,90	21,20	21,3
5	Total kebutuhan ikan konsumsi (Ton)	5.887,80	6.005,20	6.124,50	6.305,20	6.428,60

Sumber : Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.79 menunjukkan bahwa produksi ikan budidaya di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat sejak tahun 2014 dengan budidaya terbesar pada jenis ikan nila. Upaya ini perlu terus ditingkatkan guna pemenuhan kebutuhan protein hewani yang berasal dari ikan yang belum bisa mencapai swasembada, dimana tingkat produksi ikan lokal di daerah belum dapat mencukupi kebutuhan protein yang berasal dari ikan dengan tingkat kekurangan kebutuhan konsumsi ikan rata-rata sebesar 5.596 ton per tahun. Kekurangan kebutuhan pangan protein hewani yang berasal dari ikan di daerah ini diatasi dengan melakukan introduksi ikan yang merupakan sumber protein hewani ikan dari luar daerah.

#### **2.3.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki berbagai potensi alam, budaya dan sejarah yang merupakan daya tarik dan nilai objek wisata dan tersebar di beberapa kecamatan. Objek wisata tersebut terdiri dari objek wisata rohani atau agama, wisata alam atau rekreasi, sejarah atau budaya, obyek wisata hutan atau kebun. Potensi wisata di daerah ini terdiri dari wisata atau rekreasi sebanyak 25 buah, wisata sejarah atau budaya sebanyak 21 buah, wisata rohani atau agama sebanyak 8 buah dan wisata hutan atau kebun sebanyak 5 buah.

Dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai program kepariwisataan untuk mendukung daya tarik wisata ke daerah ini, antara lain Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Kemitraan dan Pengelolaan Keragaman Seni Budaya. Berbagai upaya pengembangan kepariwisataan tersebut telah memberikan kontribusi kepada perkembangan perekonomian daerah ini, yaitu kunjungan wisatawan dan kontribusi PDRB Sektor Pariwisata.



**Tabel 2. 80**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Wisatawan	93.147	109.842	129.813	147.635	153.100
	a. Wisatawan mancanegara	1.500	1.665	1.703	1.870	3.100
	b. Wisatawan Domestik	91.647	108.177	128.110	145.765	150.000
2	Rata-rata lama kunjungan wisata					
	a. Wisatawan mancanegara	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
	b. Wisatawan domestik	1 hari	2 hari	2 hari	3 hari	3 hari
3	Jumlah Daerah Tujuan Wisata	6	7	7	7	8
4	Jumlah Objek Tujuan Wisata	20	31	34	35	35
5	Jumlah promosi pariwisata yang diikuti diluar daerah	1	2	2	2	1
6	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan kepariwisataan	-	-	-	-	100
7	Ketersediaan informasi kalender pariwisata dalam setahun	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8	Persentase realisasi kegiatan sesuai kalender pariwisata	100	100	100	100	100
9	Ketersediaan data rencana Pengembangan Pariwisata Daerah	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
10	PAD sektor pariwisata	51.245.000	90.370.000	130.000.000	130.000.000	200.000.000

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2018

Tabel 2.80 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami kenaikan dari 93.147 orang menjadi 153.100 orang. Kabupaten Tapanuli Utara juga sudah melakukan beberapa kegiatan untuk dapat meningkatkan jumlah pariwisata dengan menambah objek tujuan wisata yang juga ditunjang dengan perbaikan sarana dan prasarana. Dengan bertambahnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya pelaku-pelaku usaha dibidang pariwisata dan dapat menonjolkan hasil karya daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **2.3.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Sektor Pertanian memegang peranan penting dan merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Sektor pertanian memberikan fasilitas dan dorongan yang lebih terarah bagi perkembangan pembangunan kerakyatan. Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, tanaman

hortikultura dan tanaman perkebunan. Unggulan tanaman pangan adalah padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar serta kacang tanah. Sedangkan unggulan tanaman hortikultura adalah cabai merah, bawang merah, alpukat, jeruk dan nenas. Unggulan tanaman perkebunan adalah kopi dan kakao. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Utara mayoritas penduduk Kabupaten Tapanuli Utara bermata pencarian sebagai petani. Oleh karena itu, produk pertanian khususnya tanaman pangan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani, hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga. Potensi lahan yang cukup luas yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara sangat cocok untuk pengembangan pertanian komoditi pangan dan palawija dan pengembangan komoditi perkebunan.

#### 2.3.3.3.1. Tanaman Pangan

Pengembangan sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Tapanuli Utara cukup potensial karena didukung oleh potensi lahan yang cukup luas, yang meliputi : potensi lahan sawah seluas 16.879 Ha dan lahan kering untuk tanaman pangan dan perkebunan seluas 126.095 Ha.

**Tabel 2.81**  
**Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Padi</b>					
	Produksi (Ton)	158.017,68	160.577,95	170.918,57	182.743,02	229.162,12
	Luas panen (Ha)	28.550	28.899,43	30.108,00	32.378,00	42.162,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	46,345	46,58	51,96	52,52	52,61
<b>2</b>	<b>Padi Sawah</b>					
	Produksi (Ton)	145.758,30	148.131,96	151.342,64	153.816,55	158.144,96
	Luas panen (Ha)	24.980,00	25.304,40	25.778,00	26.106,00	26.777,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	58,35	58,54	58,71	58,92	59,06
<b>3</b>	<b>Padi Ladang (Gogo)</b>					
	Produksi (Ton)	12.259,38	12.445,99	19.575,93	28.926,46	71.017,16
	Luas panen (Ha)	3.570,00	3.595,03	4.330,00	6.272,00	15.385,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	34,34	34,62	45,21	46,12	46,16
<b>4</b>	<b>Jagung</b>					
	Produksi (Ton)	14.770,47	14.866,00	37.250,33	47.641,55	64.941,22
	Luas panen (Ha)	4.290,00	4.306,49	7.035,00	8.930,00	12.159,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	34,43	34,52	52,95	53,35	53,41
<b>5</b>	<b>Kacang Tanah</b>					
	Produksi (Ton)	2.521,40	2.600,98	2.654,40	2.550,83	2.583,17
	Luas panen (Ha)	1.400,00	1.417,43	1.344,00	1.287,00	1.302,00

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Produktivitas (Kw/Ha)	18,01	18,35	19,75	19,82	19,84
<b>6</b>	<b>Ubi Kayu</b>					
	Produksi (Ton)	31.744,95	32.123,07	23.659,24	21.131,49	21.168,29
	Luas panen (Ha)	1.770,00	1.788,49	1.269,00	1.123,00	1.124,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	179,35	179,61	186,44	188,17	188,33
<b>7</b>	<b>Ubi Jalar</b>					
	Produksi (Ton)	11.757,16	11.829,58	14.197,92	14.544,11	14.599,76
	Luas panen	1.114,00	1.116,63	880,00	865,00	868,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	105,54	105,94	161,34	168,14	168,20

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Secara umum produksi padi (padi sawah dan padi gogo) setiap tahun naik dan rata-rata produksi selama lima tahun terakhir adalah sebanyak 180.283,868 ton. Komoditi lain yang berpotensi untuk dikembangkan adalah jagung dimana rata-rata produksi selama lima tahun terakhir adalah 35.893,914 ton.

#### 2.3.3.3.2. Tanaman Hortikultura

Sub sektor hortikultura merupakan komoditas yang cukup potensial dikembangkan secara agribisnis karena punya nilai ekonomis dan nilai tambah cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Selain fungsi ekonomi tersebut tanaman hortikultura mempunyai nilai kalori cukup tinggi, merupakan sumber vitamin, mineral, serat alami dan anti oksidan, sehingga selalu diperlukan oleh tubuh sebagai sumber pangan maupun nutrisi serta berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Melihat manfaat dan fungsinya dapat dikatakan hortikultura dapat diandalkan untuk memajukan perekonomian daerah. Komoditas hortikultura mencakup tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, tanaman hias (florikultura) dan tanaman bahan obat (biofarmaka). Hortikultura memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama pada pola pangan harapan. Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan, sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

**Tabel 2.82**  
**Rata-rata Produksi Tanaman Sayur-sayuran Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Cabe Merah</b>					
	Produksi (Ton)	5.925,00	6.241,71	6.684,32	8.871,72	9.298,00
	Luas panen (Ha)	1.092,77	1.145,06	1.202,00	1.604,00	1.680,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	54,22	54,51	55,61	55,31	55,35

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>2</b>	<b>Bawang Merah</b>					
	Produksi (Ton)	480,20	500,74	541,53	609,51	632,15
	Luas panen (Ha)	67,40	70,00	74,00	82,00	85,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	71,25	71,53	73,18	74,33	74,37

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Kontribusi sub sektor tanaman hortikultura ini perlu terus ditingkatkan, mengingat tanaman ini merupakan tanaman sela diantara musim tanam padi berikut. Beberapa wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara bahkan menjadikan tanaman ini menjadi komoditi utama pertanian dari wilayah bersangkutan.

Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang telah mampu berkontribusi bagi pembangunan. Komoditas ini juga sangat potensial dan prospektif untuk diusahakan karena metode pembudidayaan cenderung mudah dan sederhana. Kegiatan usaha tani buah-buahan juga berperan besar dalam peningkatan pendapatan masyarakat, hal ini dikarenakan komoditas tersebut memiliki nilai komersial yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas yang lainnya.

**Tabel 2.83**  
**Perkembangan Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Alpukat</b>					
	Produksi (Ton)	811,50	814,93	816,14	845,76	862,53
	Luas panen (Ha)	109,66	110,01	112,00	116,00	118,30
	Produktivitas (Kw/Ha)	74,00	74,08	72,87	72,91	72,91
<b>2</b>	<b>Mangga</b>					
	Produksi (Ton)	1.167,00	1.192,92	1.194,02	1.220,80	1.237,31
	Luas panen (Ha)	153,05	156,00	156,00	159,00	161,15
	Produktivitas (Kw/Ha)	76,25	76,47	76,54	76,78	76,78
<b>3</b>	<b>Jeruk</b>					
	Produksi (Ton)	3.101,00	3.129,07	3.132,22	3.260,54	3.304,21
	Luas panen (Ha)	214,23	216,01	216,00	224,00	227,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	144,75	144,86	145,01	145,56	145,56
<b>4</b>	<b>Durian</b>					
	Produksi (Ton)	5.798,00	5.819,42	5.819,43	5.884,09	5.903,43
	Luas panen (Ha)	601,14	603,30	603,30	608,30	610,30
	Produktivitas (Kw/Ha)	96,45	96,46	96,46	96,73	96,73
<b>5</b>	<b>Nenas</b>					
	Produksi (Ton)	34.456,00	34.477,57	34.856,81	34.917,95	34.974,38
	Luas panen (Ha)	1.927,61	1.927,84	1.947,09	1.949,09	1.952,24
	Produktivitas (Kw/Ha)	178,75	178,84	179,02	179,15	179,15

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Nenas menjadi salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Tapanuli Utara yang produksinya pada tahun 2018 mencapai 34.974, 38 ton dengan area pertanaman terluas di Kecamatan Sipahutar.

#### 2.3.3.3.3. Tanaman Perkebunan

Ditinjau dari segi iklim dan ketersediaan lahan Kabupaten Tapanuli Utara sangat cocok dan sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan. Pada umumnya perkebunan di daerah ini merupakan usaha perkebunan rakyat dan belum terdapat usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Walaupun demikian di masa mendatang diharapkan perkebunan rakyat ini semakin berkembang. Jenis komoditi unggulan yang dibudidayakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara adalah tanaman kopi arabika. Hal ini terlihat dari besarnya luas tanaman kopi arabika dengan luas tanam terbesar ada di Kecamatan Siborongborong. Kemudian diikuti oleh tanaman kemenyan dengan luas tanam terbesar terdapat di Kecamatan Pangaribuan.

**Tabel 2.84**  
**Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Karet</b>					
	Produksi (Ton)	5.435,00	5.437,00	5.437,61	5.478,36	5.497,75
	Luas panen (Ha)	8.131,36	8.134,35	8.150,75	8.383,11	8.393,51
	Produktivitas (Kg/Ha)	668,40	668,40	667,13	653,50	655,00
<b>2</b>	<b>Kemenyan</b>					
	Produksi (Ton)	3.654,50	3.660,75	3.661,15	3.833,71	3.849,54
	Luas panen (Ha)	13.923,50	13.947,31	13.947,25	13.984,00	13.991,20
	Produktivitas (Kg/Ha)	262,47	262,47	262,50	274,15	275,14
<b>3</b>	<b>Kopi Arabika</b>					
	Produksi (Ton)	10.780,00	10.891,13	10.932,09	11.823,49	11.833,43
	Luas panen	5.450,09	10.097,00	10.131,50	12.052,36	12.062,00
	Produktivitas (Kg/Ha)	1.977,95	1.078,65	1.079,02	981,01	981,05
<b>4</b>	<b>Kopi Robusta</b>					
	Produksi (Ton)	545,00	546,90	546,93	567,82	568,99
	Luas panen (Ha)	1.053,02	1.056,48	1.056,49	1.100,99	1.103,10
	Produktivitas (Kg/Ha)	517,56	517,66	517,69	515,74	515,81
<b>5</b>	<b>Kelapa</b>					
	Produksi (Ton)	253,10	253,15	253,17	264,16	266,25
	Luas panen (Ha)	225,84	225,85	225,85	242,1	244,00
	Produktivitas (Kg/Ha)	1.120,70	1.120,88	1.120,97	1.091,12	1.091,17
<b>6</b>	<b>Kakao</b>					
	Produksi (Ton)	1.401,00	1.404,05	1.404,20	1.772,64	1.774,95
	Luas panen (Ha)	1.951,25	1.955,01	1.955,00	2.628,28	2.631,50
	Produktivitas (Kg/Ha)	718,00	718,18	718,26	674,45	674,5

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>7</b>	<b>Kulit Manis</b>					
	Produksi (Ton)	1.115,00	1.126,05	1.126,15	1.126,15	1.126,15
	Luas panen	195,27	197,20	197,20	197,20	197,20
	Produktivitas (Kg/Ha)	5.710,00	5.710,19	5.710,70	5.710,70	5.710,72
<b>8</b>	<b>Kemiri</b>					
	Produksi (Ton)	215,00	216,55	216,65	221,96	223,46
	Luas panen (Ha)	274,88	276,75	276,75	296,00	298,00
	Produktivitas (Kg/Ha)	782,15	782,48	782,84	749,86	749,88
<b>9</b>	<b>Aren</b>					
	Produksi (Ton)	173,10	174,20	174,28	175,78	177,18
	Luas panen	269,16	270,75	270,75	294,9	297,20
	Produktivitas (Kg/Ha)	643,10	643,40	643,69	596,07	596,15
<b>10</b>	<b>Tembakau</b>					
	Produksi (Ton)	412,24	428,87	433,13	468,00	472,99
	Luas panen (Ha)	353,85	366,56	195,00	390,00	393,50
	Produktivitas (Kg/Ha)	1.165,00	1.170,00	1.125,00	1.200,00	1.202,00

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

#### 2.3.3.3.4. Peternakan

Dalam mendukung pengembangan usaha peternakan di daerah ini terdapat potensi lahan padang penggembalaan yang tersebar di seluruh kecamatan. Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Melalui berbagai program bidang peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara telah didapat capaian hasil kegiatan pembangunan pada bidang peternakan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.85**  
**Perkembangan Populasi dan Produksi Peternakan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Sapi</b>					
	Populasi (ekor)	437	442	469	471	473
	Produksi (Kg/Tahun)	1.967,31	1.987,61	2.110,04	2.120,59	2.131,20
<b>2</b>	<b>Kerbau</b>					
	Populasi (ekor)	9.246	9.433	9.527	9.622	9.718
	Produksi (Kg/Tahun)	110.956,44	113.192,88	114.324,81	115.468,06	116.622,74
<b>3</b>	<b>Kambing</b>					
	Populasi (ekor)	1.869	1.910	1.959	1.969	1.978
	Produksi (Kg/Tahun)	887,78	907,20	930,67	935,33	940
<b>4</b>	<b>Babi</b>					
	Populasi (ekor)	57.681	59.023	61.679	64.454	67.354

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Produksi (Kg/Tahun)	1.107.475,2	1.133.234,5	1.184.230,05	1.237.520,04	1.293.208,82
<b>5</b>	<b>Ayam</b>					
	Populasi (ekor)	422.140	424.637	427.822	431.031	434.263
	Produksi (Kg/Tahun)	88.649,4	89.173,82	89.842,62	90.516,44	91.195,31
<b>6</b>	<b>Itik</b>					
	Populasi (ekor)	31.875	32.456	32.700	32.944	33.191
	Produksi (Kg/Tahun)	4.845	4.933,34	4.970,34	5.007,61	5.045,17
<b>7</b>	<b>Ayam</b>					
	Populasi ayam kampung (ekor)	633.210	641.733	641.733	646.546	649.193,13
	Produksi telur ayam kampung (Kg/Tahun)	5.065.680	5.133.864	5.133.864	5.172.368	5.193.545
<b>8</b>	<b>Bebek</b>					
	Populasi bebek (ekor)	286.875	292.105,5	294.296,25	296.503,5	296.628,13
	Produksi telur bebek (Kg/Tahun)	2.295.000	2.336.844	2.354.370	2.372.028	2.373.025
9	Produksi susu	231.250	232.210	235.560	240.750,9	237.641,96

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Secara umum populasi ternak bertambah setiap tahun dan produksi ternak terbanyak adalah kerbau, babi dan ayam yang merupakan konsumsi daging utama masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan untuk protein hewani, populasi dan produksi ternak tersebut harus ditambah agar tercapai swasembada pangan.

#### 2.3.3.3.5. Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau *social interplay* dalam suatu komunitas. Kelembagaan petani juga memiliki titik strategis (*entry point*) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian sangat mendukung pembangunan sektor pertanian. Dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia petani dilakukan pemberdayaan petani melalui penyuluhan. Keberadaan balai penyuluhan dan tenaga penyuluh pertanian sangat memegang peranan penting didalam pemberdayaan dan keberhasilan pembangunan sektor pertanian di daerah ini. Keberadaan kelembagaan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014-2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.86**  
**Perkembangan Kelembagaan Pertanian Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (Orang)	125	132	127	180	177
2	Jumlah Kelompok Tani (Poktan) (Kelompok)	1.925	2.092	2.126	2.200	2.256
3	Jumlah Poktan yang sudah berbadan hukum	-	-	-	-	50
4	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) (Kel)	170	181	203	145	152
5	Jumlah Gapoktan yang sudah berbadan hukum	-	-	-	-	-
6	Jumlah WKPP (Unit)	135	132	127	180	177

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Berdasarkan data Tabel 2.86, terjadi penambahan jumlah PPL menjadi 177 orang pada tahun 2018 dengan target 1 orang PPL per desa hingga tahun 2019. Penambahan jumlah PPL ini diharapkan mampu membantu para petani di lapangan dalam menghadapi berbagai permasalahan di bidang pertanian.

#### **2.3.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Secara kewenangan, pertambangan sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kewenangan pemerintah daerah terkait ESDM hanya pada pemanfaatan energi terbarukan, dalam hal ini bisa pada pemanfaatan langsung energi panas bumi. Pemanfaatan langsung pada energi panas bumi selama ini belum dilakukan secara teknis oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral dari berbagai sumber adalah kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB terus mengalami penurunan. Mulai tahun 2017 urusan pilihan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah panas bumi.

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan wilayah yang memiliki potensi tambang dan galian, diantaranya kaolin 5,28 juta ton, batu gamping 192,40 juta ton, batu apung 0,6 juta ton, belerang 1,35 juta ton, feldspar 14 juta ton, sirtu 3,12 juta ton, oker 4,5 juta ton, zeolit 1,82 juta ton, trass 1,80 juta ton, lempung 0,54 juta ton, batu setengah mulia 1.24 juta ton, slate/sabak 0,15 juta ton, mika 1,20 juta ton, silika 1,2 juta ton, serisit 0,416 juta ton, tanah diatomae 0,05 juta ton, granit 249,6 juta ton dan dolomit magnesit 0,005 juta ton. Pada tahun 2013, PDRB sub sektor pertambangan telah memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara (ADHK 2000) sebesar 0,08 persen.

Pemenuhan bahan bakar untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dilayani melalui 4 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan pelayanan energi listrik dilaksanakan oleh PT. PLN Distribusi Wilayah Sumatera Utara, pada



tahun 2012 terdapat 30.419.679 KWh energi listrik yang terpakai untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dengan orang pelanggan, dimana terdapat pelanggan rumah tangga sebanyak 29.282 rumah tangga. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (rasio elektrifikasi) adalah 83 persen pada tahun 2013. Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan pada tahun yang akan datang, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga terus diupayakan baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN ataupun Non PLN.

#### 2.3.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Pengembangan sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur perekonomian antara sektor pertanian dan sektor industri, perluasan lapangan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemanfaatan sumberdaya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jenis usaha pada umumnya merupakan industri skala kecil/kerajinan menengah.

**Tabel 2.87**  
**Perkembangan Industri Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2014-2018**

No	Kelompok Industri	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah industri Pangan					
	a. Unit usaha	645	651	659	666	666
	b. Tenaga Kerja	1.830	1.834	1.843	1.849	1.849
	c. Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	-	-	-	-	-
2	Jumlah industri Sandang dan kulit					
	a. Unit usaha	2.245	2.246	2.256	2.255	2.258
	b. Tenaga Kerja	4.228	4.232	4.236	4.238	4.241
	c. Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	-	-	-	-	-
3	Jumlah industri Kimia & Bahan Bangunan					
	a. Unit usaha	169	169	186	186	186
	b. Tenaga Kerja	571	571	588	588	588
	c. Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	-	-	-	-	-
4	Jumlah industri Kerajinan Umum					
	a. Unit usaha	242	246	246	350	350
	b. Tenaga Kerja	403	405	406	698	698
	c. Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi					
5	Jumlah industri logam					
	a. Unit usaha	302	311	347	253	254
	b. Tenaga Kerja	659	659	700	407	410
	c. Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi					

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.87 dapat dilihat bahwa jumlah industri di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014 sebanyak 3.603 unit dan meningkat pada tahun 2018

menjadi 3.714 unit. Dengan meningkatnya jumlah industri maka tenaga kerja juga semakin meningkat dimana pada tahun 2014 sebanyak 7.691 orang menjadi 7.786 orang pada tahun 2018.

#### **2.3.3.6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat. Adapun perkembangan urusan transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.88.

**Tabel 2.88**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Luas area transmigrasi (Ha)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Jumlah peserta transmigrasi (KK)	100	100	100	100	100
3	Persentase transmigran yang mendapat pelatihan	100	100	100	100	100
4	Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya	60	60	60	60	60

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Areal transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Utara berada di Kecamatan Garoga dengan luas 1.000 Hektar dan jumlah peserta transmigrasi sebanyak 100 kepala keluarga yang berasal dari Pulau Jawa dan transmigran lokal.

#### **2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

##### **2.3.4.1. Sekretariat Daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut diketahui Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah juga melaksanakan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan urusan kewenangan setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah

provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa Jabatan (LKPJ dan AMJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Program penataan peraturan perundangan di daerah ini dilaksanakan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan menjamin kepastian hukum telah diterbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

**Tabel 2.89**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Peraturan Daerah Kab. Tapanuli Utara	12	10	10	5	11
2	Jumlah Peraturan Bupati Tapanuli Utara	43	49	62	51	44
3	Jumlah Keputusan Bupati	720	1.101	583	544	617
4	Jumlah Nota Kesepakatan	11	10	12	14	10
5	Jumlah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)	1	1	4	3	2
6	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5	4	11	10	4
7	Nilai LPPD	2,58	2,88	2,73	2,76	-
8	Nilai SAKIP	28,47	32,79	36,84	50,08	50,51
9	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	6,67	10,00	13,33
10	Persentase Perangkat Daerah dengan pelayanan publik bernilai baik	-	-	6,67	10,00	13,33
11	Persentase SOP yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah	-	-	20,00	25,00	30,00
12	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	-	5,00	10,00	15,00	20,00
13	Cakupan pedoman ketatatlaksanaan yang tersusun	10,00	10,00	15,00	15,00	20,00
14	Persentase permohonan bansos yang dapat ditindaklanjuti					
	a. Jumlah permohonan yang masuk	130	136	138	102	110
	b. Jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	110	111	110	76	92
	c. Persentase permohonan yang telah ditindaklanjuti	84,62	81,62	79,71	74,51	83,64
15	Persentase bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran	100	100	100	100	100
16	Jumlah SKPD yang menyusun RUP	29	32	35	52	47
17	Persentase rata-rata capaian laba BUMD/Perusda					
	a. Persentase rata-rata capaian laba PDAM Mual Natio	84	78	115	103	80

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	b. Persentase rata-rata capaian laba Perusda Pertanian	67,20	54,49	28,82	18,37	44,90
	c. Persentase rata-rata capaian laba Perusda Industri dan Pertambangan	-	1,89	20,00	22,00	43,00

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.89 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penataan peraturan perundangan di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini merupakan pembaruan Perda dan Perbup yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan, pelayanan publik dan jaminan kepastian hukum masyarakat dan peningkatan pelayanan umum serta promosi daerah. Penegakan peraturan daerah sudah berjalan dengan baik, dimana hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif yang dilakukan melalui pelaksanaan pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos siskamling.

#### 2.3.4.2. Sekretariat DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh.

**Tabel 2.90**  
**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Prolegda	15	15	19	13	15
2	Jumlah kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu	6	6	6	6	6
3	Jumlah kebijakan anggaran yang harus disepakati	6	6	6	6	6

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara, 2019

#### 2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

##### 2.3.5.1. Perencanaan

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan di daerah dan dalam era globalisasi maka dituntut sebuah perencanaan yang akuntabel, efisien, efektif dan

transparan. Mendasar pada permasalahan dan kondisi yang ada maka untuk mencapai target yang ditetapkan disusun strategi peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengembangan IPTEK. Adapun langkah kebijakan yang ditempuh dengan meningkatkan kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan meningkatkan kinerja fungsi penelitian dan pengembangan IPTEK Daerah. Penyelarasan secara terpadu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis perlu semakin ditingkatkan. Penyusunan RPJMD harus mengacu pada penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketersediaan dokumen perencanaan di daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.91**  
**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
1.	Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda							V				Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2001 telah diubah dengan Perda Kab. Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017
2.	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda											Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006
3.	Dokumen RPJMD yg ditetapkan dengan PERDA	V										Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2018
4.	Dokumen Renstra SKPD yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan ditetapkan Keputusan Kepala SKPD			V								
5.	Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA	V		V		V		V		V		
6.	Dokumen Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA	V		V		V		V		V		
7.	Dokumen Renja SKPD yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan ditetapkan Keputusan Kepala SKPD	V		V		V		V		V		

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2019

### 2.3.5.2. Keuangan

Kabupaten Tapanuli Utara memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.92**  
**Indikator Kinerja Urusan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018**

No.	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SiLPA terhadap APBD	11,12	10,87	4,45	5,04	4,69
3	Persentase belanja pendidikan	44,66	38,76	34,59	32,95	30,70
4	Persentase belanja kesehatan	10,14	9,85	12,43	12,97	13,95
5	Persentase belanja tidak langsung terhadap total APBD	61,08	56,85	60,64	63,17	59,74
6	Persentase belanja langsung terhadap total APBD	38,92	43,15	39,36	36,83	40,26
7	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja langsung	10,48	8,96	8,93	12,48	9,88
8	Persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja langsung	43,44	40,23	42,56	52,36	55,25
9	Persentase belanja modal terhadap total belanja langsung	46,09	50,81	48,51	35,16	34,87
10	Jumlah Wajib Pajak Daerah					
	a. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	91,10	92,60	93,35	95,90	98,32
	b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	526	814	608	658	643
	c. Pajak hotel	17	18	24	25	25
	d. Pajak restoran	86	91	98	100	105
	e. Pajak hiburan	13	13	13	16	18
	f. Pajak reklame	18	33	44	52	47
	g. Pajak mineral bukan logam dan batuan	317	395	658	438	757
	h. Pajak parkir	-	-	-	1	1
	i. Pajak penerangan jalan	1	1	1	1	1
11	Jumlah Wajib Retribusi Sewa Tanah	737	737	737	726	785
12	Persentase wajib pajak daerah yang melakukan pembayaran tepat waktu	92,59	90,23	86,36	86,54	81,97
13	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap target	130,98	115,98	101,92	102,77	91,81
14	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah terhadap target	30,98	15,98	1,92	2,77	-8,11
15	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target	138,95	117,78	112,43	90,46	70,78

No.	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
16	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah terhadap target	38,95	17,78	12,43	-9,54	-29,22
17	Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap target	137,89	108,49	98,70	587,01	-36,56
18	Persentase peningkatan penerimaan retribusi daerah terhadap target	37,89	8,49	-1,30	487,01	-36,56
19	Rasio kemandirian keuangan daerah	7,29	7,63	7,91	13,30	8,19

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Permasalahan yang dihadapi dalam fungsi pengelolaan keuangan adalah adanya dinamika kebijakan pemerintah dan dinamika implementasi penganggaran dari OPD, kurangnya pemahaman OPD terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator, belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan kekayaan daerah serta kurang optimalnya pendapatan daerah. Target yang akan dicapai pada akhir RPJMD adalah peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mempertahankan kondisi posisi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) melalui kebijakan peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran, penyempurnaan regulasi, meningkatkan kualitas belanja daerah, mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah, menggali potensi baru pendapatan daerah, peningkatan kualitas dan efisiensi pengelolaan BUMD, peningkatan investasi daerah serta meningkatkan kualitas pengendalian dan pelaporan keuangan dan aset daerah.

#### 2.3.5.3. Kepegawaian

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer).

**Tabel 2.93**  
**Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah ASN					
	a. Laki - Laki	2.496	2.605	2.146	2.069	2.061
	b. Perempuan	3.734	3.957	3.435	3.563	3.552
2.	ASN berdasarkan Jabatan :					
	A. ESELON II					
	a. ASN yang telah mengikuti DIKLATPIM II	3	3	3	3	4

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	b. ASN yang belum mengikuti DIKLATPIM II	30	30	30	30	29
	B. ESELON III					
	a. ASN yang telah mengikuti DIKLATPIM III	6	30	34	34	34
	b. ASN yang belum mengikuti DIKLATPIM III	158	134	130	130	130
	C. ESELON IV					
	a. ASN yang telah mengikuti DIKLATPIM IV	70	70	97	97	97
	b. ASN yang belum mengikuti DIKLATPIM IV	454	454	427	427	427
	D. ASN yang mengikuti Diklat					
	a. ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	250	250	250	450	480
	b. ASN yang mengikuti Diklat Teknis	190	190	190	250	290
3.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (jam pelatihan)	11	12	12	14	14
4.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	7,0	6,7	7,8	12,5	13
5.	Jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah	30	31	30	32	34
6.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	142	158	156	164	722
7.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	5.603	5.849	4.900	3.815	4.748

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sampai saat ini antara lain belum meratanya distribusi jumlah pegawai antar OPD. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan PNS disebabkan kuota formasi CPNS yang terbatas, belum optimalnya kapasitas pegawai, belum optimalnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan belum optimalnya sistem penghargaan atas kinerja pegawai termasuk untuk pemberian tambahan penghasilan pegawai belum berdasarkan pada beban kerja. Target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD dalam domain fungsi penunjang kepegawaian dan diklat adalah meningkatkan pengembangan, pendayagunaan, pembinaan dan layanan aparatur yang optimal. Berdasarkan pada permasalahan dan kondisi yang ada maka untuk mencapai target yang ditetapkan disusun strategi dengan peningkatan pendayagunaan, pengembangan dan pelayanan aparatur. Sedangkan kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan pengelolaan kepegawaian, meningkatkan kualitas, kuantitas dan jenis pendidikan serta pelatihan bagi aparatur. Kebijakan yang mendorong pengembangan aparatur ini diindikasikan dengan adanya formasi pegawai sebagai pedoman manajemen kepegawaian, keterisian jabatan ASN sesuai kompetensi dan diklat sesuai kebutuhan. Sedangkan kebijakan yang mengarah pada pendayagunaan aparatur diindikasikan dengan ratio distribusi pegawai yang berimbang dan kenaikan pangkat tepat waktu. Untuk kebijakan



pembinaan dan pelayanan aparatur diindikasikan dengan penurunan pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin, layanan kepegawaian tepat waktu serta layanan kepegawaian yang berbasis sistem informasi.

#### **2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan review. Capaian pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.94**  
**Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2014-2018**

LHP	Tahun																								
	2014					2015					2016					2017					2018				
	Jlh Temu-an	Jlh Reko-mendasi	S	D	B	Jlh Temu-an	Jlh Reko-mendasi	S	D	B	Jlh Temu-an	Jlh Reko-mendasi	S	D	B	Jlh Temu-an	Jlh Reko-mendasi	S	D	B	Jlh Temu-an	Jlh Reko-mendasi	S	D	B
Inspektorat Kab. Tapanuli Utara																									
ADD/Dana Desa	42	45	45	0	0	51	60	60	0	0	122	120	120	0	0	1.219	1.340	1.316	24	0	1.108	1.212	1.202	10	0
Fisik/Belanja Modal	57	50	50	0	0	143	127	127	0	0	85	63	56	1	6	63	86	79	0	7	45	51	17	0	34
Kinerja OPD	84	82	82	0	0	84	82	82	0	0	90	90	79	11	0	177	201	195	1	5	102	99	91	0	8
Dana BOS	33	86	36	0	0	85	52	50	0	2	92	105	101	2	2	89	106	105	1	0	340	360	359	1	0
Pengaduan Masyarakat	32	46	46	0	0	146	101	101	0	0	192	192	190	2	0	159	105	96	0	9	24	18	17	0	1
Kinerja Kecamatan	88	88	88	0	0	88	88	88	0	0	42	36	36	0	0	82	90	87	0	3	36	40	40	0	0
Lembaga Kesehatan	23	64	64	0	0	43	45	45	0	0	113	123	114	0	9	54	65	65	0	0	-	-	-	-	-
Lembaga Pendidikan	54	79	79	0	0	66	74	74	0	0	113	137	137	0	0	54	57	56	0	1	-	-	-	-	-
Kinerja UPT	56	59	59	0	0	174	183	183	0	0	189	197	190	0	7	173	160	154	2	4	54	57	56	0	1
Jumlah I	469	549	549	0	0	880	812	810	0	2	1.038	1.063	1.023	16	24	2.070	2.210	2.153	28	29	1.709	1.837	1.782	11	44
Inspektorat Provinsi																									
Reguler	15	26	23	3	0	15	40	36	4	0	16	46	45	1	0	18	90	85	5	0	13	63	54	9	0
Jumlah II	15	26	23	3	0	15	40	36	4	0	16	46	45	1	0	18	90	85	5	0	13	63	54	9	0
BPK RI Perwakilan Prov. Sumatera Utara																									
LKPD	14	36	30	5	1	15	40	34	6	0	26	87	83	4	0	18	90	84	6	0	8	15	0	15	0
Jumlah III	14	36	30	5	1	15	40	34	6	0	26	87	83	4	0	18	90	84	6	0	8	15	0	15	0
Jumlah Total I + II + III	498	611	602	11	1	910	892	880	14	2	1.080	1.196	1.151	21	24	2.106	2.390	2.322	39	29	1.730	1.915	1.836	35	44

Sumber : Inspektorat Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan di daerah dan dalam era globalisasi maka dituntut sebuah perencanaan yang akuntabel, efisien, efektif dan transparan. Permasalahan yang dihadapi pada konteks fungsi penunjang pengawasan ini adalah bahwa tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan belum dapat diselesaikan 100% oleh obyek pemeriksaan dan masih adanya kesenjangan jumlah aparat pengawasan/auditor dibandingkan dengan beban kerja obyek pemeriksaan. Target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD adalah meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengawasan desa. Untuk mencapai target tersebut diperlukan strategi dan kebijakan peningkatan kinerja pengawasan dan evaluasi instansi pemerintah dengan melaksanakan pemeriksaan pada seluruh OPD dan desa, mendorong obyek pemeriksaan tidak ada temuan dan tindak lanjut rekomendasi temuan yang tepat waktu.

#### **2.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

##### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya, salah satunya melalui konsumsi akhir rumah tangga, yang merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data pada tabel 2.95 menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tapanuli Utara, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara maupun produk impor yang didatangkan dari luar wilayah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

**Tabel 2.95**  
**Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2017**

No	Komponen Pengeluaran	Tahun							
		2014		2015		2016		2017	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.547.363,56	2.908.001,28	3.846.894,55	3.013.074,69	4.209.331,94	3.160.064,52	4.631.552,70	3.293.409,51
	a. Makanan, Minuman dan Rokok	1.961.824,45	1.648.526,38	2.128.332,55	1.704.824,01	2.356.102,76	1.799.853,80	2.616.322,15	1.874.459,36
	b. Pakaian dan Alas Kaki	175.475,99	148.725,08	195.847,22	157.018,03	215.051,60	164.203,14	237.590,96	172.730,36
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	442.558,91	360.084,88	472.885,71	370.808,94	505.002,00	383.910,16	542.346,27	398.203,59
	d. Kesehatan dan Pendidikan	247.271,50	209.248,54	266.614,41	217.354,22	286.754,29	225.128,99	308.355,4	233.062,50
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	480.697,95	373.857,58	527.265,61	391.059,35	572.329,95	409.709,41	629.274,46	430.967,49
	f. Hotel dan Restoran	153.371,41	100.216,96	163.165,23	102.390,99	173.331,72	104.595,94	186.505,04	108.110,86
	g. Lainnya	86.163,34	67.341,87	92.783,81	69.619,16	100.759,62	72.663,07	111.158,39	75.875,35
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	274.840,47	244.164,37	296.060,65	254.293,45	315.959,76	265.278,94	335.997,33	275.712,65
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	976.893,19	836.784,55	1.058.487,26	863.669,84	137.377,97	884.689,31	1.205.705,23	893.887,95
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.884.522,39	1.327.644,22	2.198.609,47	1.432.525,09	2.529.025,64	1.548.932,22	2.879.210,36	1.685.852,26
	<b>PDRB</b>	<b>5.429.327,83</b>	<b>4.642.325,79</b>	<b>5.855.611,46</b>	<b>4.869.478,21</b>	<b>6.300.290,07</b>	<b>5.070.194,85</b>	<b>6.765.691,15</b>	<b>5.280.688,78</b>

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia, yaitu rata-rata sebesar 66,58 persen (ADHB) dan 62,30 persen (ADHK). Data pada tabel 2.95 menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tapanuli Utara, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga. Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selama periode tahun 2014 – 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Apabila kita amati, maka komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan sebagian besar untuk makanan, minuman dan rokok, yang secara rata-rata mencapai 55,77 persen dari seluruh total konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 2.96**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2017**

No	Komponen Pengeluaran	Tahun							
		2014		2015		2016		2017	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Makanan, Minuman dan Rokok	1.961.824,45	55,30	2.128.332,55	55,33	2.356.102,76	55,97	2.616.322,15	56,49
2	Pakaian dan Alas Kaki	175.475,99	4,95	195.847,22	5,09	215.051,60	5,11	237.590,96	5,13
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	442.558,91	12,48	472.885,71	12,29	505.002,00	12,00	542.346,27	11,71
4	Kesehatan dan Pendidikan	247.271,50	6,97	266.614,41	6,93	286.754,29	6,81	308.355,43	6,66
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	480.697,95	13,55	527.265,61	13,71	572.329,95	13,60	629.274,46	13,59
6	Hotel dan Restoran	153.371,41	4,32	163.165,23	4,24	173.331,72	4,12	186.505,04	4,03
7	Lainnya	86.163,34	2,43	92.783,81	2,41	100.759,62	2,39	111.158,39	2,40
	<b>Total pengeluaran</b>	<b>3.547.363,56</b>	<b>100,00</b>	<b>3.846.894,55</b>	<b>100,00</b>	<b>4.209.331,94</b>	<b>100,00</b>	<b>4.631.552,70</b>	<b>100,00</b>

Konsumsi rumah tangga per kapita terbesar di Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2014-2017 (ADHB) secara rata-rata adalah untuk :

1. Makanan, minuman dan rokok rata-rata sebesar 55,77 persen.
2. Transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya rata-rata sebesar 13,61 persen
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga rata-rata sebesar 12,12 persen.

Konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2014, yaitu dari Rp. 35.473.635,60 menjadi Rp. 46.315.527,00 per tahun. Peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat.

#### **2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya :

**Tabel 2.97**  
**Fasilitas Sarana Prasarana Wilayah Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase panjang jaringan jalan kondisi baik	35	45	50	55	65
2	Tersedianya aksesibilitas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	75	85	95	100	100
3	Persentase rumah tinggal layak huni	88,10	88,75	88,79	88,83	90,29
4	Persentase penduduk berakses sanitasi layak	54,99	55,59	57,32	63,71	72
5	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	65,30	66	71,47	78,40	80,60
6	Persentase rumah tangga menggunakan listrik	94.99	95.56	91.89	96.14	96.14

Berdasarkan data pada tabel 2.97, gambaran kondisi fasilitas sarana prasarana wilayah Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahun menunjukkan perbaikan. Persentase panjang jaringan jalan kondisi baik, ketersediaan akses dalam wilayah kabupaten, rumah layak huni, penduduk berakses sanitasi layak, rumah tangga pengguna air

bersih dan listrik memperlihatkan angka yang membaik. Kondisi ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan agar kondisi infrastruktur wilayah dapat mendukung iklim investasi yang lebih baik.

#### **2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor keamanan dan ketertiban, lama proses perijinan dan pajak/retribusi yang akan dibayarkan oleh pelaku usaha. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi.

**Tabel 2.98**  
**Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Tindak Pidana	531	605	283	283	445
2	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	312	247	135	135	290
3	Persentase yang diselesaikan	58,76	40,83	47,70	47,70	65,17

Kasus tindak kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2014-2018 jumlahnya berfluktuasi dengan kecenderungan penurunan kasus. Sementara persentase jumlah kasus yang diselesaikan mengalami peningkatan. Hal ini perlu lebih ditingkatkan lagi agar rasa aman berinvestasi dapat tercipta. Seluruh komponen masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masing-masing.

#### **2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan



kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti : motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.99**  
**Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan**  
**di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sekolah Dasar	8	10	10	30	84
2	Sekolah Menengah Pertama	111	255	328	356	294
3	SLTA/SMK	442	310	524	982	3.049
4	Diploma I	1	2	2	-	40
5	Diploma II	1	1	-	154	90
6	Sarjana Muda	92	35	88	432	678
7	Sarjana	665	172	224	-	1.415

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tapanuli Utara didominasi penduduk dengan lulusan SLTA dan sarjana. Bahkan pada tahun 2018 jumlah pencari kerja terdaftar lulusan SLTA/SMK sederajat mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 3.049 orang. Hal ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah melalui pembukaan lapangan pekerjaan atau membina para generasi muda untuk menjadi wirausaha muda.

Tingginya jumlah angkatan kerja juga akan berpengaruh pada besarnya besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sehingga nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun. Indikator yang menggambarkan ketergantungan penduduk non produktif terhadap kelompok usia produktif adalah rasio ketergantungan. Kondisi yang timpang dengan kecenderungan besarnya kelompok usia non produktif akan menyebabkan tekanan di bidang ekonomi dan sosial.

**Tabel 2.100**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

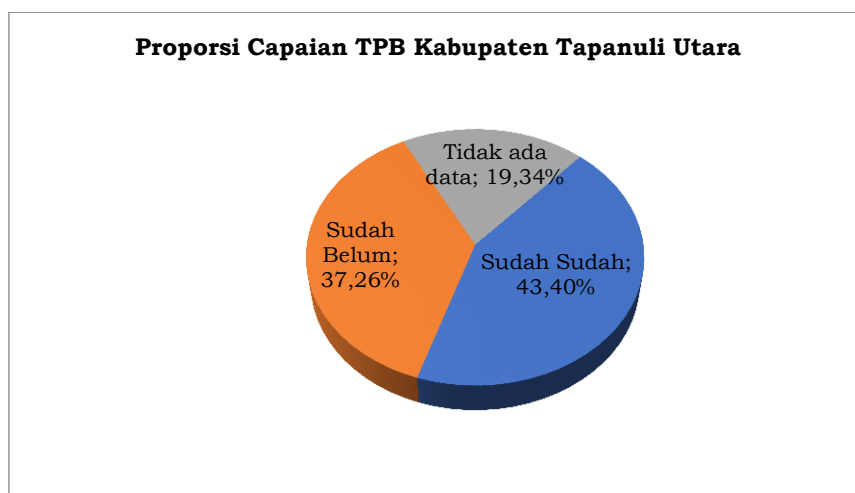
No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	105.469	105.570	105.459	105.077	105.023
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	18.042	18.583	19.212	19.954	20.804
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	123.511	124.153	124.671	125.031	125.827
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	317.353	169.246	170.942	172.575	174.054
5	Rasio ketergantungan	39	73	73	72	72

Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014 mencapai angka 39, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung 39 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas). Pada tahun 2018 total rasio ketergantungan pada angka 72, berarti setiap 100 orang berusia produktif menanggung 72 orang usia belum produktif dan usia tidak produktif.

## **2.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Utara**

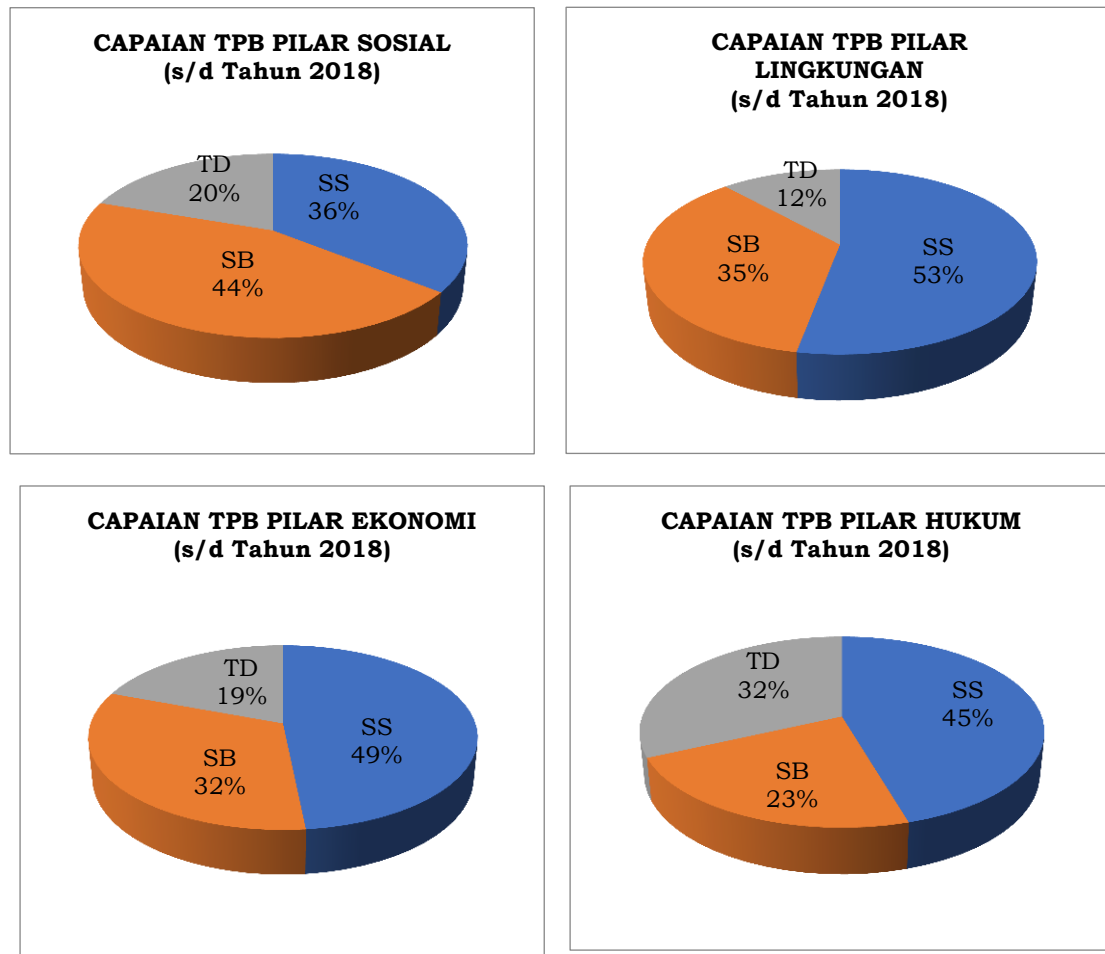
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 di Kantor Pusat PBB New York oleh 193 negara sebagai komitmen Agenda Pembangunan Global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) yang sudah dilaksanakan selama periode 2000-2015. SDGs merupakan penyempurnaan dari Agenda Pembangunan Global sebelumnya, karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau human wellbeing. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang. Kemuliaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagian diperlambangkan dalam 17 Tujuan atau Goals yang terukur untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, pembangunan berkelanjutan menuntut manusia untuk memperhatikan keterkaitan (interlinkages) antar ke 17 Tujuan, dan saling ketergantungan antar 167 Target yang diukur melalui 241 indikator dan dengan memperhatikan bahwa alam dan seisinya adalah pembatas kelangsungan kehidupan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diuraikan menjadi 17 tujuan, yaitu : (1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; (2)

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; (6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua; (7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern; (8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; (9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; (11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; (12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; (14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; (15) Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; (16) Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; (17) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



**Gambar 2.12**  
**Proporsi Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara**

Berdasarkan hasil analisa pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dari keseluruhan data indikator capaian TPB yang terkumpul diketahui bahwa capaian TPB di Kabupaten Tapanuli Utara masih rendah, yaitu 43,40 % sudah mencapai target, 37,26% belum mencapai target dan 19,34% lainnya tidak memiliki data. Untuk memudahkan analisa, indikator TPB yang belum memiliki data "dianggap" belum mencapai target, dengan demikian indikator TPB di Kabupaten Tapanuli Utara yang belum mencapai target mencapai 56,60 %.

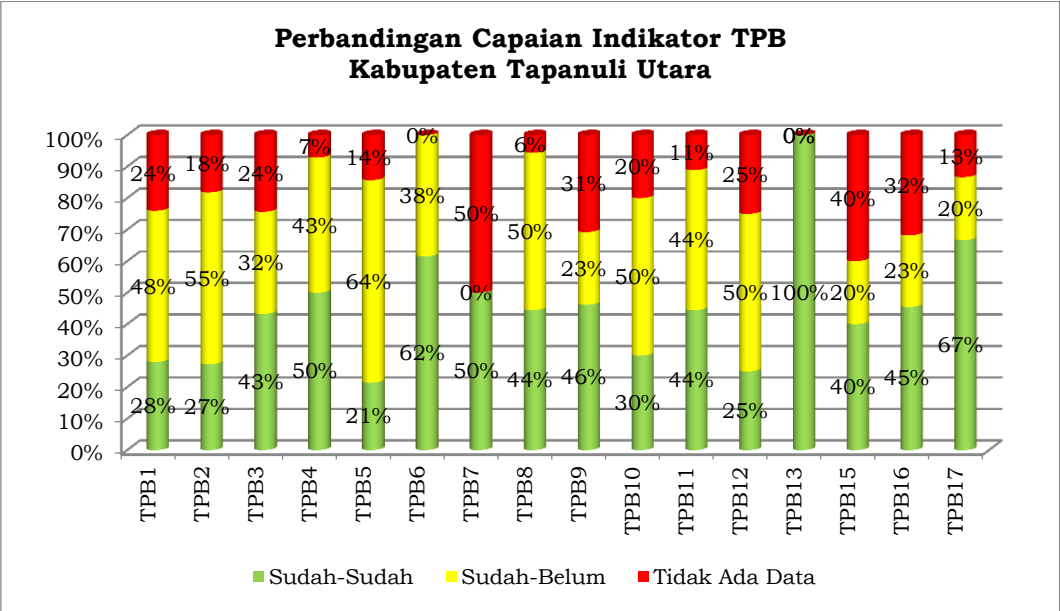


**Gambar 2.13**  
**Proporsi Capaian TPB Berdasarkan Pilar Kabupaten Tapanuli Utara**

Jika ditinjau dari masing-masing pilar TPB : pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar tata kelola, terlihat bahwa tingkat capaian indikator TPB terendah adalah pilar lingkungan, hanya mencapai 37 persen sedangkan yang terbanyak adalah pilar sosial mencapai 48 persen. Pilar dengan ketersediaan data paling rendah adalah pilar lingkungan (37 persen) diikuti oleh pilar hukum dan tata kelola (33 persen). Dari Gambar 2.13 terlihat bahwa tidak ada satu pilar pun yang capaian targetnya mencapai 50 persen. Ditinjau dari data indikator capaian TPB yang

belum mencapai target, diketahui bahwa pilar ekonomi memiliki persentase indikator yang paling banyak belum tercapai yakni 40 persen disusul oleh pilar sosial 35 persen.

Jika ditinjau dari masing-masing TPB terlihat bahwa TPB yang memiliki capaian di atas 50 persen adalah TPB 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya yakni 100 persen), TPB 17 (Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan sebesar 67 persen), TPB 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua sebesar 60 persen) serta TPB 4 (Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua sebesar 50 persen) dan TPB 7 (Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern sebesar 50 persen). TPB dengan tingkat pencapaian Sudah-Sudah terendah adalah TPB 5 (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan sebesar 21 persen), TPB 11 (Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebesar 25 persen) dan TPB 2 (Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan sebesar 27 persen).



**Gambar 2.14**  
**Perbandingan Indikator Capaian Masing-masing Tujuan TPB**

Sedangkan TPB yang capaian indikatornya Sudah-Belum dan Tidak Ada Data dengan persentase terbesar adalah TPB 5 (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, 79%), TPB 11 (Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, 75%) dan TPB 2 (Menghilangkan kelaparan, mencapai

ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, 73%). TPB dengan capaian indikator Sudah-Belum dan Tidak Ada Data dengan persentase terkecil adalah TPB 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, 0%), TPB 17 (Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, 33%), TPB 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua, 40%) serta TPB 4 (Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, 50%) dan TPB 7 (Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern, 50%). Selengkapnya daftar indikator TPB yang sudah tercapai (Sudah-Sudah) dan yang belum tercapai (Sudah-Belum) atau tidak ada data yang dikelompokkan berdasarkan pilar ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.101**  
**Capaian Indikator TPB Kabupaten Tapanuli Utara Pilar Sosial Tahun 2014-2018**

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	KB	67.42	66.12	74.17	71.26	65.17	SS
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	DINKES	82.64	82	83	73	83	SS
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 91,63%	DISDIK	70.92%	97.50%	72.35%	81.30%	100.50%	SS
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	BPBD	0	0	0	0	0	SS
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	DINSOS	0	0	0	0	0	SS
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	BPBD	ada	ada	ada	ada	ada	SS
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	BAPPEDA	2.61	2.50	1.03	2.67	2.65	SS
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Menurun menjadi 28%	DINKES	--	--	--	--	0.45%	SS
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	DISTAN	21,819 jt	23,590 jt	24,970 jt	29,140 jt	29.407	SS
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	DINKES	2 Org	8 Org	5 Org	8 Org	4 Org	SS
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	DINKES	86	57	72	56	5	SS
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	DINKES	42	42	50	38	23	SS
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	DINKES	60	55	66	51	30	SS

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Menurun menjadi <0,5%	DINKES	0.004%	0.004%	0.005%	0.005%	0.004%	SS
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Menurun	DINKES	5	7	2	0	0	SS
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Meningkat menjadi 300	DINKES	belum	belum	belum	belum	sudah	SS
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Meningkat	DINKES	--	--	--	10%	20%	SS
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Meningkat menjadi 35.	DINKES	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	SS
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Menurun menjadi 24,3%	DINKES	16.83%	16.93%	17.03%	17.23%	17.23%	SS
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Meningkat menjadi 280	DINKES	--	--	--	100%	100%	SS
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Meningkat menjadi 65%	KB	67.42%	66.12%	74.17%	71.26%	65.17%	SS
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Meningkat menjadi 23,5%	KB	29%	30%	33%	32%	33%	SS
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Menurun menjadi 38	KB	4	4	4	4	4	SS
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Meningkat	DINKES	52.51%	61.64%	65.67%	74.60%	74%	SS
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Meningkat	DINKES	85%	88%	89%	85%	90%	SS
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Meningkat menjadi 91,63%	DISDIK	103.30%	105.38%	105.38%	119.75%	104.83%	SS
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Meningkat menjadi 91,63%	DISDIK	97.80%	97.50%	98.95%	114.23%	114.95%	SS



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Meningkat menjadi 8,8 tahun	DISDIK	9 thn	9 thn	12 thn	12 thn	12 thn	SS
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah)		DISDIK	22.51	3.44	3.53	8.48	14.34	SS
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Meningkat menjadi 96,1%	DISDIK	99.45%	98.23%	99.22%	99.30	99.43	SS
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat	DISDIK	99.45%	98.23%	99.22%	99.34%	99.38%	SS
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Meningkat menjadi 70%	KB	77%	77%	91%	97%	--	SS
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Menurun	KB	0	0	0	0	0	SS
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	KOMINFO	--	--	--	81.88%	88.92%	SS
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	BPJSKer	--	478	3.096	3.891	7.864	SB
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun menjadi 7-8%	BPS	11.06%	11.41%	11.25%	11.35%	9.75%	SB
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Meningkat menjadi 95%	BPJSKes	77%	78%	84%	81%	83%	SB
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkat menjadi 17,12%	DINSOS	1.69	1.26	4.81	3.25	3.84	SB
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Menurun menjadi 2,8 juta	DINSOS	3915	4802	6690	6648	11270	SB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Meningkat menjadi 63%.	DINKES	DPT = 22,19 campak : 24,9	DPT = 25,1 campak : 27,3	DPT = 27,5 campak : 29,5	DPT = 29,5 campak : 19,1	DPT = 14 % campak : 96,57	SB
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 100%	BPS	55.78%	63.47%	62.29%	79.70%		SB
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 100%	DISPERKIM	57.56%	54.22%	65.06%	63.71%	79.50%	SB
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Meningkat menjadi 91,63%	DISDIK	88.40%	98.51%	90.18%	90.08%	89.05%	SB
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Meningkat menjadi 77,4%.	DUKCAPIL	14.28%	14.77%	18.77%	44.48%	59.79%	SB
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Meningkat menjadi 100%	DLH	95%	95%	96%	96.80%	97.90%	SB
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkat menjadi 39 daerah	BPBD	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	SB
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Meningkat	BAPPEDA	54.5%	49.3%	47.6%	46.4%	49.2%	SB
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Menurun menjadi 17%	DINKES	--	--	--	--	0,61% (153 org)	SB
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Menurun	DINKES	--	--	--	--	91	SB
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	Menurun	DINKES	0.82	0.002	0.0012	0.001	0.082	SB
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Meningkat menjadi 50%	DINKES	52.10%	31.41%	27%	28%	54.72%	SB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	KETAPANG	--	80.2	81	81.5	82.1	SB
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Meningkat menjadi 95%	DINKES	55%	58%	59%	61%	62.40%	SB
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkat menjadi 85 %	DINKES	55%	58%	59%	61%	62%	SB
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Meningkat menjadi 95%	DINKES	77%	79%	86%	94%	71%	SB
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Menurun menjadi 245	DINKES	164	172	182	204	224	SB
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Menurun menjadi 5,4%	DINKES	7.40%	7.50%	7.60%	7.70%	7.80%	SB
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Menurun	DINKES	8.70%	8.88%	8.90%	9%	9%	SB
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan		DINSOS	0	0	0	0	0	SB
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu		DINSOS	0	0	0	0	0	SB
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Meningkat menjadi 66%	KB	67.42%	66.12%	74.17%	71.26%	65.17%	SB
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Menurun menjadi 2,28	KB	4	4	4	4	4	SB
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan	Menurun	DINKES	--	--	--	--	0.36%	SB
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkat	DINKES	1125	1118	1127	1703	1282	SB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika		DISDIK	(i) 100%/ (ii) 0,10% untuk SD	(i) 100%/ (ii) 0,09% untuk SD	(i) 100%/ (ii) 0,80% untuk SD	(i) 100%/ (ii) 0,80% untuk SD	(i) 100%/ (ii) 3,20% untuk SD	SB
			DISDIK	(i) 100%/ (ii) 0,12% untuk SMP	(i) 100%/ (ii) 0,37% untuk SMP	(i) 100%/ (ii) 0,73% untuk SMP	(i) 100%/ (ii) 0,56% untuk SMP	(i) 100%/ (ii) 0,52% untuk SMP	
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 84,6%	DISDIK	--	69.70%	45%	71.20%	79.50%	SB
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 84,6%	DISDIK	--	85.9	72.20%	82.40%	63.80%	SB
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkat menjadi 91,63 %	DISDIK	--	--	--	12.09%	12.23%	SB
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	Meningkat	DISDIK	88.40%	98.51%	90.18%	90.08%	89.05%	SB
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Meningkat	DISDIK	95.70	95.70	98.71	98.72	98.72	SB
4.c.1*	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	Meningkat	DISDIK			6	6	7	SB
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	bertambah sebanyak 16	KB	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	SB
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Menurun	KB	0.02%	0%	0.05%	0.05%	0.05%	SB
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	KB	7.80%	8%	22%	21%	24%	SB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Menurun	KB	76%	61%	91%	100%		SB
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Meningkat	SETWAN	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	SB
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Meningkat	BPJSKer	--	--	--	5.70%	5.70%	SB
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Meningkat	KB	67%	66%	74%	71%	65%	SB
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Menurun menjadi 9,9%	KB	--	24.10%	18.38%	20.19%	20.64%	SB
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Meningkat menjadi 85%	KB	77%	78%	84%	81%	83%	SB
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Menurun menjadi 8,5 %	KETAPANG	--	--	--	--	--	TD
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Menurun	KETAPANG	--	--	--	--	--	TD
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Meningkat menjadi 18,6 juta	DISPERKIM	--	--	--	--	--	TD
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social	Meningkat menjadi 151 ribu	DINSOS	--	--	--	--	--	TD
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana social	Meningkat menjadi 81,5 ribu	DINSOS	--	--	--	--	--	TD
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Menurun menjadi 118,6	BPBD	--	--	--	--	--	TD
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Menurun	BPBD	--	--	--	--	--	TD
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menurun	KETAPANG	--	--	--	--	--	TD

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Menurun menjadi 28%	DINKES	--	--	--	--	--	TD
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Menurun	DINKES	--	--	--	--	--	TD
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Menurun	DUKCAPIL	--	--	--	--	--	TD
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis		DINKES	--	--	--	--	--	TD
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi		DINKES	--	--	--	--	--	TD
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Menurun menjadi angka 0,02%	DINSOS	--	--	--	--	--	TD
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Menurun	DINSOS	--	--	--	--	--	TD
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Menurun menjadi 9,91%	DINKES	--	--	--	--	--	TD
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Meningkat menjadi minimal 95%	BPJSKes	--	--	--	--	--	TD
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Menurun	DINKES	--	--	--	--	--	TD
4.2.1	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin			--	--	--	--	--	TD
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Meningkat menjadi 21 tahun	DUKCAPIL	--	--	--	--	--	TD
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Menurun menjadi 38 tahun	DUKCAPIL	--	--	--	--	--	TD

**Tabel 2.102**  
**Capaian Indikator TPB Kabupaten Tapanuli Utara Pilar Lingkungan Tahun 2014-2018**

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN PEMKAB					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Meningkat menjadi 100%	PDAM	55.78%	63.47%	62.29%	79.70%	--	SS
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Meningkat	DINKES	19	19	19	20	21	SS
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Meningkat menjadi 100%	DISPERKIM	54.99%	55.59%	57.32%	63.71%	79.50%	SS
6.2.1.(d)	Jumlah desa/keurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Meningkat	DINKES	--	58	119	154	155	SS
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Meningkat	DLH	12%	13%	13.50%	14%	15%	SS
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industry	ada	DISTAN	ada	ada	ada	ada	ada	SS
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Meningkat	BAPPEDA	54	58	58	62	62	SS
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	ada	BAPPEDA	ada	ada	ada	ada	ada	SS
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	ada	DISPERKIM	ada	ada	ada	ada	ada	SS
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Meningkat menjadi 96,6%	PLN	78%	87%	87%	91%	98%	SS
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Meningkat menjadi 1.200 KWh	PLN	1083	1138	1344	1335	1155	SS
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	BPBD	0	0	0	0	0	SS

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN PEMKAB					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	ada	BPBD	ada	ada	ada	ada	ada	SS
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	ada	BPBD	ada	ada	ada	ada	ada	SS
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Meningkat	DLH	2	4	5	7	8	SS
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	ada	DLH	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada	SS
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Meningkat	DISHUT	1	1	1	4	4	SS
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	ada	BPBD	1	1	1	1	1	SB
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	BPBD	0	0	0	0	0	SS
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	DISHUT	45%	46.20%	46.80%	49.20%	51.50%	SS
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	PDAM	--	17.19	18.89	19.47	19.68	SB
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 100%	DISPERKIM	--	--	--	--	62.4%	SB
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	DINKES	26	81	73	48	111	SB
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Meningkat	DISPERKIM	0	0	0	0	0	SB
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	ada	DLH	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	SB
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Meningkat menjadi 32%	DISHUB	23.48%	24.70%	23.68%	24.50%	24.90%	SB
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Meningkat menjadi 80%	DLH	60%	63%	65%	67%	70%	SB



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN PEMKAB					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Meningkat/ada	DLH	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	SB
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 ton per hari (skala nasional)	DLH	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	SB
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	5,5 juta ha (skala nasional)	DISHUT	5%	7,5%	10%	12,5%	14%	SB
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Sudah	BPBD	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	SB
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Menurun	BPBD	--	--	--	--	--	TD
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Meningkat	ORG	--	--	--	--	--	TD
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional)	BBKSDA	--	--	--	--	--	TD
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Meningkat menjadi 500.000 ha (skala nasional)	DISHUT	--	--	--	--	--	TD

**Tabel 2.103**  
**Capaian Indikator TPB Kabupaten Tapanuli Utara Pilar Ekonomi Tahun 2014-2018**

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN PEMKAB					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Meningkat	EKON	84%	85%	85%	85%	85%	SS
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Meningkat	DISNAKER	--	--	--	14,500	14,646	SS
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun	DISNAKER	--	--	--	0.049	0.035	SS
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	Menurun	DISNAKER	--	--	--	0.322	0.299	SS
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	DISPAR	1500	1665	1703	1870	3100	SS
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat	DISPAR	91647	108177	128110	145765	150000	SS
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Meningkat	DISNAKER	--	--	--	0.007	0.007	SS
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Menurun (mendekat)	EKON	5	4	3	2.5	2.5	SS
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkat	EKON	12%	14%	16%	19%	22%	SS
9.1.2.(a)	Jumlah bandara		DISHUB	1	1	1	1	1	SS
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Meningkat	DISHUB	2	2	2	2	2	SS
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkat	BPS	1.88%	1.95%	2.01%	2.13%	--	SS
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Meningkat	KOMINFO	--	--	--	16.89%	22.46%	SS
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	KOMINFO	--	--	--	81.88%	88.92%	SS
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	KOMINFO	--	--	--	65.23%	74%	SS
10.1.1*	Koefisien Gini	Menurun menjadi 0,36	BPS	0.3045	0.3558	0.3087	0.3289	0.2819	SS

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN PEMKAB					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun menjadi 7-8%	BPS	11.06%	11.41%	11.25%	11.35%	9.75%	SS
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	tidak ada	KESBANGPOL	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	SS
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Di atas 12%	BPS	0.21%	0.16%	0.18%	0.21%	--	SS
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	ada	BAPPEDA	ada	ada	ada	ada	ada	SS
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistic	Meningkat	BPS	0%	0%	0%	100%	100%	SS
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Meningkat	BPS	0%	0%	0%	100%	100%	SS
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Meningkat	BPS	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	SS
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	DUKCAPIL	ada	ada	ada	ada	ada	SS
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Meningkat	BPS	--	--	--	10	10	SS
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Meningkat	BPS	--	--	--	98%	100%	SS
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	KOMINFO	--	--	--	65.23	74%	SS
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Meningkat	BAPPEDA	--	--	--	55,83%	57,5%	SS
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Meningkat menjadi 8%	BPS	0,234%	0,235%	0,237%	0,248	0,26	SB
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	Meningkat	BPS	9.75	8.19	8.63	7.64	--	SB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN PEMKAB					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	BPS	18666,21 RIBU	19957.84	21312.63	22718.45	--	SB
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	51%	DISNAKER	--	--	--	0.05	0.05	SB
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat	DISNAKER	--	--	--	0.59	0.59	SB
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25%	DISUKM	12%	14%	16%	19%	22%	SB
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Meningkat	DISNAKER	--	--	--	1,115	1,111	SB
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Meningkat	BPS		16,64 (L) 13,91 (P)	16,75 (L) 15,75 (P)	16,64 (L) 17,5 (P)	--	SB
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	OJK	--	--	--	108	111	SS
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	PERINDAG	12.07	8.96	6.28	6.47	5.81	SB
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat	PERINDAG	24.78%	24.70%	24.56%	24.51%	24.53%	SB
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Meningkat	BPS	5,11	4,81	4,12	4,15*	--	SB
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	80 Kabupaten (skala nasional)	PMD	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	SB
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Menurun menjadi 14%	PMD	11.06%	11.41%	11.25%	11.35%	--	SB
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkat menjadi 87	KESBANGPOL	0	0	0	0	0	SB
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	BPJSKer	--	478	3.096	3.891	7.864	SB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN PEMKAB					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Meningkat	BPKAD	48632 jt	71442 jt	92998 jt	158067 jt	115160 jt	SB
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	100%	KOMINFO	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	SB
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	ada	BPBJ	0	0	0	0	0	SB
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	1,1 juta sambungan rumah tangga	EKON	--	--	--	--	--	TD
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	10-16%	BPS	--	--	--	--	--	TD
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Meningkat	BPS	--	--	--	--	--	TD
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industry	Meningkat	BPS	--	--	--	--	--	TD
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Meningkat	DISUKM	--	--	--	--	--	TD
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Menurun	DLH	--	--	--	--	--	TD
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Menurun menjadi mendekati 26%	DLH	--	--	--	--	--	TD
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Meningkat	BAPPEDA	--	--	--	--	--	TD
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Menurun	BPS	--	--	--	--	--	TD
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	Meningkat menjadi 87	KESBANGPOL	--	--	--	--	--	TD

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN PEMKAB					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	KOMINFO	--	--	--	perkotaan = 38%, perdesaan = 24%	perkotaan = 43%, perdesaan = 25%	SB
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	KOMINFO	--	--	--	perkotaan = 60% dan perdesaan = 27,5%	perkotaan = 74% dan perdesaan = 30,6%	SB
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Meningkat	BAPPEDA	--	--	--	55,83%	57,5%	SS

**Tabel 2.104**  
**Capaian Indikator TPB Kabupaten Tapanuli Utara Pilar Hukum dan Tata Kelola Tahun 2014-2018**

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN PEMKAB					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Menurun	BPS	3	1	3	0	0	SS
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kab/Kota: 50%	ORG	--	115.18%	112.35%	135.94%	100.88%	SS
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Meningkat	BKD	6.70%	6.50%	6.70%	6.30%	9.40%	SS
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	ada	KOMINFO	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SS
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	tidak ada	KUMDANG	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	SS
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Menurun	DINSOS	0	0	0	0	0	SS
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Meningkat	POLRES	12	12	118	170	--	SS
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Meningkat	DUKCAPIL	40.17%	44.31%	52.60%	63.35%	80.06%	SS
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Meningkat	DUKCAPIL	14.28%	14.77%	18.77%	44.48%	59.79%	SS
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Meningkat	KOMINFO	--	--	--	18.80%	21%	SS
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Menurun	KB	0.009	0.002	0.001	0.007	--	SB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN PEMKAB					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Menjadi menjadi 80%	BPBJ	64.25	55.53	66.14	67.68	59.38	SB
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kab/Kota: 45%	ORG	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	SB
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Meningkat	SETWAN	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	SB
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Menurun	POLRES	8	8	18	20	--	SB
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Menurun	POLRES	--	--	--	--	--	TD
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Meningkat	DINSOS	--	--	--	--	--	TD
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Menurun	KB	--	--	--	--	--	TD
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Meningkat menjadi 4,0	KEJARI	--	--	--	--	--	TD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kab : 60%, Kota: 65%	BPKAD	--	--	--	--	--	TD



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	CAPAIAN PEMKAB					KET
				2014	2015	2016	2017	2018	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kab/Kota: 80%	ORG	--	--	--	--	--	TD
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Meningkat	DUKCAPIL	--	--	--	--	--	TD

### **BAB III**

## **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Kebijakan desentralisasi fiskal yang digulirkan sejak tahun 2001 merupakan upaya koreksi fundamental atas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik. Dalam kebijakan tersebut berlaku prinsip *Money Follows Functions*, yang berarti bahwa pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah disertai dengan sumber-sumber pendanaan yang memadai untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pelaksanaan Kebijakan Fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan penuh kepada daerah dalam penguatan pajak dan retribusi daerah (*Local Taxing Power*) dan transfer dari pemerintah dalam bentuk Dana Perimbangan. Disamping itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah serta penerimaan hibah dari pemerintah atau pihak lain. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber kekayaan negara secara proporsional demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Memiliki pendapatan yang besar adalah penting, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan. Tantangan ke depan bagi daerah adalah bagaimana meningkatkan dan menjamin ketersediaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan secara memadai dalam rangka penyediaan layanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks baik menyangkut kuantitas maupun kualitas. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengelola pendapatan dan belanja tersebut secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Untuk memberi gambaran pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih komprehensif, perlu dilakukan analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisa ini dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah di masa lalu untuk periode lima tahun dan bagaimana proyeksi pendanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan.

#### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengandung makna bahwa :

- a. Pendapatan Daerah diperoleh dari berbagai sumber pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Belanja Daerah digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan;
- c. Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya semaksimal mungkin agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*) dan diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*). Sedangkan pelaksanaan kebijakan belanja melalui tahapan analisis belanja, standart pelayanan minimal, standart harga satuan barang dan harga satuan pokok kegiatan atas komponen belanja tiap kegiatan, sehingga dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada prinsipnya digunakan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja yang kurang strategis dan tidak memiliki nilai tambah (*no value added*) harus diminimalisir.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk dapat melihat perkembangan Pendapatan Daerah secara

keseluruhan, terlebih dahulu dilihat asumsi indikator makro ekonomi sebagai gambaran kondisi perekonomian di lapangan, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Makro Ekonomi Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014 – 2018**

No	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>Pertumbuhan ekonomi</b>	<b>5,04</b>	<b>4,89</b>	<b>4,12</b>	<b>4,15</b>	<b>4,35</b>
1.1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,59	3,51	2,74	2,43	2,02
1.2	Pertambangan dan Penggalian	9,58	10,06	6,29	6,31	5,17
1.3	Industri Pengolahan	12,07	8,96	6,28	6,47	5,81
1.4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,02	8,80	2,72	5,39	7,13
1.5	Pengadaan Air	4,40	4,31	1,80	1,90	2,79
1.6	Konstruksi	9,08	8,81	8,90	8,13	8,32
1.7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,26	5,63	5,24	7,44	8,81
1.8	Transportasi dan Pergudangan	7,14	6,99	5,57	6,47	6,28
1.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,49	6,38	5,77	5,25	5,92
1.10	Informasi dan Komunikasi	1,55	0,94	1,71	2,57	2,73
1.11	Jasa Keuangan	5,85	8,78	4,53	3,58	3,46
1.12	Real Estate	6,57	7,27	4,74	3,81	3,04
1.13	Jasa Perusahaan	3,63	3,52	2,78	3,77	3,86
1.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,00	4,67	3,09	2,57	3,96
1.15	Jasa Pendidikan	0,80	0,56	1,61	1,28	1,88
1.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,52	0,96	2,00	1,97	2,06
1.17	Jasa lainnya	5,12	5,02	3,99	3,95	4,13
<b>II</b>	<b>Inflasi</b>	<b>7,38</b>	<b>1,66</b>	<b>4,28</b>	<b>3,82</b>	<b>2,22</b>

Selama tahun 2014 hingga 2018, realisasi rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berada pada kisaran 4,51 persen per tahun. Secara umum, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 hingga tahun 2018 berfluktuasi. Kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pembangunan infrastruktur belum memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun sejak tahun 2017 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun 2016. Hal ini dapat dilihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan sektor-sektor produksi perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi menandai peningkatan output pada sektor-sektor produksi dan sebaliknya. Pergerakan output sektor-sektor produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pendapatan daerah.

### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2014-2018**

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam siklus APBD, memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan money follow program yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas daerah yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan daerah. Secara umum realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018 menunjukkan kecenderungan meningkat, baik pendapatan maupun belanja. Nilai peningkatan pendapatan asli daerah tertinggi dicapai pada tahun 2017 dengan nilai mencapai Rp. 162.441.906.093,04 dan belanja langsung tertinggi dicapai pada tahun 2018 dengan nilai mencapai Rp. 520.307.422.173,94. Defisit belanja yang ditutupi dari pembiayaan terjadi setiap tahun sehingga kondisi ini menunjukkan masih perlunya upaya maksimal dan keseriusan dalam peningkatan pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah. Secara rinci perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Utara disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Perkembangan Target dan Realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun					
		2014			2015		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>881.602.238.554,00</b>	<b>843.112.578.518,09</b>	<b>95,63</b>	<b>1.093.082.192.329,00</b>	<b>1.117.190.183.201,86</b>	<b>102,21</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>48.631.943.204,00</b>	<b>38.192.107.584,09</b>	<b>78,53</b>	<b>71.442.031.599,00</b>	<b>82.753.547.210,86</b>	115,83
1.1.1.	Pajak Daerah	8.122.686.000,00	9.615.653.599,52	118,38	8.150.579.223,00	9.599.737.353,20	117,78
1.1.2.	Retribusi Daerah	26.224.403.610,00	13.222.859.344,00	50,42	35.138.175.110,00	38.136.335.569,00	108,53
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.516.367.594,00	4.481.772.418,00	52,63	7.457.520.126,00	7.442.520.126,00	99,80
1.1.4.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.768.486.000,00	10.871.822.222,57	188,47	20.695.757.140,00	27.574.954.162,66	133,24
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>669.367.576.498,00</b>	<b>662.033.813.144,00</b>	<b>98,90</b>	<b>773.316.180.583,00</b>	<b>762.000.830.373,00</b>	98,54
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.209.460.498,00	16.875.697.144,00	69,71	33.752.896.583,00	22.435.676.373,00	66,47
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	596.841.256.000,00	596.841.256.000,00	100,00	616.216.474.000,00	616.216.474.000,00	100,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	48.316.860.000,00	48.316.860.000,00	100,00	123.346.810.000,00	123.348.680.000,00	100,00
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>163.602.718.852,00</b>	<b>142.886.657.790,00</b>	<b>87,34</b>	<b>248.323.980.147,00</b>	<b>272.435.805.618,00</b>	109,71
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.220.162.650,00	3.160.162.650,00	98,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	17.261.054.202,00	10.302.035.340,00	59,68	19.999.279.577,00	51.735.763.073,00	258,69
1.3.3.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	106.872.852.000,00	106.872.852.000,00	100,00	204.618.115.000,00	203.268.615.000,00	99,34
1.3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	36.248.650.000,00	22.551.607.800,00	62,21	23.706.585.570,00	17.431.427.545,00	73,53
1.3.5	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>912.133.966.666,28</b>	<b>796.440.673.975,00</b>	<b>87,32</b>	<b>1.224.096.508.796,27</b>	<b>1.097.187.075.012,12</b>	89,63
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>552.464.472.158,98</b>	<b>498.842.036.478,00</b>	<b>90,29</b>	<b>692.985.929.192,17</b>	<b>469.018.973.716,90</b>	90,00
2.1.1	Belanja Pegawai	501.715.977.901,98	453.151.519.023,00	90,32	584.539.679.917,17	365.339.139.092,90	88,97

No	Uraian	Tahun					
		2014			2015		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.1.2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Hibah	19.973.450.000,00	16.035.272.749,00	80,28	10.877.000.000,00	8.405.448.609,00	77,28
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.470.000.000,00	2.728.366.000,00	78,63	2.915.000.000,00	892.970.000,00	30,63
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	22.305.044.257,00	22.104.516.706,00	99,10	93.764.249.275,00	93.584.696.015,00	99,81
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	4.822.362.000,00	96,45	890.000.000,00	796.720.000,00	89,52
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>359.669.494.507,30</b>	<b>297.598.637.497,00</b>	<b>82,74</b>	<b>531.110.579.604,10</b>	<b>628.168.101.295,22</b>	89,15
2.2.1	Belanja Pegawai	33.638.448.578,30	27.411.588.260,00	81,49	45.317.314.678,00	156.573.916.754,10	93,66
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	152.898.431.002,00	123.699.666.586,00	80,90	212.988.845.198,00	231.044.278.159,71	89,43
2.2.3	Belanja Modal	173.132.614.927,00	146.487.382.651,00	84,61	272.804.419.728,10	240.549.906.381,41	88,18
	Surplus/(Defisit)	-30.531.728.112,28	46.671.904.543,09	-152,86	-131.014.316.467,27	20.003.108.189,74	15,27
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>56.565.323.288,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.555.527.017,27</b>	<b>110.786,681,166.27</b>	77,71
3.1.1	Penggunaan SILPA	39.565.323.288,28	0,00	0,00	90.786.681.166,27	90,786,681,166.27	100,00
3.1.2	Penerimaan piutang daerah	17.000.000.000,00	0,00	0,00	31.768.845.851,00	0,00	0,00
3.1.3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	20,000,000,000.00	100,00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>26.033.595.176,00</b>	<b>22.000.000.000,00</b>	<b>84,51</b>	<b>11.541.210.550,00</b>	<b>11,500,000,000.00</b>	99,64
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00			
3.2.1	Penyertaan Modal	6.033.595.176,00	2.000.000.000,00	33,15	11.500.000.000,00	11,500,000,000.00	100
3.2.2	Pembayaran Beban Utang		0,00	0,00	41.210.550,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembiayaan Netto	30.531.728.112,28	-22.000.000.000,00	-72,06	131.014.316.467,27	99.286.681.166,27	75,78
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.671.904.543,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.289.789.356,01</b>	<b>0,00</b>

Sumber : BPKPAD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019

No	Uraian	Tahun					
		2016			2017		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.275.823.048.331,44</b>	<b>1.197.874.974.979,45</b>	<b>93,89</b>	<b>1.231.044.439.187,33</b>	<b>1.221.109.579.448,04</b>	<b>90,55</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>92.997.947.710,00</b>	<b>94.783.154.638,45</b>	<b>101,92</b>	<b>158.067.279.858,00</b>	<b>162.441.906.093,04</b>	<b>35,43</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	11.440.181.766,00	12.862.246.705,44	112,43	15.730.000.000,00	14.229.820.630,70	90,46
1.1.2.	Retribusi Daerah	45.701.161.944,00	45.108.112.180,50	98,70	8.140.809.000,00	47.787.543.065,25	77,68
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.550.000.000,00	9.499.944.717,00	125,83	8.798.722.253,00	8.548.722.253,00	97,16
1.1.4.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.306.604.000,00	27.312.851.035,51	96,49	125.397.748.605,00	91.875.820.144,09	21,46
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>963.002.529.976,00</b>	<b>894.622.014.138,00</b>	<b>92,90</b>	<b>841.851.289.768,00</b>	<b>828.361.615.959,00</b>	<b>98,40</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.428.948.976,00	26.641.817.772,00	71,18	29.903.699.768,00	28.249.355.154,00	94,47
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	650.827.006.000,00	650.827.006.000,00	100,00	639.394.068.000,00	639.394.068.000,00	100,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	274.746.575.000,00	217.153.190.366,00	79,04	172.553.522.000,00	160.718.192.805,00	93,14
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>219.822.570.645,44</b>	<b>208.469.806.203,00</b>	<b>94,84</b>	<b>231.125.869.561,33</b>	<b>230.306.057.396,00</b>	<b>99,65</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	13.184.000.000,00	0,00	0,00	3.312.000.000,00	0,00
1.3.2.	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	68.141.268.645,44	43.617.810.228,00	64,01	42.927.043.561,33	38.795.231.396,00	90,37
1.3.3.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	147.031.302.000,00	147.031.302.000,00	100,00	188.198.826.000,00	188.198.826.000,00	100,00
1.3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	4.650.000.000,00	4.636.693.975,00	99,71	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Pendapatan lainnya	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.384.695.484.581,32</b>	<b>1.251.194.183.763,24</b>	<b>90,36</b>	<b>1.273.906.756.787,32</b>	<b>1.203.503.299.521,51</b>	<b>86,76</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>842.054.433.491,69</b>	<b>591.587.689.232,00</b>	<b>90,10</b>	<b>798.043.392.851,25</b>	<b>760.274.029.343,00</b>	<b>95,27</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	640.095.331.216,69	392.873.345.400,00	87,48	499.122.074.582,25	478.193.191.976,00	95,81
2.1.2.	Belanja Subsidi	1.182.985.000,00	1.112.065.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Tahun					
		2016			2017		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.1.3	Belanja Hibah	13.995.800.000,00	12.024.468.800,00	85,91	24.658.067.300,00	23.672.648.100,00	96,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.800.000.000,00	962.410.000,00	53,47	1.150.000.000,00	853.644.364,00	74,23
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	183.409.817.275,00	183.049.033.532,00	99,80	248.618.880.964,00	248.417.021.903,00	99,92
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.570.500.000,00	1.566.366.500,00	99,74	24.494.370.005,00	9.137.523.000,00	37,30
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>542.641.051.089,63</b>	<b>659.606.494.531,24</b>	<b>90,76</b>	<b>475.863.363.936,07</b>	<b>443.229.270.178,51</b>	<b>72,49</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	46.905.157.571,00	168.374.290.886,00	93,77	54.168.239.431,00	55.324.298.667,00	39,47
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	247.541.757.271,63	252.303.797.557,21	84,67	257.374.465.843,96	232.060.017.601,40	70,23
2.2.3	Belanja Modal	248.194.136.247,00	238.928.406.088,03	96,27	164.320.658.661,11	155.844.953.910,11	86,93
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-108.872.436.249,88</b>	<b>-53.319.208.783,79</b>	<b>48,97</b>	<b>-42.862.317.599,99</b>	<b>9.428.317.992,53</b>	<b>-22,00</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>119.289.789.356,01</b>	<b>119,289,789,356.01</b>	<b>100,00</b>	<b>55.637.928.918,22</b>	<b>55.710.584.792,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Penggunaan SILPA	119.289.789.356,01	119,289,789,356.01	100,00	55.637.928.918,22	55.710.584.792,05	0,00
3.1.2	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.417.353.106,13</b>	<b>10,332,651,654.00</b>	<b>99,19</b>	<b>12.775.611.318,23</b>	<b>12.683.309.867,00</b>	<b>99,28</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Penyertaan Modal	9.170.615.538,00	9,170,615,538.00	100,00	12.149.529.251,00	12.149.529.251,00	100,00
3.2.2	Pembayaran Beban Utang	1.246.737.568,13	1,162,036,116.00	93,21	626.082.067,23	533.780.616,00	85,26
3.2.3	Pembiayaan Netto	108.872.436.249,88	108.957.137.702,01	100,08	42.862.317.599,99	-12.683.309.867,00	-29,59
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.637.928.918,22</b>		<b>0,00</b>	<b>52.582.578.176,39</b>	<b>0,00</b>

No	Uraian	Tahun		
		2018		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.313.649.617.104,60</b>	<b>1.290.353.459.949,31</b>	<b>98,23</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>115.160.302.201,00</b>	<b>105.729.074.994,31</b>	<b>91,81</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	24.896.060.566,00	17.621.282.629,57	70,78
1.1.2.	Retribusi Daerah	7.001.500.000,00	4.441.482.532,78	63,44
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.717.966.635,00	9.467.966.635,00	97,43
1.1.4.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73.544.775.000,00	74.198.343.196,96	100,89
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>873.634.126.000,00</b>	<b>868.012.988.517,00</b>	<b>99,36</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.469.795.000,00	37.516.300.069,00	123,13
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	639.394.068.000,00	639.394.068.000,00	100,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	203.770.263.000,00	191.102.620.448,00	93,78
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>324.855.188.903,60</b>	<b>316.611.396.438,00</b>	<b>97,46</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	53.515.000.000,00	53.296.880.000,00	99,59
1.3.2.	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	50.418.430.903,60	44.462.674.701,00	88,19
1.3.3.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	198.421.758.000,00	198.421.758.000,00	100,00
1.3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	15.000.000.000,00	14.888.786.100,00	99,26
1.3.5	Pendapatan lainnya	7.500.000.000,00	5.541.297.637,00	73,88
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.369.671.636.252,18</b>	<b>1.293.318.440.932,50</b>	<b>94,43</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>800.060.710.374,69</b>	<b>773.011.018.758,56</b>	<b>96,62</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	520.849.124.076,07	500.290.223.119,56	96,05
2.1.2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Hibah	40.604.926.723,62	36.490.120.907,00	89,87
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	850.000.000,00	669.426.417,00	78,76

No	Uraian	Tahun		
		2018		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	232.756.659.575,00	230.916.041.315,00	99,21
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	4.645.207.000,00	92,90
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>569.610.925.877,49</b>	<b>520.307.422.173,94</b>	<b>91,34</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	56.106.606.860,00	51.504.519.564,00	91,80
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	319.255.665.911,49	287.140.871.146,04	89,94
2.2.3	Belanja Modal	194.248.653.106,00	181.662.031.463,90	93,52
	Surplus/(Defisit)	-56.022.019.147,58	-2.964.980.983,19	5,29
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>60.633.554.851,58</b>	<b>60.633.554.851,58</b>	<b>100,00</b>
3.1.1	Penggunaan SiLPA	60.633.554.851,58	60.633.554.851,58	100,00
3.1.2	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.611.535.704,00</b>	<b>4.611.535.704,00</b>	<b>100,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.1	Penyertaan Modal	3.488.198.234,00	3.488.198.234,00	100,00
3.2.2	Pembayaran Beban Utang	1.123.337.470,00	1.123.337.470,00	100,00
3.2.3	Pembiayaan Netto	56.022.019.147,58	56.022.019.147,58	100,00
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.633.554.851,58</b>	

Perkembangan APBD Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan data selama tahun 2014-2018 cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 873.193.145.520,86. Pendapatan tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 1.290.353.459.949,31. Demikian juga halnya dengan belanja daerah yang besarannya meningkat sejak tahun 2014-2018. Total belanja daerah tahun 2014 adalah sebesar Rp. 816.538.465.050,87 dan meningkat hingga Rp. 1.293.318.440.932,50 tahun 2018. Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun relatif dalam nilai yang masih kecil.

#### **3.1.1.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi, perkiraan pertumbuhan ekonomi, realisasi penerimaan PAD dan tidak memberatkan masyarakat serta dunia usaha. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. **Dana Perimbangan**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan terkait Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Cukai Hasil Tembakau, Minyak/Gas/Pertambangan Lainnya. Sedangkan penganggaran Dana Alokasi Umum dialokasikan sesuai Peraturan Presiden.

3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Desa.

Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 – Tahun 2018**

No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>873.193.145.520,86</b>	<b>1.117.190.183.201,86</b>	<b>1.197.874.974.979,45</b>	<b>1.221.109.579.448,04</b>	<b>1.290.610.019.652,31</b>	<b>10,69</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>63.696.097.398,86</b>	<b>82.753.547.210,86</b>	<b>94.783.154.638,45</b>	<b>162.441.906.093,04</b>	<b>105.729.074.994,31</b>	<b>20,23</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	11.286.218.960,23	9.599.737.353,20	12.862.246.705,44	14.229.820.630,70	17.621.282.629,57	13,38
1.1.2.	Retribusi Daerah	36.162.112.657,00	38.136.335.569,00	45.108.112.180,50	47.787.543.065,25	4.441.482.532,78	-15,26
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.481.772.418,00	7.442.520.126,00	9.499.944.717,00	8.548.722.253,00	9.467.966.635,00	23,61
1.1.4.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.765.993.363,63	27.574.954.162,66	27.312.851.035,51	91.875.820.144,09	74.198.343.196,96	87,64
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>780.637.089.042</b>	<b>762.000.830.373,00</b>	<b>894.622.014.138,00</b>	<b>828.361.615.959,00</b>	<b>868.012.988.517,00</b>	<b>3,10</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.148.942.689,00	22.435.676.373,00	26.641.817.772,00	28.249.355.154,00	37.516.300.069,00	13,63
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	596.841.256.000,00	616.216.474.000,00	650.827.006.000,00	639.394.068.000,00	639.394.068.000,00	1,78
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	48.316.860.000,00	123.348.680.000,00	217.153.190.366,00	160.718.192.805,00	191.102.620.448,00	56,06
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>138.014.826.783,00</b>	<b>272.435.805.618,00</b>	<b>208.469.806.203,00</b>	<b>230.306.057.396,00</b>	<b>316.867.956.141,00</b>	<b>30,47</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	3.175.162.650,00	0,00	13.184.000.000,00	3.312.000.000,00	53.553.439.703,00	
1.3.2.	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	5.457.178.353,00	51.735.763.073,00	43.617.810.228,00	38.795.231.396,00	44.462.674.701,00	208,97
1.3.3.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	106.872.852.000,00	203.268.615.000,00	147.031.302.000,00	188.198.826.000,00	198.421.758.000,00	23,99
1.3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0,00	17.431.427.545,00	4.636.693.975,00	0,00	14.888.786.100,00	
1.3.5.	Pendapatan lainnya	25.684.796.430,00	0,00	0,00	0,00	5.541.297.637,00	

Sumber : BPKPAD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function) dan melaksanakan pembangunan (development function). Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dari catatan yang ada selama periode tahun 2014-2018 pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan adanya peningkatan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan mencapai 20,23 persen. Namun apabila diperhatikan, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah, yaitu rata-rata 8,82 persen. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah harus mendapat perhatian yang lebih serius demi meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Realisasi Dana Perimbangan yang merupakan sumber pendapatan terbesar dibandingkan dengan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2014–2018 Dana Perimbangan tumbuh rata-rata sebesar 3,10 persen. Jumlah Dana Perimbangan paling besar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 894.622.014.138.00. Selain PAD dan Dana Perimbangan, peningkatan dan pertumbuhan pendapatan daerah dapat dilihat pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah sampai saat ini masih mengalami banyak kendala terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, antara lain:

1. Pemutakhiran data PAD belum efektif dan kurang optimal dilaksanakan
2. Subjek/objek/petugas pemungut pajak/retribusi daerah belum jujur dalam mengisi potensi pajak/retribusi daerah
3. Penetapan target penerimaan dari pajak/retribusi daerah masih ditetapkan dengan perkiraan yang tidak terukur
4. Sering terjadi keterlambatan penyetoran PAD ke kas daerah
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah
6. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa dengan sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi masih

kurang. Pemahaman SDM terkait dengan pajak dan retribusi daerah menjadi penting karena SDM di lapangan harus dapat memberi penjelasan yang mudah dimengerti masyarakat. Pemahaman SDM menjadi untuk tombak untuk membangun kesadaran pentingnya membayar pajak dan retribusi dari masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain :

1. Merancang disain/mekanisme khusus untuk menjaring data produksi atas obyek pajak sehingga wajib pajak tidak bisa melakukan rekayasa data produksi atas obyek pajak
2. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada BUMD yang diharapkan.
3. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.
4. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
5. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitannya dengan kewajiban pembayaran pajak daerah
6. Bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah
7. Penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan
8. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak/retribusi daerah menuju pelayanan prima.

#### **3.1.1.2. Belanja Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu yang biasanya selama 5 (lima) tahun. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas. Besarnya belanja daerah di Kabupaten Tapanuli Utara selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Secara rinci perkembangan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - Tahun 2018**

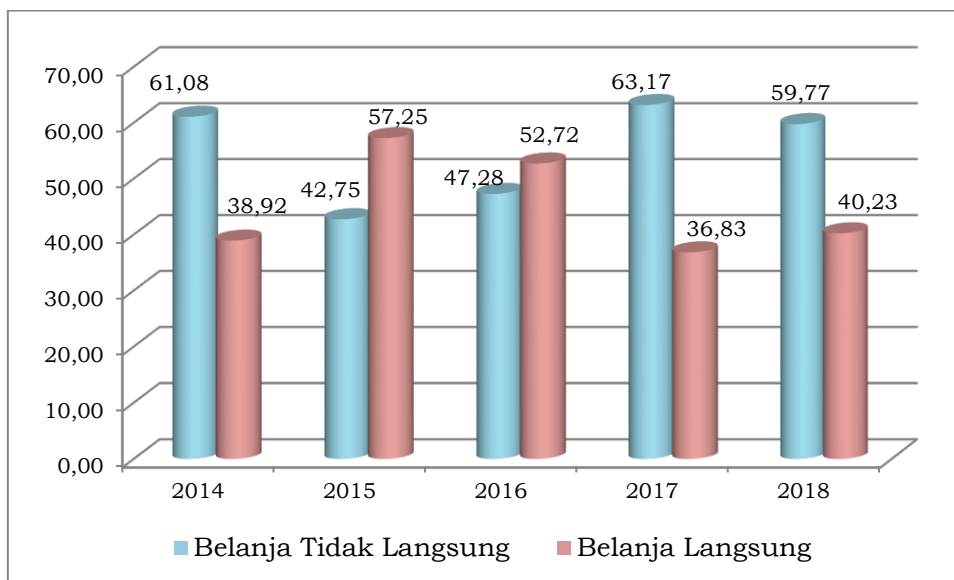
No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>816.538.465.050,87</b>	<b>1.097.187.075.012,12</b>	<b>1.251.194.183.763,24</b>	<b>1.203.503.299.521,51</b>	<b>1.293.318.440.932,50</b>	13,01
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>498.730.593.790,00</b>	<b>469.018.973.716,90</b>	<b>591.587.689.232,00</b>	<b>760.274.029.343,00</b>	<b>773.011.018.758,56</b>	12,59
2.1.1	Belanja Pegawai	453.091.896.635,00	365.339.139.092,90	392.873.345.400,00	478.193.191.976,00	500.290.223.119,56	3,63
2.1.2	Belanja Subsidi	0	0,00	1.112.065.000,00	0,00	0,00	-25,00
2.1.3	Belanja Hibah	15.992.591.949,00	8.405.448.609,00	12.024.468.800,00	23.672.648.100,00	36.490.120.907,00	36,66
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.728.366.000,00	892.970.000,00	962.410.000,00	853.644.364,00	669.426.417,00	-23,09
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	22.104.516.706,00	93.584.696.015,00	183.049.033.532,00	248.417.021.903,00	230.916.041.315,00	111,91
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	4.813.222.500,00	796.720.000,00	1.566.366.500,00	9.137.523.000,00	4.645.207.000,00	111,84
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>317.807.871.260,87</b>	<b>628.168.101.295,22</b>	<b>659.606.494.531,24</b>	<b>443.229.270.178,51</b>	<b>520.307.422.173,94</b>	21,81
2.2.1	Belanja Pegawai	33.292.330.274,00	156.573.916.754,10	168.374.290.886,00	55.324.298.667,00	51.504.519.564,00	75,95
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	138.051.229.923,91	231.044.278.159,71	252.303.797.557,21	232.060.017.601,40	287.140.871.146,04	23,07
2.2.3	Belanja Modal	146.464.311.062,96	240.549.906.381,41	238.928.406.088,03	155.844.953.910,11	181.662.031.463,90	11,34

Sumber : BPKPAD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019



Secara umum belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Persentase rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah tahun 2014-2018 sebesar 13,01 persen. Dengan kapasitas fiskal yang dimiliki, realisasi anggaran belanja daerah tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dari Rp. 816.538.465.050,87 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 1.293.318.440.932,50 pada tahun 2018. Jika dilihat tabel 3.4 maka realisasi belanja daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2018 cenderung meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan pendanaan dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

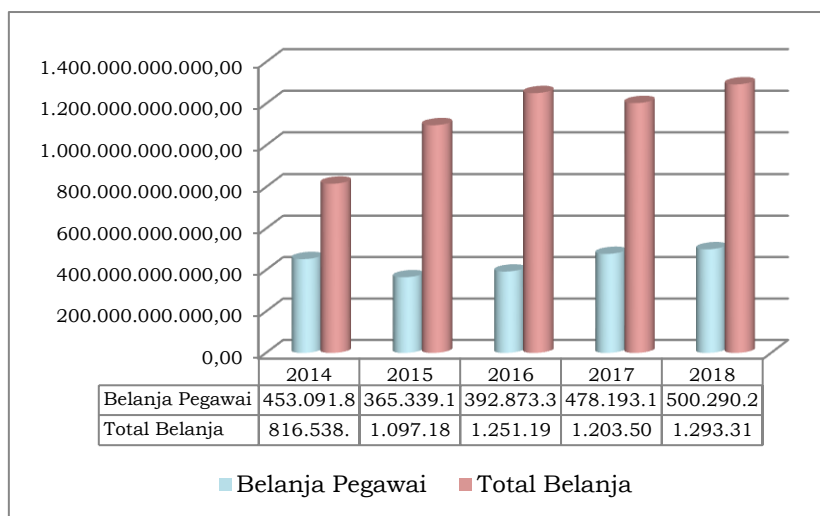
Dilihat dari proporsinya, selama lima tahun terakhir terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja daerah. Realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami peningkatan meskipun alokasi belanja langsung pernah mengalami penurunan pada tahun 2017. Apabila dilihat dari jumlah anggaran belanja maka realisasi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Kenaikan anggaran terbesar komponen belanja tidak langsung adalah pada belanja bantuan keuangan. Hal ini disebabkan adanya penambahan yang signifikan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Secara rinci proporsi masing-masing belanja daerah terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.1**  
**Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**  
**APBD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014 – Tahun 2018**

Berdasarkan gambar 3.1 dapat kita lihat bahwa alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung selama tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 54,81 persen sedangkan belanja langsung rata-rata sebesar 45,19 persen. Proporsi terbesar belanja tidak langsung

terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 63,17 persen dari total belanja daerah. Komponen proporsi belanja langsung yang relatif kecil memberikan gambaran bahwa alokasi anggaran untuk program pembangunan relatif terbatas.



**Gambar 3.2**  
**Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja**  
**APBD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2018**

Komponen terbesar dari alokasi belanja tidak langsung adalah pada belanja pegawai yaitu rata-rata sebesar 39,72 persen dari total belanja daerah. Apabila dilihat alokasi belanja pegawai maka kenaikan anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,63 persen.

Realisasi belanja modal selama lima tahun di Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan bahwa proporsi belanja modal terhadap total belanja maupun proporsi belanja modal terhadap belanja langsung kondisinya fluktuatif. Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah yang baru. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta dan rumah tangga. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **3.1.1.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal;
- c. Persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - Tahun 2018**

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>56.132.000.696,28</b>	<b>110.786.681.166,27</b>	<b>119.289.789.356,01</b>	<b>55.710.584.792,05</b>	<b>60.633.554.851,58</b>	<b>15,15</b>
3.1.1	Penggunaan SiLPA	39.532.475.153,28	90,786,681,166.27	119,289,789,356.01	55.710.584.792,05	60.633.554.851,58	29,15
3.1.2	Penerimaan piutang daerah	16.599.525.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
3.1.3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	20,000,000,000.00	0,00	0,00	0,00	-25,00
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>22.000.000.000,00</b>	<b>11,500,000,000.00</b>	<b>10,332,651,654.00</b>	<b>12.683.309.867,00</b>	<b>4.611.535.704,00</b>	<b>-24,69</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
3.2.1	Penyertaan Modal	2.000.000.000,00	11,500,000,000.00	9,170,615,538.00	12.149.529.251,00	3.488.198.234,00	103,98
3.2.2	Pembayaran Beban Utang	0,00	0,00	1,162,036,116.00	533.780.616,00	1.123.337.470,00	14,10
3.2.3	Pembiayaan Netto	34.132.000.696,28	99.286.681.166,27	108.957.137.702,01	43.027.274.925,05	56.022.019.147,58	42,58
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>90.786.681.166,27</b>	<b>119.289.789.356,01</b>	<b>55.637.928.918,22</b>	<b>60.633.554.851,55</b>	<b>52.582.578.176,39</b>	<b>-6,57</b>

Sumber : BPKPAD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sumber satu-satunya penerimaan pembiayaan adalah berasal dari SiLPA yang nilainya naik dan turun. Hal ini menunjukkan realisasi penggunaan anggaran dan pengurangan nilai SiLPA belum dapat terwujud. Apabila dilihat SiLPA per tahun nilainya mengalami naik turun dan belum ada konsistensi. Namun secara rata-rata, pertumbuhan nilai SiLPA mencapai 29,15 persen walaupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara rata-rata sejak tahun 2014-2018 telah berkurang. Dimasa mendatang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus lebih cermat lagi dalam perencanaan anggaran sehingga nilai anggaran yang tersisa dapat lebih diminimalkan. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, persentase terbesar dipergunakan untuk penyertaan modal dan pembayaran beban utang.

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Sejalan dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Asset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian Neraca Daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Selama kurun waktu tahun 2014-2018 Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mengalami pertumbuhan yang positif dan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 – Tahun 2018**

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	ASET					
1.1.	ASET LANCAR					
	Kas di Kas Daerah	90.717.864.707,27	119.326.403.601,01	55.667.576.987,05	52.717.294.742,58	45.348.356.912,39
	Kas di BUD	0,00	0,00	0,00	48.850.399.930,58	41.420.588.055,39
	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	3.866.894.812,00	3.927.768.857,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	14.504.533,00	67.571.219,00	28.107.805,00	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	73.521.004,00	700.600,00	14.900.000,00	0,00	0,00
	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	6.700.710.363,00	6.413.766.830,00
	Kas di Bendahara BOS	0,00	217.824.703,00	2.908.147.901,40	1.215.549.746,00	820.454.434,00
	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan	0,00	27.389.171.517,38	5.237.410.811,74	5.624.096.404,49	24.567.575.854,81
	Piutang Pendapatan - BLUD	0,00	0,00	0,00		7.805.251.436,00
	Piutang Pajak	3.091.259.946,93	0,00	0,00	-	
	Piutang Retribusi	449.015.122,00	0,00	0,00		
	Piutang Dana Bagi Hasil	41.818.564.794,26	0,00	0,00		
	Piutang Lain-lain	186.813.610,00	186.813.610,00	165.990.775,00	140.376.450,00	108.355.450,00
	Penyisihan Piutang	0,00	(1.541.428.878,71)	(2.370.722.938,01)	(3.028.509.903,15)	(3.885.865.828,28)
	Beban dibayar dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan	6.392.193.146,97	6.771.574.296,34	8.725.830.316,00	11.542.211.911,49	9.870.127.481,14
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>143.241.736.864,43</b>	<b>153.067.322.755,02</b>	<b>70.377.241.658,18</b>	<b>74.911.729.714,41</b>	<b>91.048.022.560,06</b>
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG					
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen					
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	28.396.791.189,50	40.048.076.101,50	46.053.532.484,50	56.786.310.404,50	60.042.672.375,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	28.396.791.189,50	40.048.076.101,50	46.053.532.484,50	56.786.310.404,50	60.042.672.375,00
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>31.919.579.928,50</b>	<b>43.570.864.840,50</b>	<b>49.576.321.223,50</b>	<b>60.309.099.143,50</b>	<b>63.565.461.114,00</b>
1.3.	ASET TETAP					
	Tanah	199.119.908.408,00	836.500.874.041,00	845.849.170.307,00	781.727.477.748,00	787.945.692.488,00
	Peralatan Dan Mesin	186.904.418.848,04	225.711.032.948,00	239.879.201.531,00	248.574.918.445,00	266.869.154.508,00
	Gedung Dan Bangunan	489.539.395.323,51	520.799.704.196,77	564.776.565.527,00	526.600.334.702,00	543.861.559.596,00
	Jalan,Irigasi dan Jaringan	582.425.048.945,95	696.956.523.923,00	856.951.614.721,00	917.367.768.243,00	1.021.811.455.713,00
	Aset Tetap Lainnya	7.721.419.931,94	10.852.865.472,00	9.534.668.670,00	7.842.473.229,00	8.730.096.417,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.571.423.396,35	21.320.246.449,00	4.909.572.401,00	3.617.361.546,00	3.617.361.546,00
	Akumulasi Penyusutan	0,00	(653.281.050.336,29)	(688.712.586.574,00)	(784.461.994.413,00)	(871.716.382.968,96)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.474.281.614.853,79</b>	<b>1.658.860.196.693,48</b>	<b>1.833.188.206.583,00</b>	<b>1.701.268.339.500,00</b>	<b>1.761.118.937.299,04</b>
1.4.	DANA CADANGAN					
	Dana Cadangan	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.	ASET LAINNYA					
	Aset tidak berwujud	249.983.410,00	221.267.599,60	737.262.636,95	695.243.187,00	472.141.293,00
	Aset lain-lain	23.642.272.308,18	16.686.483.301,40	55.106.403.118,40	53.088.895.406,00	50.670.159.656,00
	Kas yang dibatasi penggunaannya	1.400.000.000,00	-	-	-	-
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>249.983.410,00</b>	<b>16.907.750.901,00</b>	<b>55.843.665.755,35</b>	<b>51.365.402.843,00</b>	<b>53.561.036.699,00</b>
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>1.694.735.187.364,90</b>	<b>1.872.406.135.190,00</b>	<b>2.008.985.435.220,03</b>	<b>1.887.854.571.200,91</b>	<b>1.969.293.457.672,10</b>

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
2.	KEWAJIBAN					
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	4.704.545,00	684.471.364,00	7.960.000,00	0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	167.305.952,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Beban	0,00	2.088.788.079,50	879.988.100,00	752.325.228,00	1.194.026.551,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	523.280.627,13	610.162.067,23	84.341.451,23	84.341.451,23
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>4.704.545,00</b>	<b>3.463.846.022,13</b>	<b>1.498.110.167,23</b>	<b>836.666.679,23</b>	<b>1.278.368.002,23</b>
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
	Utang Dalam Negeri	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>3.986.668.168,80</b>	<b>3.986.668.168,80</b>	<b>3.986.668.168,80</b>	<b>3.986.668.168,80</b>	<b>3.986.668.168,80</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>3.991.372.713,80</b>	<b>7.450.514.191,43</b>	<b>5.484.778.336,03</b>	<b>4.823.334.848,03</b>	<b>5.265.036.171,03</b>
3.	EKUITAS					
3.1.	Ekuitas	1.690.743.814.651,10	1.864.955.620.998,57	2.003.500.656.884,00	1.883.031.236.352,88	1.964.028.421.501,07
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.690.743.814.651,10</b>	<b>1.864.955.620.998,57</b>	<b>2.003.500.656.884,00</b>	<b>1.883.031.236.352,88</b>	<b>1.964.028.421.501,07</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.694.735.187.364,90</b>	<b>1.872.406.135.190,00</b>	<b>2.008.985.435.220,03</b>	<b>1.887.854.571.200,91</b>	<b>1.969.293.457.672,10</b>

Sumber : BPKPAD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019



#### **3.1.2.1. Aset**

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Perkembangan neraca daerah, khususnya tentang perkembangan aset daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,02 persen per tahun. Jika pada tahun 2014 total aset daerah sebesar Rp. 1.694.735.187.364,90 maka pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.969.293.457.672,10. Meskipun pertumbuhan asset hanya sebesar 4,02 persen, kondisi keuangan Kabupaten Tapanuli Utara berada dalam kondisi sehat dan memberikan indikasi bahwa Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi yang menjanjikan jika keuangannya dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

#### **3.1.2.2. Kewajiban**

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Nilai kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama lima tahun tumbuh berfluktuasi, dimana nilai kewajiban pemerintah daerah tahun 2016 dan 2017 tumbuh negatif (nilainya lebih rendah dari tahun sebelumnya) dengan rata-rata pertumbuhan 14,34 persen per tahun. Nilai kewajiban Pemerintah Daerah Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3.991.372.713,80 dan tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 5.265.036.171,03.

#### **3.1.2.3. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018 tumbuh rata-rata sebesar 4,01 persen dengan total ekuitas tahun 2014 sebesar Rp. 1.690.743.814.651,10 dan menjadi Rp. 1.964.028.421.501,07 pada tahun 2018.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar walaupun porsinya setiap tahun semakin berkurang. Porsi Dana Alokasi Umum pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014 mencapai 68 persen dan semakin berkurang hingga mencapai 49 persen pada tahun 2018. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha.

Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

- (1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
- (2) peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah;
- (3) peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan
- (4) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu :

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah

2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan OPD sumber pendapatan daerah
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah
7. Meningkatkan kinerja pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Tapanuli Utara pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategis dan tidak memiliki nilai tambah (*non value-added*) harus diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka jumlah pembiayaan neto (penerimaan

pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) harus dapat menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara umum telah mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama periode tahun 2014-2018, rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur adalah 55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih besar persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, sedangkan idealnya pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan.

**Tabel 3.7**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran (Rp)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2018	654.369.911.758,07	1.374.283.171.956,18	47,62
2	Tahun Anggaran 2017	630.448.115.893,25	1.286.682.368.105,55	49,00
3	Tahun Anggaran 2016	789.634.600.072,32	1.395.112.837.687,45	56,60
4	Tahun Anggaran 2015	721.957.656.117,17	1.235.637.719.346,27	58,43
5	Tahun Anggaran 2014	594.640.592.316,68	938.167.561.842,28	63,38

Sumber : BPKPAD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, total belanja daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur tiap tahunnya semakin berkurang. Jika pada 2014 persentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan adalah sebesar 63,38%, maka pada tahun 2018 persentase belanja aparatur berkurang hingga menjadi 47,62%. Dari gambaran tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam lima tahun kedepan berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di berbagai bidang dengan meningkatkan alokasi belanja yang berhubungan dengan pemenuhan pelayanan publik.

### **3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Realisasi pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.8**  
**Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	873.193.145.520,86	1.117.190.183.201,86	1.197.874.974.979,45	1.221.109.579.448,04	1.290.537.707.622,31
2	Dikurangi Realisasi					
3	Belanja Daerah	816.538.465.050,87	1.097.187.075.012,12	1.251.194.183.763,24	1.203.503.299.521,51	1.293.318.440.932,50
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22.000.000.000,00	11,500,000,000.00	10,332,651,654.00	12.683.309.867,00	4.611.535.704,00
5	Defisit Riil	34.654.680.469,99	8.503.108.189,74	(63.651.860.437,79)	4.922.970.059,53	(7.392.269.014,19)

Sumber : BPKPAD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa defisit riil anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014 mencapai Rp. 34.654.680.469,99 kemudian menjadi Rp. -7.392.269.014,19 pada tahun 2018. Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama, dapat digambarkan komposisinya pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.9**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	39.532.475.153,28	90,786,681,166.27	119,289,789,356.01	55.710.584.792,05	60.633.554.851,58
2	Pencairan Dana Cadangan	0	20,000,000,000.00	0	0	0
3	Penerimaan Piutang Daerah	16.599.525.543,00	0	0	0	0
4	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	56.132.000.696,28	110,786,681,166.27	119,289,789,356.01	55.710.584.792,05	60.633.554.851,58
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	<b>90.786.681.166,27</b>	<b>119.289.789.356,01</b>	<b>55.637.928.918,22</b>	<b>60.633.554.851,55</b>	<b>52.582.578.176,39</b>

Sumber : BPKPAD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019



Tabel 3.9 menunjukkan bahwa sumber satu satunya penerimaan pembiayaan adalah dari SiLPA yang nilainya berfluktuasi setiap tahun. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara belum maksimal dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kedepan dapat lebih cermat lagi dalam hal perencanaan anggaran. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, persentase terbesar berasal dari penyertaan modal.

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terkait dengan hal tersebut maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1, disebutkan bahwa kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kapasitas riil keuangan daerah yang dimaksud merupakan penerimaan/pendapatan

daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama lainnya.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi dan pajak daerah tersebut dipungut;
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan;
5. Penerimaan dana bagi hasil hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil diperoleh.

Untuk tujuan tersebut maka perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap kemampuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi.

### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah**

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
  - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi
  - b. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP)
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. DAU cenderung meningkat setiap tahun seiring kebijakan kenaikan gaji pegawai

- b. Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun.
- 3. Sesuai peraturann perundang-undangan pemerintah daerah dapat menganggarkan defisit.
- 4. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan mengalami kenaikan setiap tahun.

Berdasarkan hasil *forecasting* menurut data eksisting dan asumsi, didapat proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024**

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.413.509.766.000,00</b>	<b>1.442.662.315.000,00</b>	<b>1.469.059.442.000,00</b>	<b>1.498.203.611.000,00</b>	<b>1.532.138.160.000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>149.834.210.000,00</b>	<b>157.989.785.000,00</b>	<b>166.584.906.000,00</b>	<b>175.743.346.000,00</b>	<b>185.506.313.000,00</b>
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	35.917.000.000,00	33.012.000.000,00	34.001.506.000,00	35.021.550.000,00	36.072.198.000,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	9.030.000.000,00	10.617.443.000,00	11.891.537.000,00	13.318.521.000,00	14.916.744.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.835.000.000,00	8.835.000.000,00	8.835.000.000,00	8.835.000.000,00	8.835.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96.052.210.000,00	105.525.342.000,00	111.856.863.000,00	118.568.275.000,00	125.682.371.000,00
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>926.171.265.000,00</b>	<b>940.645.861.000,00</b>	<b>951.379.585.000,00</b>	<b>962.241.240.000,00</b>	<b>973.232.159.000,00</b>
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.465.826.000,00	26.596.385.000,00	26.862.349.000,00	27.130.972.000,00	27.402.282.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	683.984.244.000,00	691.032.463.000,00	698.154.967.000,00	705.352.565.000,00	712.625.809.000,00
1.2.2.1	DAU Formula	655.805.793.000,00	662.363.850.000,00	668.987.490.000,00	675.677.365.000,00	682.434.138.000,00
1.2.2.2	DAU Tambahan	28.178.451.000,00	28.668.613.000,00	29.167.477.000,00	29.675.200.000,00	30.191.671.000,00
	a. Bantuan Pendanaan Kelurahan	4.026.000.000,00	4.106.520.000,00	4.188.651.000,00	4.272.424.000,00	4.357.872.000,00
	b. Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	9.470.842.000,00	9.660.259.000,00	9.853.465.000,00	10.050.534.000,00	10.251.544.000,00
	c. Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kades dan Perangkat Desa	14.681.609.000,00	14.901.834.000,00	15.125.361.000,00	15.352.242.000,00	15.582.255.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	219.721.195.000,00	223.017.013.000,00	226.362.269.000,00	229.757.703.000,00	233.204.068.000,00

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>337.504.291.000,00</b>	<b>344.026.669.000,00</b>	<b>351.094.951.000,00</b>	<b>360.219.025.000,00</b>	<b>373.399.688.000,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	53.515.000.000,00	53.782.575.000,00	54.051.488.000,00	54.321.746.000,00	54.593.354.000,00
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.845.930.000,00	50.858.582.000,00	51.367.168.000,00	51.880.840.000,00	52.399.648.000,00
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	216.143.361.000,00	219.385.512.000,00	222.676.295.000,00	226.016.439.000,00	229.406.686.000,00
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0	0	0
1.3.5.	Pendapatan Lainnya	17.000.000.000,00	20.000.000.000,00	23.000.000.000,00	28.000.000.000,00	37.000.000.000,00

### **3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah**

Rumusan kebijakan belanja daerah ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum digunakan untuk:

1. Mendanai belanja wajib dan mengikat
2. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Mendanai program-program prioritas lanjutan yang belum terlaksana pada RPJMD periode sebelumnya

Rumusan kebutuhan belanja didasarkan pada pagu indikatif yaitu jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara membuat proyeksi untuk belanja daerah sama dengan cara seperti yang digunakan untuk proyeksi pendapatan. Sementara itu, dari total proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun anggaran sebagaimana telah disajikan pada tabel sebelumnya, selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja selama 5 (lima) tahun kedepan baik untuk belanja tidak langsung, maupun belanja langsung. Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai
2. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024
3. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja

Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024**

No	Uraian	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.447.066.457.000,00</b>	<b>1.455.862.988.840,00</b>	<b>1.481.261.410.000,00</b>	<b>1.509.904.654.000,00</b>	<b>1.542.839.295.000,00</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>891.925.457.000,00</b>	<b>910.013.988.840,00</b>	<b>928.765.410.000,00</b>	<b>957.939.654.000,00</b>	<b>993.546.295.000,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	570.704.907.000,00	584.925.258.840,00	599.500.006.000,00	614.438.238.000,00	629.748.941.000,00
	- Belanja Pegawai PNS	561.234.065.000,00	575.265.000.000,00	589.646.541.000,00	604.387.704.000,00	619.497.397.000,00
	- Belanja Pegawai PPK	9.470.842.000,00	9.660.258.840,00	9.853.465.000,00	10.050.534.000,00	10.251.544.000,00
2.1.2	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja Hibah	10.750.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	35.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	296.405.550.000,00	300.523.730.000,00	304.700.404.000,00	308.936.416.000,00	313.232.354.000,00
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	8.500.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>555.411.553.500,00</b>	<b>545.849.000.000,00</b>	<b>552.496.000.000,00</b>	<b>551.965.000.000,00</b>	<b>549.293.000.000,00</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	19.064.000.000,00	19.064.000.000,00	19.064.000.000,00	19.064.000.000,00	19.064.000.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	333.602.000.000,00	310.032.000.000,00	310.657.000.000,00	309.833.000.000,00	304.843.000.000,00
2.2.3	Belanja Modal	202.745.553.500,00	216.753.000.000,00	222.775.000.000,00	223.068.000.000,00	225.386.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>-33.827.244.500,00</b>	<b>-13.200.673.840,00</b>	<b>-12.201.968.000,00</b>	<b>-11.701.043.000,00</b>	<b>-10.701.135.000,00</b>

### **3.3.3. Proyeksi Pembiayaan**

Rumusan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan berasal dari penerimaan piutang daerah ataupun pinjaman daerah. Adapun pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain penyertaan modal pada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.



**Tabel 3.12**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024**

No	Uraian	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>43.556.691.000,00</b>	<b>23.200.673.840,00</b>	<b>22.201.968.000,00</b>	<b>21.701.043.000,00</b>	<b>20.701.135.000,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.827.244.500,00	23.200.673.840,00	22.201.968.000,00	21.701.043.000,00	20.701.135.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.3	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>33.556.691.000,00</b>	<b>13.200.673.840,00</b>	<b>12.201.968.000,00</b>	<b>11.701.043.000,00</b>	<b>10.701.135.000,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah dan kerangka pendanaan alokasi prioritas I, II, III Tahun 2020-2024. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan proyeksi penggunaan sumber penerimaan tersebut. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Sebelum dialokasikan besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dana alokasi umum dan khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
3. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 (lima) tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.13.

**Tabel 3.13**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Proyeksi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	1.413.509.766.000,00	1.442.662.315.000,00	1.469.059.442.000,00	1.498.203.611.000,00	1.532.138.160.000,00
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	43.827.244.500,00	23.200.673.840,00	22.201.968.000,00	21.701.043.000,00	20.701.135.000,00
3	Total Penerimaan	1.457.337.010.500,00	1.465.862.988.840,00	1.491.261.410.000,00	1.519.904.654.000,00	1.552.839.295.000,00
	Dikurangi					
4	Belanja Tidak Langsung	891.925.457.000,00	910.013.988.840,00	928.765.410.000,00	957.939.654.000,00	993.546.295.000,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>555.411.553.500,00</b>	<b>545.849.000.000,00</b>	<b>552.496.000.000,00</b>	<b>551.965.000.000,00</b>	<b>549.293.000.000,00</b>

Dari tabel 3.13 dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk 5 Tahun ke depan adalah :

1. Proyeksi Tahun 2020 sebesar Rp. 555.411.553.500,00 atau sebesar 39,29 persen dari total pendapatan.
2. Proyeksi Tahun 2021 sebesar Rp. 545.849.000.000,00 atau sebesar 37,84 persen dari total pendapatan.
3. Proyeksi Tahun 2022 sebesar Rp. 552.496.000.000,00 atau sebesar 37,61 persen dari total pendapatan.
4. Proyeksi Tahun 2023 sebesar Rp. 551.965.000.000,00 atau sebesar 36,84 persen dari total pendapatan.
5. Proyeksi Tahun 2024 sebesar Rp. 549.293.000.000,00 atau sebesar 35,85 persen dari total pendapatan.

Selanjutnya setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Rincian data penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dimaksud dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 3.14**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Proyeksi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas Keuangan	1.411.468.634.445,00	1.433.156.730.022,35	1.455.148.208.060,88	1.479.449.097.019,06	1.508.065.297.503,49
2	Prioritas I	592.734.544.124,89	607.505.553.518,01	622.644.891.061,76	638.161.746.018,23	654.065.537.002,19
3	Prioritas II	529.617.260.437,11	532.762.446.861,34	535.437.913.336,93	529.985.935.028,44	529.702.406.971,48
4	Prioritas III	289.116.829.883,00	292.888.729.643,00	297.065.403.662,19	311.301.415.972,39	324.297.353.529,82
	Surplus/(Defisit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dari tabel 3.14, prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program unggulan pencapaian visi misi kepala daerah, yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Selain itu program prioritas II berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- c. Rencana alokasi prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja yang bersifat mendukung seperti belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial.

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan dan isu yang tepat dan bersifat strategis akan dapat menentukan sasaran dan program pembangunan untuk lima tahun yang akan datang. Permasalahan pembangunan merupakan kondisi penting yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan serta sekaligus sebagai komponen dasar (*raw materials*) bagi penyusunan isu strategis. Sedangkan analisis isu-isu strategis merupakan upaya untuk memahami kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Jika dinamika internal dan eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun dapat diidentifikasi dengan baik, maka pemerintah daerah dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Suatu isu strategis apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan data dan informasi yang sudah terkumpul, permasalahan pembangunan diidentifikasi sesuai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

##### **4.1.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan gambaran kinerja pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah yang relevan. Berdasarkan hasil analisis terhadap data empirik permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan dipetakan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

No	Urusan	Permasalahan
I	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	
1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1. Masih belum meratanya sebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik antar wilayah maupun antar sekolah
		2. Perlunya standarisasi dan kesetaraan kualitas sekolah antar sekolah dan antar wilayah kecamatan

No	Urusan	Permasalahan
		3. Perlunya peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
		4. Perlunya pengembangan pembinaan karakter siswa, baik melalui pembelajaran muatan lokal maupun kegiatan ekstrakurikuler
		5. Belum optimalnya fasilitasi dan apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi
1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal
		2. Cakupan pelayanan rujukan masih rendah
		3. Belum semua puskesmas terakreditasi
		4. Ketersediaan dan pemanfaatan alkes belum optimal
		5. Kondisi/bangunan fisik puskesmas dan jaringannya masih ada yang belum memenuhi syarat
1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Konektivitas antar wilayah belum seluruhnya terbuka
		2. Masih ada saluran irigasi yang terbuat dari tanah
		3. Kurangnya kesesuaian/ketaatan pembangunan terhadap regulasi penataan ruang yang disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan informasi penataan ruang (RTRW, RDTR dan peraturan yang lebih rinci) di ruang publik
		4. Belum seluruh kawasan strategis daerah memiliki RDTR
		5. Belum adanya penyusunan RDTR yang terintegrasi untuk pengembangan Kawasan Pariwisata
		6. Perlunya penanganan/pemeliharaan drainase jalan terutama wilayah perkotaan
		7. Belum semua rumah tangga terlayani air bersih
		8. Kawasan kumuh yang belum seluruhnya tertangani
		9. Cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan belum tersedia
		10. Kondisi debit sumber air PDAM terus menurun dari tahun ke tahun
1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh
		2. Rendahnya daya dukung sarana prasarana wilayah permukiman
		3. Kualitas lingkungan permukiman yang kurang memenuhi syarat
		4. Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi
		5. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani



No	Urusan	Permasalahan
1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang dijiwai oleh nilai keagamaan dan budaya lokal perlu dikembangkan lebih optimal, terutama kepada siswa sekolah dan pemuda
		2. Perlunya perencanaan terkait pengurangan resiko bencana
		3. Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana dikarenakan jangkaun terlalu luas, belum adanya pos pembantu serta kurangnya armada
1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1. Perlunya peningkatan keterampilan/keahlian terutama bagi PMKS dan penyandang disabilitas
		2. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat masih relatif rendah
		3. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara
<b>II</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	1. Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara
		2. Kurangnya keterampilan/keahlian tenaga kerja sebagai tenaga kerja terampil
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Masih sedikitnya OPD yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender
		2. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD
		3. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kabupaten layak anak
2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1. Belum maksimalnya penguatan cadangan pangan daerah
		2. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
		3. Belum optimalnya pencapaian skor pola pangan harapan
		4. Masih belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
		5. Belum optimalnya ketersediaan diversifikasi olahan pangan lokal
		6. Belum berkembangnya Teknologi Tepat Guna secara terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis komoditi lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya
		7. Belum terpenuhinya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1. Belum tersedianya data secara menyeluruh mengenai kepemilikan tanah bersertifikat oleh pemerintah daerah

No	Urusan	Permasalahan
		2. Masih adanya konflik pertanahan antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah daerah
2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	1. Limbah sebagian masih dibuang kesungai yang berdampak pada pencemaran sumber air
		2. Masih terbatasnya titik-titik yang dipantau dalam rangka pemantauan status mutu air
		3. Belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah (belum seluruh sampah dapat diangkut ke TPA)
		4. Belum tersedia TPA <i>sanitary landfill</i>
2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sejak awal
		2. Perlunya peningkatan kualitas implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).
2.7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
		2. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang Desa masih belum optimal (kompetensi SDM, pengelolaan keuangan, ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja)
		3. Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya
		4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum terbentuk dan yang sudah terbentuk belum sepenuhnya mampu berjalan secara optimal
		5. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa atau produk unggulan desa
		6. Belum optimalnya data profil desa dan data base terpadu penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di perdesaan
2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Masih tingginya pasangan usia subur yang belum ber KB
		2. Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap kesehatan reproduksi
		3. Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB.
2.9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	1. Belum optimalnya penyediaan rambu-rambu untuk seluruh jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara
		2. Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sehingga dibutuhkan pembinaan kedisiplinan

No	Urusan	Permasalahan
		3. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas ketersediaan layanan angkutan orang/ barang hingga ke kecamatan
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi publik
		2. Masih terbatasnya sarana internet untuk diakses oleh masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan
		3. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi
		2. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM sehingga menyulitkan pengembangan usaha
		3. Keterbatasan Koperasi dan UMKM dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	1. Potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor
		2. Sebagian investor masih belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya (LKPM) sehingga menghambat pengawasan
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan kepemudaan
		2. Sarana dan prasarana olahraga yang minim dan belum merata diseluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk pemenuhannya
		3. Terbatasnya pemuda yang mendapat akses pembinaan
		4. Rendahnya even/kegiatan yang melibatkan pemuda
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1. Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan. Faktanya semua instansi pemerintah memiliki data, namun data yang dimiliki tidak terintegrasi satu sama lain.
		2. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan
		3. Publikasi data statistik sektoral melalui media komunikasi/multi media belum optimal
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah

No	Urusan	Permasalahan
		2. Sarana dan prasarana persandian masih perlu ditingkatkan
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Tapanuli Utara
		2. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan seni dan budaya daerah
		3. Kurangnya sarana prasarana dan SDM pembina kegiatan seni dan budaya
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1. Rendahnya minat baca masyarakat terutama untuk membaca buku-buku literatur
		2. Masih terbatasnya pustakawan yang tersertifikasi
		3. Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat menjadi acuan juga kendala dalam penyediaan layanan perpustakaan (kurangnya tenaga yang menguasai IT)
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1. Belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk/format informatika/digital
		2. Masih terbatasnya sarana prasarana, aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah
		3. Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah. Sumberdaya manusia yang terbatas secara kualitas dan kuantitas mempengaruhi tingkat layanan kearsipan dan kualitas pengelolaan arsip
<b>III Urusan Pemerintahan Pilihan</b>		
3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Perlunya peningkatan kontribusi perikanan (darat) bagi perekonomian daerah
		2. Fluktuasi ketersediaan benih ikan. Upaya yang dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan, peningkatan teknologi perikanan
		3. Tingginya harga pakan pabrikan
		4. Kelembagaan kelompok belum mantap
3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	1. Kurangnya daya dukung infrastruktur menuju destinasi wisata
		2. Pengembangan sektor pariwisata belum terintegrasi dengan dengan sektor lain
		3. Belum adanya tata kelola obyek wisata yang jelas dan sesuai dengan karakteristik masing-masing obyek wisata termasuk agenda wisata yang terencana
		4. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru
		5. Masih kurangnya promosi pariwisata, baik wisata alam maupun buatan
		6. Kemampuan SDM pelaku pariwisata dalam menangkap peluang usaha dan kompetensi pelaku pariwisata masih terbatas
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian

No	Urusan	Permasalahan
		2. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan
		3. Sarana dan prasarana produksi, pasca panen dan pemasaran pertanian belum memadai
		4. Belum optimalnya produktifitas komoditas pertanian/perkebunan
		5. Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian, peternakan dan perkebunan yang berpengaruh pada penguasaan teknik budidaya, pengelolaan manajemen dan pemanfaatan teknologi tepat guna
		6. Pentingnya penyuluhan kepada petani dalam menghadapi anomali iklim dan ancaman hama serta penyakit tanaman
		7. Perlunya penyuluhan dalam mengatasi ancaman penyakit ternak yang dapat mengganggu produktivitas
		8. Belum tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan
		9. Kurang optimalnya penerapan inovasi teknologi dan penyerapan informasi oleh petani
		10. Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh
3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	1. Belum optimalnya pengelolaan hutan dan peningkatan produksi hasil kehutanan
		2. Masih adanya lahan kritis yang harus dikonservasi
3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Perlunya penataan kegiatan usaha pertambangan mineral batuan bukan logam (Galian C) yang terkait pajak dan prosedur pertambangan
		2. Pengembangan energi baru terbarukan belum berjalan secara optimal
		3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan
3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1. Kurangnya sarana usaha dan modal usaha bagi pedagang kecil sektor informal dan perdagangan kaki lima
		2. Perkembangan kondisi fisik bangunan pasar masih ada yang sedang dan kurang baik
		3. Terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok pedagang informal
3.7	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1. Diperlukan peningkatan SDM, ketrampilan dan penguasaan teknologi khususnya yang mendukung Industri Kecil
		2. Masih terbatasnya kesempatan pelaku industri kecil dan menengah dalam mengikuti berbagai kegiatan pameran/promosi produk
3.8	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Belum optimalnya pembinaan transmigran pada daerah transmigrasi.

No	Urusan	Permasalahan
<b>IV</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>	
4.1	Sekretariat Daerah	1. Belum optimalnya tata kelola kelembagaan, tata laksana serta akuntabilitas kinerja
		2. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah
		3. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur
		4. Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan
		5. Perlunya peningkatan pelayanan kelurahan
		6. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas produk kebijakan bidang perekonomian
		7. Kurangnya komitmen bersama (eksekutif dan legislatif) dalam menjalankan pemerintahan secara lebih maksimal
		8. Perlunya peningkatan pengelolaan BUMD untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah
<b>V</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	
5.1	Perencanaan	1. Regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya
		2. Kurangnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
5.2	Keuangan	1. Perlunya peningkatan manajemen aset dalam fungsi perencanaan, pendayagunaan dan pengendalian
		2. Keterbatasan tindak lanjut peraturan perundang-undangan dari pusat dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
		3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
		4. Perlu adanya komitmen dalam proses penyusunan APBD agar tepat waktu dalam setiap tahapan
5.3	Kepegawaian	1. Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
		2. Belum optimalnya pembiayaan untuk mengikuti diklat yang dibutuhkan
5.4	Penelitian dan Pengembangan	1. Kurangnya kajian/penelitian/riset sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas
		2. Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan dalam melakukan kajian/penelitian/riset baik dari sisi aparatur daerah maupun akademisi yang ada di daerah

No	Urusan	Permasalahan
<b>VI</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>	
6.1	Inspektorat	1. Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) disetiap OPD dikarenakan kapasitas/kompetensi SDM masih belum memadai dan dibutuhkan sarana prasarana pengawasan
<b>VII</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>	
7.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat

#### 4.1.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pembangunan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara. Rumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

##### 1. Permasalahan Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018 sebesar 9,75 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,82 persen dan lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara (8,94 persen) dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 29.200 orang. Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan antara lain oleh : (a) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu belum terjangkau secara optimal; (b) Masih rendahnya ketrampilan/keahlian yang dimiliki sebagian masyarakat; (c) Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin; dan (d) Aksebilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih rendah. Tingginya angka kemiskinan juga berpengaruh terhadap permasalahan pengangguran. Tingginya angka pengangguran bukan semata-mata karena ketiadaan lapangan pekerjaan namun juga karena rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja yang ada dan tidak sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja sebagai tempat untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja.

##### 2. Permasalahan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar merupakan faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Hingga tahun 2018 jalan kabupaten dalam kondisi baik masih 50,95 persen dan irigasi masih 67,42 persen. Bahkan cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas

lahan budidaya masih 21,06 persen. Rendahnya daya dukung infrastruktur dasar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Tapanuli Utara masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong percepatan pertumbuhan daerah.

3. Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Kualitas kelestarian lingkungan hidup harus tetap dijaga guna mencegah dan mengendalikan kerusakan SDA dari dampak aktivitas sosial perekonomian. Mengembangkan bina lingkungan lestari antara lain dengan (a) mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan khususnya dalam pengolahan limbah rumah tangga; (b) meningkatkan daya dukung kawasan lindung; (c) mencegah kerusakan SDA utamanya penanganan lahan-lahan kritis dan lahan kurang produktif serta perlindungan sumber daya air.

4. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Pengelolaan keuangan daerah, dimana belum terintegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran belum dapat dihitung secara akurat. Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah belum optimal, seperti masih besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur dengan rata-rata selama tahun 2014-2018 mencapai 60,30 persen (belanja tidak langsung) dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Rendahnya kesadaran wajib pajak daerah untuk melakukan pembayaran tepat waktu juga menjadi masalah. Permasalahan berikutnya terkait dengan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan.
- b. Manajemen Kepegawaian dan Struktur Organisasi. Penempatan aparatur secara proposional berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi masih perlu mendapatkan perhatian. Penempatan pegawai belum dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, keadilan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Pada sisi lain, perubahan SOTK sebagai dampak penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih menyisakan berbagai persoalan, antara lain



terdapatnya tumpang tindih tupoksi antar OPD yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.

- c. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara masih menghadapi beberapa kendala, antara lain : (a) penataan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, efektif, efisien dan akuntabel; (b) penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah, profesional, cepat, tepat dan terpercaya; (c) penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah; (d) belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); serta (e) belum optimalnya penerapan pola pengembangan karir PNS.

## **4.2. Isu Strategis**

Identifikasi isu-isu strategis sangat penting dalam proses perencanaan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah maupun berasal dari dinamika nasional serta dunia internasional. Kebijakan nasional maupun regional yang terkait dengan pembangunan daerah juga dapat menjadi isu strategis. Substansi utama dalam identifikasi dan penyajian isu strategis adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh yang besar bagi pencapaian target pembangunan dimasa yang akan datang.

### **4.2.1. Isu Strategis Global**

#### **4.2.1.1. Perlambatan Ekonomi Global**

Sebagian besar negara mengalami perlambatan ekonomi sebagai efek perang dagang dan hanya Amerika Serikat yang pertumbuhannya tetap meningkat. Pada triwulan I tahun 2019, perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh lebih cepat sebesar 3,2 persen (YoY). Sementara itu perekonomian Tiongkok tumbuh stabil pada triwulan I tahun 2019 sebesar 6,4 persen (YoY). Konflik perang dagang yang belum mencapai kesepakatan menahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Namun kondisi tersebut diimbangi dengan stimulus moneter yang diberlakukan sehingga perekonomian dapat tetap tumbuh. Perlambatan ekonomi juga terjadi di kawasan Eropa. Negara-negara di kawasan tersebut seperti Spanyol dan Perancis mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,1 dan 2,4 persen. Akibat perekonomian global yang masih belum stabil, sebagian besar negara berhati-hati dengan menahan tingkat suku bunganya. Di sisi lain, harga komoditas internasional bergerak turun selama triwulan I tahun 2019. Meski begitu, harga minyak mentah justru mengalami peningkatan. Hal ini merupakan keberhasilan bagi negara-negara yang tergabung dalam OPEC+ yang sepakat menurunkan produksinya untuk kembali menaikkan harga minyak. Perekonomian global kedepannya, diprediksi masih akan tumbuh melambat. Hal ini ditandai dengan penurunan target pertumbuhan ekonomi oleh

beberapa negara besar. Perlambatan ini masih dibayangi oleh isu perang dagang yang masih belum menemukan titik temu.

IMF memprediksi perekonomian global hanya mampu tumbuh hingga 3,5 persen pada tahun 2019. Proyeksi tersebut lebih rendah 0,2 persen dari proyeksi yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2018. Sedangkan World Bank mengeluarkan prediksi yang lebih rendah bahwa perekonomian global tumbuh hanya sebesar 2,9 persen pada tahun 2019 dan 2,8 pada tahun 2020. Sementara pertumbuhan negara-negara maju diproyeksikan sebesar 2 persen pada tahun 2019. Perekonomian AS pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh melambat sebesar 2,5 persen. Hal tersebut diperkirakan terjadi karena memudarnya stimulus fiskal. Di sisi lain, peningkatan tarif perdagangan akan membebani kinerja ekspor dan impor. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 1,6 persen. Pertumbuhan pada tahun 2020 diperkirakan lebih lambat. Proyeksi pertumbuhan yang menurun sebagai dampak dari perlambatan ekonomi negara-negara di kawasan Eropa diantaranya Jerman, Perancis dan Italia. Peningkatan pengeluaran Jerman akan memperkecil surplus, sementara defisit yang terjadi di Perancis dan Italia diprediksi meningkat.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2019 sebesar 6,2 persen. Proyeksi dengan pertumbuhan yang melambat tersebut merupakan dampak dari berlanjutnya proses penyeimbangan kembali aktivitas perekonomian domestik maupun eksternal. World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 sebesar 5,2 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 5,3 persen. Ekspansi ekonomi Thailand diperkirakan melambat menjadi 3,8 persen. Kawasan Asia Timur dan Pasifik sendiri diprediksi masih menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat, stabil pada angka 6 persen pada tahun 2019. Kawasan Eropa dan Asia Tengah diprediksi melambat menjadi 2,3 persen disebabkan pertumbuhan beberapa negara besar yang melambat. Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat yakni Asia Selatan diprediksi meningkat menjadi 7,1 persen pada tahun 2019. Perekonomian kawasan Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Afrika Sub-Sahara juga diprediksi tumbuh lebih cepat.

#### **4.2.1.2. Sustainable Development Goals (SDGs)**

SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Bersih dan

Terjangkau; (8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas; (12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab; (13) Aksi Terhadap Iklim; (14) Kehidupan Bawah Laut; (15) Kehidupan di Darat; (16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

*Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDG's) yang berakhir pada tahun 2015. MDG's yang diklaim sukses membawa penduduk negara dunia ketiga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang diukur melalui *Human Development Index* dilanjutkan dengan penancangan SDG's. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. Bila pada *Millenium Development Goals* (MDG's) terdapat 8 sasaran dan 60 target maka pada *Sustainable Development Goals* (SDG's) terdapat 17 sasaran dan 169 target pembangunan. Sasaran SDG's tersebut adalah :

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan diantara negara -negara.

11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai komitmen bersama di dunia internasional, SDG's sebagai agenda global perlu diintegrasikan dengan agenda nasional dan agenda pembangunan daerah. Hal ini bertujuan agar pencapaian terhadap sasaran SDG's dapat lebih maksimal.

#### **4.2.1.3. Perubahan Iklim Global**

Perubahan iklim adalah fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih-guna lahan. Fenomena perubahan iklim diawali dengan menumpuknya berbagai gas yang dihasilkan dari kegiatan tersebut pada atmosfer. Gas-gas tersebut memiliki sifat kekhususan seperti kaca yang bersifat meneruskan radiasi gelombang-pendek atau cahaya matahari, tetapi menyerap dan memantulkan radiasi gelombang-panjang atau radiasi-balik yang dipancarkan bumi yang bersifat panas sehingga suhu atmosfer bumi meningkat. Dengan adanya penumpukan gas-gas tersebut, keadaan di bumi identik dengan keadaan di dalam rumah kaca yang selalu lebih panas dibanding suhu udara di luarnya. Dari pemaknaan inilah, gas-gas tersebut dikenal dengan istilah “gas rumah kaca” dan pengaruh yang ditimbulkannya dikenal dengan istilah “efek rumah kaca”. Proses alam inilah yang selanjutnya akan menimbulkan suatu pemanasan global yang akan berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Fenomena pemanasan global bukan suatu proses instan yang terjadi dalam hitungan bulan atau belasan tahun, tetapi merupakan akumulasi secara bertahap dalam peningkatan konsentrasi kandungan gas rumah kaca di atmosfer bumi. Beberapa dampak negatif pemanasan global adalah menurunnya produksi pangan,

terganggunya fluktuasi dan distribusi ketersediaan air, penyebaran hama dan penyakit tanaman serta dampak bagi kehidupan sosial ekonomi manusia.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas total daratan 1,9 juta kilometer persegi yang tersebar di 17.000 buah pulau. Sedangkan luas lautan sebesar 5,8 juta kilometer persegi termasuk zona ekonomi eksklusif. Ibukota negara dan hampir semua ibu kota provinsi terletak di wilayah pantai serta 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir dengan panjang pantai total sekitar 81.000 km. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan merupakan daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai negara yang notabene masih agraris, perubahan iklim akan menyebabkan gangguan pada daur air dan produksi pangan di Indonesia. Hujan yang intensitasnya semakin tinggi pada perioda musim hujan yang semakin pendek telah menyebabkan banjir di tempat-tempat yang tidak biasa. Penggundulan hutan telah memperparah permasalahan ini. Saat yang sama, penghutanan kembali dan pemeliharaan hutan yang masih ada bisa membantu beradaptasi dengan pola hujan dan daur air yang berubah ini.

Naiknya permukaan air laut karena pemanasan global (*global warming*) dapat menyebabkan bencana besar bagi suatu pulau kecil dan membahayakan juga penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Tenggelam atau hilangnya suatu pulau kecil merupakan salah satu fenomena yang akan pasti terjadi apabila dampak perubahan iklim tidak dihindarkan. Dampak perubahan iklim bukan hanya akan dirasakan oleh wilayah pesisir saja akan tetapi juga dapat memengaruhi wilayah daratan yang berkaitan dengan perubahan musim tanam, kekeringan atau kemarau panjang, longsor dan banjir serta juga kebakaran hutan.

Masyarakat yang mendiami suatu daerah rentan perubahan iklim, sebagaimana halnya Indonesia, harus melakukan suatu upaya adaptasi untuk mengatasi masalah yang terjadi. Mengingat hal tersebut, langkah antisipatif akan lebih efektif dan biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah bila dibanding dengan upaya adaptasi yang dilakukan nanti pada saat keadaan sudah semakin memburuk dimana dampak sudah semakin besar sehingga upaya adaptasi akan membutuhkan biaya lebih mahal.

Dampak pemanasan global menjadi salah satu isu yang diangkat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Tapanuli Utara dengan iklim yang semakin panas. Kondisi ini disebabkan oleh emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang meningkat sebesar 11 persen akibat kerusakan/pemanfaatan hutan, sumber bergerak dan tidak bergerak. Perubahan iklim ini berdampak pada penurunan produksi hasil pertanian dan perkebunan akibat peningkatan populasi hama, penyakit tanaman, penambahan

umur produksi dan tidak jelasnya masa tanam. Demikian juga halnya dalam bidang kesehatan manusia dengan ditemukannya kondisi prevalensi penyakit yang semakin meningkat disebabkan perubahan cuaca dan iklim seperti ISPA, batuk, influenza dan Demam Berdarah Dengue.

#### **4.2.1.4. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi semakin besar dalam perluasan jangkauan layanan dan peningkatan kualitas layanan pada sektor pemerintahan, industri, jasa maupun sosial. Dalam bidang pemerintahan, pemanfaatan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Namun demikian, kondisi saat ini banyak instansi yang membangun aplikasi masing-masing dan banyak data yang belum terintegrasi membuat pemanfaatan TIK menjadi tidak optimal. Dalam pelayanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan, pemanfaatan TIK dapat memperluas layanan dan pemerataan kualitas layanan. Dalam bidang ekonomi, industri, maupun jasa, pemanfaatan TIK juga dapat memberikan dampak yang besar. Namun demikian, saat ini pemanfaatan TIK di sektor pertanian dan perikanan masih sangat minim, sehingga manfaat TIK bagi petani dan nelayan belum signifikan seperti memberikan informasi harga yang paling aktual dan memperluas jaringan penjualan kepada nelayan. Dalam bidang perdagangan dan ekonomi kreatif, pemanfaatan TIK berdampak besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Luasnya pemanfaatan TIK membutuhkan berbagai keahlian dalam mengelola perangkat TIK maupun memanfaatkan informasi. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan SDM termasuk melalui pendidikan vokasi bidang TIK. Pengembangan TIK juga membutuhkan SDM yang berasal dari berbagai bidang khususnya *Science, Technology, Engineering* dan *Mathematics* (STEM). Pengembangan SDM TIK tersebut juga sejalan dengan besarnya pasar TIK di Indonesia. Pengembangan kemampuan SDM dalam memproduksi barang dan jasa TIK diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pasar TIK, terutama dalam menghadapi industri 4.0.

#### **4.2.1.5. Demokratisasi dan Hak Azasi Manusia**

Mengacu pada Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024, Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia Tahun 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi terdapat empat isu yang perlu diperhatikan. Pertama, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. Kedua, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Ketiga, masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

#### **4.2.2. Isu Strategis Nasional**

##### **4.2.2.1. Isu Perekonomian Nasional**

Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2018. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, menunjukkan adanya penguatan ekonomi domestik. Secara kewilayahan, hampir semua kawasan mengalami pertumbuhan positif, kecuali kawasan Maluku dan Papua. Perkembangan perekonomian domestik banyak dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global, harga komoditas internasional, agenda nasional (Pemilihan Umum) serta perubahan musim panen. Perkembangan sektor fiskal digambarkan dengan realisasi penerimaan perpajakan, dimana hingga akhir triwulan I tahun 2019 mencapai Rp. 350,1 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, realisasi terhadap target APBN relatif menurun. Pendapatan negara dan hibah turun dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh turunnya harga komoditas. Di sisi lain, realisasi belanja negara turun dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sementara itu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga BI7DRR pada level 6,00 persen. Langkah tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik yang diharapkan menjaga stabilisasi.

Sementara itu perekonomian Indonesia diprediksi masih tumbuh positif dan stabil pada 5,2 persen. Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga seiring stabilnya tingkat inflasi dan meningkatnya bantuan sosial. Konsumsi LNPRT akan tumbuh melambat pada sisa triwulan 2019 terkait dengan telah selesainya pelaksanaan pemilu nasional. Ekspor dan impor juga diprediksi melambat terkait

lemahnya kondisi perekonomian global. Di sisi lain, sektor pertanian pada triwulan II tahun 2019 diprediksi meningkat seiring dengan pergeseran masa panen.

#### **4.2.2.2. Agenda Pembangunan Nasional**

Mempedomani Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, disampaikan bahwa 7 agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas  
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
  - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan; dan
  - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan  
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :
  - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belum berkembang;
  - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
  - d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahn dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
  - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing  
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui :
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;



- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas daya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
- Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilakukan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
- a. Memperkuat ketahanan budaya bangsa;
  - b. Memajukan kebudayaan;
  - c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai agama;
  - d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga;
  - e. Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :
- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - d. Rehabilitasi sarana prasarana yang sudah tidak efisien;
  - e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
  - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
  - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
  - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan nasional selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan di wilayah masing-masing guna pencapaian target pembangunan secara nasional.

#### **4.2.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara**

Mempedomani Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, disampaikan bahwa isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah:

##### **1. Ketimpangan**

Kondisi ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari indikator Indeks Gini, dimana Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang selama kurun waktu 2013-2017 dan nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara selalu berada di bawah gini ratio nasional. Untuk tahun 2013, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,354 dan terjadi penurunan nilai gini ratio pada tahun 2014 menjadi 0,321. Akan tetapi pada tahun 2015, gini ratio Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 0,336 dan kondisi ini terjadi juga pada tingkat nasional. Seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan maka nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dari 0,319 menjadi 0,315.

## 2. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih relatif tinggi yakni 9,28 persen terhadap total penduduk. Pola permasalahan kemiskinan relatif sama yaitu dimana jumlah penduduk miskin dominan dipengaruhi pada dimensi infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan, namun dimensi kesehatan dan pendidikan juga penting untuk diintervensi karena dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pendampingan pelaksanaan program belum memadai, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah.

## 3. Pengangguran

Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 6,74 juta jiwa yang terdiri dari 6,37 juta jiwa berkerja dan sebesar 377 ribu jiwa pengangguran. Penduduk yang berkerja ini sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan yaitu 37,52 persen. Selanjutnya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 22,16 persen. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor Jasa Kemasyarakatan yaitu sebesar 17,26 persen, sementara penduduk yang berkerja di sektor industri hanya sekitar 9,03 persen. Selebihnya bekerja di sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor keuangan. Pada Tahun 2017 persentase angkatan kerja di Sumatera Utara dengan pendidikan yang ditamatkan sebagian besar berpendidikan Diploma dan Sarjana. Persentase golongan ini mencapai 87,77 persen. Selanjutnya angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SD kebawah dan SMP masing-masing sekitar 71,46 persen dan 78,38 persen, sedangkan 78,94 persen berpendidikan SMA. Namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera Utara hanya 68,88 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan/skill yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 4.441 orang yang didominasi oleh pencari kerja lulusan SMA sebanyak 2.889 orang dan Sarjana sebanyak 684 orang. Hal ini mengindikasikan kurangnya penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat maupun informasi terhadap pasar kerja yang belum memadai. Selain penyediaan lapangan pekerjaan, perlu juga diwujudkan kemudahan berbisnis dan upaya pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini penting mengingat bahwa prospek kewirausahaan di Sumatera Utara cukup baik dan pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

#### 4. Kesehatan

Pelayanan kesehatan terdiri dari 4 aspek yaitu preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif. Aspek preventif berarti pencegahan terhadap penyakit, terutama pada masyarakat yang berisiko tinggi. Aspek kuratif yaitu usaha penyembuhan dari penyakit yang menyerang. Aspek promotif adalah usaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, terutama pada masyarakat yang sehat. Aspek rehabilitatif adalah usaha pemulihan dari penyakit dengan tujuan mencapai kualitas hidup yang sama dengan saat sebelum terkena penyakit.

Beberapa hal yang menjadi isu dalam pembangunan kesehatan masyarakat antara lain perhatian terhadap pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat yang selama ini belum berjalan dengan optimal. Perbaikan pelayanan bidang kesehatan masih harus dilakukan. Perbaikan terhadap sarana dan prasarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, tenaga medis) harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan tahun 2017 mencapai 68,37 tahun. Jumlah kematian bayi dan jumlah kematian ibu masih tinggi, cakupan balita gizi buruk yang mengalami perawatan juga patut menjadi perhatian karena grafik penanganannya sangat fluktuatif. Selain itu dalam hal menyangkut fasilitas kesehatan yakni rasio posyandu, puskesmas, poliklinik, pustu, rumah sakit per satuan penduduk belum mengalami perkembangan yang berarti begitu halnya juga dengan rasio dokter dan tenaga medis persatuan penduduk sehingga pelayanan kesehatan belum optimal.

#### 5. Pendidikan

Pendidikan adalah investasi sumberdaya manusia dalam jangka panjang, yang baru dapat dirasakan 20 tahun ke depan. Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan bahwa pendidikan merupakan hal yang menjadi landasan pembangunan, dan mengalokasikan dana pembangunan minimal 20% untuk mendukung pendidikan. Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat terus ditingkatkan untuk memenuhi standar pendidikan nasional dan juga tuntutan kemajuan IPTEK. Berbagai upaya pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pelaku pembangunan lainnya, namun tak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (sekolah, kompetensi guru, akreditasi) masih menjadi agenda pembangunan 5 (lima) tahun mendatang bagi Provinsi Sumatera Utara. Hal lain lagi yang perlu ditingkatkan yaitu belum meratanya akses dan partisipasi pendidikan terutama di pendidikan menengah dan tinggi di Sumatera Utara.

#### 6. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atas indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Sumatera Utara adalah sebesar 55,02. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara tidak baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain erupsi gunung Sinabung dan Kebakaran Hutan. Selanjutnya yang menjadi isu strategis lingkungan hidup adalah terkait dengan sampah dan menjadi masalah dari tahun ke tahun. Namun saat ini yang menjadi penekanan terhadap pengelolaan sampah adalah bagaimana pengelolaan sampah di setiap kabupaten/kota ditangani dengan baik seperti meminimalisasi timbunan sampah, meningkatkan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Sistem Operasional TPA dan Sarana Pengangkutan Sampah. Pertambahan penduduk, geliat perekonomian yang mulai membaik dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif meningkatkan volume sampah, serta jenis dan karakteristik yang semakin beragam. Untuk menanggulangi berbagai permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Utara khususnya di perkotaan, pemerintah melakukan upaya mengembangkan kualitas layanan dasar permukiman baik perkotaan maupun diperdesaan yang terdapat di wilayah pesisir dan dataran tinggi, berupa sistem pengelolaan air minum dan pembangunan sanitasi, meliputi air limbah persampahan dan drainase serta penyediaan ruang terbuka hijau.

#### 7. Infrastruktur

Kondisi ekonomi daerah yang produktif sangat sulit dicapai apabila tidak didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan. Sampai dengan Tahun 2018, berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Sumatera Utara terus dipacu. Seiring dengan

pertumbuhan penduduk maka pemenuhan infrastruktur semakin besar untuk itu pembangunan infrastruktur menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan untuk menjadi solusi atas masalah-masalah utama yang dihadapi Sumatera Utara berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, pelayanan dasar serta pemerataan pembangunan. Beberapa infrastruktur di Sumatera Utara yang perlu diprioritaskan selain transportasi yang menghubungkan inter dan intra wilayah yaitu perumahan dan permukiman yakni menyangkut rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pembangunan pembangkit listrik, air minum, sanitasi dan sampah. Selain itu untuk menunjang produksi hasil pertanian dan ketahanan pangan maka infrastruktur irigasi masih perlu ditingkatkan.

#### 8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta profesionalisme pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu prioritas untuk menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu sistem pemerintahan yang bersih juga dihasilkan dari transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Tuntutan dalam melaksanakan e-government menjadi salah satu hal penting dalam melaksanakan tata pemerintahan yang bersih. Tantangan dalam pengembangan e-government cukup besar mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi Informasi Teknologi (IT) terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

#### 4.2.2.4. Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan uraian gambaran kondisi daerah yang telah dikemukakan dan hasil identifikasi permasalahan, maka rumusan isu strategis yang akan dihadapi Kabupaten Tapanuli Utara pada lima tahun yang akan datang antara lain :

##### 1. Pembangunan Ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Pembangunan ekonomi perlu mendapatkan akselerasi di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami perlambatan sejak tahun 2014 sampai 2017. Jika pada tahun 2014 angkanya sebesar 5,11 persen, maka pada tahun 2017 menjadi 4,15 persen. Perlu upaya serius dalam rangka menggairahkan

dinamika perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya penduduk miskin dan semakin menurunnya kesempatan kerja dengan demikian menjadi salah satu sebab meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018 sebesar 9,75 persen sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 1,42 persen. Terbukanya akses jalan menuju kawasan ekonomi khusus maupun strategis hingga ke kecamatan dan desa diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di masa lima tahun mendatang. Pembangunan daerah tujuan wisata juga diharapkan akan mampu menggairahkan perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat dan sekaligus masuk dalam urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian yang besar dalam pembangunan. Rata-rata lama sekolah harus ditingkatkan sehingga wajib belajar 12 tahun dapat tercapai. Persentase penduduk yang menamatkan pendidikannya hingga tingkat sarjana juga harus ditingkatkan. Usia harapan hidup Kabupaten Tapanuli Utara masih harus ditingkatkan. Jumlah balita gizi buruk juga setiap tahun berkurang dan seluruhnya mendapat perawatan. Hal ini perlu dipertahankan, bahkan harus dikurangi karena balita dengan gizi buruk akan mempengaruhi kualitas hidupnya di waktu mendatang.

3. Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya

Ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menuntut upaya serius Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengembangan sektor pariwisata. Selain Danau Toba, pemerintah daerah diharapkan mampu membuat objek wisata baru di beberapa wilayah sebagai alternatif daerah tujuan wisata sehingga pemerataan pembangunan dapat tercipta. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT) membuka peluang yang cukup besar terhadap berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif.

4. Penguatan struktur ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa

Struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara yang didominasi oleh sektor pertanian membutuhkan perhatian serius dari seluruh. Pengembangan ekonomi

harus diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian yang harus ditopang oleh sektor industri yang mendukung sektor pertanian. Ketersediaan prasarana dan sarana (alsintan, teknologi pertanian, pupuk dan bibit unggul) sangat dibutuhkan agar produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan.

5. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata  
Ketersediaan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai sangat dibutuhkan bagi stimulus percepatan pembangunan daerah. Hal ini relevan guna meningkatkan daya saing daerah yang diikuti dengan peningkatan investasi daerah. Ketersediaan infrastruktur secara merata dapat mendorong investasi masuk ke daerah dan tahap selanjutnya akan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
6. Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan  
Tatakelola pemerintahan daerah yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Berbagai fenomena terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas tatakelola pemerintahan yang baik dan inovatif cenderung memiliki kinerja yang baik dibandingkan daerah lainnya. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala di Kabupaten Tapanuli Utara. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik belum mampu menciptakan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam penerapan e-government, inovasi dalam pemanfaatan potensi daerah serta inovasi lainnya belum mampu secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga mengakibatkan tingkat daya saing daerah masih rendah.
7. Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan  
*Global Warming* yang merupakan hasil dari industrialisasi yang tidak diikuti dengan pengelolaan lingkungan secara baik, telah memberikan pelajaran pada dunia bahwa “harga” kerusakan lingkungan alam akan jauh lebih mahal dari pembangunan itu sendiri dan hal ini akan semakin mahal pada generasi yang akan datang. Kesadaran bersama ini melahirkan konsep baru dalam pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*).



Perlindungan terhadap lingkungan (sumber mata air, kawasan hutan) harus dilakukan agar dapat menjaga keseimbangan lingkungan.

8. Penguatan desa mandiri melalui optimalisasi pengolahan potensi lokal  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih luas bagi pembangunan desa, yang diikuti dengan kewenangan berupa anggaran yang cukup besar. Momentum ini tentu sangat strategis bagi daerah secara sinergis mengembangkan desa, mengingat sebagian besar permasalahan dan potensi pembangunan berada di desa.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. Visi**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi maka visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dapat dirumuskan, yaitu:

#### **“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata ”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Tapanuli Utara** : adalah seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- Lumbung Pangan** : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan/atau pengurangan pengangguran, penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan pangan.
- Lumbung Sumberdaya Manusia** : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu dalam pengembangan potensi sumberdaya manusia yang diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat

(manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur).

**Berkualitas** : bermakna perwujudan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang sehat, cerdas dan berbudaya sebagai pelaku utama pembangunan yang mampu mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.

**Daerah Tujuan Wisata** : bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

## **5.2. Misi**

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi. Misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan

5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*;

Makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Definisi Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024**

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Perlindungan Petani dan lahan Pertanian Berkelanjutan	Mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau serta peningkatan perlindungan petani dan meningkatkan lahan pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah
2	Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal	Meningkatkan kualitas dan kuantitas (jenis) komoditi unggulan dan produk unggulan dengan meningkatkan komoditi pertanian yang memiliki daya saing dan memanfaatkan SDA dan SDM lokal
3	Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan menjadikan RSUD dan Puskesmas serta layanan kesehatan lainnya menjadi pusat layanan kesehatan yang memenuhi mutu pelayanan kesehatan (Akreditasi) serta pemberian pelayanan kesehatan dasar dan KB secara gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit.
4	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing menjadi SDM yang adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui pengentasan kemiskinan serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja
5	Meningkatkan Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata	Meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi wisata melalui pemenuhan prinsip kepariwisataan terkait amenitas, aksesibilitas dan atraksi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah
6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, Perlindungan Sumberdaya Alam dan Pestaarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta tetap memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim
7	Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri	Menjadikan desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
8	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dengan sistem <i>e-government</i> ;	Mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)

Misi tersebut mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025, sehingga terdapat hubungan yang kuat antara misi dalam RPJPD dengan misi dalam RPJMD.

**Tabel 5.2**  
**Keselarasan Misi Pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024**  
**dengan Misi Pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025**

No.	Misi RPJMD Tahun 2019-2024	Misi RPJPD Tahun 2005-2025
1.	Misi 1 : Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Perlindungan Petani dan lahan Pertanian Berkelanjutan	Misi 1 : Menempatkan sektor pertanian dan agroindustri yang maju sebagai andalan perekonomian rakyat didukung sektor pariwisata, pertambangan dan energy
2.	Misi 2 : Pengembangan Komoditi dan Prodak Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal	Misi 5: Memperkuat perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan sehingga mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak.
3.	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Misi 2: Meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan guna menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas
4.	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Misi 6: Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) sesuai kebutuhan masyarakat.
5.	Misi 5: Meningkatkan Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata	Misi 8: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman melalui pemanfaatan ruang yang serasi antar penggunaan pertanian, permukiman, kegiatan sosial ekonomi, konservasi dan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam lingkungan yang berkesinambungan.
6.	Misi 6: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, Perlindungan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.	Misi 7: Membangun infrastuktur yang maju untuk semua wilayah kabupaten Tapanuli Utara
7.	Misi 7 : Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri	Misi 3: Menciptakan kondisi dinamis, bagi terjaminnya kesatuan dan persatuan yang harmonis.
8.	Misi 8 : Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dengan sistem <i>e-government</i> ;	Misi 4 : Terciptanya pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ), bagi terjaminnya pelayanan masyarakat yang optimal

Misi dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara juga mempunyai keterkaitan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 serta RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.3**  
**Keterkaitan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dengan Misi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024**

No.	Misi RPJMD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019-2024	Misi RPJMD Prov. Sumatera Utara Tahun 2018-2023	Misi RPJMN Tahun 2020-2024
1.	Misi 1 : Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Perlindungan Petani dan lahan Pertanian Berkelanjutan	Misi 1: <b>Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan</b> karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
2.	Misi 2 : Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal	Misi 1: <b>Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan</b> karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3.	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Misi 1: <b>Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan</b> karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau  Misi 3 : <b>Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan</b> karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.	Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
4.	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Misi 3 : <b>Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan</b> karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.	Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia  Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

No.	Misi RPJMD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019-2024	Misi RPJMD Prov. Sumatera Utara Tahun 2018-2023	Misi RPJMN Tahun 2020-2024
5.	Misi 5: Meningkatkan Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata	Misi 1: <b>Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan</b> karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	Misi 5 : Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6.	Misi 6: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, Perlindungan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.	Misi 5 : <b>Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan</b> karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.	Misi 3 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan  Misi 4 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
7.	Misi 7 : Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri		Misi 3 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
8.	Misi 8 : Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dengan sistem <i>e-government</i> ;	Misi 2 : <b>Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik</b> dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	Misi 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

**Tabel 5.4**  
**Keselarasn Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2017- 2037**  
**dengan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024**

<b>Kebijakan RTRW Kab. Tapanuli Utara Tahun 2017 - 2037</b>	<b>Penerjemahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024</b>
Pengembangan struktur ruang daerah	Diterjemahkan dalam misi ke :
	1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
	2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal
	3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
	7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
Pengembangan pola ruang daerah	Diterjemahkan dalam misi ke : 1 : Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan 6 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Penetapan kawasan strategis daerah	Diterjemahkan dalam misi ke : 5 : Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata 6 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.



**Tabel 5.5**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara**  
**Tahun 2019 - 2024**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan	1. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat
		2. Meningkatkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi pangan komoditi pangan
			2. Meningkatnya SDM dan kelembagaan petani
		3. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani	1. Ketersediaan faktor produksi
			2. Meningkatnya kelompok tani yang memperoleh perlindungan petani
			3. Meningkatnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
2	Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal	1. Terwujudnya pengembangan komoditi unggulan daerah	Peningkatan jenis komoditi unggulan dan luas kawasan budidaya komoditi
		2. Peningkatan produk unggulan daerah	1. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan untuk pengembangan produk unggulan daerah
			2. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung produk unggulan daerah
			3. Peningkatan jumlah home industri produk unggulan daerah
			4. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah
3	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	1. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas
		2. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja
			2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan
5	Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata	Meningkatnya Jumlah Wisatawan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata
6	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan
			2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
			3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

No	Misi	Tujuan	Sasaran
		2. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang
			2. Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
		3. Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah
			2. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif
7	Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Meningkatkan status desa
8	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem <i>e-government</i>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja
			2. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan
			3. Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan target-target terukur. Kinerja dan target disusun setiap tahun dan ditampilkan pada tabel 5.6.

**Tabel 5.6**  
**Hubungan Hirarki Antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Misi 1:											
Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan											
Tujuan 1.1											
Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat	1. Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,35	4,35-4,45	4,45-4,55	4,55-4,65	4,65-4,75	4,75-4,85	4,85-4,90	4,9	Semua OPD
	2. Angka kemiskinan	Persen	9,75	9,5	9,25	9	8,75	8,5	8,25	8,25	Semua OPD
	3. Gini ratio	Nilai	0,31	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Semua OPD
Sasaran											
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita	Rp. Juta	24,33	25,40	27,99	30,06	32,16	34,46	36,96	36,96	Semua OPD
Tujuan 1.2.											
Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,91	74,92	74,93	74,94	74,95	74,97	74,98	74,98	Dinas Pertanian, Dinas Ketapang dan Perikanan
Sasaran 1.2.1											
Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,91	74,92	74,93	74,94	74,95	74,97	74,98	74,98	Dinas Pertanian, Dinas Ketapang dan Perikanan
Sasaran 1.2.2											
Meningkatnya SDM dan kelembagaan petani	Persentase kelompok tani naik kelas	Persen	45	49	50	51	52	53	54	54	Dinas Pertanian

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Tujuan 1.3</b>											
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Nilai	97,98	97,98	98,00	99,00	99,00	100	100	100	Dinas Pertanian
<b>Sasaran 1.3.1</b>											
Ketersediaan faktor produksi	Persentase ketersediaan faktor produksi	Persen	60	60	61	62	63	64	65	65	Dinas PUPR, Dinas Pertanian
<b>Sasaran 1.3.2</b>											
Meningkatnya kelompok tani yang memperoleh perlindungan petani	Cakupan kelompok tani yang memperoleh perlindungan petani	Kelompok	0	0	5	10	15	20	25	25	Dinas Pertanian
<b>Sasaran 1.3.3</b>											
Meningkatnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Cakupan luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B	Kecamatan	0	0	0	4	7	10	15	15	Dinas Pertanian
<b>Misi 2</b>											
<b>Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal</b>											
<b>Tujuan 2.1</b>											
Terwujudnya pengembangan komoditi unggulan daerah	1. Peningkatan luas kawasan budidaya komoditi unggulan	Hektar	15		110	120	130	140	150	665	Dinas Pertanian
	2. Peningkatan jumlah komoditi unggulan daerah	Ton	8		9	9	10	10	11	11	Dinas Pertanian

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Sasaran</b>											
Peningkatan jenis komoditi unggulan dan luas kawasan budidaya komoditi	1. Peningkatan luas kawasan budidaya komoditi unggulan	Hektar	15		110	120	130	140	150	665	Dinas Pertanian
	2. Peningkatan jumlah/jenis komoditi unggulan daerah	Ton	8		9	9	10	10	11	11	Dinas Pertanian
<b>Tujuan 2.2</b>											
Peningkatan produk unggulan daerah	Nilai Tambah Produk	Juta Rupiah	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Dinas Koperasi dan UMKM
<b>Sasaran 2.2.1</b>											
Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan untuk pengembangan produk unggulan daerah	Persentase koperasi sehat	Persen	19,54	21,31	21,31	21,31	21,5	21,98	22,45	22,45	Dinas Koperasi dan UMKM
<b>Sasaran 2.2.2</b>											
Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung produk unggulan daerah	Jumlah produk unggulan UMKM terstandarisasi	Produk	5	5	14	17	20	22	25	25	Dinas Koperasi dan UMKM
<b>Sasaran 2.2.3</b>											
Peningkatan jumlah home industry produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	2,13	2,15	2,17	2,21	2,71	3,02	3,4	3,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Sasaran 2.2.4</b>											
Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	14,47		15,1	15,5	16,01	16,42	16,83	16,83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>Misi 3</b>											
<b>Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan</b>											
<b>Tujuan 3.1</b>											
Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,91	73,73	73,73	74,24	74,75	75,26	75,77	75,77	Dinas Pendidikan
<b>Sasaran</b>											
Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,65	9,71	9,76	9,98	10,02	10,24	10,28	10,28	Dinas Pendidikan
	2. Angka melek huruf	Persen	99,38	99,42	99,47	99,52	99,58	99,64	99,7	99,7	Dinas Pendidikan
	3. Tingkat kunjungan ke perpustakaan	Persen	32,00	33,50	34,00	34,17	35,94	36,05	36,11	36,11	Dinas Perpustakaan
<b>Tujuan 3.2</b>											
Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,01	68,46	68,61	68,77	68,92	69,07	69,23	69,23	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran</b>											
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	68,01	68,46	68,61	68,77	68,92	69,07	69,23	69,23	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	2. Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak	4	4	4	4	4	3	3	3	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
Misi 4											
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan											
Tujuan											
Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,83	1,78	1,72	1,67	1,61	1,55	1,50	1,50	Dinas Ketenagakerjaan
Sasaran 4.1											
Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,83	1,78	1,72	1,67	1,61	1,55	1,50	1,50	Dinas Ketenagakerjaan
Sasaran 4.2											
Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan	Persentase wirausaha pemuda pemula	Persen	0,004	0,004	0,008	0,012	0,016	0,020	0,024	0,024	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 5											
Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata											
Tujuan											
Meningkatnya jumlah wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang	153.000	155.000	158.000	163.000	165.000	170.000	175.000	175.000	Dinas Pariwisata

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Sasaran</b>											
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata	1. Persentase infrastruktur destinasi wisata kondisi baik	Persen	25	28	30	36	40	46	50	50	Dinas Pariwisata Dinas PUPR
	2. Lama tinggal	Hari	0,5	0,5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1	Dinas Pariwisata
<b>Misi 6</b>											
<b>Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup</b>											
<b>Tujuan 6.1</b>											
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Nilai	45,26	58,31	60,7	62,14	63,51	64,72	66,05	66,05	Semua OPD
<b>Sasaran 6.1.1</b>											
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Persen	55,8	56,00	56,54	57,20	57,85	58,5	61,03	61,03	Dinas PUPR
<b>Sasaran 6.1.2</b>											
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	80,6	80,8	81	82	83	85	87	87	Dinas Perkim



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Sasaran 6.1.3</b>											
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase fasilitas keselamatan transportasi	Persen	20	20,25	21,57	22,50	24	25,50	27	27	Dinas Perhubungan
<b>Tujuan 6.2</b>											
Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPR
<b>Sasaran 6.2.1</b>											
Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang	Jumlah regulasi tentang tata ruang	Regulasi RTR (Peraturan Daerah/Perbub)	1		RDTR Tarutung, Sipoholon, Siatas Barita, Siborong-borong	Praturan Bupati Turunan Peraturan Daerah RDTR	RDTR Kawasan Strategis Pahae	RDTR Sipahutar	RDTR Parmona-ngan	7 Regulasi	Dinas PUPR
<b>Sasaran 6.2.2</b>											
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Cakupan ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen	84,81	84,81	84,81	84,81	85,76	86,71	87,66	87,66	Dinas Perkim
<b>Tujuan 6.3</b>											
Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	70,12	70,12	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22	70,22	Dinas Lindup

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Sasaran 6.3.1</b>											
Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	70,12	70,12	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22	70,22	Dinas Lindup
<b>Sasaran 6.3.2</b>											
Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	Persentase desa tangguh bencana	Persen	0	0	20	40	60	90	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Misi 7</b>											
<b>Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri</b>											
<b>Tujuan</b>											
Meningkatnya jumlah desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	0	0	0	0	1	2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>Sasaran</b>											
Meningkatkan status desa	a. Desa sangat tertinggal	Desa	20	20	11	5	3	1	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	b. Desa tertinggal	Desa	165	165	129	90	47	4	0	0	
	c. Desa berkembang	Desa	56	56	86	116	146	178	180	180	
	d. Desa maju	Desa	0	0	15	30	45	57	59	59	
	e. Desa mandiri	Desa	0	0	0	0	0	1	2	2	

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Misi 8											
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government											
Tujuan											
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	38,12	39	40	50	60	65	70,25	70,25	Semua OPD
Sasaran 8.1											
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	CC	C	B	B	BB	BB	A	A	Semua OPD
Sasaran 8.2											
Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Semua OPD
Sasaran 8.3											
Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi (akumulasi)	Persen	11	33	33	55	77	87	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

## **BAB VI**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara berkelanjutan.

#### **6.1 Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Hal ini merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran. Gambaran strategi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.1

**Tabel 6.1**  
**Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>VISI</b> Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata		
<b>Misi 1</b> <b>Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan</b>		
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Revitalisasi sektor pertanian sebagai basis perekonomian daerah dengan mendorong kegiatan agribisnis yang ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana pertanian modern
2. Meningkatkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi pangan	Meningkatkan persentase hasil produksi dan produktivitas komoditi pangan (padi, jagung, kerbau, babi, ikan mas)
	2. Meningkatnya SDM dan kelembagaan petani	Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani
3. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani	1. Ketersediaan faktor produksi	Pengadaan ketersediaan faktor produksi

Tujuan	Sasaran	Strategi
	2. Meningkatnya kelompok tani yang memperoleh perlindungan petani	Pemberian bantuan peralatan sarana dan prasarana produksi bagi pelaku usaha
	3. Meningkatnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Pemberian pupuk bayar pasca panen, alsintan dan subsidi pengolahan lahan gratis
<b>Misi 2</b> <b>Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal</b>		
1. Terwujudnya pengembangan komoditi unggulan daerah	Peningkatan jenis komoditi unggulan dan luas kawasan budidaya komoditi	Meningkatkan jenis dan luas tanam komoditi unggulan
2. Peningkatan produk unggulan daerah	1. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan untuk pengembangan produk unggulan daerah	Meningkatkan penggunaan bibit unggul komoditi unggulan yang berkualitas
	2. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung produk unggulan daerah	Meningkatkan sumber daya produksi, tenaga ahli, modal dan inovasi dalam menciptakan produk unggulan baru
	3. Peningkatan jumlah home industri produk unggulan daerah	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha memberikan bantuan permodalan, kemudahan berusaha (izin usaha) dan pengembangan kemitraan
	4. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Mengoptimalkan kebijakan penetapan harga pasar
<b>Misi 3</b> <b>Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan</b>		
1. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas	1. Meningkatkan ketersediaan pendukung peningkatan mutu pendidikan
		2. Meningkatkan minat baca masyarakat
2. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
		2. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana
<b>Misi 4</b> <b>Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan</b>		

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja	1. Mempersiapkan angkatan kerja memasuki pasar tenaga kerja dan meningkatkan akses angkatan kerja atas sumber daya produktif serta mendorong pengembangan ekonomi perdesaan untuk menyerap angkatan kerja
		2. Menjalin hubungan kerjasama industrial yang harmonis
		3. Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi peraturan ketenagakerjaan
	2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan	Meningkatkan kompetensi pemuda di bidang kewirausahaan
Misi 5 Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata		
Meningkatnya Jumlah Wisatawan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata	1. Peningkatan jumlah dan daya tarik obyek wisata
		2. Peningkatan kualitas layanan kepariwisataan
Misi 6 Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup		
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	1. Mempertahankan fungsi dan kondisi jalan baik
		2. Meningkatkan interkoneksi menuju ke sentra produksi dan destinasi wisata
		3. Meningkatkan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
	2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	1. Meningkatkan pelayananan air minum
		2. Meningkatkan rasio penduduk mendapatkan akses sanitasi layak
		3. Meningkatkan penanganan kawasan kumuh perumahan dan permukiman
		4. Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni
	3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	1. Meningkatkan jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan
		2. Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan

Tujuan	Sasaran	Strategi
2. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang	1. Tersedianya regulasi terkait tata ruang
		2. Meningkatkan pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTR
	2. Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Peningkatan pengadaan tanah pemerintah
3. Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	2. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Meningkatkan jumlah desa tangguh bencana
		2. Meningkatkan penanganan bencana
Misi 7 Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri		
Meningkatnya jumlah desa mandiri	Meningkatkan status desa	1. Meningkatkan peran aktif lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pemuda dan perempuan dalam pembangunan desa
		2. Meningkatkan kapasitas ekonomi desa sesuai dengan potensi
		3. Meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang lingkungan hidup dan pengetahuan kebencanaan
Misi 8 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas sumber daya aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan dan perencanaan
	2. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Meningkatkan kinerja laporan keuangan dan birokrasi
	3. Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1. Membangun e-government yang terintegrasi
		2. Meningkatkan sistem informasi daerah
		3. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

## **6.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan akan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD diluar yang diprioritaskan tidak berjalan, namun tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan, artinya program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain itu semua kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas. Arah kebijakan pembangunan lima tahun Kabupaten Tapanuli Utara periode tahun 2019 - 2024 digambarkan sebagai berikut :

### **6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (Tahun 2020)**

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung akses, kualitas dan kapasitas pelayanan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya infrastruktur jalan ke lokasi wilayah daerah strategis, seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi serta infrastruktur irigasi dalam mendukung ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, pemetaan pengembangan komoditi unggulan pertanian di setiap kecamatan sebagai acuan dalam pengembangan industri berbasis pertanian, peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan bibit pertanian dan pupuk bersubsidi, melaksanakan percepatan pembangunan di perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa serta penyediaan infrastruktur perdesaan yang memadai dan dapat menstimulasi penciptaan kegiatan ekonomi pedesaan, pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik serta pembinaan terhadap generasi muda dalam mengembangkan kreativitasnya terhadap seni budaya



dan olah raga menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari kelurahan/desa sampai tingkat kabupaten serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Alokasi pendanaan untuk bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pembangunan pemberdayaan masyarakat desa perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas.

### **6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (Tahun 2021)**

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Penanganan permasalahan pembangunan terus dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Demikian juga halnya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan ke lokasi wilayah daerah strategis seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi serta infrastruktur irigasi terus dilaksanakan secara konsisten, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif, pelaksanaan pengembangan komoditi unggulan di setiap kecamatan atau wilayah, peningkatan kesejahteraan petani dan pemberdayaan masyarakat desa terus dilaksanakan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender dan peningkatan peran generasi muda dalam pengembangan kreativitas. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

### **6.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (Tahun 2022)**

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan akses, kualitas dan kapasitas pelayanan kepada masyarakat pada berbagai aspek harus didukung oleh unit-unit kerja terkait. Peningkatan kinerja pemerintahan diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat

diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut.

#### **6.2.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (Tahun 2023)**

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang berdaya saing. Selain terus melaksanakan upaya-upaya penanganan masalah pembangunan daerah, penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti daerah kawasan pariwisata yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah mendorong bagaimana penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi ditingkat global dan regional.

#### **6.2.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (Tahun 2024)**

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama empat tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode berikutnya. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

Secara lengkap arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Tapanuli Utara dapat digambarkan seperti pada tabel berikut :

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024**

Arah Kebijakan Pembangunan				
Tahun ke-1 (2020)	Tahun ke-2 (2021)	Tahun ke-3 (2022)	Tahun ke-4 (2023)	Tahun ke-5 (2024)
Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung akses, kualitas dan kapasitas pelayanan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya infrastruktur jalan ke lokasi wilayah daerah strategis, seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi serta infrastruktur irigasi dalam mendukung ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, pemetaan pengembangan komoditi unggulan pertanian di setiap kecamatan sebagai acuan dalam pengembangan industri berbasis pertanian, peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan bibit pertanian dan pupuk bersubsidi, melaksanakan percepatan pembangunan di perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa serta penyediaan infrastruktur perdesaan yang memadai dan dapat menstimulasi penciptaan kegiatan	Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Penanganan permasalahan pembangunan terus dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Demikian juga halnya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan ke lokasi wilayah daerah strategis seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi serta infrastruktur irigasi terus dilaksanakan secara konsisten, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif, pelaksanaan pengembangan komoditi unggulan di setiap kecamatan atau wilayah, peningkatan kesejahteraan petani dan pemberdayaan masyarakat desa terus	Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan akses, kualitas dan kapasitas pelayanan kepada masyarakat pada berbagai aspek harus didukung oleh unit-unit kerja terkait. Peningkatan kinerja pemerintahan diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih	Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector agar terwujud pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang berdaya saing. Selain terus melaksanakan	Tahun kelima merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sector yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

Arah Kebijakan Pembangunan				
Tahun ke-1 (2020)	Tahun ke-2 (2021)	Tahun ke-3 (2022)	Tahun ke-4 (2023)	Tahun ke-5 (2024)
ekonomi pedesaan, pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik serta pembinaan terhadap generasi muda dalam mengembangkan kreativitasnya terhadap seni budaya dan olah raga menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari kelurahan/desa sampai tingkat kabupaten serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Alokasi pendanaan untuk bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pembangunan pemberdayaan masyarakat desa perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas.	dilaksanakan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender dan peningkatan peran generasi muda dalam pengembangan kreativitas. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.	efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut.	upaya-upaya penanganan masalah pembangunan daerah, penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti daerah kawasan pariwisata yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah mendorong bagaimana penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi ditingkat global dan regional.	

### **6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk pencapaian target visi misi pembangunan. Program pembangunan daerah yang bersifat prioritas ditentukan sesuai dengan keterkaitannya dalam pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program prioritas yang tertuang pada tabel 6.3 dibagi atas dua bagian, yaitu program yang digunakan untuk perencanaan tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan program yang digunakan untuk perencanaan tahun 2021-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Indikator program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang disusun oleh daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada OPD. Hal ini disebabkan adanya beberapa program yang digunakan oleh lebih dari satu bidang pada OPD yang bersangkutan, sehingga untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja maka indikator program juga disusun berdasarkan tugas pokok bidang yang bersangkutan.

**Tabel 6.3**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disertai Pagu Indikatif**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Misi 1:										
Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan										
Tujuan 1.1										
Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat	1. Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,35-4,45	4,45-4,55	4,55-4,65	4,65-4,75	4,75-4,85	4,85-4,90	4,9	Semua OPD
	2. Angka kemiskinan	Persen	9,5	9,25	9	8,75	8,5	8,25	8,25	Semua OPD
	3. Gini ratio	Nilai	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Semua OPD
Sasaran										
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita	Rp. Juta	25,40	27,99	30,06	32,16	34,46	36,96	36,96	Semua OPD
Program										
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Cakupan komoditi hasil pertanian yang dipasarkan	Persen	94	94	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Cakupan ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persen	-	-	40	42	44	46	46	Dinas Pertanian
Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang terdata dan menerima bantuan sosial	Persen	50	50	-	-	-	-	-	Dinas Sosial

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase akurasi data penerima perlindungan dan jaminan sosial	Persen	50	52	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang meningkat taraf hidupnya	Persen	2	2	4	6	8	10	10	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang ditangani	Persen	-	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	2. Persentase anak terlantar yang ditangani	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
	3. Persentase lanjut usia terlantar yang ditangani	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
	4. Persentase gelandangan dan pengemis yang ditangani	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
Program Pelayanan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	-	4,31	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Program pengembangan iklim penanaman modal	1. Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	-	4,31	7	10	10	12	12	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
	2. Cakupan Pelayanan Perijinan yang Ditindaklanjuti	Persen	-	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Cakupan Pelayanan Perijinan yang Ditindaklanjuti	Persen	-	100	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase data dan informasi yang dimutakhirkan	Persen	-	-	75	78	80	85	85	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
<b>Tujuan 1.2.</b>										
Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,92	74,93	74,94	74,95	74,97	74,98	74,98	Dinas Pertanian Dinas Ketapang dan Perikanan
<b>Sasaran 1.2.1</b>										
Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,92	74,93	74,94	74,95	74,97	74,98	74,98	Dinas Pertanian Dinas Ketapang dan Perikanan
<b>Program</b>										
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kapita/Thn	-	456,99	-	-	-	-	-	Dinas Ketapang dan Perikanan
Program Penganekaragaman, Keamanan, Mutu dan Pengolahan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	85	86	-	-	-	-	-	Dinas Ketapang dan Perikanan
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai	85	86	87	88	89	90	90	Dinas Ketapang dan Perikanan
Program penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rawan pangan	Persen	-	-	26,67	20	13,33	6,67	6,67	Dinas Ketapang dan Perikanan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Produksi dan produktivitas tanaman pangan									Dinas Pertanian
	- Padi sawah	Ton	160.600	160.685	-	-	-	-	-	
		Kw/Ha	59,25	59,28	-	-	-	-	-	
	- Padi ladang	Ton	10.000	10.500	-	-	-	-	-	
		Kw/Ha	26,50	26,53	-	-	-	-	-	
	- Jagung	Ton	25.150	26.000	-	-	-	-	-	
		Kw/Ha	49,50	49,54	-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Populasi Ternak	Ton		1.659	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	- Kerbau	Ekor	9.677	9.717	-	-	-	-	-	
	- Babi	Ekor	43.698	44.698	-	-	-	-	-	
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan									Dinas Pertanian
	- Padi sawah	Ton	160.600	160.685	160.790	160.898	161.087	161.142	161.142	
		Kw/Ha	59,25	59,28	59,32	59,36	59,4	59,45	59,45	
	- Padi ladang	Ton	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500	
		Kw/Ha	26,50	26,53	26,57	26,61	26,65	26,7	26,7	
	- Jagung	Ton	25.150	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000	30.000	
		Kw/Ha	49,50	49,54	49,58	49,63	49,69	49,72	49,72	
	2. Peningkatan Populasi Ternak									
	- Kerbau	Ekor	9.677	9.717	9.757	9.797	9.837	9.877	9.877	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Babi	Ekor	43.698	44.698	45.698	46.698	47.698	48.698	48.698	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Capaian produksi perikanan	Ton	2.071	2.100	-	-	-	-	-	Dinas Ketapang dan Perikanan
Program pengelolaan perikanan budidaya	Capaian produksi perikanan	Ton	2.071	2.100	2.100	2.150	2.200	2.300	2.300	Dinas Ketapang dan Perikanan
<b>Sasaran 1.2.2</b>										
Meningkatnya SDM dan kelembagaan petani	Persentase kelompok tani naik kelas	Persen	49	50	51	52	53	54	54	Dinas Pertanian
<b>Program</b>										
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	1. Persentase penyuluh pertanian yang sesuai dengan kompetensi	Persen	0,35	0,37	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	2. Persentase kelompok tani dibina	Persen	58	59	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Program penyuluhan pertanian	Persentase kelompok tani dibina	Kelompok	58	59	60	62	64	66	66	Dinas Pertanian
<b>Tujuan 1.3</b>										
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Nilai	97,98	98,00	99,00	99,00	100	100	100	Dinas Pertanian
<b>Sasaran 1.3.1</b>										
Ketersediaan faktor produksi	Persentase ketersediaan faktor produksi	Persen	60	61	62	63	64	65	65	Dinas PUPR, Dinas Pertanian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Program</b>										
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang saluran irigasi kab kondisi baik	Persen	67,62	67,64	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang saluran irigasi kab kondisi baik	Persen	67,62	67,64	67,66	67,68	67,7	67,72	67,72	Dinas PUPR
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan	Cakupan kecukupan alsintan terhadap kebutuhan	Persen	20	20	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	38	39	40	42	44	46	46	Dinas Pertanian
<b>Sasaran 1.3.2</b>										
Meningkatnya kelompok tani yang memperoleh perlindungan petani	Cakupan kelompok tani yang memperoleh perlindungan petani	Kelompok	-	5	10	15	20	25	25	Dinas Pertanian
<b>Program</b>										
Program Perlindungan Petani	Jumlah kelompok tani	Kelompok		100	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	82	84	85	86	87	88	88	Dinas Pertanian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Sasaran 1.3.3</b>										
Meningkatnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Cakupan luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B	Kecamatan	-	-	4	7	10	15	15	Dinas Pertanian
<b>Program</b>										
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian	Luas lahan yang dipetakan sebagai LP2B	Hektar	-	1.233	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan yang dipetakan sebagai LP2B	Hektar	-	1.233	2.672	6.372	9.340	14.025	14.025	Dinas Pertanian
<b>Misi 2</b>										
<b>Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal</b>										
<b>Tujuan 2.1</b>										
Terwujudnya pengembangan komoditi unggulan daerah	1. Peningkatan luas kawasan budidaya komoditi unggulan daerah	Hektar		110	120	130	140	150	665	Dinas Pertanian
	2. Peningkatan jumlah komoditi unggulan daerah	Ton		9	9	10	10	11	11	Dinas Pertanian
<b>Sasaran</b>										
Peningkatan jenis komoditi unggulan dan luas kawasan budidaya komoditi	1. Peningkatan luas kawasan budidaya komoditi unggulan	Hektar		110	120	130	140	150	665	Dinas Pertanian
	2. Peningkatan jumlah komoditi unggulan daerah	Ton		9	9	10	10	11	11	Dinas Pertanian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Program</b>										
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hortikultura	Produksi dan produktivitas hortikultura									Dinas Pertanian
	- Cabai Merah	Ton	9.298,00	6.760	-	-	-	-	-	
		Kw/Ha	55,35	55,35	-	-	-	-	-	
	- Bawang Merah	Ton	632,15	575	-	-	-	-	-	
		Kw/Ha	74,37	74,37	-	-	-	-	-	
	- Bawang Putih	Ton	-	250	-	-	-	-	-	
		Kw/Ha	-	40	-	-	-	-	-	
	- Jeruk	Ton	3.304,21	3600	-	-	-	-	-	
		Kw/Ha	145,56	145,57	-	-	-	-	-	
	- Nenas	Ton	34.974,38	34865	-	-	-	-	-	
		Kw/Ha	179,15	179,21	-	-	-	-	-	
	- Durian	Ton	5.903,43	5823	-	-	-	-	-	
		Kw/Ha	96,73	96,75	-	-	-	-	-	
	- Mangga	Ton	1.237,31	1199	-	-	-	-	-	
		Kw/Ha	76,78	76,81	-	-	-	-	-	
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura	Persen	38	40	40	42	44	46	46	Dinas Pertanian
	- Cabai merah	Ton	9.298,00	6.760	6770	6780	6790	8.000	8.000	Dinas Pertanian
		Kw/Ha	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	
	- Bawang merah	Ton	632,15	575	585	595	605	610	610	
		Kw/Ha	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37	
	- Bawang putih	Ton	-	250	275	300	325	350	350	
		Kw/Ha	-	40,00	40	40	40	40	40	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Jeruk	Ton	3.304,21	3.304	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		Kw/Ha	145,56	145,56	145,56	145,60	145,61	145,63	145,63	
	- Nenas	Ton	34.974,38	34.978	34.865	34.865	34.865	34.865	34.865	
		Kw/Ha	179,15	179,15	179,21	179,25	179,27	179,30	179,30	
	- Durian	Ton	5.903,43	5.903	5.823	5.823	5.823	5.823	5.823	
		Kw/Ha	96,73	96,73	96,75	96,77	96,78	96,78	96,78	
	- Mangga	Ton	1.237,31	1.237	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	
		Kw/Ha	76,78	76,78	76,81	76,84	76,85	76,86	76,86	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Hortikultura	Cakupan penerapan teknologi hortikultura	Persen	50	55	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Cakupan penerapan teknologi hortikultura	Persen	50	55	60	65	70	75	75	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Perkebunan	Produksi dan produktivitas perkebunan									Dinas Pertanian
	- Kopi Arabika	Ton	11.833,43	11.600	-	-	-	-	-	
		Kg/Ha	981,05	1,108	-	-	-	-	-	
	- Kakao	Ton	1.774,95	1.450	-	-	-	-	-	
		Kg/Ha	674,5	577,37	-	-	-	-	-	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan									Dinas Pertanian
	- Kopi Arabika	Ton	11.833,43	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	12.000	
		Kg/Ha	981,05	1,108	1.131	1.154	1.177	1.200	1.200	
	- Kakao	Ton	1.774,95	1.450	1.550	1.650	1.750	1.800	1.800	
		Kg/Ha	674,5	577,37	577,52	577,71	578,01	578,16	578,16	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Cakupan penerapan teknologi perkebunan	Persen	50	55	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan penerapan teknologi perkebunan	Persen	50	55	60	65	70	75	75	Dinas Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Perkebunan	Cakupan pencegahan dan penanggulangan hama penyakit perkebunan	Persen	70	72	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	70	72	74	76	78	80	80	Dinas Pertanian
<b>Tujuan 2.2</b>										
Peningkatan produk unggulan daerah	Nilai Tambah Produk	Juta Rupiah	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Sasaran 2.2.1</b>										
Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan untuk pengembangan produk unggulan daerah	Persentase koperasi sehat	Persen	21,31	21,31	21,31	21,5	21,98	22,45	22,45	Dinas Koperasi dan UKM
<b>Program</b>										
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase kualitas kelembagaan koperasi	Persen	21,36	21,36	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang mendapat bantuan	Persen	-	-	10	15	15	15	15	Dinas Koperasi dan UKM
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1. Persentase koperasi aktif	Persen	21,51	21,51	21,53	21,85	22,33	22,85	22,85	Dinas Koperasi dan UKM

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	2. Persentase kualitas kelembagaan koperasi	Persen	21,36	21,36	22,16	23,09	24,16	25,34	25,34	Dinas Koperasi dan UKM
<b>Sasaran 2.2.2</b>										
Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung produk unggulan daerah	Jumlah produk unggulan UMKM terstandarisasi	Produk		14	17	20	22	25	25	Dinas Koperasi dan UKM
<b>Program</b>										
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Pertumbuhan UMKM baru	Persen	1,2	1,4	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro	Pertumbuhan UMKM baru	Persen	1,2	1,4	1,8	1,9	2	2,04	2,04	Dinas Koperasi dan UKM
<b>Sasaran 2.2.3</b>										
Peningkatan jumlah home industri produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	2,15	2,17	2,21	2,71	3,02	3,4	3,4	Dinas Perindustrian & Perdagangan
<b>Program</b>										
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	20	20	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Persentase pertumbuhan IKM	Persen	0,0010	0,0022	0,0027	0,0032	0,0032	0,0035	0,0035	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	2. Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	20	20	25	30	40	50	50	



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Sasaran 2.2.4</b>										
Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen		15,1	15,5	16,01	16,42	16,83	16,83	Dinas Perindustrian & Perdagangan
<b>Program</b>										
Program Pengembangan, Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional	Cakupan peningkatan pasar tradisional (akumulatif)	Persen	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan pasar yang tergolong baik	Persen	9	10	11	12	13	14	14	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	60	62	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTPP yang ditera/tera ulang	Persen	50	55	60	65	70	75	75	Dinas Perindustrian & Perdagangan
<b>Misi 3</b>										
<b>Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan</b>										
<b>Tujuan 3.1</b>										
Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,33	73,73	74,24	74,75	75,26	75,77	75,77	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Sasaran</b>										
Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,71	9,76	9,98	10,02	10,24	10,28	10,28	Dinas Pendidikan
<b>Program</b>										
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	a. Angka Partisipasi Murni									Dinas Pendidikan
	- APM SD/MI	Nilai		89,05	-	-	-	-	-	
	- APM SMP/MTs	Nilai		100,7	-	-	-	-	-	
	b. Angka Partisipasi Kasar									
	- APK SD/MI	Nilai		105,04	-	-	-	-	-	
	- APK SMP/MTs	Nilai		115,18	-	-	-	-	-	
	c. Angka Putus Sekolah									
	- Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen		0,03	-	-	-	-	-	
	- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen		0,12	-	-	-	-	-	
	d. Persentase sekolah akreditasi minimal B	Persen		83,43	-	-	-	-	-	
	2. Angka melek huruf	Persen		99,47	99,52	99,58	99,64	99,7	99,7	Dinas Pendidikan
<b>Program</b>										
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen		3,61	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik	a. Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	Persen		83,06	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
	b. Persentase guru yang telah mengikuti pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan	Persen		37,33	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya kejar paket A,B dan C	Ada/Tidak ada		Ada	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	a. Angka Partisipasi Murni									Dinas Pendidikan
	- APM SD/MI	Nilai	-	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05	
	- APM SMP/MTs	Nilai	-	100,7	100,81	100,91	101,01	101,11	101,11	
	b. Angka Partisipasi Kasar									
	- APK SD/MI	Nilai	-	105,04	105,15	105,25	105,36	105,46	105,46	
	- APK SMP/MTs	Nilai	-	115,18	115,3	115,41	115,53	115,64	115,64	
	c. Angka Putus Sekolah									
	- Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
	- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	-	0,12	0,1	0,1	0,09	0,08	0,08	
	d. Persentase sekolah akreditasi minimal B	Persen	-	83,43	86,28	89,25	92,34	95,56	95,56	
	e. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	-	3,61	4,15	4,78	5,49	6,32	6,32	
	f. Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	-	83,06	85,64	88,35	91,19	94,19	94,19	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	g. Persentase guru yang telah mengikuti pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan	Persen	-	37,33	41,53	46,06	51,14	56,7	56,7	
	h. Terlaksananya kejar paket A,B dan C	Ada/Tidak ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	3. Tingkat kunjungan ke perpustakaan	Persen	33,50	34,00	34,17	35,94	36,05	36,11	36,11	Dinas Perpustakaan
<b>Program</b>										
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan di kecamatan	Jumlah Perpustakaan		5	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemenuhan sarana prasarana perpustakaan	Persen	-	-	45	65	85	100	100	Dinas Perpustakaan
<b>Tujuan 3.2</b>										
Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,46	68,61	68,77	68,92	69,07	69,23	69,23	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran</b>										
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup	Tahun	68,46	68,61	68,77	68,92	69,07	69,23	69,23	Dinas Kesehatan
<b>Program</b>										
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	Persen	75	78	80	85	90	95	95	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase desa Universal Child Immunization (UCI)	Persen	84,10	86	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standart	Persen	100	100	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standart pelayanan dan akreditasi rumah sakit	Persen	-	100	-	-	-	-	-	RSUD Tarutung
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit	Persen	-	100	-	-	-	-	-	RSUD Tarutung
Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	b. Persentase desa Universal Child Immunization (UCI)	Persen	84,10	86	90	91	92	93	93	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	c. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standart	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	d. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	RSUD Tarutung
	e. Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit	Persen	-	100	100	100	100	100	100	RSUD Tarutung
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Persen	50	57	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Persen	50	57	65	75	85	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persen	100	100	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persen		70	72,5	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	a. Perolehan medali tingkat nasional	Medali	-	-	80	85	90	95	95	Dinas Pemuda dan Olahraga

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	b. Perolehan medali tingkat provinsi	Medali	-	-	80	85	90	95	95	
	c. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persen	-	70	72,5	75	77,5	80	80	
	2. Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Anak	4	4	4	4	3	3	3	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
<b>Program</b>										
Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga	Contraseptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	65,64	68,92	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
Program Pembinaan Keluarga Berencana	a. Cakupan pelayanan KB	Persen	-	-	80	85	90	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	b. Contraseptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	65,64	68,92	72,37	75,99	79,79	83,78	83,78	
Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	3,03	3,01	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	3,03	3,01	2,97	2,94	2,9	2,86	2,86	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Misi 4										
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan										
Tujuan										
Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,78	1,72	1,67	1,61	1,55	1,50	1,50	
Sasaran 4.1										
Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,78	1,72	1,67	1,61	1,55	1,50	1,50	Dinas Ketenagakerjaan
Program										
Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja	a. Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	Jumlah	47	60	-	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan
	b. Jenis pelatihan	Jenis	7	8	-	-	-	-	-	
	c. Jumlah peserta pelatihan	Orang	47	60	-	-	-	-		
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pengembangan kompetensi tenaga kerja	Persen	-	-	73,89	77,1	80,45	83,95	83,95	Dinas Ketenagakerjaan
Program Kemitraan Ketenagakerjaan	Cakupan penempatan tenaga kerja	Persen	45	49,12	-	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan
Program perencanaan tenaga kerja	Cakupan penempatan tenaga kerja	Persen	45	49,12	57,22	67,69	78,09	87,49	87,49	Dinas Ketenagakerjaan
Sasaran 4.2										
Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan	Persentase wirausaha pemuda pemula	Persen	0,004	0,008	0,012	0,016	0,020	0,024	0,024	Dinas Pemuda dan Olahraga



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Program</b>										
Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan wirausaha	Orang	32	35	40	45	50	55	55	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	a. Persentase peningkatan pemuda pelopor	Persen	-	-	20	40	60	80	80	Dinas Pemuda dan Olahraga
	b. Persentase peningkatan wirausaha pemuda	Persen	-	-	20	40	60	80	80	
	c. Persentase peningkatan pemuda berprestasi	Persen	-	-	20	40	60	80	80	
<b>Misi 5</b>										
<b>Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata</b>										
<b>Tujuan</b>										
Meningkatnya jumlah wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang	155.000	158.000	163.000	165.000	170.000	175.000	175.000	Dinas Pariwisata
<b>Sasaran</b>										
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata	1. Persentase infrastruktur destinasi wisata kondisi baik	Persen	28	30	36	40	46	50	50	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR
<b>Program</b>										
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan pembenahan destinasi pariwisata	Persen	21	30	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan pembenahan destinasi pariwisata	Persen	21	30	36	40	46	50	50	Dinas Pariwisata

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan	Persen	11	12	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan	Persen	11	12	15	19	23	31	31	Dinas Pariwisata
	2. Lama tinggal	Hari	0,5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1	Dinas Pariwisata
<b>Program</b>										
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase event pariwisata yang dilaksanakan	Persen	15	16	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase event pariwisata yang dilaksanakan	Persen	15	16	18	20	22	24	24	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Persentase penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
	b. Persentase penyelesaian gangguan Trantibum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Misi 6</b>										
<b>Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup</b>										
<b>Tujuan 6.1</b>										

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Nilai	58,31	60,7	62,14	63,51	64,72	66,05	66,05	Semua OPD
<b>Sasaran 6.1.1</b>										
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Persen	56,00	56,54	57,2	57,85	58,5	61,03	61,03	Dinas PUPR
<b>Program</b>										
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	a. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	60,22	61,13	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
	b. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	Persen	82	82,81	84	85	85,16	85,94	85,94	
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	a. Persentase panjang jaringan jalan kabupaten (K1) dalam kondisi baik	Persen	64,75	66,68	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
	b. Persentase jembatan kabupaten (K10) dalam kondisi baik	Persen	84	84,61	85,38	86,15	86,92	87,7	87,7	
Program Penyelenggaraan Jalan	a. Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	64,75	66,68	66,75	66,82	66,89	66,96	66,96	Dinas PUPR
	b. Persentase panjang jaringan jalan kondisi baik	Persen	60,22	61,13	62,04	62,97	63,91	64,87	64,87	
	c. Persentase jembatan kabupaten (K10) dalam kondisi baik	Persen	82	82,81	84	85	85,16	85,94	85,94	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		

<b>Sasaran 6.1.2</b>										
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	80,8	81	82	83	85	87	87	Dinas Perkim
<b>Program</b>										
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Persen	28,83	31,26	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Persen	28,83	31,26	33,69	36,12	38,55	40,98	40,98	Dinas Perkim
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kesesuaian Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	100	100	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkim
Program Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Persentase penduduk berakses sanitasi layak	Persen	79,5	89,22	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk berakses sanitasi layak	Persen	79,5	89,22	92,71	95,14	97,57	100	100	Dinas Perkim
Program Lingkungan Sehat Perumahan	a. Luasan Kawasan kumuh	Hektar		1.026,24	1.006,80	987,46	968,08	948,69	948,69	Dinas Perkim

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	b. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	55	60	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	55	60	65	70	75	80	80	Dinas Perkim
Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman	Persentase rumah layak huni	Persen	78,53	83,36	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	Persen	78,53	83,36	84,37	85,38	86,39	87,4	87,4	Dinas Perkim
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang diangkut	Persen	28	28,60	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang diangkut	Persen	28	28,60	30,10	31,50	33,00	34,40	34,40	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Sasaran 6.1.3</b>										
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase fasilitas keselamatan transportasi	Persen	20,25	21,57	22,5	24	25,5	27	27	Dinas Perhubungan
<b>Program</b>										
Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan	Persen	50	53	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Cakupan pelayanan keselamatan lalu lintas jalan	Persen	10,5	11	12	13	14	15	15	Dinas Perhubungan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Cakupan pelayanan angkutan jalan	Persen	30	32,13	34	36	38	40	40	
<b>Tujuan 6.2</b>										
Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPR
<b>Sasaran 6.2.1</b>										
Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang	Jumlah regulasi tentang tata ruang	Regulasi RTR (Peraturan Daerah/Perbub)		RDTR Tarutung, Sipoholon, Siatas Barita, Siborong-borong	Praturan Bupati Turunan Peraturan Daerah RDTR	RDTR Kawasan Strategis Pahae	RDTR Sipahutar	RDTR Parmonangan	7 Regulasi	Dinas PUPR
<b>Program</b>										
Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Dokumen		9	2	3	4	5	29	Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Persen	-	20,00	33,33	46,67	60,00	73,33	73,33	Dinas PUPR
<b>Sasaran 6.2.2</b>										
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Cakupan ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen	84,81	84,81	84,81	85,76	86,71	87,66	87,66	Dinas Perkim
<b>Program</b>										

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	a. Persentase penyelesaian konflik	Persen		100	100	100	100	100	100	Dinas Perkim
	b. Persentase ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen		84,81	84,81	85,76	86,71	87,66	87,66	Dinas Perkim
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa/konflik tanah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	Dinas Perkim
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	Dinas Perkim
<b>Tujuan 6.3</b>										
Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	70,12	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22	70,22	Dinas Lindup
<b>Sasaran 6.3.1</b>										
Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	70,12	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22	70,22	Dinas Lindup
<b>Program</b>										
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	80	80,5	-	-	-	-	-	Dinas Lindup

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	70	71	-	-	-	-	-	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	80	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5	Dinas Lindup
	b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	70	71	72	73	74	75	75	Dinas Lindup
<b>Sasaran 6.3.2</b>										
Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	Persentase desa tangguh bencana	Persen	0	20	40	60	90	100	100	BPBD
<b>Program</b>										
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Response time mencapai lokasi bencana	Jam	2x 24 jam	-	-	-	-	-	-	BPBD
Program Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap bencana	Jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	BPBD
	Cakupan desa yang dibina menuju desa tangguh bencana	Persen	-	1,66	3,32	6,64	9,96	13,28	13,28	
	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana	Persen	85	89	10	10	10	10	10	



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Misi 7										
Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri										
Tujuan										
Meningkatnya jumlah desa mandiri	Jumlah desa mandiri	Desa	0	0	0	0	1	2	2	Dinas Pemmas & Desa
Sasaran										
Meningkatkan status desa	1. Desa sangat tertinggal	Desa	20	11	5	3	1	0	0	Dinas Pemmas & Desa
	2. Desa tertinggal	Desa	165	129	90	47	4	0	0	
	3. Desa berkembang	Desa	56	86	116	146	178	180	182	
	4. Desa maju	Desa	0	15	30	45	57	59	57	
	5. Desa mandiri	Desa	0	0	0	0	1	2	2	
Program										
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kerjasama Desa	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kerjasama desa	Persen		100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program Peningkatan Manajemen Penataan Desa	Cakupan peningkatan manajemen penataan desa	Persen		100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program Penataan Desa	Cakupan pelayanan penataan desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat	Cakupan pengembangan ekonomi pedesaan	Persen		100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan kerjasama antar desa yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi Masyarakat	Cakupan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan partisipasi masyarakat	Persen		100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
<b>Misi 8</b>										
<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government</b>										
<b>Tujuan</b>										
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	39	40	50	60	65	70,25	70,25	Semua OPD
<b>Sasaran 8.1</b>										
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	C	B	B	BB	BB	A	A	Semua OPD
<b>Program</b>										
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Maturitas SPIP Kabupaten Tapanuli Utara	Level	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Inspektorat

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level maturitas SPIP	Level	Level II	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Inspektorat
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Dokumen RPJMD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
	b. Dokumen RKPD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian program pembangunan daerah	Persen		100	100	100	100	100	100	Bappeda
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
Program Reformasi Birokrasi	Cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai			90	92	95	100	100	Sekretariat Daerah
Program Administrasi Umum	Persentase OPD yang memiliki nilai LAKIP kategori baik	Persen								
	Nilai indeks kepuasan masyarakat tingkat kabupaten	Nilai			90	92	95	100	100	
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Persentase kegiatan fisik yang terlaksana dengan baik	Persen		98,2	98,4	98,6	98,8	99	99	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase realisasi kegiatan Perangkat Daerah sesuai APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pelayanan PPID OPD Kab. Tapanuli Utara	Ada/Tidak Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi & Informatika

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Informasi dan Komunikasi Publik	a. Persentase peningkatan update konten pada website Pemkab. Tapanuli Utara	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi & Informatika
	b. Cakupan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Program Pengembangan Aparatur	Capaian pengembangan aparatur	Persen		93,09	94,42	95,77	97,16	98,58	98,58	BKD
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Persentase aparatur mengikuti diklat struktural	Persen	20	22	23	24	25	26	26	BKD
	b. Persentase aparatur mengikuti diklat teknis	Persen	10	11	12	13	14	15	15	
<b>Sasaran 8.2</b>										
Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Semua OPD
<b>Program</b>										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen		95	95	100	100	100	100	Semua OPD
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan	Tersedianya peraturan daerah tentang APBD tepat waktu	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPKPAD

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPKPAD
	b. Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	Tepat waktu/ terlambat	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
	c. Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai/ tidak sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
	d. Tersedianya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah dan Investasi Pemerintah Daerah	Cakupan tercatatnya nilai asset pemerintah Kab. Tapanuli Utara	Persen		100	100	100	100	100	100	BPKPAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/aset daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPKPAD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	a. Adanya tindaklanjut hasil audit	Ada/Tidak Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Inspektorat
	b. Tersedianya review laporan	Ada/Tidak Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	a. Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Inspektorat

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)	OPD Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	b. Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
<b>Sasaran 8.3</b>										
Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi (akumulasi)	Persen	33	33	55	77	87	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Program</b>										
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pengembangan aplikasi informatika dan e-government	Aplikasi	2	3	4	5	6	7	7	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi	Persen	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

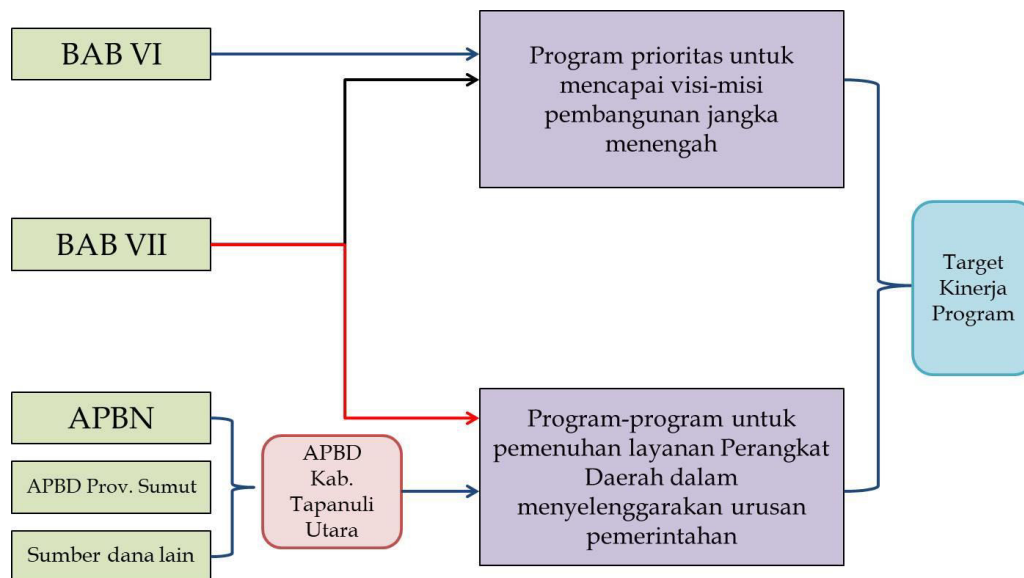
## **BAB VII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Program pembangunan merupakan suatu bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Selain itu juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Program disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dan pagu program dihitung secara indikatif yang merupakan jumlah anggaran tersedia untuk mendanai program pembangunan tahunan. Penghitungannya didasarkan atas standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara dan sumber-sumber pendanaan lainnya) sebagaimana diuraikan pada Gambar 7.1.



**Gambar 7.1**  
**Indikasi Program Pembangunan RPJMD**

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. Pada periode RPJMD tahun 2019-2024 diasumsikan bahwa pengeluaran belanja daerah dari pengeluaran wajib dan mengikat cenderung meningkat dan tidak disertai dengan adanya peningkatan pendapatan daerah yang signifikan, sehingga kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama periode RPJMD diprediksi cenderung turun.

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Tapanuli Utara berisi program-program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menjalankan Urusan Pemerintahan. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program (*outcomes*) yang telah ditetapkan. Dalam menyusun perencanaan pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip “*money follow program*”. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Konsep “*money follow function*” selama ini mengandung kelemahan, anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau organisasi birokrasi yang mahal untuk menjalankan kegiatannya.



Akibatnya program-program strategis dan prioritas belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai sebagai program unggulan daerah.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan pagu indikatif tidak bisa secara ideal dilakukan, sehingga konsep “*money follow program*” belum mampu diaplikasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Banyaknya kewajiban dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh daerah dalam bentuk belanja wajib seperti : pemenuhan kewajiban alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20 persen, bidang kesehatan 10 persen, Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10 persen dari total dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dana transfer wajib digunakan untuk belanja modal minimum 20 persen dan dana bagi hasil yang peruntukannya sebagian besar sudah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan sangat terbatasnya potensi dana yang bisa diarahkan secara ideal untuk mendanai program-program prioritas daerah.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu potensi dana yang besarnya cukup signifikan untuk mendanai program-program pembangunan di daerah akan tetapi besarnya belum dapat dimasukkan dalam proyeksi pendapatan dan kerangka pendanaan APBD sebelum ada aturan yang ditetapkan dan dipublikasikan serta dalam melaksanakan harus sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah Pusat sehingga dengan kondisi tersebut daerah tidak leluasa dalam penggunaannya untuk mendanai program prioritas daerah.
3. Potensi dana yang bisa cukup leluasa diarahkan untuk pendanaan program prioritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jumlahnya tidak signifikan untuk mendesain pagu indikatif secara ideal. Namun demikian penyusunan pagu indikatif tersebut tetap diupayakan mengacu ketentuan yang ada, namun karena berbagai keterbatasan tersebut ada beberapa kebijakan daerah yang harus dilakukan untuk mengatasinya sehingga diperoleh solusi yang lebih realistis dan rasional. Secara umum beberapa pertimbangan yang dipergunakan sebagai penghitung pagu indikatif antara lain : pemenuhan kewajiban belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian visi misi jangka menengah, belanja untuk membiayai urusan wajib bersifat pelayanan dasar dan belanja-belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah.

Perumusan kerangka indikatif pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.447.066.457.000,00</b>	<b>1.455.862.988.840,00</b>	<b>1.481.261.410.000,00</b>	<b>1.509.904.654.000,00</b>	<b>1.542.839.295.000,00</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>891.925.457.000,00</b>	<b>910.013.988.840,00</b>	<b>928.765.410.000,00</b>	<b>957.939.654.000,00</b>	<b>993.546.295.000,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	570.704.907.000,00	584.925.258.840,00	599.500.006.000,00	614.438.238.000,00	629.748.941.000,00
	- Belanja Pegawai PNS	561.234.065.000,00	575.265.000.000,00	589.646.541.000,00	604.387.704.000,00	619.497.397.000,00
	- Belanja Pegawai PPK	9.470.842.000,00	9.660.258.840,00	9.853.465.000,00	10.050.534.000,00	10.251.544.000,00
2.1.2	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja Hibah	10.750.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	35.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	296.405.550.000,00	300.523.730.000,00	304.700.404.000,00	308.936.416.000,00	313.232.354.000,00
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	8.500.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>555.411.553.500,00</b>	<b>545.849.000.000,00</b>	<b>552.496.000.000,00</b>	<b>551.965.000.000,00</b>	<b>549.293.000.000,00</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	19.064.000.000,00	19.064.000.000,00	19.064.000.000,00	19.064.000.000,00	19.064.000.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	333.602.000.000,00	310.032.000.000,00	310.657.000.000,00	309.833.000.000,00	304.843.000.000,00
2.2.3	Belanja Modal	202.745.553.500,00	216.753.000.000,00	222.775.000.000,00	223.068.000.000,00	225.386.000.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis termasuk menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Secara implikatif agenda kerja untuk memberhasilkan seluruh agenda pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dijabarkan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada tabel 7.2.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program per urusan yang tertuang pada tabel 7.2 dibagi atas dua bagian, yaitu program yang digunakan untuk perencanaan tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan program yang digunakan untuk perencanaan tahun 2021-2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Nomor urut program per urusan yang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tetap dimulai dari nomor satu (tidak melanjutkan urutan program sebelumnya).

**TABEL 7.2**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD KAB. TAPANULI UTARA TAHUN 2020-2024**

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					371.703.619.500,00		368.578.465.000,00		371.764.000.000,00		372.715.000.000,00		371.215.000.000,00	
1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					103.373.049.000,00		103.370.000.000,00		103.370.000.000,00		103.370.000.000,00		103.370.000.000,00	Dinas Pendidikan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	3.871.148.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	598.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	51.685.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	3,14	3,61	530.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik	a. Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	80,58	83,06	11.896.862.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
		b. Persentase guru yang telah mengikuti pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan	Persen	32,24	37,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	a. APM SD/MI	Nilai	89,05	89,05	56.732.548.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
		b. APM SMP/MTs	Nilai	100,5	100,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		c. APK SD/MI	Nilai	104,83	105,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		d. APK SMP/MTs	Nilai	114,95	115,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		e. Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,04	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,14	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		g. Persentase sekolah akreditasi minimal B	Persen	80,69	83,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya kejar paket A,B dan C	Ada/ Tdk ada	Ada	Ada	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
9	Program Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar kondisi baik	Persen	75	77	29.631.296.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	4.520.000.000,00	12 Bulan	4.520.000.000,00	12 Bulan	4.520.000.000,00	12 Bulan	4.520.000.000,00	Dinas Pendidikan
2	Program Pengelolaan Pendidikan	a. Angka Partisipasi Murni				-		98.850.000.000,00		98.850.000.000,00		98.850.000.000,00		98.850.000.000,00	Dinas Pendidikan
		- APM SD/MI	Nilai	89,05	89,05	-	89,05	-	89,05	-	89,05	-	89,05	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
		- APM SMP/MTs	Nilai	100,5	100,7	-	100,81	-	100,91	-	101,01	-	101,11	-	
		b. Angka Partisipasi Kasar													
		- APK SD/MI	Nilai	104,83	105,04	-	105,15	-	105,25	-	105,36	-	105,46	-	
		- APK SMP/MTs	Nilai	114,95	115,18	-	115,3	-	115,41	-	115,53	-	115,64	-	
		c. Angka Putus Sekolah													
		- Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,04	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	
		- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,14	0,12	-	0,1	-	0,1	-	0,09	-	0,08	-	
		d. Persentase sekolah akreditasi minimal B	Persen	80,69	83,43	-	86,28	-	89,25	-	92,34	-	95,56	-	
		e. Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	3,14	3,61	-	4,15	-	4,78	-	5,49	-	6,32	-	
		f. Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	80,58	83,06	-	85,64	-	88,35	-	91,19	-	94,19	-	
		g. Persentase guru yang telah mengikuti pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan	Persen	32,24	37,33	-	41,53	-	46,06	-	51,14	-	56,7	-	
		h. Terlaksananya kejar paket A,B dan C	Ada/ Tdk ada	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					132.563.916.000,00		130.500.000.000,00		129.819.000.000,00		130.575.000.000,00		130.500.000.000,00	Dinkes, RSUD Tarutung
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	3.439.231.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	244.670.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	84.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	81	100	329.051.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Program peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standart	Persen	50	100	49.538.884.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase desa Universal Child Immunization (UCI)	Persen	84,1	86	1.457.667.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Program peningkatan sumber daya kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Persen	45	57	3.803.752.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit	Persen	98	100	3.619.267.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Tarutung
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standart pelayanan dan akreditasi rumah sakit	Persen	94	100	70.033.894.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Tarutung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	5.681.460.000,00	12 Bulan	4.000.000.000,00	12 Bulan	4.000.000.000,00	12 Bulan	4.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar	Persen	100	100	-	100	124.038.540.000,00	100	125.000.000.000,00	100	125.000.000.000,00	100	125.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		b. Persentase desa Universal Child Immunization (UCI)	Persen	84,10	86	-	90	-	91	-	92	-	93	-	Dinas Kesehatan
		c. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standart	Persen	50	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
		d. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	RSUD Tarutung
		e. Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit	Persen	98	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	RSUD Tarutung
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Persen	45	57	-	65	345.000.000,00	75	362.250.000,00	85	525.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	a. Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki ijin	Persen			-	100	330.000.000,00	100	346.500.000,00	100	525.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
		b. Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT)	Persen			-	70		75		80		85		
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	Persen	-	-	-	80	105.000.000,00	85	110.250.000,00	90	525.000.000,00	95	500.000.000,00	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					88.276.784.000,00		102.128.000.000,00		104.580.000.000,00		104.105.000.000,00		102.480.000.000,00	Dinas PUPR
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	3.163.834.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	333.885.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
6	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	a. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	60,22	61,13	22.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
		b. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	Persen	82	82,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang saluran irigasi kab kondisi baik	Persen	67,62	67,64	10.262.065.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
8	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	a. Persentase panjang jaringan jalan kabupaten (K1) dalam kondisi baik	Persen	64,75	66,68	47.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
		b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	82	82,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pemenuhan kebutuhan jalan dan jembatan ke pusat-pusat kegiatan	Persen	3,38	0,2	4.700.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
10	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	41,83	42,69	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
11	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Dokumen	1	9	602.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinaamargaan	a. Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan	Persen	29	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
		b. Jumlah tenaga konstruksi terampil	orang	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	4.000.000.000,00	12 Bulan	4.200.000.000,00	12 Bulan	3.675.000.000,00	12 Bulan	3.500.000.000,00	Dinas PUPR
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67,62	67,64	-	67,66	10.000.000.000,00	67,68	10.000.000.000,00	67,7	10.000.000.000,00	67,72	10.000.000.000,00	Dinas PUPR



No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
3.	Program Penyelenggaraan Jalan	a. Persentase panjang jaringan jalan kabupaten kondisi baik	Persen	64,75	66,68	-	66,75	73.200.000.000,00	66,82	75.000.000.000,00	66,89	75.000.000.000,00	66,96	73.200.000.000,00	Dinas PUPR
		b. Persentase panjang jaringan jalan kondisi baik	Persen	60,22	61,13	-	62,04	-	62,97	-	63,91	-	64,87	-	
		c. Persentase panjang jembatan kabupaten kondisi baik	Persen	82	82,81	-	84	-	85	-	85,16	-	85,94	-	
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang memiliki kompetensi	Persen	-	-	-	10	230.000.000,00	15	230.000.000,00	20	230.000.000,00	25	230.000.000,00	Dinas PUPR
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Persen	-	20,00	-	33,33	970.000.000,00	46,67	1.000.000.000,00	60,00	1.000.000.000,00	73,33	1.000.000.000,00	Dinas PUPR
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Persen	28,83	31,26	-	33,69	4.360.000.000,00	36,12	4.500.000.000,00	38,55	4.500.000.000,00	40,98	4.600.000.000,00	Dinas Perkim
6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk berakses sanitasi layak	Persen	79,5	89,22	-	92,71	4.560.000.000,00	95,14	4.700.000.000,00	97,57	4.700.000.000,00	100	4.800.000.000,00	Dinas Perkim
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan	Persen	41,83	42,69	-	60	2.990.000.000,00	65	3.100.000.000,00	70	3.100.000.000,00	75	3.200.000.000,00	Dinas Perkim
8.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100	100	-	100	1.818.000.000,00	100	1.850.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	1.950.000.000,00	Dinas Perkim

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					35.013.773.500,00		20.050.000.000,00		20.680.000.000,00		21.300.000.000,00		21.400.000.000,00	Dinas Perkim
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	5.308.002.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	3.566.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	12.439.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	55	60	2.126.538.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
7	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) persatuan penduduk	Rasio/ 1000 penduduk	25,40	24,80	360.778.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
8	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Luasan pengembangan kawasan permukiman	Ha	5038,98	5038,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
9	Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman	Persentase rumah layak Huni	Persen	78,53	83,36	7.903.930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Persen	28,83	31,26	4.247.858.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kesesuaian Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	100	100	1.460.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
12	Program Penataan/ Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Lampu Taman	Cakupan Pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Lampu Taman	Persen	6,72	7,04	2.650.491.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
13	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase tersedianya luasan RTH Publik	Persen	13,18	13,76	1.344.774.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
14	Program Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Persentase penduduk berakses sanitasi layak	Persen	79,5	89,22	6.032.513.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	5.900.000.000,00	12 Bulan	5.900.000.000,00	12 Bulan	5.900.000.000,00	12 Bulan	5.900.000.000,00	Dinas Perkim
2.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengendalian, pembangunan dan pengembangan perumahan	Persen	100	100	-	100	360.000.000,00	100	380.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas Perkim
3.	Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	Persen	78,53	83,36	-	84,37	1.340.000.000,00	85,38	1.400.000.000,00	86,39	1.500.000.000,00	87,40	1.600.000.000,00	Dinas Perkim

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	55	60	-	65	12.450.000.000,00	70	13.000.000.000,00	75	13.500.000.000,00	80	13.500.000.000,00	Dinas Perkim

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat					10.716.532.000,00		10.450.000.000,00		10.865.000.000,00		10.865.000.000,00		10.865.000.000,00	Satpol PP, BPBD
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	5.886.775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	140.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Cakupan peningkatan ketentraman dan keterlibatan umum	Persen	100	100	800.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
7	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pengakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	85	89	315.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
8	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan kejadian kebakaran	Persen	70	70	213.317.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	685.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	835.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tingkat Waktu Tanggap	Jam	2x24 jam	2x24 jam	415.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
7	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani sementara akibat bencana	Persen	13,28		264.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana	Persen	85	89	890.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	5.500.000.000,00	12 Bulan	5.775.000.000,00	12 Bulan	5.775.000.000,00	12 Bulan	5.800.000.000,00	Satpol PP
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Persentase penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100,00	100,00	-	100	1.300.000.000,00	100	1.365.000.000,00	100	1.365.000.000,00	100	1.365.000.000,00	Satpol PP
		b. Persentase penyelesaian gangguan Trantibum	Persen	100,00	100,00	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
3	Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase penanganan kejadian kebakaran	Persen	70	70	-	75	500.000.000,00	80	525.000.000,00	85	525.000.000,00	90	500.000.000,00	Satpol PP
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	985.000.000,00	12 Bulan	1.000.000.000,00	12 Bulan	1.000.000.000,00	12 Bulan	1.000.000.000,00	BPBD
2	Program Penanggulangan Bencana	a. Tingkat waktu tanggap bencana	Jam	2x24 jam	2x24 jam	-	2x24 jam	2.165.000.000,00	2x24 jam	2.200.000.000,00	2x24 jam	2.200.000.000,00	2x24 jam	2.200.000.000,00	BPBD
		b. Cakupan desa yang dibina menuju desa tangguh bencana	Persen	-	1,66	-	3,32	-	6,64	-	9,96	-	13,28	-	
		c. Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana	Persen	85	89	-	10	-	10	-	10	-	10	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)		
1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					1.759.565.000,00		2.080.465.000,00		2.450.000.000,00		2.500.000.000,00		2.600.000.000,00	Dinas Sosial	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	524.665.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	111.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	13.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
6	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang terdata dan menerima bantuan sosial	Persen	50	50	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
7	Program Pemberdayaan Sosial	Indeks Pemberdayaan Sosial	Nilai	0,7	2	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
8	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang meningkat taraf hidupnya	Persen	0,7	2	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase akurasi data penerima perlindungan dan jaminan sosial	Nilai	65	70	510.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	650.000.000,00	12 Bulan	700.000.000,00	12 Bulan	700.000.000,00	12 Bulan	700.000.000,00	Dinas Sosial	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi PSKS dan PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	-	5	-	10	100.000.000,00	15	200.000.000,00	20	200.000.000,00	25	250.000.000,00	Dinas Sosial	
3	Program Rehabilitasi Sosial	a. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang ditangani	Persen	-	100	-	100	500.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	Dinas Sosial	
		b. Persentase anak terlantar yang ditangani	Persen	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
		c. Persentase lanjut usia terlantar yang ditangani	Persen	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
		d. Persentase gelandangan dan pengemis yang ditangani	Persen	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase akurasi data penerima perlindungan dan jaminan sosial	Persen	-	70	-	75	680.465.000,00	80	750.000.000,00	85	800.000.000,00	90	850.000.000,00	Dinas Sosial	
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen	-	100	-	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas Sosial	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan kondisi baik	Persen	-	100	-	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas Sosial	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
II	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					48.293.697.000,00		52.579.220.000,00		52.133.000.000,00		50.772.250.000,00		51.005.750.000,00	
2.7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					1.713.000.000,00		1.750.000.000,00		1.875.000.000,00		2.012.500.000,00		2.087.500.000,00	Dinas Naker
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	590.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Naker
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	240.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Naker
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Naker
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Naker
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Naker
6	Program Perlindungan Ketenagakerjaan	Cakupan Perlindungan Ketenagkerjaan	Persen	39,08	39,38	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Naker
7	Program Kemitraan Ketenagakerjaan	Cakupan Penempatan Tenaga Kerja	Persen	40,86	42,71	323.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Naker
8	Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja	a. Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	Jumlah	47	60	430.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Naker
		b. Jenis pelatihan	Jenis	7	8		-	-	-	-	-	-	-	-	
		c. Jumlah peserta pelatihan	Orang	47	60		-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	788.000.000,00	12 Bulan	800.000.000,00	12 Bulan	862.500.000,00	12 Bulan	862.500.000,00	Dinas Naker
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pengembangan kompetensi tenaga kerja	Persen	69,91	70,81	-	73,89	655.000.000,00	77,10	700.000.000,00	80,45	700.000.000,00	83,95	700.000.000,00	Dinas Naker
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan penempatan tenaga kerja	Persen	40,86	42,71	-	44,66	144.000.000,00	46,69	175.000.000,00	48,81	200.000.000,00	51,03	225.000.000,00	Dinas Naker
4	Program Hubungan Industrial	Cakupan perlindungan ketenagakerjaan	Persen	39,08	39,38	-	39,70	163.000.000,00	40,03	200.000.000,00	40,38	250.000.000,00	40,75	300.000.000,00	Dinas Naker

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1.300.245.000,00		555.000.000,00		615.500.000,00		630.500.000,00		660.000.000,00	Dinas PP, KB, PP dan PA
1	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Persen	85	89	923.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	85	89	377.145.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PP, KB, PP dan PA
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persen	-	75	-	80	360.000.000,00	85	396.000.000,00	90	396.000.000,00	100	405.000.000,00	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan	Persen	-	75	-	80	50.000.000,00	85	55.000.000,00	90	60.000.000,00	100	65.000.000,00	Dinas PP, KB, PP dan PA
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan peningkatan layanan kualitas keluarga	Persen	-	70	-	75	25.000.000,00	80	30.000.000,00	85	35.000.000,00	90	40.000.000,00	Dinas PP, KB, PP dan PA
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Cakupan pelayanan pemenuhan hak anak	Persen	-	55	-	60	95.000.000,00	65	104.500.000,00	70	104.500.000,00	75	110.000.000,00	Dinas PP, KB, PP dan PA
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan layanan perlindungan khusus anak	Persen	-	55	-	60	25.000.000,00	65	30.000.000,00	70	35.000.000,00	75	40.000.000,00	Dinas PP, KB, PP dan PA



No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					1.862.500.000,00		2.255.000.000,00		2.315.000.000,00		2.385.000.000,00		2.430.000.000,00	Dinas Ketapang dan Perikanan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	534.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Program Ketahanan Pangan	Cakupan ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kapita /Tahun	439,25	456,99	437.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketapang dan Perikanan
7	Program Penganekaragaman, Keamanan, Mutu dan Pengolahan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	82,1	86	626.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketapang dan Perikanan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	850.000.000,00	12 Bulan	875.000.000,00	12 Bulan	900.000.000,00	12 Bulan	900.000.000,00	Dinas Ketapang dan Perikanan
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	85	86	-	87	1.135.000.000,00	88	1.150.000.000,00	89	1.175.000.000,00	90	1.200.000.000,00	Dinas Ketapang dan Perikanan
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan	Persen	-	-	-	26,67	170.000.000,00	20	180.000.000,00	13,33	190.000.000,00	6,67	200.000.000,00	Dinas Ketapang dan Perikanan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pemantauan keamanan pangan	Persen	-	-	-	5	100.000.000,00	10	110.000.000,00	15	120.000.000,00	20	130.000.000,00	Dinas Ketapang dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					5.400.000.000,00		4.120.000.000,00		5.400.000.000,00		4.370.000.000,00		4.120.000.000,00	Dinas Perkim
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	a. Persentase ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen	84,89	84,89	5.400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
		b. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	Persen	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persen	100	100	-	100	370.000.000,00	100	400.000.000,00	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	Dinas Perkim
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persen	100	100	-	100	3.750.000.000,00	100	5.000.000.000,00	100	4.000.000.000,00	100	3.750.000.000,00	Dinas Perkim

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					5.386.960.000,00		5.702.000.000,00		5.805.000.000,00		5.895.000.000,00		5.935.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	652.660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	183.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	38.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	a. Indeks kualitas air (IKA)	Nilai	80	80,50	304.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	70	71,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang diangkut	Persen	28	28,60	4.063.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pelayanan informasi pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Persen	45	50	145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	875.000.000,00	12 Bulan	875.000.000,00	12 Bulan	875.000.000,00	12 Bulan	875.000.000,00	Dinas Lindup
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup	Persen	50	50	-	50	228.000.000,00	100	230.000.000,00	100	235.000.000,00	100	235.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a. Indeks kualitas air (IKA)	Nilai	80	80,50	-	81,00	150.000.000,00	81,50	175.000.000,00	82,00	200.000.000,00	82,50	225.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	70	71,00	-	72,00	-	73,00	-	74,00	-	75,00	-	
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase tersedianya luasan RTH	Persen	13,76	13,76	-	14,35	25.000.000,00	14,94	30.000.000,00	15,53	35.000.000,00	16,12	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan usaha yang wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan	Persen	50	60	-	70	25.000.000,00	80	30.000.000,00	90	35.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH)	Cakupan fasilitasi Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	100	-	100	90.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase keikutsertaan dalam lomba lingkungan hidup	Persen	50	50	-	75	145.000.000,00	75	150.000.000,00	75	150.000.000,00	75	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan pengaduan masyarakat yang direspon	Persen	100	100	-	100	14.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang diangkut	Persen	28	28,60	-	30,1	4.150.000.000,00	31,5	4.200.000.000,00	33	4.250.000.000,00	34,4	4.255.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					2.381.210.000,00		2.395.000.000,00		2.520.000.000,00		2.720.000.000,00		2.770.000.000,00	Disduk dan Catpil
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	872.000.000,00									
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	321.450.000,00									
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-									
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-									
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	8.950.000,00									
6	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	85	88	70.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Disduk dan Catpil
7	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	15.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Disduk dan Catpil
8	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Cakupan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persen	85	88	5.110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Disduk dan Catpil
9	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	85	88	39.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Disduk dan Catpil
10	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persen	82	85	1.049.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Disduk dan Catpil
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	1.200.000.000,00	12 Bulan	1.200.000.000,00	12 Bulan	1.200.000.000,00	12 Bulan	1.250.000.000,00	Disduk dan Catpil
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persen	-	85	-	87	1.050.000.000,00	90	1.100.000.000,00	95	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	Disduk dan Catpil
3	Program Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	Persen	-	100	-	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Disduk dan Catpil
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan dalam perumusan kebijakan	Persen	-	100	-	100	75.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Disduk dan Catpil
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan Profil Kependudukan	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	-	Ada	20.000.000,00	Ada	20.000.000,00	Ada	20.000.000,00	Ada	20.000.000,00	Disduk dan Catpil

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					3.970.300.000,00		8.285.000.000,00		5.040.000.000,00		4.040.000.000,00		4.040.000.000,00	Dinas Pemmas dan Desa
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	754.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	32.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	11.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kerjasama Desa	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kerjasama desa	Persen	85	88	663.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Program Peningkatan Manajemen Penataan Desa	Cakupan peningkatan manajemen penataan desa	Persen	85	88	763.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Program Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat	Cakupan pengembangan ekonomi pedesaan	Persen	85	88	780.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi Masyarakat	Cakupan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan partisipasi masyarakat	Persen	85	88	966.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	585.000.000,00	12 Bulan	600.000.000,00	12 Bulan	600.000.000,00	12 Bulan	600.000.000,00	Dinas Pemmas dan Desa
2	Program Penataan Desa	Cakupan pelayanan penataan desa	Persen	100	100	-	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas Pemmas dan Desa
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan kerjasama antar desa yang difasilitasi	Persen	-	-	-	100	-	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	Dinas Pemmas dan Desa
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	Persen	100	100	-	100	6.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	Dinas Pemmas dan Desa
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum	Persen	-	-	-	100	1.500.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	Dinas Pemmas dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					6.961.800.000,00		7.110.000.000,00		7.215.000.000,00		6.909.250.000,00		6.835.750.000,00	Dinas PP, KB, PP dan PA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	591.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	875.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	42.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga	Contraseptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	65,64	68,92	694.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	4,00	3,90	4.758.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	1.435.000.000,00	12 Bulan	1.500.000.000,00	12 Bulan	1.400.000.000,00	12 Bulan	1.400.000.000,00	Dinas PP, KB, PP dan PA
2.	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	4,00	3,90	-	3,80	220.000.000,00	3,70	240.000.000,00	3,60	249.250.000,00	3,50	250.000.000,00	Dinas PP, KB, PP dan PA
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	a. Cakupan pelayanan KB	Persen	70	75	-	80	5.225.000.000,00	85	5.225.000.000,00	90	5.000.000.000,00	100	4.925.750.000,00	Dinas PP, KB, PP dan PA
		b. Contraseptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	65,64	68,92	-	72,37	-	75,99	-	79,79	-	83,78	-	
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	a. Persentase Anggota Bina Keluarga Balita Aktif	Persen	-	-	-	80	230.000.000,00	85	250.000.000,00	90	260.000.000,00	100	260.000.000,00	Dinas PP, KB, PP dan PA
		b. Persentase Anggota Bina Keluarga Remaja Aktif	Persen	-	-	-	80	-	85	-	90	-	100	-	
		c. Persentase Anggota Bina Keluarga Lansia Aktif	Persen	-	-	-	80	-	85	-	90	-	100	-	
		d. Jumlah Kelompok UPPKS Aktif	Persen	-	-	-	80	-	85	-	90	-	100	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					3.920.620.000,00		2.967.050.000,00		2.975.000.000,00		2.990.000.000,00		3.005.000.000,00	Dishub
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	971.870.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	280.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
6	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan	Persen	50	53	1.574.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
7	Program Peningkatan Layanan Angkutan	Cakupan pelayanan angkutan umum	Persen	50	53	371.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
8	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemasangan rambu dengan kebutuhan rambu	Persen	50	53	710.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12	12	-	12	728.100.000,00	12	730.000.000,00	12	730.000.000,00	12	730.000.000,00	Dishub
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Cakupan pelayanan keselamatan lalu lintas jalan	Persen	10,50	11	-	12	2.163.650.000,00	13	2.165.000.000,00	14	2.175.000.000,00	15	2.185.000.000,00	Dishub
		b. Cakupan pelayanan angkutan jalan	Persen	30,00	32	-	34	-	36	-	38	-	40	-	
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan pelayanan keselamatan pelayaran	Persen	100	100	-	100	75.300.000,00	100	80.000.000,00	100	85.000.000,00	100	90.000.000,00	Dishub



No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					7.449.750.000,00		7.044.000.000,00		7.400.000.000,00		7.400.000.000,00		7.400.000.000,00	Dinas Kominfo
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	4.373.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	239.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan informasi dan komunikasi publik dan kehumasan	Persen	85	88	1.557.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pengembangan aplikasi informatika dan e-government	Persen	85	88	1.264.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	4.587.000.000,00	12 Bulan	4.600.000.000,00	12 Bulan	4.600.000.000,00	12 Bulan	4.600.000.000,00	Dinas Kominfo
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	a. Persentase peningkatan update konten pada website Pemkab. Tapanuli Utara	Persen	100	100	-	100	1.378.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	Dinas Kominfo
		b. Cakupan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat di kecamatan	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
3	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi	Persen	28,57	42,86	-	57,14	1.079.000.000,00	71,43	1.300.000.000,00	85,71	1.300.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	Dinas Kominfo

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					1.392.500.000,00		3.825.000.000,00		3.710.000.000,00		3.755.000.000,00		3.805.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	499.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Pertumbuhan UMKM	Persen	1,20	1,40	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase kualitas kelembagaan koperasi	Persen	19,54	21,36	615.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	530.000.000,00	12 Bulan	550.000.000,00	12 Bulan	565.000.000,00	12 Bulan	575.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	-	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen	20	20	-	22	650.000.000,00	23	500.000.000,00	24	500.000.000,00	25	500.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	a. Persentase koperasi aktif	Persen	21,51	21,51	-	21,53	120.000.000,00	21,85	135.000.000,00	22,33	145.000.000,00	22,85	165.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
		b. Persentase kualitas kelembagaan koperasi	Persen	21,36	21,36	-	22,16	-	23,09	-	24,16	-	25,34	-	
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Persen	50	55	-	60	120.000.000,00	70	135.000.000,00	80	145.000.000,00	90	165.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapatkan bantuan	Persen	-	-	-	10	515.000.000,00	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan UMKM baru	Persen	1,20	1,40	-	1,8	1.690.000.000,00	2,04	1.690.000.000,00	2,69	1.690.000.000,00	3,25	1.690.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
8	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi skala kecil	Persen	-	0,90	-	1,6	100.000.000,00	1,7	100.000.000,00	1,8	110.000.000,00	1,9	110.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					1.485.050.000,00		1.490.000.000,00		1.645.000.000,00		1.865.000.000,00		2.060.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	552.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	157.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
6	Program Pelayanan Investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	3	4,31	487.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
7	Program Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Perizinan	Cakupan pemantauan dan pengawasan perizinan	Persen	85	88	224.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
8	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Cakupan pelayanan perijinan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	606.463.200,00	12 Bulan	650.000.000,00	12 Bulan	700.000.000,00	12 Bulan	700.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Persentase pertumbuhan nilai investasi	Persen	3	4,31	-	7	290.172.000,00	10	325.000.000,00	11	400.000.000,00	12	450.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
		b. Cakupan pelayanan perijinan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Keikutsertaan pada pameran investasi	Persen	-	4	-	4	179.749.400,00	5	200.000.000,00	6	250.000.000,00	7	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ijin yang diterbitkan	Persen	-	85	-	85	172.947.900,00	87	185.000.000,00	90	200.000.000,00	93	250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase ijin yang dapat dikendalikan	Persen	-	10	-	10	138.534.800,00	15	150.000.000,00	20	165.000.000,00	25	185.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dimutakhirkan	Persen	-	75	-	75	102.132.700,00	78	135.000.000,00	80	150.000.000,00	85	175.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					2.725.050.000,00		2.950.000.000,00		3.047.500.000,00		3.130.000.000,00		3.137.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	630.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	123.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan wirausaha	Orang	30	35	789.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Program Pembinaan dan Permayarakatan Olah Raga	Cakupan pembinaan dan permasyarakatan olahraga	Persen	92,59	100,00	715.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga	Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persen	67,50	70,00	455.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	850.000.000,00	12 Bulan	892.500.000,00	12 Bulan	900.000.000,00	12 Bulan	787.500.000,00	Dinas PO
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	a. Persentase peningkatan pemuda pelopor	Persen	-	-	-	20	800.000.000,00	40	840.000.000,00	60	900.000.000,00	80	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		b. Persentase peningkatan wirausaha pemuda	Persen	-	-	-	20	-	40	-	60	-	80	-	
		c. Persentase peningkatan pemuda berprestasi	Persen	-	-	-	20	-	40	-	60	-	80	-	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	a. Perolehan medali tingkat nasional	Medali	-	75	-	80	1.000.000.000,00	85	1.000.000.000,00	90	1.000.000.000,00	95	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		b. Perolehan medali tingkat provinsi	Medali		75	-	80	-	85	-	90	-	95	-	
		c. Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persen	-	-	-	72,50	-	75	-	77,50	-	80	-	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kepramukaan	Persen	-	-	-	22	300.000.000,00	44	315.000.000,00	66	330.000.000,00	88	350.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					408.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00	Dinas Kominfo
1	Program Penyelenggaraan Persandian dan Statistik Sektoral	Cakupan pelayanan keamanan informasi	Persen	85	88	408.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data sektoral	Persen	100	100	-	100	345.000.000,00	100	345.000.000,00	100	345.000.000,00	100	345.000.000,00	Dinas Kominfo

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					-		65.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	Dinas Kominfo
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan pelayanan keamanan informasi	Persen	100	100	-	100	65.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	Dinas Kominfo

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					764.712.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1 Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pengembangan nilai budaya	Persen	85	88	764.712.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
	1 Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	Persen	20	20	-	20	500.000.000,00	30	500.000.000,00	40	500.000.000,00	50	500.000.000,00	Dinas Pendidikan



No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					1.072.500.000,00		1.121.170.000,00		1.400.000.000,00		1.500.000.000,00		1.550.000.000,00	Dinas Perpustakaan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	495.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan
6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan di kecamatan	Jumlah	3	5	537.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	551.670.000,00	12 Bulan	700.000.000,00	12 Bulan	750.000.000,00	12 Bulan	800.000.000,00	Dinas Perpustakaan
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemenuhan sarana prasarana perpustakaan	Persen	-	45	-	45	569.500.000,00	65	700.000.000,00	85	750.000.000,00	100	750.000.000,00	Dinas Perpustakaan

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					99.500.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Perpustakaan
1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Cakupan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persen	85	88	99.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah	Persen	-	-	-	20	100.000.000,00	25	250.000.000,00	30	250.000.000,00	35	250.000.000,00	Dinas Perpustakaan

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
III	Urusan Pemerintahan Pilihan					43.479.778.000,00		35.694.402.000,00		35.929.500.000,00		36.192.000.000,00		36.525.000.000,00	
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					2.664.000.000,00		3.640.000.000,00		3.585.000.000,00		3.600.000.000,00		3.625.000.000,00	Dinas Ketapang dan Perikanan
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Capaian produksi perikanan	Ton	2.071	2.100	2.664.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketapang dan Perikanan
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Capaian produksi perikanan	Ton	-	-	-	2.100	3.570.000.000,00	2.150	3.500.000.000,00	2.200	3.500.000.000,00	2.300	3.500.000.000,00	Dinas Ketapang dan Perikanan
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan kelompok pengolah hasil perikanan	Kelompok	5	5	-	10	70.000.000,00	15	85.000.000,00	20	100.000.000,00	25	125.000.000,00	Dinas Ketapang dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					12.862.581.000,00		2.028.402.000,00		2.050.000.000,00		2.065.000.000,00		2.080.000.000,00	Dinas Pariwisata
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	741.416.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	90.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	a. Persentase event pariwisata yang dilaksanakan	Persen	100	100	1.941.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
		b. Persentase peningkatan PAD sektor wisata	Persen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
7	Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan	Persen	10	12	1.182.365.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan pembenahan destinasi pariwisata	Persen	21	30	8.892.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12	12	-	12	900.000.000,00	12	900.000.000,00	12	900.000.000,00	12	900.000.000,00	Dinas Pariwisata
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan pembenahan destinasi pariwisata	Persen	21	30	-	36	508.402.000,00	40	500.000.000,00	46	500.000.000,00	50	500.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase event pariwisata yang dilaksanakan	Persen	100	100	-	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas Pariwisata
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan	Persen	-	-	-	15	120.000.000,00	19	150.000.000,00	23	165.000.000,00	31	180.000.000,00	Dinas Pariwisata

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					22.489.025.000,00		26.475.000.000,00		26.667.500.000,00		26.825.000.000,00		27.045.000.000,00	Dinas Pertanian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	1.378.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	875.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
6	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Holtikultura	Produksi dan produktivitas hortikultura				1.424.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
		- Cabai merah	Ton	9.298	6.760		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kw/Ha	55,35	55,35		-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Bawang merah	Ton	632,15	575		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kw/Ha	74,37	74,37		-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Bawang putih	Ton	0	250		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kw/Ha	0	40		-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Jeruk	Ton	3304,21	3600		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kw/Ha	145,56	145,57		-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Nenas	Ton	34974,38	34865		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kw/Ha	179,15	179,21		-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Durian	Ton	5903,43	5823		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kw/Ha	96,73	96,75		-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Mangga	Ton	1237,31	1199		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kw/Ha	76,78	76,81		-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Holtikultura	Cakupan penerapan teknologi hortikultura	Persen	50	55	200.155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Holtikultura	Cakupan pencegahan dan penanggulangan hama penyakit hortikultura	Persen	70	72	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
9	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Perkebunan	Produksi dan produktivitas perkebunan	Persen			630.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
		- Kopi arabika	Ton	11.833,43	11.600		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kg/Ha	981,05	1,108		-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Kakao	Ton	1.774,95	1.450		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kg/Ha	674,5	577,37		-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Cakupan penerapan teknologi perkebunan	Persen	50	55	240.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Perkebunan	Cakupan pencegahan dan penanggulangan hama penyakit perkebunan	Persen	70	72	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Cakupan penanggulangan penyakit ternak	Persen	85	88	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
13	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Capaian produksi daging	Ton	1.568	1.659	2.030.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
14	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan penerapan teknologi peternakan di masyarakat	Persen	85	88	135.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
15	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Cakupan komoditi hasil pertanian yang dipasarkan	Persen	93	94	234.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
16	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persentase penyuluh pertanian yang sesuai dengan kompetensi	Persen	0,35	0,37	3.622.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
17	Program Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Petani	Persentase kelompok tani dibina	Persen	58	59	225.000.000,00									
18	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Cakupan kecukupan alsintan terhadap kebutuhan	Persen	19	20	8.279.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
19	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Produksi dan produktivitas pangan	Persen			675.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
		- Padi sawah	Ton	160.600	160.685		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kw/Ha	59,25	59,28		-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Padi ladang	Ton	10.000	10.500		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kw/Ha	26,5	26,53		-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Jagung	Ton	25.150	26.000		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kw/Ha	49,5	49,54		-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan	Cakupan penyerapan teknologi pertanian di masyarakat	Persen	85	88	950.000.000,00									Dinas Pertanian
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman Pangan	Cakupan penanggulangan penyakit tanaman pangan	Persen	85	88	75.000.000,00									Dinas Pertanian
22	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian	Luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B	Hektar	-	1.233	400.000.000,00									Dinas Pertanian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	3.000.000.000,00	12 Bulan	3.000.000.000,00	12 Bulan	3.000.000.000,00	12 Bulan	3.000.000.000,00	Dinas Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan						15.675.000.000,00		15.675.000.000,00		15.675.000.000,00		15.675.000.000,00	Dinas Pertanian
		- Padi sawah	Ton	160.600	160.685	-	160.790	-	160.898	-	161.087	-	161.142	-	
			Kw/Ha	59,25	59,28	-	59,32	-	59,36	-	59,4	-	59,45	-	
		- Padi ladang	Ton	10.000	10.500	-	11.000	-	11.500	-	12.000	-	12.500	-	
			Kw/Ha	26,5	26,53	-	26,57	-	26,61	-	26,65	-	26,7	-	
		- Jagung	Ton	25.150	26.000	-	27.000	-	28.000	-	29.000	-	30.000	-	
			Kw/Ha	49,5	49,54	-	49,58	-	49,63	-	49,69	-	49,72	-	
		b. Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura				-		-		-		-		-	
		- Cabe merah	Ton		6.760	-	6770	-	6780	-	6790	-	8.000	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Kw/Ha		55,35	-	55,35	-	55,35	-	55,35	-	55,35	-	
		- Bawang merah	Ton		575	-	585	-	595	-	605	-	610	-	
			Kw/Ha		74,37	-	74,37	-	74,37	-	74,37	-	74,37	-	
		- Bawang putih	Ton		250	-	275	-	300	-	325	-	350	-	
			Kw/Ha		40,00	-	40	-	40	-	40	-	40	-	
		- Jeruk	Ton		3.304	-	3.600	-	3.600	-	3.600	-	3.600	-	
			Kw/Ha		145,56	-	145,56	-	145,60	-	145,61	-	145,63	-	
		- Nenas	Ton		34.978	-	34.865	-	34.865	-	34.865	-	34.865	-	
			Kw/Ha		179,15	-	179,21	-	179,25	-	179,27	-	179,30	-	
		- Durian	Ton		5.903	-	5.823	-	5.823	-	5.823	-	5.823	-	
			Kw/Ha		96,73	-	96,75	-	96,77	-	96,78	-	96,78	-	
		- Mangga	Ton		1.237	-	1.199	-	1.199	-	1.199	-	1.199	-	
			Kw/Ha		76,78	-	76,81	-	76,84	-	76,85	-	76,86	-	
		c. Cakupan penerapan teknologi hortikultura	Persen	50	55,00	-	60	-	65	-	70	-	75	-	
		d. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan				-		-		-		-		-	
		- Kopi arabica	Ton		11.600	-	11.700	-	11.800	-	11.900	-	12.000	-	
			Kg/Ha		1.108	-	1.131	-	1.154	-	1.177	-	1.200	-	
		- Kakao	Ton		1.450	-	1.550	-	1.650	-	1.750	-	1.800	-	
			Kg/Ha		577,37	-	577,52	-	577,71	-	578,01	-	578,16	-	
		e. Cakupan penerapan teknologi tanaman perkebunan	Persen	50	55,00	-	60	-	65	-	70	-	75	-	
		f. Peningkatan Populasi Ternak				-		-		-		-		-	
		- Kerbau	Ekor		9.640	-	9.680	-	9.720	-	9.760	-	9.800	-	
		- Babi	Ekor		65.156	-	68.000	-	71.000	-	73.000	-	75.000	-	
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	a. Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	38	39	-	40	3.000.000.000,00	42	3.000.000.000,00	44	3.000.000.000,00	46	3.000.000.000,00	Dinas Pertanian
		b. Luas lahan yang dipetakan sebagai LP2B	Hektar	-	1.233	-	2.672	-	6.372	-	9.340	-	14.025	-	
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	70	75	-	80	950.000.000,00	82	950.000.000,00	84	950.000.000,00	86	950.000.000,00	Dinas Pertanian
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	a. Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	82	84	-	85	700.000.000,00	86	735.000.000,00	87	735.000.000,00	88	735.000.000,00	Dinas Pertanian
		b. Cakupan pencegahan dan penanggulangan hama penyakit perkebunan	Persen	70	72	-	74	-	76	-	78	-	80	-	Dinas Pertanian
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan izin usaha pertanian	Persen	-	-	-	10	150.000.000,00	12	157.500.000,00	14	165.000.000,00	16	185.000.000,00	Dinas Pertanian
7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani dibina	Persen	58	59	-	60	3.000.000.000,00	62	3.150.000.000,00	64	3.300.000.000,00	66	3.500.000.000,00	Dinas Pertanian

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan					265.000.000,00		-		-		-		-	Dinas Lindup
1	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase pengurangan lahan kritis	Persen	85	88	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Capaian peningkatan perlindungan dan pelestarian ekosistem	Persen	20	22	185.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	



No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					4.619.172.000,00		3.271.000.000,00		3.305.000.000,00		3.330.000.000,00		3.355.000.000,00	Dinas Perindag
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	830.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	13.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase pengembangan usaha perdagangan	Persen	85	88	100.022.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindag
7	Program Pengembangan, Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional	Cakupan peningkatan pasar tradisional (akumulatif)	Persen	1	1	3.425.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindag
8	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	60	62	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindag
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	855.000.000,00	12 Bulan	855.000.000,00	12 Bulan	855.000.000,00	12 Bulan	855.000.000,00	Dinas Perindag
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang tergolong baik	Persen	9	10	-	11	1.496.000.000,00	12	1.500.000.000,00	13	1.500.000.000,00	14	1.500.000.000,00	Dinas Perindag
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pelaksanaan monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	50	50	-	60	270.000.000,00	65	300.000.000,00	70	325.000.000,00	80	350.000.000,00	Dinas Perindag
4	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UUTP yang ditera/tera ulang	Persen	50	55	-	60	150.000.000,00	65	150.000.000,00	70	150.000.000,00	75	150.000.000,00	Dinas Perindag
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan pelaksanaan event promosi	Persen	20	25	-	30	500.000.000,00	40	500.000.000,00	50	500.000.000,00	60	500.000.000,00	Dinas Perindag

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					560.000.000,00		260.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00	Dinas Perindag
1	Program Pengembangan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	20	20	560.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	a. Persentase pertumbuhan IKM	Persen	0,0010	0,0022	-	0,0027	210.000.000,00	0,0032	250.000.000,00	0,003202	300.000.000,00	0,0035	350.000.000,00	Dinas Perindag
		b. Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	-	-	-	25	-	30	-	40	-	50	-	
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase informasi IKM	Persen	-	-	-	30	50.000.000,00	40	50.000.000,00	50	50.000.000,00	60	50.000.000,00	Dinas Perindag

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)		
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		20.000.000,00	Dinas Naker	
1	Program Pembinaan Transmigrasi	Persentase Transmigrasi Swakarsa	Persen	85	88	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina	Persen	-	-	-	10	20.000.000,00	15	22.000.000,00	20	22.000.000,00	25	20.000.000,00	Dinas Naker	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					47.909.705.000,00		46.488.999.000,00		47.433.300.000,00		47.433.300.000,00		46.496.000.000,00	
4.1	Sekretariat Daerah					32.378.315.000,00		31.988.999.000,00		32.933.300.000,00		32.933.300.000,00		31.996.000.000,00	Sekretariat Daerah
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	5.470.300.000,00									
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	8.867.000.000,00									
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-									
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-									
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	515.100.000,00									
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Wakil KDH	Cakupan kinerja pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH	Persen	85	88	6.421.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
7	Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah	Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah	Persen	85	88	678.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
8	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintah	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	Persen	85	88	778.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hukum	Persen	85	88	1.382.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
10	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Persen	85	88	691.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
11	Program Peningkatan BUMD dan Lembaga keuangan	Jumlah BUMD dan Lembaga Keuangan	Unit	3	5	310.945.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
12	Program Reformasi Birokrasi	Cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi	Persen	85	88	710.810.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
13	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persen	85	88	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
14	Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Persen	85	88	973.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
15	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Persen	85	88	1.086.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
16	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Cakupan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	85	88	1.740.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase kualitas pemeliharaan gedung/kantor dan kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati serta kendaraan pool	Persen	85	88	2.091.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
18	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan serta Kebijakan Bupati	Persentase Kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa	Persen	85	88	245.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	Persentase Pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol	Persen	85	88	315.110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	13.242.999.000,00	12 Bulan	13.250.000.000,00	12 Bulan	13.250.000.000,00	12 Bulan	13.250.000.000,00	Sekretariat Daerah
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan	Persen	85	88	-	90	3.750.000.000,00	92	3.937.500.000,00	95	3.937.500.000,00	100	3.750.000.000,00	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
		b. Persentase capaian evaluasi kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		c. Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		d. Persentase fasilitasi bantuan hukum	Persen	90	90	-	95	-	95	-	100	-	100	-	
		e. Persentase kerjasama daerah yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	Persen	80	80	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	a. Persentase capaian kinerja evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persen	100	100	-	100	3.826.000.000,00	100	4.017.300.000,00	100	4.017.300.000,00	100	3.826.000.000,00	Sekretariat Daerah
		b. Persentase realisasi kegiatan Perangkat Daerah sesuai APBD	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		c. Cakupan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	85	88	-	90	-	92	-	95	-	100	-	
4	Program Administrasi Umum	a. Persentase pelaksanaan administrasi umum Sekretariat Daerah	Persen	100	100	-	100	11.170.000.000,00	100	11.728.500.000,00	100	11.728.500.000,00	100	11.170.000.000,00	Sekretariat Daerah
		b. Persentase OPD yang memiliki nilai laporan kinerja kategori baik	Persen	40	55	-	65	-	75	-	90	-	100	-	
		c. Nilai indeks kepuasan masyarakat tingkat kabupaten	Nilai	81,15	82	-	83	-	84	-	85	-	86	-	
		d. Persentase Pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol	Persen	85	88	-	90	-	92	-	95	-	100	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
		e. Persentase Kegiatan Pimpinan yang dimuat di media massa	Persen	85	88	-	90	-	92	-	95	-	100	-	
		f. Persentase pelaksanaan perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)		
4.2	Sekretariat DPRD					15.531.390.000,00		14.500.000.000,00		14.500.000.000,00		14.500.000.000,00		14.500.000.000,00	Sekretariat DPRD	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	8.592.175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	453.575.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	677.290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Persen	85	88	4.230.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
7	Program Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah	Cakupan penetapan dokumen perencanaan, rekomendasi dan pengawasan kebijakan pembangunan	Persen	85	88	1.563.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	4.041.472.800,00	12 Bulan	4.041.472.800,00	12 Bulan	4.041.472.800,00	12 Bulan	4.041.472.800,00	Sekretariat DPRD	
2	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi DPRD	Persen	100	100	-	100	3.272.505.752,00	100	3.272.505.752,00	100	3.272.505.752,00	100	3.272.505.752,00	Sekretariat DPRD	
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	100	-	100	7.186.021.448,00	100	7.186.021.448,00	100	7.186.021.448,00	100	7.186.021.448,00	Sekretariat DPRD	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
V.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					18.361.520.000,00		16.807.215.000,00		19.290.296.000,00		18.890.875.000,00		18.168.500.000,00	
5.1	Perencanaan					3.494.977.000,00		3.750.000.000,00		4.027.500.000,00		3.995.000.000,00		3.995.000.000,00	Bappeda
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	708.391.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	130.588.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator sasaran daerah	Persen	85	89	902.186.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
7	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Kesra	Persentase capaian target program bidang pemerintahan, sosial dan kesra	Persen	85	89	479.340.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
8	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah	Persentase capaian program yang memenuhi target bidang perekonomian daerah	Persen	85	89	487.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
9	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase capaian program yang memenuhi target bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persen	85	89	482.882.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
10	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian program perencanaan pembangunan daerah	Persen	85	89	292.965.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	900.000.000,00	12 Bulan	945.000.000,00	12 Bulan	945.000.000,00	12 Bulan	945.000.000,00	Bappeda
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD setiap tahun	Persen	100	100	-	100	1.200.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.300.000.000,00	Bappeda
3	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketercapaian program perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	-	100	650.000.000,00	100	682.500.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	Bappeda
4	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase ketercapaian program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Persen	100	100	-	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	Bappeda
5	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketercapaian program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	100	-	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	Bappeda



No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
5.2	Keuangan					8.174.585.000,00		7.667.215.000,00		7.973.643.000,00		7.983.500.000,00		7.983.500.000,00	BPKPAD
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	2.227.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	32.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan	Tersedianya peraturan daerah tentang APBD tepat waktu	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	1.958.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPAD
7	Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan	Persen	85	89	181.030.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPAD
8	Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	Cakupan Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	Persen	85	89	646.695.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPAD
9	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Cakupan Peningkatan Pendapatan Daerah	Persen	85	89	859.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPAD
10	Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Cakupan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persen	85	89	508.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPAD
11	Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah dan Investasi Pemerintah Daerah	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah dan Investasi Pemerintah Daerah	Persen	85	89	1.510.640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPAD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	2.041.000.000,00	12 Bulan	2.122.364.000,00	12 Bulan	2.125.000.000,00	12 Bulan	2.125.000.000,00	BPKPAD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD	Persen	100	100	-	100	2.713.365.000,00	100	2.821.907.000,00	100	2.825.000.000,00	100	2.825.000.000,00	BPKPAD
		b. Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	Tepat waktu/ terlambat	Tepat waktu	Tepat waktu	-	Tepat waktu	-	Tepat waktu	-	Tepat waktu	-	Tepat waktu	-	
		c. Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai/ tidak sesuai	Sesuai	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	
		d. Tersedianya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/aset daerah	Persen	100	100	-	100	1.491.445.000,00	100	1.551.107.000,00	100	1.555.000.000,00	100	1.555.000.000,00	BPKPAD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD terhadap target	Persen	100	100	-	100	1.421.405.000,00	100	1.478.265.000,00	100	1.478.500.000,00	100	1.478.500.000,00	BPKPAD

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
5.3	Kepegawaian					5.815.887.000,00		4.130.000.000,00		5.489.153.000,00		5.112.375.000,00		4.890.000.000,00	BKD
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	564.195.000,00									
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	62.730.000,00									
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-									
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	2.117.980.000,00									
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	14.110.000,00									
6	Program Pengembangan Aparatur	Capaian Pengembangan Aparatur	Persen	75	80	546.220.000,00									
7	Program Pendayagunaan Aparatur	Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	Persen	75	80	535.202.000,00									
8	Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur	Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	Persen	75	80	1.975.450.000,00									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	2.570.000.000,00	12 Bulan	2.500.000.000,00	12 Bulan	2.500.000.000,00	12 Bulan	2.390.000.000,00	BKD
2	Program Kepegawaian Daerah	a. Persentase tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	Persen	100	100	-	100	1.560.000.000,00	100	2.989.153.000,00	100	2.612.375.000,00	100	2.500.000.000,00	BKD
		b. Persentase layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
5.4	Pendidikan dan Pelatihan					-		760.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00	BKD
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Persentase aparatur mengikuti diklat struktural	Persen	20	22	-	23	760.000.000,00	24	1.000.000.000,00	25	1.000.000.000,00	26	500.000.000,00	BKD
		b. Persentase aparatur mengikuti diklat teknis	Persen	10	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
5.5	Penelitian dan Pengembangan					876.071.000,00		500.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00	Bappeda
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kajian dan penelitian yang ditindaklanjuti	Persen	85	85	876.071.000,00	-	-	-	-	-	-	0	-	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Persentase hasil kajian dan penelitian yang dimanfaatkan	Persen	85	85	-	85	500.000.000,00	85	800.000.000,00	85	800.000.000,00	85	800.000.000,00	Bappeda
		b. Nilai Indeks Inovasi Daerah	Nilai	NA	NA	-	301-500	-	501-650	-	651-800	-	801-1000	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					5.953.064.000,00		5.859.329.000,00		5.859.329.000,00		5.875.000.000,00		5.875.000.000,00	
6.1	Inspektorat Daerah					5.953.064.000,00		5.859.329.000,00		5.859.329.000,00		5.875.000.000,00		5.875.000.000,00	Inspektorat
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	1.109.047.000,00									Inspektorat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	1.078.709.000,00									Inspektorat
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	70	72	-									Inspektorat
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	70	72	1.032.534.000,00									Inspektorat
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	338.995.000,00									Inspektorat
6	Program Peningkatan sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Opini BPK Laporan Keuangan Kabupaten Tapanuli Utara : WTP	Opini	WTP	WTP	1.093.144.000,00									Inspektorat
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Maturitas SPIP Kabupaten Tapanuli Utara : level III	Nilai	Level II	Level III	434.450.000,00									Inspektorat
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Progres RAD Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Tapanuli Utara : 80%	Persen	70	75	866.185.000,00									Inspektorat
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	2.158.819.100,00	12 Bulan	2.158.819.100,00	12 Bulan	2.165.000.000,00	12 Bulan	2.165.000.000,00	Inspektorat
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	a. Level kapabilitas APIP	Level	Level II	Level III	-	Level III	2.490.167.700,00	Level III	2.490.167.700,00	Level III	2.495.000.000,00	Level III	2.495.000.000,00	Inspektorat
		b. Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Maturitas SPIP	Level	Level II	Level III	-	Level III	1.210.342.200,00	Level III	1.210.342.200,00	Level III	1.215.000.000,00	Level III	1.215.000.000,00	Inspektorat

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
VII	Unsur Kewilayahan					17.701.300.000,00		17.832.500.000,00		18.071.575.000,00		18.071.575.000,00		17.992.750.000,00	
7.1	Kecamatan					7.878.300.000,00		7.900.000.000,00		7.922.500.000,00		7.922.500.000,00		7.900.000.000,00	
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	286.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Tarutung
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Tarutung
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Tarutung
	4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Tarutung
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Tarutung
	6 Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	105.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Tarutung
	7 Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kelurahan	Persen	60	65	7.450.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Tarutung
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	340.000.000,00	12 Bulan	357.000.000,00	12 Bulan	357.000.000,00	12 Bulan	340.000.000,00	Kantor Kecamatan Tarutung
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	110.000.000,00	75	115.500.000,00	80	115.500.000,00	85	110.000.000,00	Kantor Kecamatan Tarutung
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	60	65	-	70	7.450.000.000,00	75	7.450.000.000,00	80	7.450.000.000,00	85	7.450.000.000,00	Kantor Kecamatan Tarutung

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan				416.000.000,00		430.000.000,00		451.500.000,00		451.500.000,00		451.500.000,00		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	198.000.000,00	100	-	100	-	100	-	100	-	Kantor Kecamatan Siatas Barita
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	45.000.000,00	75	-	78	-	80	-	85	-	Kantor Kecamatan Siatas Barita
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	90	-	92	-	95	-	100	-	Kantor Kec. Siatas Barita
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	80	-	82	-	85	-	85	-	Kantor Kecamatan Siatas Barita
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	8.000.000,00	90	-	92	-	95	-	100	-	Kantor Kecamatan Siatas Barita
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kelurahan	Persen	60	65	165.000.000,00		-		-		-		-	Kantor Kecamatan Siatas Barita
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	260.000.000,00	12 Bulan	273.000.000,00	12 Bulan	273.000.000,00	12 Bulan	273.000.000,00	Kantor Kecamatan Siatas Barita
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	170.000.000,00	75	178.500.000,00	80	178.500.000,00	85	178.500.000,00	Kantor Kecamatan Siatas Barita

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan					365.000.000,00		380.000.000,00		416.000.000,00		416.000.000,00		416.000.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	170.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Adiankoting
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Adiankoting
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Adiankoting
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Adiankoting
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Adiankoting
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kelurahan	Persen	60	65	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Adiankoting
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	220.000.000,00	12 Bulan	231.000.000,00	12 Bulan	231.000.000,00	12 Bulan	231.000.000,00	Kantor Kecamatan Adiankoting
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	160.000.000,00	75	185.000.000,00	80	185.000.000,00	85	185.000.000,00	Kantor Kecamatan Adiankoting



No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan					1.446.000.000,00		1.445.000.000,00		1.464.000.000,00		1.464.000.000,00		1.464.000.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	185.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Sipoholon
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	42.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Sipoholon
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Sipoholon
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Sipoholon
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Sipoholon
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Sipoholon
7	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kelurahan	Persen	60	65	1.065.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Sipoholon
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	230.000.000,00	12 Bulan	241.500.000,00	12 Bulan	241.500.000,00	12 Bulan	241.500.000,00	Kantor Kecamatan Sipoholon
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	150.000.000,00	75	157.500.000,00	80	157.500.000,00	85	157.500.000,00	Kantor Kecamatan Sipoholon
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	60	65	-	70	1.065.000.000,00	75	1.065.000.000,00	80	1.065.000.000,00	85	1.065.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipoholon

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan					1.451.000.000,00		1.455.000.000,00		1.474.500.000,00		1.474.500.000,00		1.474.500.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	185.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Julu
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Julu
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Pahae Julu
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Julu
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Julu
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Julu
7	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kelurahan	Persen	60	65	1.065.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Julu
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	240.000.000,00	12 Bulan	252.000.000,00	12 Bulan	252.000.000,00	12 Bulan	252.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	150.000.000,00	75	157.500.000,00	80	157.500.000,00	85	157.500.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	60	65	-	70	1.065.000.000,00	75	1.065.000.000,00	80	1.065.000.000,00	85	1.065.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan					1.445.000.000,00		1.450.000.000,00		1.469.250.000,00		1.469.250.000,00		1.469.250.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Jae
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Jae
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Pahae Jae
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Jae
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Jae
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kelurahan	Persen	60	65	1.065.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pahae Jae
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	220.000.000,00	12 Bulan	231.000.000,00	12 Bulan	231.000.000,00	12 Bulan	231.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	165.000.000,00	75	173.250.000,00	80	173.250.000,00	85	173.250.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	60	65	-	70	1.065.000.000,00	75	1.065.000.000,00	80	1.065.000.000,00	85	1.065.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan				355.000.000,00		375.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Purbatua
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Purbatua
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Purbatua
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Purbatua
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Purbatua
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Purbatua
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	210.000.000,00	12 Bulan	235.000.000,00	12 Bulan	235.000.000,00	12 Bulan	235.000.000,00	Kantor Kecamatan Purbatua
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	165.000.000,00	75	185.000.000,00	80	185.000.000,00	85	185.000.000,00	Kantor Kecamatan Purbatua

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan					386.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		400.000.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Simangumban
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Simangumban
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Simangumban
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Simangumban
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Simangumban
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Simangumban
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	262.500.000,00	12 Bulan	262.500.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	Kantor Kec. Simangumban
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	150.000.000,00	75	157.500.000,00	80	157.500.000,00	85	150.000.000,00	Kantor Kec. Simangumban

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan					411.000.000,00		411.000.000,00		423.000.000,00		423.000.000,00		411.000.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	185.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Sipahutar
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Sipahutar
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Sipahutar
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Sipahutar
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Sipahutar
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Sipahutar
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	246.000.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	246.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipahutar
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	165.000.000,00	75	173.000.000,00	80	173.000.000,00	85	165.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipahutar

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan					440.000.000,00		435.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		435.000.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	195.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pangaribuan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pangaribuan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Pangaribuan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pangaribuan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pangaribuan
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	185.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pangaribuan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	260.000.000,00	12 Bulan	260.000.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	Kantor Kecamatan Pangaribuan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	185.000.000,00	75	190.000.000,00	80	190.000.000,00	85	185.000.000,00	Kantor Kecamatan Pangaribuan

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan					373.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		400.000.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	185.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Garoga
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Garoga
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Garoga
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Garoga
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Garoga
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Garoga
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	262.500.000,00	12 Bulan	262.500.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	Kantor Kecamatan Garoga
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	150.000.000,00	75	157.500.000,00	80	157.500.000,00	85	150.000.000,00	Kantor Kecamatan Garoga



No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan					1.501.500.000,00		1.501.500.000,00		1.523.325.000,00		1.523.325.000,00		1.501.500.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	235.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Siborongborong
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Siborongborong
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Siborongborong
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Siborongborong
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Siborongborong
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kelurahan	Persen	60	65	1.065.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Siborongborong
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	271.500.000,00	12 Bulan	285.075.000,00	12 Bulan	285.075.000,00	12 Bulan	271.500.000,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	165.000.000,00	75	173.250.000,00	80	173.250.000,00	85	165.000.000,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	60	65	-	70	1.065.000.000,00	75	1.065.000.000,00	80	1.065.000.000,00	85	1.065.000.000,00	Kantor Kecamatan Siborongborong

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan				395.000.000,00		400.000.000,00		412.500.000,00		412.500.000,00		400.000.000,00		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	185.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pagaran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pagaran
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Pagaran
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pagaran
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pagaran
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Pagaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	262.500.000,00	12 Bulan	262.500.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	Kantor Kecamatan Pagaran
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	150.000.000,00	75	150.000.000,00	80	150.000.000,00	85	150.000.000,00	Kantor Kecamatan Pagaran

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan					403.500.000,00		415.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		415.000.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Parmonangan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Parmonangan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Parmonangan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Parmonangan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Parmonangan
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Parmonangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	Kantor Kecamatan Parmonangan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	165.000.000,00	75	155.000.000,00	80	155.000.000,00	85	165.000.000,00	Kantor Kecamatan Parmonangan

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
7.1	Kecamatan					435.000.000,00		435.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		435.000.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Muara
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Muara
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kec. Muara
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Muara
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Muara
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persen	60	65	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Muara
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	285.000.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	285.000.000,00	Kantor Kecamatan Muara
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	65	-	70	150.000.000,00	75	150.000.000,00	80	150.000.000,00	85	150.000.000,00	Kantor Kecamatan Muara

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
VIII	Unsur Pemerintahan Umum					2.008.870.000,00		2.008.870.000,00		2.015.000.000,00		2.015.000.000,00		2.015.000.000,00	
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik					2.008.870.000,00		2.008.870.000,00		2.015.000.000,00		2.015.000.000,00		2.015.000.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	520.585.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbangpol
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	70	72	75.915.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbangpol
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbangpol
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	75	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbangpol
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Persen	85	88	16.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbangpol
6	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Cakupan Peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	Persen	85	89	1.395.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbangpol
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	600.000.000,00	12 Bulan	600.000.000,00	12 Bulan	600.000.000,00	12 Bulan	600.000.000,00	Badan Kesbangpol
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah konflik SARA	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Tidak ada	500.000.000,00	Tidak ada	500.000.000,00	Tidak ada	500.000.000,00	Tidak ada	500.000.000,00	Badan Kesbangpol
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada	Persen	74,49	-	-	-	165.000.000,00	-	170.000.000,00	-	170.000.000,00	85	170.000.000,00	Badan Kesbangpol
		2. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pileg	Persen	75,73		-	-	-	-	-	-	-	85	-	
		3. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pilpres	Persen	75,82	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Fasilitasi layanan Ormas	Persen	100	100	-	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Badan Kesbangpol
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Kasus penyalahgunaan narkoba	Kasus	15	13	-	12	150.000.000,00	10	150.000.000,00	8	150.000.000,00	5	150.000.000,00	Badan Kesbangpol
		2. Konflik antar umat beragama dan penghayat kepercayaan	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										OPD
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian/ penanganan konflik sosial di masyarakat	Persen	100	100	-	100	443.870.000,00	100	445.000.000,00	100	445.000.000,00	100	445.000.000,00	Badan Kesbangpol
TOTAL BELANJA LANGSUNG.....						555.411.553.500,00		545.849.000.000,00		552.496.000.000,00		551.965.000.000,00		549.293.000.000,00	

## **BAB VIII**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau capaian indikator kinerja daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan OPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan OPD.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 - 2024 yang telah direncanakan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun dengan mendasarkan pada capaian masing-masing indikator kinerja selama kurun waktu tahun 2014-2019. Indikator kinerja ini menjadi target bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah. Indikator kinerja dipilih menjadi indikator kinerja Bupati Tapanuli Utara, Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Tapanuli Utara dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Indikator kinerja ini menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah yang akan diacu setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD. Pencapaian indikator kinerja daerah ini menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut.



**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Bupati Tapanuli Utara Tahun 2019-2024**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,35-4,45	4,45-4,55	4,55-4,65	4,65-4,75	4,75-4,85	4,85-4,90	4,35-4,45
2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Rp miliar	7.296,78	7.876,87	8.511,06	9.204,72	9.918,08	10.701,61	11.557,74
3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Rp miliar	5.510,19	5755,39	6017,34	6297,14	6596,26	6919,48	7265,45
4	Laju Inflasi	Persen	2,22	3,50	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00
5	Pendapatan perkapita	Rp juta	24,33	26,08	27,99	30,06	32,16	34,46	36,96
6	Indeks Gini	Nilai	0,310	0,305	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
7	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,91	73,22	73,73	74,24	74,75	75,26	75,77
8	Angka kemiskinan	Persen	9,75	9,48	9,25	9,00	8,75	8,50	8,25
9	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,65	9,72	9,76	9,98	10,02	10,24	10,28
10	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,11	68,46	68,61	68,77	68,92	69,07	69,23
11	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,83	1,78	1,72	1,67	1,61	1,55	1,50
12	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	82,1	85	86	87	88	89	90
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,12	70,12	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22
14	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	CC	C	B	B	BB	BB	A

**Tabel 8.2**  
**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,35-4,45	4,45-4,55	4,55-4,65	4,65-4,75	4,75-4,85	4,85-4,90	4,35-4,45
2	Angka kemiskinan	Persen	9,75	9,48	9,25	9,00	8,75	8,50	8,25
3	Indeks Gini	Nilai	0,310	0,305	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
4	Pendapatan perkapita	Rp juta	24,33	26,08	27,99	30,06	32,16	34,46	36,96
5	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	82,1	85	86	87	88	89	90
6	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,65	9,72	9,76	9,98	10,02	10,24	10,28
7	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,91	73,22	73,73	74,24	74,75	75,26	75,77
8	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,11	68,46	68,61	68,77	68,92	69,07	69,23
9	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,83	1,78	1,72	1,67	1,61	1,55	1,50
10	Jumlah wisatawan	Orang	153.000	155.000	158.000	163.000	165.000	170.000	175.000
11	Irigasi kondisi baik	Persen	67,42	67,62	67,64	67,66	67,68	67,7	67,72
12	Panjang jalan dalam kondisi mantap dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Persen	55,8	56,00	56,54	57,2	57,85	58,5	61,03
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,12	70,12	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22
14	Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Persen	26,40	28,83	31,26	33,69	36,12	38,55	40,98
15	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	80,6	80,8	81	82	83	85	87
16	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	0	0	0	0	1	2
17	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8,19	10,00	10,60	10,95	11,34	11,73	12,11
19	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	CC	C	B	B	BB	BB	A

Tabel 8.3

Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>I</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>									
<b>1.1</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>									
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	%	4,35-4,45	4,45-4,55	4,55-4,65	4,65-4,75	4,75-4,85	4,85-4,90	4,35-4,45	5,00
1.1.2	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	Persen	45,28	44,90	44,52	44,15	43,75	43,35	43,00	43,00
1.1.3	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Persen	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1.1.4	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	2,70	2,85	3,00	3,10	3,25	3,40	3,50	3,50
1.1.5	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	Persen	14,47	14,08	14,39	14,71	15,03	15,35	15,65	15,65
1.1.6	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	2,21	2,31	2,39	2,48	2,56	2,64	2,75	2,75
1.1.7	Laju Inflasi	Persen	2,22	3,50	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00
1.1.8	Pendapatan perkapita	Rp juta	24,33	26,08	27,99	30,06	32,16	34,46	36,96	36,96
1.1.9	Angka kemiskinan	Persen	9,75	9,50	9,25	9,00	8,75	8,50	8,25	8,25
1.1.10	Indeks Gini	Nilai	0,310	0,305	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
1.1.11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.1.12	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	8,19	10,00	10,60	10,95	11,34	11,73	12,11	8,50
<b>1.2</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>									
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,91	73,22	73,73	74,24	74,75	75,26	75,77	75,77
1.2.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,65	9,72	9,76	9,98	10,02	10,24	10,28	10,28

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3	Angka melek huruf	Persen	99,35	99,41	99,47	99,52	99,58	99,64	99,70	99,70
1.2.4	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,11	68,46	68,61	68,77	68,92	69,07	69,23	68,98
1.2.5	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,83	1,78	1,72	1,67	1,61	1,55	1,50	1,50
1.2.6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	69,52	85,58	85,95	86,32	86,69	87,05	87,42	87,42
1.2.7	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	CC	C	B	B	BB	BB	A	A
<b>II</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>									
<b>2.1</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib</b>									
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>									
<b>1.01</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>									
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)									
-	APK SD/MI	Persen	104,83	104,83	105,04	105,15	105,25	105,36	105,46	105,46
-	APK SMP/MTs	Persen	114,95	114,95	115,18	115,3	115,41	115,53	115,64	115,64
2	Angka Partisipasi Murni (APM)									
-	APM SD/MI	Nilai	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05
-	APM SMP/MTs	Nilai	100,5	100,5	100,7	100,81	100,91	101,01	101,11	101,11
3	Angka Putus Sekolah									
-	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
-	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,14	0,14	0,12	0,1	0,1	0,09	0,08	0,08
4	Angka Kelulusan									
-	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
-	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Angka Melanjutkan									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
-	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
-	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	Persen			83,06	85,64	88,35	91,19	94,19	94,19
<b>1.02</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>									
1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Persen	6,32	6,30	6,30	6,29	6,28	6,27	6,26	6,26
2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen	38,77	37,27	35,37	33,46	31,54	29,66	27,85	27,85
3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	Nilai	4	4	4	4	4	3	3	3
4	Bed Occupancy Rate (Ideal 80%)	Persen	55,3	80	80	80	80	80	80	80
5	Average Length of Stay	Hari	5,1	6	6	6	6	6	6	6
6	Gross Death Rate	Orang	43,59	38	29	26	19	15	15	15
7	Net Death Rate	Orang	26,05	29	17	15	12	10	10	10
8	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan RSU	Nilai	79,17	81,79	85	86	86	86	87	87
<b>1.03</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
1	Jalan kabupaten (K1) dalam kondisi baik	Persen	62,80	64,75	66,68	66,75	66,82	66,89	66,96	66,96
2	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	1.074	1.074	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
3	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Km	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
4	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
5	Panjang jaringan irigasi sekunder	Meter	334.784	334.784	334.784	334.784	334.784	334.784	334.784	334.784

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	65,80	67,62	67,64	67,66	67,68	67,70	67,72	67,72
7	Cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya	Persen	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06
8	Jumlah regulasi tentang tata ruang	Peraturan Daerah	1	1	3	4	6	8	10	10
<b>1.04</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>									
1	Luas kawasan kumuh	Hektar	1.065,01	1.065,01	1.026,24	1.006,80	987,46	968,08	948,69	948,69
2	Persentase rumah tinggal layak huni	Persen	78,53	78,53	83,36	84,37	85,38	86,39	87,4	87,4
3	Persentase penduduk berakses sanitasi layak	Persen	79,50	79,50	89,22	92,71	95,14	97,57	100,00	100,00
4	Jumlah Tempat Pemakaman Umum	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) persatuan penduduk	Rasio/1000 penduduk	25,40	25,40	24,80	24,50	24,20	23,90	23,60	25,40
6	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	50	55	60	65	70	75	80	80
7	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	80,6	80,8	81	82	83	85	87	87
8	Persentase penyelesaian sengketa/konflik tanah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen	84,81	84,81	84,81	84,81	85,76	86,71	87,66	87,66
10	Cakupan penduduk mendapat akses air minum aman	Persen	26,4	28,83	31,26	33,69	36,12	38,55	40,98	40,98
<b>1.05</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>									
1	Persentase konflik sosial yg ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan tantribun yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Desa tangguh Bencana	Persen	0	0	1,66	3,32	6,64	9,96	13,28	13,28
4	Response time mencapai lokasi bencana	Jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam
<b>1.06</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>									
1	Persentase fakir miskin yang terdata dan menerima bantuan sosial	Persen	45	50	50	55	60	65	70	70
2	Persentase PMKS yang meningkat taraf hidupnya	Persen	2	2	2	4	6	8	10	10
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>									
<b>2.07</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,52	85,58	85,95	86,32	86,69	87,05	87,42	87,42
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,83	1,78	1,72	1,67	1,61	1,55	1,50	1,50
<b>2.08</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
1	Cakupan pelayanan pengarusutamaan gender	Persen	60	65	70	75	80	85	90	90
2	Cakupan pelayanan pemenuhan hak anak	Persen	45	50	55	60	65	70	75	75
<b>2.09</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>									
1	Skor pola pangan harapan	Nilai	82,1	85	86	87	88	89	90	90
2	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,91	74,92	74,93	74,94	74,95	74,97	74,98	74,98

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase pemantauan keamanan pangan	Persen	5	5	5	5	10	15	20	20
<b>2.10</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>									
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>2.11</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>									
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Terintegrasinya KLHS dalam rencana pembangunan	Ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,12	70,12	70,14	70,16	70,18	70,20	70,22	70,22
5	Indeks Kualitas Air	Nilai	80,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	82,50
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	70,12	70,12	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
7	Persentase jumlah sampah yang diangkut	Persen	15,91	28	28,60	30,10	31,50	33	34,40	34,40
8	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) sampah	Unit	328	328	328	338	348	358	368	368
10	Jumlah truk pengangkut sampah	Unit	17	17	18	19	20	21	21	21
11	Cakupan pengawasan Amdal									
-	Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal	Usaha	2	2	2	2	2	2	2	2



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
-	Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal	Usaha	2	2	2	2	2	2	2	2
-	Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal yang diawasi secara rutin	Usaha	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Hektar	19	25	10	10	10	10	10	50
13	Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>2.12</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>									
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	80	82	85	87	90	95	100	100
2	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>2.13</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>									
1	Jumlah desa mandiri	Desa	0	0	0	0	0	1	2	2
2	Jumlah desa sangat tertinggal	Desa	20	20	11	5	3	1	0	0
3	Jumlah desa tertinggal	Desa	165	165	129	90	47	4	0	0
4	Jumlah desa berkembang	Desa	56	56	86	116	146	178	180	182
5	Jumlah desa maju	Desa	0	0	15	30	45	57	59	59
<b>2.14</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	4	4	4	4	4	3	3	3
2	Contraseptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	62	65,64	68,92	72,37	75,99	79,79	83,78	83,78

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>2.15</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>									
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum									
-	Jumlah penumpang bus dan minibus	Orang	2.704.569	2.870.000	2.898.700	2.927.687	2.956.963	2.986.532	3.016.397	3.016.397
-	Jumlah penumpang kapal danau	Orang	5.773	22.600	23.052	23.913	23.983	24.462	24.951	24.951
-	Jumlah penumpang pesawat udara	Orang	176.291	200.000	20.300	206.045	209.135	212.272	215.456	215.456
2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	0	311	1326	1342	1360	1378	1396	1396
3	Jumlah pelabuhan udara/danau/ terminal bis									
-	Jumlah pelabuhan udara	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
-	Jumlah pelabuhan danau	Unit	2	2	3	3	3	3	3	3
-	Jumlah terminal bis	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah angkutan darat	Kendaraan	1.530	1.600	1.610	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Menit	0	30	30	30	30	30	30	30
6	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang	Persen	65	67	69	71	73	75	77	77
<b>2.16</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>									
1	Cakupan pelayanan PPID OPD Kabupaten Tapanuli Utara	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persen	33	33	33	55	77	87	100	100
3	Cakupan pengembangan aplikasi informatika dan e-government	Aplikasi	2	2	3	4	5	6	7	7

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>2.17</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									
1	Persentase koperasi sehat	Persen	21,31	21,31	21,31	21,31	21,5	21,98	22,45	22,45
2	Persentase koperasi aktif	Persen	19,54	21,51	21,51	21,53	21,85	22,33	22,85	22,85
3	Persentase koperasi yang mendapat bantuan	Persen	5,00	5,00	5,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15
4	Jumlah produk UMKM terstandarisasi	Produk	10	10	14	17	20	22	25	25
5	Persentase kualitas kelembagaan koperasi	Persen	19,54	21,36	21,36	22,16	23,09	24,16	25,34	25,34
6	Pertumbuhan UMKM	Persen	1,2	1,2	1,4	1,8	1,9	2	2,04	2,04
<b>2.18</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>									
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	3	3	5	7	10	10	12	12
2	Cakupan Pelayanan Perijinan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perijinan	Nilai	88,25	88,4	88,6	88,65	88,7	88,75	88,8	88,8
<b>2.19</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>									
1	Persentase peningkatan pemuda pelopor	Persen	10	15	20	40	60	80	80	80
2	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persen	65	67,5	70	72,5	75	77,5	80	80
<b>2.20</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>									
1	Persentase ketersediaan data sektoral	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>2.21</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>									
1	Cakupan pelayanan keamanan informasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>2.22</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>									
1	Persentase pengembangan kebudayaan	Persen	15	20	20	20	30	40	50	50
<b>2.23</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>									
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perpustakaan	Persen	15	20	25	45	65	85	85	85
2	Jumlah pengunjung perpustakaan/ tahun	Persen	7,69	7,69	12,18	34,17	35,94	36,05	36,11	36,11
<b>2.24</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>									
1	Persentase peningkatan pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah	Persen	33	33,2	33,7	34	38,25	38,32	38,5	38,5
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>									
<b>3.25</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>									
1	Capaian produksi perikanan	Ton	2.071	2.071	2.100	2.100	2.150	2.200	2.300	2.300
2	Persentase peningkatan kelompok pengolah hasil perikanan	Kelompok	5	5	5	10	15	20	25	25
<b>3.26</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>									
1	Jumlah Wisatawan	Orang	153.000	155.000	158.000	163.000	165.000	170.000	175.000	175.000

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Rata-rata lama kunjungan	Hari	1	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1
3	Persentase infrastruktur destinasi wisata kondisi baik	Persen	25	28	30	36	40	46	50	50
4	Cakupan pembenahan destinasi pariwisata	Persen	21	21	30	36	40	46	50	50
5	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan	Persen	10	11	12	15	19	23	31	31
6	Persentase event pariwisata yang dilaksanakan	Persen	15	15	16	18	20	22	24	24
7	Ketersediaan informasi kalender pariwisata dalam setahun	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Ketersediaan data rencana Pengembangan Pariwisata Daerah	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	PAD sektor pariwisata	Rupiah	250.000.000	280.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	500.000.000
<b>3.27</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>									
1	Produksi dan produktivitas pangan									
-	Padi sawah	Ton	160.600	160.600	160.685	160.790	160.898	161.087	161.142	161.142
		Kw/Ha	59,25	59,25	59,28	59,32	59,36	59,4	59,45	59,45
-	Padi ladang	Ton	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
		Kw/Ha	26,5	26,50	26,53	26,57	26,61	26,65	26,7	26,7
-	Jagung	Ton	25.150	25.150	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000	30.000
		Kw/Ha	49,5	49,50	49,54	49,58	49,63	49,69	49,72	49,72
2	Produksi dan produktivitas tanaman hortikultura									
-	Cabai Merah	Ton	9.298	9.298	6.760	6.770	6.780	6.790	8.000	8.000
		Kw/Ha	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35
-	Bawang Merah	Ton	632,15	632,15	575	585	595	605	610	610

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Kw/Ha	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37
-	Bawang Putih	Ton	0	210,00	250	275	300	325	350	350
		Kw/Ha	0	40	40	40	40	40	40	40
-	Jeruk	Ton	3.304,21	3.304,21	3.304	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Kw/Ha	145,56	145,56	145,56	145,56	145,6	145,61	145,63	145,63
-	Nenas	Ton	34974,38	34974,38	34.978	34.865	34.865	34.865	34.865	34.865
		Kw/Ha	179,15	179,15	179,15	179,21	179,25	179,27	179,3	179,3
-	Durian	Ton	5903,43	5903,43	5.823	5.823	5.823	5.823	5.823	5.823
		Kw/Ha	96,73	96,73	96,73	96,75	96,77	96,78	96,78	96,78
-	Mangga	Ton	1237,31	1.237,31	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
		Kw/Ha	76,78	76,78	76,78	76,81	76,84	76,85	76,86	76,86
3	Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan									
-	Kopi Arabika	Ton	11.833,43	11.833,43	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	12.000
		Kg/Ha	981,05	981,05	1,108	1.131	1.154	1.177	1.200	1.200
-	Kakao	Ton	1.774,95	1.774,95	1.450	1.550	1.650	1.750	1.800	1.800
		Kg/Ha	674,5	674,5	577,37	577,52	577,71	578,01	578,16	578,16
4	Peningkatan populasi ternak									
-	Kerbau	Ekor	9637	9677	9717	9757	9797	9837	9877	9877
-	Babi	Ekor	42.698	43.698	44.698	45698	46.698	47.698	48.698	48.698
5	Persentase Kelompok Tani dibina	Persen	58	58	59	60	62	64	66	70
6	Nilai Tukar Petani	Nilai	97,98	97,98	98	99	99	100	100	100
7	Luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B	Ha	0	0	1.233	2.672	6.372	9.340	14.025	14.025
8	Peningkatan luas kawasan budidaya komoditi unggulan	Hektar	15	30	110	120	130	140	150	695

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9	Peningkatan jumlah komoditi unggulan daerah	Ton	8	8	9	9	10	10	11	11
10	Cakupan penerapan teknologi hortikultura	Persen	47	50	55	60	65	70	75	75
11	Cakupan penerapan teknologi perkebunan	Persen	45	50	55	60	65	70	75	75
12	Cakupan Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian	Persen	68	70	72	74	76	78	80	80
<b>3.30</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>									
1	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	14,47	14,8	15,1	15,5	16,01	16,42	16,83	16,83
2	Cakupan pasar yang tergolong baik	Persen	9	9	10	11	12	13	14	14
3	Persentase UTPP yang ditera/tera ulang	Persen	50	50	55	60	65	70	75	75
<b>3.31</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>									
1	Persentase pertumbuhan IKM	Persen	0,0010	0,0010	0,0022	0,0027	0,0032	0,0032	0,0035	0,0035
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	20	20	20	25	30	40	50	50
<b>3.32</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>									
1	Persentase transmigran yang dibina	Persen	-	-	-	10	15	20	25	25
<b>4</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>									
<b>4.01</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi tata pemerintahan	Persen	80	85	88	90	92	95	100	100
2	Persentase realiasi kegiatan perangkat daerah sesuai APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pengadaan barang/jasa	Persen	80	85	88	90	92	95	100	100
4	Persentase OPD yang memiliki nilai laporan kinerja kategori baik	Persen	35	40	55	65	75	90	100	100
5	Nilai indeks kepuasan masyarakat tingkat Kabupaten	Nilai	81	81,15	82	83	84	85	86	86
<b>4.02</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>									
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>5</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>									
<b>5.01</b>	<b>Perencanaan</b>									
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>5.02</b>	<b>Keuangan</b>									
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/asset daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase realisasi PAD terhadap target	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>5.03</b>	<b>Kepegawaian</b>									
1	Persentase kelengkapan data dan informasi kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>5.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>									
1	Persentase aparatur mengikuti diklat struktural	Persen	20	20	22	23	24	25	26	26
2	Persentase aparatur mengikuti diklat teknis	Persen	10	10	11	12	13	14	15	15
<b>5.05</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>									
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	85	85	85	85	85	85	85	85
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>									
<b>6.01</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>									
1	Level kapabilitas APIP	Level	Level II	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
2	Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Level Maturitas SPIP	Level	Level II	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
<b>7</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>									
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan</b>									
1	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	60	60	65	70	75	80	85	85
<b>8</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>									
<b>8.01</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>									
1	Jumlah konflik SARA	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Persentase penyelesaian/penanganan konflik sosial di masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

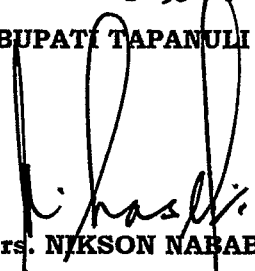
## **BAB IX PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara dan merupakan pedoman serta arahan bersama bagi seluruh *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara, sinergis dan searah dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun mendatang. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan pembangunan tercapai sesuai visi, misi dan program kepala daerah.

Keberhasilan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sangat bergantung kepada kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Leaderships and Good Governance*), dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, peran serta masyarakat, kemitraan dengan dunia usaha serta seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, 30 April 2020

**BUPATI TAPANULI UTARA,**



**Drs. NIKSON NABABAN, M.Si**